

PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI PERSPEKTIF MANAJEMEN RANTAI PASOK BERKELANJUTAN

Akhmad Mahbubi

Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

email : akhmad.mahbubi@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This study is aimed to knowing the basic system of beef supply chain, to recognize the dynamic system model of beef supply chain and produce an optimal scenario of sustainable supply chain management. Type of secondary data has been collected from BPS and ministry of agriculture. Dynamic model used to analyze the data. Four policy scenarios to be used in the analysis of the behavior of beef supply chain systems in both social welfare, economical revenue aspects and the environment refers to a variety of technical indicators achievement in the blueprint of beef self-sufficiency program. The results of this study are most optimal policy scenario of the success indicator to beef upgrade productivity.

Keyword : dynamic models, supply chain, beef, sustainable

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem dasar rantai pasok daging sapi, menyusun model sistem dinamis rantai pasok daging sapi dan menghasilkan skenario optimal pengelolaan rantai pasok daging sapi berkelanjutan dalam rangka swasembada daging sapi berkelanjutan di Indonesia. Jenis data adalah data sekunder dan sumber data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. Analisis data menggunakan simulasi model sistem dinamis. Hasil penelitian ini terdapat 4 skenario kebijakan pengelolaan rantai pasok daging sapi berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, pendapatan ekonomi dan lingkungan. Terpilih skenario optimal pengelolaan rantai pasok daging sapi berkelanjutan di Indonesia adalah skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan peningkatan produktivitas daging karkas.

Kata Kunci : model dinamis, rantai pasok, daging sapi, berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan merupakan isu utama yang menjadi perhatian berbagai negara. Menurut laporan *The Economist* (2013), lebih 50 negara masih mengalami kerawanan pangan termasuk Indonesia dengan indeks ketahanan pangan berada dibawah 50 yaitu 46,5 (nilai indeks 0 sampai 100). Posisi ketahanan pangan Indonesia ini disebabkan antara lain belum tercapainya swasembada pangan salah satunya daging sapi yang hanya mampu produksi 474,4 ribu ton, sedangkan kebutuhan mencapai 549,7 ribu ton (Kementerian Pertanian, 2013). Padahal pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 dengan kegiatan pokok yaitu penyediaan bakalan atau daging sapi lokal, peningkatan produktivitas sapi lokal, pencegahan pematangan sapi betina produktif dan penyediaan bibit sapi serta pengaturan stock daging sapi di dalam negeri.

Swasembada daging sapi yang belum tercapai disebabkan tidak optimalnya implementasi kegiatan pokok dan operasional program swasembada daging sapi (PSDS) 2014. Beberapa kendala pencapaian swasembada daging 2014 yang cukup menonjol selama ini adalah (1) kematian pedet pada musim kering di beberapa wilayah masih sangat tinggi berkisar antara 20-40 persen dan kematian induk masih lebih dari 10-20% akibat kurang pakan atau serangan penyakit, (2) ketidak peduliaan sebagian jagal yang sering memotong sapi betina produktif (SBP) karena harganya lebih murah dibanding sapi jantan, (3) banyaknya sapi muda yang dipotong pada saat belum mencapai bobot optimalnya sehingga sapi hanya memproduksi daging sekitar 60-80 persen dari potensi maksimalnya, (4) produktivitas yang masih sangat variatif, antara lain sapi persilangan hasil IB yang dipelihara dengan cara seadanya, serta (5) langkanya sapi jantan di daerah sumber bibit pada pola pemeliharaan ekstensif (*grazing*/digembalakan), karena semua sapi jantan dijual atau dipotong.

Program Swasembada daging sapi perlu segera dibenahi guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini bisa tercapai bila kegiatan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pencapaian swasembada daging sapi dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan sepanjang rantai pasok mulai dari *breeder*, peternak, pedagang atau distributor, rumah potong hewan, industri daging sapi dan olahannya serta konsumen akhir baik rumah tangga maupun industri. Penentuan prioritas kegiatan program swasembada dikaji melalui pendekatan manajemen rantai pasok daging sapi berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui sistem dasar rantai pasok daging sapi di Indonesia, (2) menyusun model sistem dinamis rantai pasok daging sapi di Indonesia dan (3) menghasilkan skenario optimal pengelolaan rantai pasok daging sapi berkelanjutan (mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kombinasi antara riset eksplanatori dan riset kausal yaitu kombinasi analisis data skunder dan eksperimen. Riset eksplanatori dengan analisis data skunder untuk mengetahui perkembangan industri daging sapi nasional, sedangkan riset kausal dengan eksperimen untuk mengetahui hubungan antar fenomena dengan menerapkan simulasi sistem dinamik rantai pasok daging sapi untuk menghasilkan skenario optimal pencapaian swasembada daging sapi berkelanjutan (mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa data *time series* 10 tahun terakhir. Sumber data penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. Analisis data menggunakan pemodelan dan simulasi sistem dinamis menggunakan program *powersim* dan uji validasi menggunakan uji MAPE (Mean Absolute Percentage Error).

HASIL DAN PEMBAHASAN

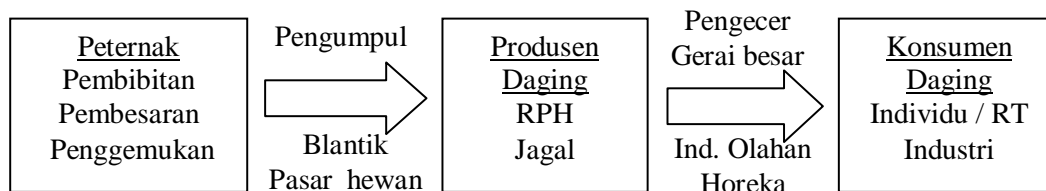
Pencapaian swasembada daging sapi 2014, sangat tergantung pada sektor hulu dari agribisnis daging sapi yaitu kegiatan agribisnis peternakan sapi atau swasembada daging sapi tergantung dari pasokan daging sapi dalam negeri yang berasal dari peternak sapi lokal. Permasalahan ketersediaan daging sapi merupakan suatu permasalahan sistem yang cukup kompleks dengan melibatkan berbagai komponen, variabel di dalamnya yang saling berinteraksi dan terintegrasi. Ketersediaan daging sapi secara nasional dapat dipandang sebagai suatu masalah dinamika sistem yang berubah sepanjang waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang juga bersifat dinamis.

Sistem Dasar Rantai Pasok Daging Sapi Nasional

Sistem rantai daging sapi nasional secara umum terdiri dari beberapa sub-sistem sebagaimana gambar 1, antara lain sub sistem peternak sapi, produsen daging dan konsumsen. Aliran rantai pasok dari hulu berupa sapi peternak ke hilir berupa daging sapi dan olahannya didistribusikan melalui pedagang. Aliran sapi lokal ke produsen daging sapi umumnya melalui beberapa jenis pedagang yaitu pedagang pengumpul, *blantik* dan pasar hewan. Sedangkan aliran daging sapi ke konsumen melalui pengecer, pedagang daging skala besar, gerai daging sapi dan industri olahan serta horeka (hotel, restoran dan kantin). Masing-masing sub-sistem terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang lebih spesifik dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan waktu, sehingga sistem rantai pasok daging sapi bersifat dinamis. Sistem rantai pasok daging sapi juga lintas sektoral karena meliputi berbagai institusi yang terkait, seperti pada bagian sub sistem konsumsi daging sapi terkait dengan kependudukan dan pendapatan masyarakat.

Sub sistem peternak terdiri dari ternak pembibitan, pembesaran dan penggemukan. Sub sistem peternak terkait dengan masalah populasi sapi baik pedet maupun dewasa dan pengelolaan ternak. Menurut Badan Pusat Statistik (2013), populasi sapi 12.686.280 ekor mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2011 yang populasinya sebanyak 14.824.000 ekor. perkembangan populasi sapi nasional kurang signifikan karena kematian sapi masih cukup tinggi dengan laju kematian pedet berkisar 20% – 40% dan induk berkisar 10% – 20%, pemotongan sapi betina produktif, pemotongan sapi yang tidak menunggu bobot

optimal, keterbatasan sumber bibit dan semen beku, kendala pakan, lemahnya mekanisasi peternakan, konversi lahan penggembalaan, kesehatan ternak belum terjamin.



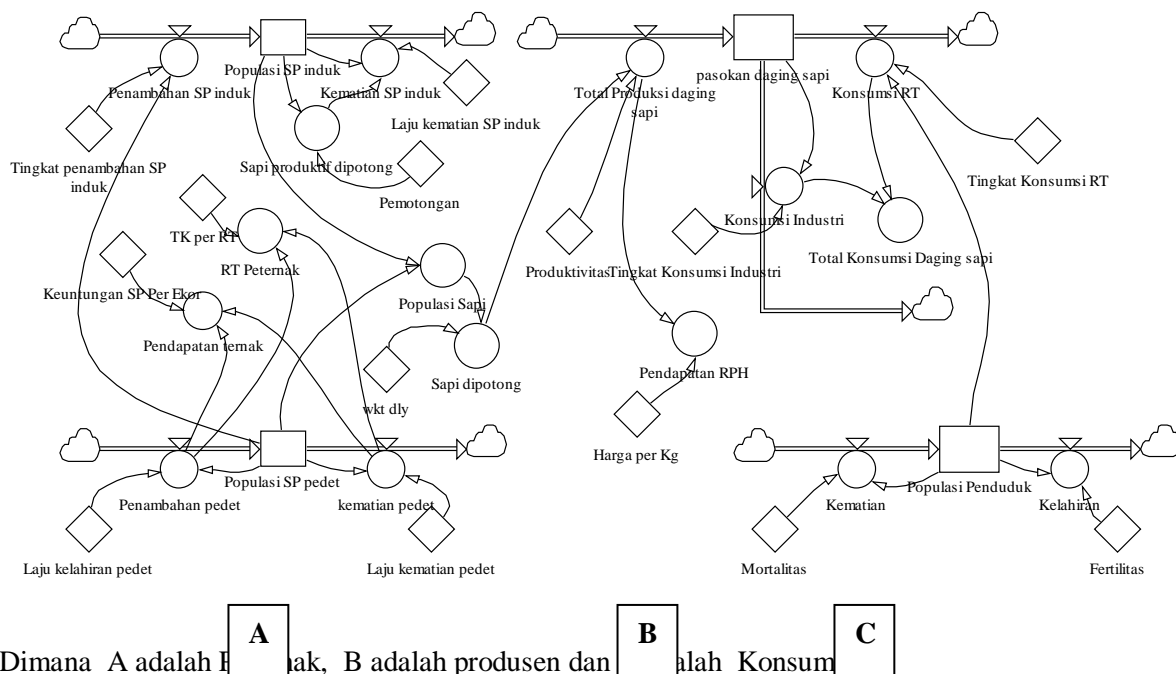
Gambar 1. Sistem Dasar Rantai Pasok Daging Sapi Nasional

Produsen daging sapi antara lain Rumah Pemotongan Hewan atau jagal baik skala rumah tangga maupun korporasi. RPH atau jagal ini melakukan pemotongan sapi, memilah dan mengelompokkan potongan sapi ke berbagai jenis seperti daging, tulang, jeroan dan sebagainya. Umumnya setiap ekor sapi yang dipotong dengan berat badan 300 – 350 kg dengan rata-rata daging karkas 165 kg 250 – 300 kg. bahkan untuk jenis Sapi Madura berat badan sapi yang dipotong berkisar dibawah rata-rata nasional yaitu 250 – 300 kg dan karkas 125 kg– 150 kg (Wijono dan Setiadi, 2004). produktivitas sapi lokal masih rendah karena inefisiensi sistem manajemen dan pakan belum optimal

Konsumen daging sapi merupakan konsumen individu dan industri olahan. Besarnya konsumsi daging individu bergantung pada tingkat konsumsi per kapita per tahun dan perkembangan populasi penduduk Indonesia. Perkembangan penduduk Indonesia tergantung pada laju kelahiran dan kematian penduduknya. Sedangkan konsumsi industri olahan adalah banyaknya industri olahan berbasis daging sapi seperti industri sosis, hotel, restoran dan kantin

Model Sistem Dinamis Rantai Pasok Daging Sapi

Selanjutnya model sistem dinamis dikembangkan mengacu pada tiga sub sistem dasar rantai pasok daging sapi diatas. Model ini dibuat berdasar identifikasi permasalahan yang dituangkan ke dalam diagram sebab akibat (*causal loop*), diformulasikan dalam diagram alir (*stock dan flow*) dan disimulasikan dengan menggunakan *software Powersim*. Selanjutnya, formulasi model dirumuskan ke dalam bentuk matematis yang dapat mewakili sistem nyata. Formulasi model menghubungkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi dalam model konseptual dengan bahasa simbolik. Formulasi model daging sapi selengkapnya sebagaimana gambar 2 berikut :



Dimana A adalah **A**nak, B adalah produsen dan **B** adalah Konsum **C**

Gambar 2. Model Sistem Dinamis Rantai Pasok Daging Sapi

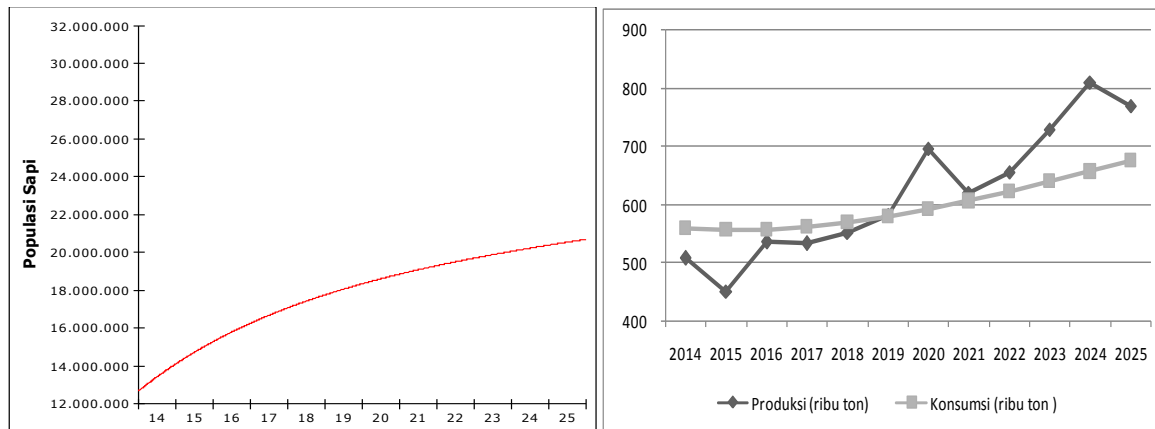
Model sistem dinamis rantai pasok daging sapi diatas valid karena berdasar uji validasi nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) sebesar 5,64%. Ini berarti bahwa terdapat penyimpangan sebesar 5,64% antara hasil simulasi dengan data aktual. Validasi model dilakukan dengan membandingkan keluaran model (hasil simulasi) dengan data aktual yang diperoleh dari sistem nyata (quantitative behaviour pattern comparison). Validasi model dilakukan terhadap data aktual yaitu data populasi dan produksi daging sapi selama satu dekade terakhir. Validasi model bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu model yang dibangun, apakah sudah merupakan perwakilan dari relitas yang dikaji, yang dapat menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan.

Skenario Pengelolaan Rantai Pasok Daging Sapi Berkelanjutan

Beberapa skenario kebijakan yang akan digunakan dalam analisis perilaku sistem rantai pasok daging sapi sampai tahun 2025 berdasar aspek ekonomi, sosial dan lingkungan mengacu berbagai indikator teknis pencapaian program swasembada daging sapi 2014 sebagaimana tercantum dalam *blue print* swasembada daging sapi 2014.

Skenario tanpa perubahan kebijakan

Skenario ini diasumsikan tidak terdapat kebijakan atau kegiatan yang mampu menekan kematian pedet, menekan kematian induk, mencegah pemotongan sapi betina produktif dan pemotongan tidak mencapai bobot optimal serta produktivitas karkas. Situasi ini menggambarkan masih belum terlaksananya semua kegiatan operasional program swasembada daging sapi. Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa hingga tahun 2018 produksi daging sapi masih lebih rendah dari pada konsumsi, yaitu produksi daging sapi sebanyak 553 ribu ton, sedangkan konsumsi 570 ribu ton sebagaimana ditunjukkan gambar 3 berikut ini :

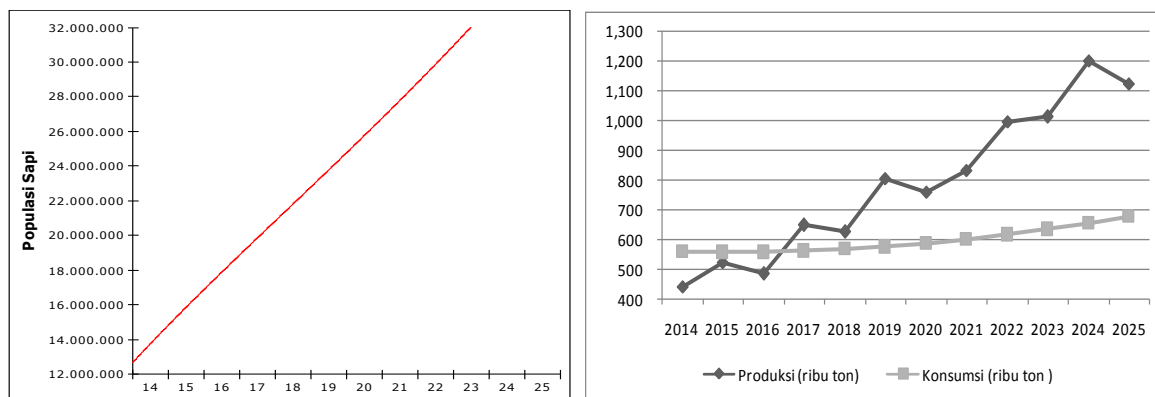


Gambar 3. Proyeksi populasi sapi Madura, produksi dan konsumsi daging sapi – skenario tanpa perubahan kebijakan

Berdasarkan skenario ini dari sisi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial yaitu peluang penambahan peternak sapi berkisar 114 ribu – 128 ribu rumah tangga peternak sapi dari tahun 2014 sampai tahun 2025. Berdasarkan aspek ekonomi dilihat dari peningkatan pendapatan mencapai 171 milyar rupiah pada tahun 2014 meningkat hingga 2025 mencapai 193 milyar rupiah. Sedangkan dari aspek lingkungan berdasar pada pemotongan sapi betina produktif yang berpotensi mengurangi plasma nutfah sapi local. Pemotongan sapi antara tahun 2014 sampai 2025 diproyeksikan berkisar 219 ribu ekor – 449 ribu ekor tiap tahunnya.

Skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan tingkat kematian pedet menjadi 25% per tahun dan tingkat kematian induk menjadi 15% per tahun.

Skenario ini diasumsikan program swasembada daging sapi dilaksanakan dan mampu menekan kematian pedet menjadi 25% per tahun dan tingkat kematian induk menjadi 15% per tahun. Situasi ini menggambarkan fokus kegiatan operasional program swasembada daging sapi yang bisa menekan kematian pedet dan induk. Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa populasi sapi terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan proyeksi produksi daging sapi sampai tahun 2016 belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yaitu produksi daging sapi 485 ribu ton dan konsumsi 558 ribu ton. Baru pada tahun 2017 produksi daging nasional surplus dengan tren yang fluktuatif hingga tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan gambar 4 berikut ini :

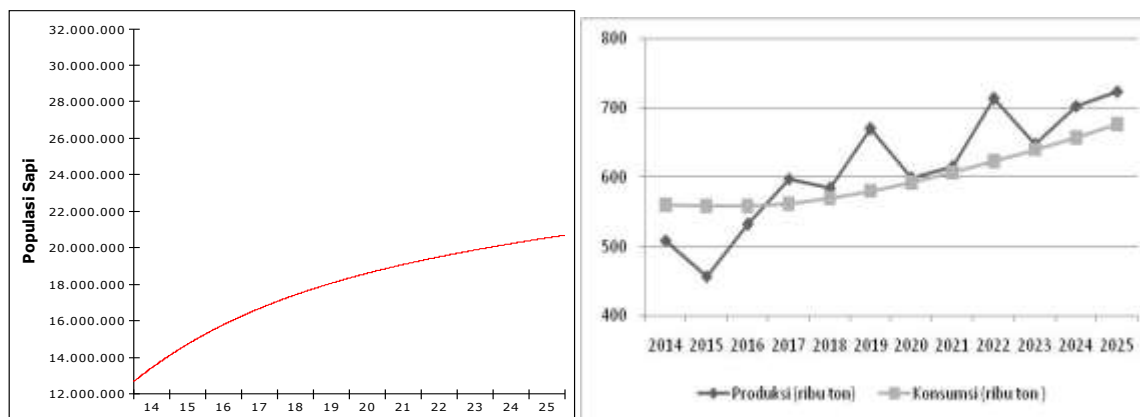


Gambar 4. Proyeksi populasi sapi nasional, produksi dan konsumsi daging sapi – skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan tingkat kematian pedet menjadi 25 % per tahun dan tingkat kematian induk menjadi 15% per tahun.

Berdasarkan skenario ini dari sisi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial yaitu peluang penambahan peternak sapi yang disebabkan pertumbuhan populasi sapi maka proyeksi tren penambahan peternak baru dari tahun 2014 sebesar 670 ribu rumah tangga peternak sapi dan terus bertambah hingga tahun 2025 menjadi 1,3 jt rumah tangga peternak sapi. Berdasarkan aspek ekonomi dilihat dari peningkatan pendapatan, bila kematian pedet dan induk bisa ditekan, maka akan mampu menambah pendapatan rumah tangga peternak secara keseluruhan mencapai 1 triliun rupiah pada tahun 2014 meningkat hingga 2025 mencapai 2 triliun rupiah. Sedangkan dari aspek lingkungan, berdasarkan pada pemotongan sapi betina produktif berpotensi mengurangi plasma nutfah sapi lokal. Pemotongan sapi Madura antara tahun 2014 sampai 2025 diproyeksikan berkisar 220 ribu ekor – 680 ribu ekor tiap tahunnya.

Skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan tunda potong selama 5 bulan untuk mencapai bobot potong optimal

Skenario ini diasumsikan terdapat kebijakan atau kegiatan yang mampu tunda potong selama 5 bulan untuk mencapai bobot optimal. Situasi ini menggambarkan fokus kegiatan operasional program swasembada daging sapi pada tunda potong selama 5 bulan untuk mencapai bobot optimal. Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan sampai tahun 2016, produksi daging sapi belum memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia, yaitu produksi 532 ribu ton sedangkan konsumsi 558 ribu ton. Baru pada tahun 2017 sudah mulai surplus daging sapi hingga tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan gambar 5 berikut :



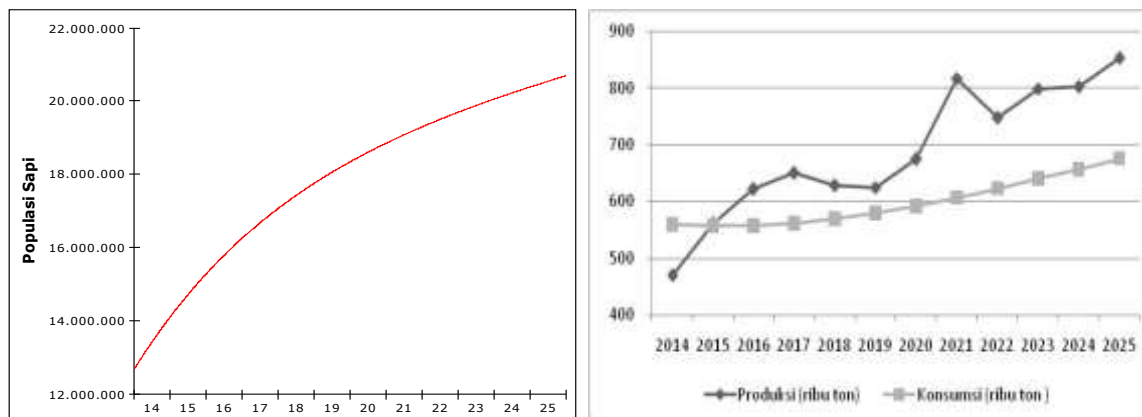
Gambar 5. Proyeksi populasi sapi Madura, produksi dan konsumsi daging sapi Madura –Skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan tunda potong selama 5 bulan untuk mencapai bobot potong optimal

Berdasarkan skenario ini dari sisi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan aspek ekonomi maka proyeksi tren penambahan peternak baru dan peningkatan pendapatan hasilnya sama dengan skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan menekan kematian induk menjadi 10% dan menekan tingkat pemotongan betina produktif menjadi 2%. Sedangkan dari aspek lingkungan berdasar pada pemotongan sapi betina produktif yang berpotensi mengurangi plasma nutfah sapi lokal diproyeksikan berkisar 219 ribu ekor – 449 ribu ekor tiap tahunnya antara tahun 2014 sampai 2025.

Skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan tingkat produktivitas karkas menjadi 180 kg per ekor sapi.

Skenario ini diasumsikan program swasembada daging sapi dilaksanakan dan mampu menghasilkan produktivitas karkas 180 kg per ekor sapi. Situasi ini menggambarkan fokus kegiatan operasional program swasembada daging sapi yang bisa meningkatkan produktivitas dari 165 kg per ekor sapi menjadi 180 kg per ekor sapi. Berdasarkan hasil simulasi menunjukkan bahwa populasi sapi terus meningkat dari

tahun ke tahun, sedangkan proyeksi produksi daging sapi memenuhi kebutuhan konsumsi nasional pada tahun 2015 yaitu produksi daging sapi 561 ribu ton dan konsumsi 558 ribu ton dengan tren yang meningkat hingga tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan gambar 6 berikut ini :



Gambar 6. Proyeksi populasi sapi nasional, produksi dan konsumsi daging sapi – skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan tingkat produktivitas karkas menjadi 180 kg per ekor sapi.

Berdasarkan skenario ini dari sisi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan aspek ekonomi maka proyeksi tren penambahan peternak baru dan peningkatan pendapatan hasilnya sama dengan skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan menekan kematian induk menjadi 10% dan menekan tingkat pematangan betina produktif menjadi 2%. Sedangkan dari aspek lingkungan berdasar pada pematangan sapi betina produktif yang berpotensi mengurangi plasma nutfah sapi lokal diproyeksikan berkisar 219 ribu ekor – 449 ribu ekor tiap tahunnya antara tahun 2014 sampai 2025.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) sistem dasar rantai pasok daging sapi terdiri dari peternak (pembibitan, pembesaran dan penggemukan), produsen (RPH atau jagal) dan konsumen daging sapi baik rumah tangga maupun industry (2) model sistem dinamis dikembangkan mengacu pada tiga sub sistem dasar rantai pasok daging sapi (3) Skenario pengelolaan rantai pasok daging sapi berkelanjutan dalam pencapaian swasembada daging sapi adalah skenario kebijakan dengan indikator keberhasilan meningkatkan produktivitas karkas menjadi 180 kg per ekor melalui optimalisasi IB dan INKA, penyediaan dan pengembangan pakan dan air serta penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- De Lara, M dan Martinet, V. 2009. Multi-criteria Dynamic Decision Under Uncertainty : a stochastic Viability Analysis and an Application to Sustainable Fishery Management. *Journal Mathematical Bioscience* 217 : 118–124.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. 2010. *Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Jakarta
- Fritz, M dan Scheifer, G. 2008. Sustainability in Food Networks. *Proceeding Gewisola*. Bonn, 24 – 26 September 2008.

- Linton, J.D., Klassen, R. dan Jayaraman, V. 2007. Sustainability Bio Product Supply Chain : An Introduction. *Journal of Operations Management* 25 : 1079–1082.
- Marimin dan Nurul M. 2011. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Rantai Pasok*. IPB Press. Bogor
- Ortiz, O., Francese, C. dan Sonneman G. 2009. Sustainability in the Construction Industry, a Review of Recent Developments based on LCA. *Journal of Construction and Building Materials* 23 : 28–39.
- The Economist. 2012. *Global Food Security Index 2012*. The Economist Intelligence Unit Limited. UK
- Widodo, Kuncoro Harto., Kharies P dan Aang A. 2011. *Supply Chain Management Agroindustri Yang Berkelanjutan*. Penerbit Lubuk Agung. Bandung
- Wijono, D.B dan Setiadi, B. 2004. Potensi dan Keragaman Sumberdaya Genetik Sapi Madura. *Prosiding Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004*: 42 – 52.

HUBUNGAN KETERGANTUNGAN KOPERASI TERHADAP ANGGOTANYA PADA KOPERASI PETERNAK SAPI PERAH “PESAT” DI KABUPATEN BAYUMAS

Anisur Rosyad

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman

e-mail: anisurrosyad@yahoo.com

ABSTRAK

Koperasi Peternak Sapi Perah “Pesat” merupakan koperasi yang menghimpun para peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas. Koperasi ini mengalami permasalahan yaitu berkurangnya jumlah anggota pada lima tahun terakhir ini. Meskipun demikian Koperasi “Pesat” tetap mampu menjalankan usahanya, yaitu mengolah dan memasarkan susu dari para peternak anggotanya, di samping pula usaha penjualan pakan konsentrat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan derajat atau tingkat ketergantungan Koperasi “Pesat” terhadap peternak anggotanya dalam perolehan susu dan pasar pakan konsentrat yang menjadi basis usaha koperasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Koperasi “Pesat” dan 10 kelompok peternak sapi perah, serta sebanyak 50 orang peternak. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perolehan susu Koperasi “Pesat” memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap anggotanya. Sementara itu untuk bisnis pakan konsentrat sampai saat ini pangsa pasar yang paling besar adalah peternak anggota. Artinya bahwa derajat ketergantungan Koperasi “Pesat” terhadap anggotanya dalam pemasaran pakan konsentrat pada tingkat yang tinggi. Dalam pemasaran susu oleh anggota ditemukan beberapa peternak anggota koperasi yang menjual susunya kepada pedagang atau pembeli di luar koperasi. Koperasi “Pesat” pun untuk beberapa tahun terakhir ini mengembangkan kemitraan dengan peternak di luar anggota untuk membeli susu guna meningkatkan pasokan susu kepada industri pengolahan susu.

Kata kunci : Koperasi, Sapi perah

ABSTRACT

Farmers Cooperative Dairy Cattle "Pesat" is a cooperative which brought together dairy farmers in Banyumas. Cooperative is experiencing problems which reduced the number of members in the last five years. Nevertheless Cooperative "Pesat" is still able to run their business, namely processing and marketing of dairy farmers members, in addition to also feed concentrate sales efforts. This study aims to reveal the degree or level of dependency Cooperative "Pesat" to the dairy farmer members in the acquisition and concentrate feed markets which are the basis of the cooperative effort. This research was conducted at the Cooperative "Pesat" and 10 groups of dairy farmers, and ranchers as many as 50 people. Data analysis was performed using descriptive analysis. The results showed that the acquisition of dairy cooperative "Pesat" has a high degree of dependence on its members. Meanwhile for the businesses concentrate feed to the current market share is greatest breeder members. This means that the degree of dependence of the Cooperative "Pesat" to its members in marketing concentrate feed at a high level. In the marketing of milk by members of the cooperative members found some breeders who sell milk to traders or buyers outside the cooperative. Cooperative "Pesat" was for the last few years to develop partnerships with farmers outside members to buy milk in order to increase the supply of milk to the dairy processing industry.

Keywords: Cooperative, Dairy cattle

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang bisnis yang beranggotakan orang-orang dengan kepentingan yang sama. Mereka adalah pemilik yang sekaligus menjadi pelanggan perusahaan koperasi, sehingga dalam organisasi koperasi dikenal istilah identitas ganda (Ropke, 1987). Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama (Hanel, 1989). Koperasi memiliki peran strategis dalam mengangkat dan mengembangkan perekonomian rakyat

terutama kelompok masyarakat perdesaan. Bidang-bidang usaha yang banyak digeluti koperasi terutama bidang usaha pertanian termasuk di dalamnya peternakan dan perikanan. Dalam perkembangannya tidak sedikit koperasi pertanian yang mengalami pasang surut usahanya, bahkan kemudian tidak beroperasi lagi. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan koperasi di perdesaan adalah kurangnya jiwa kemandirian yang dikembangkan di kalangan koperasi.

Koperasi harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi bisnis lainnya agar dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai suatu kekuatan organisasional yang secara jelas menempatkan suatu perusahaan di posisi terdepan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Faktor-faktor keunggulan kompetitif koperasi datang dari: (1) sumber-sumber *tangible* seperti kualitas atau keunikan dari produk yang dipasarkan dan kekuatan modal; (2) sumber-sumber bukan *tangible* seperti *brand name*, reputasi, dan pola manajemen yang diterapkan; dan (3) kapabilitas atau kompetensi inti yakni kemampuan yang kompleks untuk melakukan suatu rangkaian pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan kompetitif (Peterson, 2005). Selanjutnya dijelaskan bahwa yang harus dilakukan koperasi untuk bisa menang dalam persaingan adalah menciptakan efisiensi biaya. Keunggulan kompetitif koperasi adalah hubungannya dengan anggota dalam bisnis, seperti misalnya pada koperasi produksi pertanian, koperasi tersebut bisa melacak bahan baku yang lebih murah, sedangkan perusahaan non-koperasi harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan bahan baku.

Sebagian besar koperasi pertanian terutama KUD sangat tergantung kepada program dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Banyak koperasi yang kemudian terjebak pada kemudahan dan kenikmatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sementara upaya untuk mengadakan usaha yang berbasis pada kebutuhan anggota dan potensi wilayah tidak pernah dilakukan. Akibatnya banyak koperasi di perdesaan yang kemudian gulung tikar ketika pemerintah memutuskan untuk mengubah pendekatannya dalam membina koperasi, yaitu pembinaan yang mengedepankan kemandirian koperasi.

Pengelola koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat koperasi unggul di pasar yang senantiasa mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan masyarakat, penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, dan makin banyaknya pesaing baru dalam skala yang lebih besar. Dalam menghadapi perubahan tersebut, faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi adalah (1) posisi pasar yang kuat; (2) pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi; (3) sangat memahami rantai produksi dari produk bersangkutan; (4) menerapkan strategi yang cemerlang yang bisa merespons secara tepat dan cepat setiap perubahan pasar; dan (5) terlibat aktif dalam produk-produk yang mempunyai trend yang meningkat atau prospek masa depan yang baik (Loyd,2001).

Salah satu koperasi yang bergerak di bidang peternakan di Kabupaten Banyumas adalah Koperasi PESAT. Koperasi PESAT merupakan koperasi yang didirikan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan sapi perah di daerah tersebut. Koperasi ini telah berumur lebih kurang enam belas tahun, dan mengalami pasang surut dalam perjalanan usahanya. Naik turunnya jumlah sapi perah yang dimiliki para peternak anggotanya menjadi salah satu penyebab keadaan itu. Selain itu adanya persaingan usaha dengan lainnya baik pada pasar produk susu olahan maupun pasar bahan pakan konsentrat turut memperparah kondisi koperasi tersebut. Koperasi PESAT memiliki usaha menampung susu dari para peternak anggota dan selanjutnya menjualnya dalam bentuk susu segar ke IPS (Industri Pengolahan Susu), dan sebagian susu diolah untuk dijual dalam bentuk susu pasteurisasi. Produksi susu peternak anggota saat ini sekitar 2.500 ltr/hari, masih lebih kecil dari kapasitas tampung *cooling unit* yang ada di koperasi yaitu sebanyak 15.000 ltr/hari. Untuk menambah jumlah pasokan susu, koperasi membeli susu dari peternak bukan anggota yang ada di beberapa daerah seperti di Kabupaten Wonosobo. Pasokan susu dari anggota semakin berkurang dengan adanya perilaku sebagian peternak anggota koperasi yang menjual sebagian susu yang diproduksi keluar koperasi. Perilaku ini dipicu oleh perbedaan harga pembelian susu oleh koperasi yang lebih kecil bila dibandingkan dengan harga pembelian pihak lain. Pada usaha pengadaan pakan konsentrat, koperasi menghadapi kejadian serupa yaitu adanya sebagian peternak anggota yang memilih membeli pakan konsentrat di luar koperasi atau membuatnya sendiri, dengan alasan kualitas

pakan konsentrat yang disediakan koperasi lebih rendah bila dibandingkan dengan pakan konsentrat yang mereka beli dari luar koperasi atau mereka membuatnya sendiri.

Keadaan pada Koperasi PESAT seperti diuraikan tersebut di atas, mengindikasikan adanya permasalahan dalam hubungan ketergantungan koperasi terhadap anggotanya. Bahwa sesungguhnya hubungan ketergantungan yang kuat diantara keduanya merupakan modal utama untuk pengembangan dan penguatan usaha koperasi. Oleh karena itu jika derajat ketergantungan diantara keduanya itu rendah, maka selanjutnya dapat mengganggu keberlangsungan usaha koperasi. Walaupun usaha koperasi itu berhasil tanpa ketergantungan dengan anggota, maka bukan berarti koperasi tersebut telah berhasil sebagai sebuah koperasi. Demikian halnya bila peternak anggota koperasi mengalami kemajuan usahanya, sedangkan ketergantungan mereka terhadap koperasi rendah, maka koperasi tidak bisa melakukan klaim sebagai koperasi yang berhasil. Kurangnya kemampuan petani dan peternak dalam mengelola produksi maupun pasar produknya sehingga memerlukan adanya peranan koperasi. Sebagai gambaran dalam kasus komoditas susu sapi segar hasil produksi peternak di Kabupaten Banyumas, yang menghadapi anggapan masyarakat bahwa susu tersebut berkualitas rendah. Namun bagi peternak anggota koperasi hal tersebut tidak berlaku, mengingat bahwa dengan adanya koperasi maka pengelolaan ternak maupun pemerahan susu sudah bisa dikerjakan dengan baik. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Astuti, Nurhidayat dan Siswadi (2008) bahwa susu yang beredar di pedagang eceran yang berasal dari koperasi masih layak dikonsumsi.

Penelitian ini melakukan kajian mendalam mengenai hubungan usaha (bisnis) koperasi dengan peternak anggotanya, yaitu dalam pemasaran susu segar dan pakan konsentrat untuk kebutuhan sapi milik peternak anggota. Adanya persaingan usaha dengan pihak lain dan dorongan kepentingan lainnya bisa membuat hubungan bisnis diantara koperasi dan peternak anggotanya melemah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur derajat ketergantungan dalam hubungan bisnis antara Koperasi PESAT dengan peternak anggotanya, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi penguat maupun yang berpotensi untuk melemahkan derajat hubungan diantara keduanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan populasi sasaran peternak anggota koperasi yang terdapat dalam 10 kelompok peternak di Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Karangnangka, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, dan Sumbang. Selain itu juga diteliti manajer dan sejumlah karyawan koperasi yang berkompeten dalam bidang pelayanan dan pemasaran. Sebanyak 50 orang peternak anggota koperasi diambil sebagai sampel, dengan menggunakan metode klaster (*Cluster sampling*) dengan kelompok peternak sebagai klaster.

Variabel yang diamati adalah variabel derajat ketergantungan koperasi terhadap peternak anggota dalam pemasaran susu dan pakan konsentrat. Ketergantungan yang dimaksud adalah tingkat atau derajat kebermaknaan pihak yang satu bagi yang lain dalam hubungan pemenuhan kebutuhan. Dalam penelitian ini konsep ketergantungan diterapkan untuk menggambarkan seberapa penting dan kuatnya hubungan bisnis dengan peternak anggota bagi koperasi terutama pada bisnis pemasaran susu dan pakan konsentrat. Variabel ketergantungan diukur melalui besarnya persentase pangsa pasar anggota baik pada bisnis pemasaran susu maupun pakan konsentrat. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Selain itu dijabarkan pula faktor-faktor yang menguatkan maupun melemahkan derajat hubungan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketergantungan dalam pengadaan susu

Koperasi PESAT memiliki fungsi utama memasarkan susu produksi peternak anggotanya. Produksi susu peternak anggota koperasi per hari mencapai 4.000 liter. Pasar utama yang dituju selama ini adalah IPS (Industri Pengolahan Susu) besar di Yogyakarta dan beberapa IPS kecil di Tegal dan daerah lain. Proporsi susu yang dipasarkan ke IPS mencapai 60 % dan sebanyak 38% untuk IPS kecil lainnya,

sedangkan 2% untuk produksi susu olahan (susu pasteurisasi). Pengiriman susu untuk IPS di Yogyakarta dilakukan dua hari sekali. Guna meningkatkan pasokan susu kepada IPS, koperasi juga membeli susu dari peternak di luar anggota koperasi. Pembelian susu dari peternak bukan anggota mencapai 500 – 900 liter per hari.

Harga pembelian susu oleh koperasi ditentukan berdasarkan mutu susu yang disetorkan oleh peternak. Susu dengan kualitas grade A dibeli dengan harga Rp3.900,- per liter, adapun grade B dan C masing-masing Rp3.700 dan Rp3.500,- per liter. Apabila kualitas susu yang disetorkan oleh peternak buruk, koperasi tidak bersedia menerimanya. Namun untuk saat ini susu yang disetorkan peternak anggota semuanya bisa diterima oleh koperasi, karena kualitasnya cukup baik. Bagi susu dengan kualitas yang tidak memenuhi standar di atas, koperasi membayar dengan harga Rp3.000,- per liter. Terkait dengan harga pembelian susu oleh koperasi, sebagian peternak anggota menganggap harga tersebut terlalu murah. Oleh karena itu mereka tertarik untuk menjual susunya ke luar koperasi yang bersedia membeli susu dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp5.000,- per liter. Perilaku yang seperti ini banyak dilakukan oleh peternak anggota yang berdomisili di wilayah bagian timur Kabupaten Banyumas, yaitu di daerah Kedungbanteng, Sumbang dan Baturraden. Lokasi tempat tinggal mereka yang relatif lebih dekat dengan kota Purwokerto dan lokawisata Baturraden menjadi lebih mudah untuk berhubungan dengan pedagang produk olahan susu maupun konsumen rumah tangga.

Adanya sebagian peternak anggota yang menjual susu ke luar koperasi merupakan ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan koperasi. Apabila hal itu dibiarkan, dan kemudian bahkan mempengaruhi peternak lainnya, maka koperasi akan kehilangan pasokan susu dari anggota. Keadaan yang berbeda bisa pula terjadi, apabila koperasi tidak memperbaiki pelayanan bagi anggotanya termasuk harga pembelian susu, sementara koperasi lebih berkonsentrasi untuk membeli susu dari luar anggota, maka koperasi menjadi tidak lagi memerlukan pasokan susu peternak anggotanya. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa hubungan ketergantungan koperasi dan anggota sangat lemah. Adapun keadaan yang terjadi saat ini Koperasi PESAT memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan susu dari peternak anggota. Sebesar 82-89 % susu yang dipasarkan Koperasi PESAT berasal dari peternak anggota dan 11 – 18 % berasal dari bukan anggota.

Ketergantungan dalam pemasaran pakan konsentrat

Pakan konsentrat merupakan keperluan pakan untuk ternak sapi perah disamping pakan hijauan, ampas tahu dan lainnya. Peternak anggota memperoleh pakan konsentrat dari koperasi, dan ada pula yang membeli konsentrat di luar koperasi, disamping sebagian lagi peternak yang membuat sendiri. Pembelian konsentrat di koperasi melalui mekanisme jual beli biasa dan ada pula yang diperhitungkan berdasarkan banyaknya susu yang disetorkan oleh peternak. Pada umumnya prosedur yang ditempuh yaitu hasil penjualan susu akan dipotong untuk membayar sejumlah konsentrat yang dibeli anggota. Apabila peternak menyetorkan susunya lebih sedikit dari biasanya, maka peternak tersebut hanya bisa membeli konsentrat dalam jumlah yang lebih sedikit.

Peternak anggota koperasi yang membeli konsentrat di luar koperasi beralasan bahwa kualitas konsentrat yang disediakan oleh koperasi kurang memuaskan. Demikian pula peternak yang membuat pakan konsentrat sendiri, selain karena kualitasnya kurang baik juga mereka menilai bahwa dengan membuat sendiri konsentrat, biaya pakan konsentrat menjadi lebih murah. Hasil penelitian terhadap 50 orang peternak anggota koperasi yang tersebar di 10 kelompok peternak menunjukkan bahwa 60% peternak anggota membeli pakan konsentrat dari koperasi, 24% peternak anggota membeli pakan konsentrat di luar koperasi, dan 16% peternak membuat pakan konsentrat sendiri. Sementara itu, jumlah pembeli pakan konsentrat di koperasi 96% adalah peternak anggota koperasi, dan 4,0% peternak bukan anggota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bisnis pakan konsentrat ketergantungan koperasi terhadap peternak anggota sangat tinggi. Ini dapat dimaknai bahwa koperasi telah mampu memuaskan kebutuhan anggotanya, sehingga mayoritas anggota tetap membeli konsentrat di koperasi. Dapat pula dimaknai bahwa koperasi tidak memiliki pasar yang lain selain peternak anggota koperasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketergantungan

Berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan transaksi produk susu dan pakan konsentrat oleh koperasi dengan peternak anggotanya, penelitian ini mencatat faktor-faktor yang bisa menjadi penguat hubungan bisnis diantara keduanya, maupun yang berpotensi untuk melemahkannya. Pada hubungan bisnis produk susu, koperasi memiliki ketergantungan yang tinggi atas produksi dan pasokan susu dari peternak anggota koperasi. Dilihat dari sudut pandang kepentingan peternak anggota koperasi hubungan seperti itu berarti bahwa koperasi merupakan pasar yang menjamin bagi keberlanjutan usaha peternakan sapi perah mereka. Faktor penguat hubungan ini adalah pemberian harga yang wajar atau menguntungkan oleh koperasi, pelayanan yang baik baik terkait dengan penanganan susu maupun pendukungnya, dan komitmen yang tinggi pengelola koperasi terhadap kepentingan anggota.

Adapun faktor yang berpotensi untuk melemahkan hubungan tersebut bisa berasal dari peternak anggota maupun pengelola koperasi itu sendiri. Selama ini koperasi hanya sedikit saja mengambil susu dari peternak bukan anggota dan dengan harga pembelian yang relatif sama dengan harga susu dari anggota. Akan tetapi bila koperasi di kemudian hari mendapatkan keuntungan yang lebih banyak bila mengambil susu dari bukan anggota, misalnya harga pembelian yang murah, maka sedikit demi sedikit koperasi akan meninggalkan anggotanya. Faktor lain yang berpotensi merusak hubungan adalah menurunnya kualitas usaha produksi susu oleh peternak anggota sebagai akibat kurangnya tenaga kerja, mahalnya harga pakan, dan rendahnya keterampilan peternak dalam budidaya. Jika hal ini terjadi maka terjadi penurunan baik kuantitas maupun kualitas susu yang dihasilkan oleh peternak anggota koperasi. Akibatnya koperasi akan kekurangan pasokan susu dari anggota, dan kemudian akan lebih bergantung kepada pasokan peternak non anggota.

Dalam hubungan bisnis pakan konsentrat, koperasi sangat bergantung kepada permintaan konsentrat oleh peternak anggota. Apabila koperasi mampu untuk mempertahankan mutu pelayanannya baik melalui harga yang wajar, kualitas konsentrat yang baik, dan cara-cara pelayanan lainnya yang disukai anggota, maka hubungan ketergantungan dengan anggota menjadi sesuatu yang positif. Dalam hal ini koperasi bisa memperoleh keuntungan dengan cara memberikan kepuasan yang tinggi kepada anggotanya. Adanya persaingan dengan pelaku bisnis yang lain yang dapat menyediakan konsentrat dengan harga lebih murah dan mutunya juga lebih baik, maka akan menjadi gangguan yang serius bagi koperasi. Kualitas konsentrat yang kalah dibandingkan dengan yang disediakan bukan koperasi, dan harga konsentrat yang lebih mahal di koperasi bila dibandingkan dengan membeli di luar koperasi atau peternak membuatnya sendiri akan melemahkan hubungan bisnis dengan anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di muka, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi PESAT memiliki ketergantungan yang tinggi atas pasokan susu dari peternak anggotanya. Adanya permintaan susu segar yang meningkat telah mendorong koperasi untuk melakukan hubungan bisnis dengan peternak bukan anggota, namun dalam proporsi yang relatif kecil.
2. Koperasi PESAT memiliki ketergantungan yang tinggi atas permintaan pakan konsentrat dari peternak anggota koperasi. Pangsa pasar koperasi untuk bisnis konsentrat hampir mutlak berupa konsumsi peternak anggota koperasi. Sementara konsumen di luar anggota sangat sedikit.
3. Keandalan pelayanan dan harga beli susu yang menguntungkan peternak akan senantiasa menjadi faktor penguat hubungan ketergantungan koperasi dan peternak anggotanya. Demikian pula halnya dalam pemasaran konsentrat, koperasi akan mampu memperkuat hubungan ketergantungan dengan anggota jika mampu bersaing dengan pasar dalam menyediakan konsentrat yang bermutu baik dan harganya wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Triana Yuni, Nunung Noorhidayat, Siswasdi (2008), Daya Tahan Susu Segar Pedagang eceran Sebagai Indikator layak Konsumsi. Laporan Penelitian, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman.
- Hanel, Alfred (1989), Basic Aspect of Cooperative Organization and Policies for Their Promotion in Developing Countries. Marburg: University of Marburg
- Lloyd, Bernard (2001), "Positioning for Performance: Reshaping Co-ops for Success in the 21st Century", makalah dalam Farmer Co-operative Conference, Oktober 29, Las Vegas, McKinsey & Company
- Peterson, Chris (2005), "Searching for a Cooperative Competitive Advantage", mimeo, Michigan State University.
- Ropke, Jochen (1985), The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing Countries. With Special Reference of Indonesia, Marburg: University of Marburg

INTEGRASI SAPI POTONG TANAMAN KAKAO DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT

Arfa'i¹⁾ dan Yuliaty Shafan Nur²⁾

Program Studi Sosial Ekonomi¹⁾, Nutrisi dan Teknologi Pakan²⁾, Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang

ABSTRACT

Integrated Farming System (IFS) emphasizes the integration between the various components by utilizing the available resources in an efficient, economical and friendly environment. The basis of this concept is the consideration of agricultural production of crops and livestock with the principles of zero waste, optimize the resource utilization of farm-animal optimally to increase production and livestock-farming income. The aim of the study was to analyze: (1) integration of beef cattle and cocoa plants and development potential; and (2) the constraints faced in the implementation of integration programs of beef cattle and cocoa plants. The study was conducted at farmer groups (Fadhila) in the vilage of Taram, Harau County, District of Limapuluh Kota. The study used survey method and direct observation to localized research using questionnaires. The results showed that the integration between beef cattle and cocoa plants not take place optimally, cocoa waste utilization for animal feed only reached 13.05%, while the use of organic vertilizer for cocoa crop has reached 100% in the form of unprocessed vertilizer. Obstacles encountered in the implementation of the integration of beef cattle and crops are cocoa farmers lack knowledge about integration and limited their knowledge of livestock waste treatment technology and feed processing of cocoa crop waste, so that the application of the integration between beef cattle and crop cocoa is not optimal.

Keywords: Beef cattle integration, Cocoa, District of Limapuluhkota

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 (PSDS-2014) merupakan salah satu program utama Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik. Tantangan ini tidak mudah, karena saat ini impor daging dan sapi bakalan sangat besar, sekitar 30 persen dari kebutuhan daging nasional. Bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat yang secara otomatis akan menguras devisa negara sangat besar. Bila kondisi ini tidak diwaspadai, hal ini dapat menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani khususnya daging sapi semakin jauh dari harapan (Ditjen Peternakan 2010). Salah satu program pemerintah yang mendukung pencapaian Swasembada Daging Sapi yakni Program Integrasi sapi dengan tanaman.

Setiawan (2000) mengemukakan konsep *LEISA* (Low External Input Suistinable Agriculture) yang menekankan keterpaduan antar berbagai komponen dengan meman-faatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien, ekonomis dan ramah lingkungan, aplikasi secara sederhana menjadi *Integrated Farming System (IFS)*. Konsep ini melibatkan petani-ternak, pendekatan optimalisasi penggunaan bahan baku yang terdapat di lingkungan sekitar secara terpadu, penggunaan sumberdaya ditekankan pada efisiensi untuk meningkatkan pendapatan petani-ternak. Dasar pertimbangan konsep ini adalah kegiatan produksi pertanian tanaman dan ternak dengan prinsip *zero waste*, yang dimaksud dengan *zero waste* adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, seperti jerami padi, pucuk tebu, kulit buah kakao, kulit buah kopi, serat sawit sebagai pakan ternak melalui proses fermentatif agar mempunyai nilai guna yang lebih baik dan kotoran ternak sapi diproses menjadi pupuk organik. Artinya memperbaiki unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga tidak ada limbah yang terbuang (Ditjen Peternakan 2002).

Nagari Taram, Kecamatan Harau, kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan salah satu daerah yang memiliki peluang dilaksanakannya integrasi antara tanaman dan ternak, mengingat daerah ini memiliki populasi ternak sapi potong sebanyak 1031 ekor dan perkebunan coklat milik masyarakat mencapai luas 649,09 Ha (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2011). Kelompok tani Fadhila yang terletak di Nagari

Taram mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan program integrasi sapi potong dengan tanaman kakao melalui dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010. Setelah lebih kurang \pm 3 tahun program ini berjalan, terlihat bahwa pelaksanaan integrasi antara sapi potong dengan tanaman kakao belum berjalan secara optimal. Untuk mendapatkan informasi bagaimana program integrasi ini dilaksanakan dan kendala-kendala yang dihadapi maka dilakukan penelitian ini.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) integrasi sapi potong dengan tanaman kakao dan potensi pengembangannya; (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan solusinya, pada Kelompok Tani Tani Fadhila kenagarian Taram

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Fadhila kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berlangsung selama tiga bulan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metoda survey, melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mendatangi masing-masing responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun. Data sekunder di peroleh dari instansi-instansi terkait seperti BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kantor Camat Harau.

Responden Penelitian

Responden pada penelitian ini yakni Anggota kelompok Tani Fadhila yang melaksanakan program Integrasi Sapi Potong dengan Tanaman Kakao sebanyak 20 orang.

Peubah dan Pengukuran

Peubah yang di amati pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik kelompok pelaksana program
2. Alokasi Dana program
3. Usaha sapi potong
4. Jumlah dan jenis ternak yang di pelihara (ST)
5. Pakan (jenis pakan yang diberikan, jumlah pemberian)
6. Tatalaksana pemeliharaan (sistem pemeliharaan, kandang dan peralatan)
7. Produksi feses dan Pengolahan
8. Usaha tanaman kakao
9. Luas tanaman kebun kakao di Kelompok Tani Maju Berkarya (ha)
10. Pemupukan (jenis dan jumlah pupuk yang diberikan)
11. Produksi limbah dan Pengolahannya
12. Pemanfaatan Limbah
13. Pemanfaatan limbah Kakao pakan ternak.
14. Pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik.
15. Kendala-kendala yang di hadapi dalam penerapan integrasi sapi potong dengan tanaman kakao
16. Pengetahuan peternak tentang integrasi ternak dan tanaman
17. Pengetahuan Pengetahuan teknologi pengolahan limbah kakao dan limbah ternak.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam Tabel, Gambar dan Grafik, kemudian dibandingkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan integrasi ternak dan tanaman. Untuk mengetahui

permasalahan yang dihadapi oleh anggota dilihat dari alasan mereka terkait dengan pencapaian sasaran program dan pengetahuan mereka terhadap penggunaan teknologi pendukung integrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari Taram merupakan salah satu nagari yang berada di kecamatan Harau, kenagarian ini berjarak \pm 4 km dari pusat pemerintah kecamatan, \pm 3 km dari ibu kota kabupaten Lima Puluh Kota, dan \pm 122 km dari ibu kota Propinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Taram \pm 60,59 Km² dengan mata pencarian penduduk sebagaimana besar bergerak dibidang pertanian (90%).

Ketinggian Nagari Taram rata-rata mencapai 600 mdpl, beriklim tropis dengan temperatur bergerak antara 25° – 31°C dan rata-rata curah hujan yang cukup tinggi yaitu mencapai 1.308-3.333 mm per tahun.

Penggunaan lahan di Nagari Taram cukup beragam, penggunaan lahan terbesar sebagai lahan perkebunan (34.42%), persawahan (33.83%), hutan (16.99%), kolam ikan (16.99%), dan lahan perumahan (0.63%). Lahan yang diperuntukan untuk perkebunan ditanami dengan tanaman Kakao, sehingga upaya integrasi antara sapi potong dengan tanaman kakao memiliki potensi yang besar dikembangkan di wilayah ini.

Profil Kelompok Tani Pelaksana Program Integrasi

Profil kelompok tani ternak pelaksana program integrasi sapi potong dan tanaman Kakao disajikan pada Tabel 1.

Kelompok tani Fadhila berdiri semenjak tahun 2005 mulai melaksanakan program integrasi pada bulan Agustus 2010, hal ini menggambarkan bahwa kelompok sudah terbentuk jauh hari sebelum program bantuan ini ada, bukan kelompok yang dibentuk dengan adanya program. Dari segi pembentukan kelompok sangat mendukung adanya program integrasi antara sapi potong dan tanaman Kakao, jumlah anggota yang terlibat dalam program bantuan sebanyak 20 orang.

Tabel 1. Karakteristik kelompok tani pelaksana bantuan integrasi

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Kelompok	Fadhila
2	Tahun Berdiri	2005
3	Jumlah anggota	20
4	Tahun menerima bantuan sapi	Agustus 2010
5	Kelembagaan	Kelompok Tani
6	Status Kelompok	Lanjut

Sumber: Hasil Penelitian (2014)

Alokasi Dana Bantuan Program Integrasi

Alokasi dana bantuan program integrasi tanaman kakao dan ternak sapi potong disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi dana bantuan program integrasi

No	Uraian	Volume	Jumlah	Persentase
1	Sapi Peranakan Simental	24 ekor	248.500.000	82.83
2	Mesin pencacah kakao	1 unit	17.500.000	5.83
3	Mesin penepung	1 unit	12.500.000	4.17

4	Biaya pendamping	1 paket	11.500.000	3.83
5	Bahan dan alat pengolahan limbah Kakao	1 paket	10.000.000	3.34
	Jumlah		300.000.000	100.00

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa jumlah dana bantuan sosial (BANSOS) untuk kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan integrasi tanaman kakao dengan sapi potong pada kelompok tani Fadhila. Pemanfaatan dana bantuan untuk pengadaan sapi potong masih kurang (82.83%), berdasarkan petunjuk teknis integrasi sapi dan tanaman penggunaan dana untuk pengadaan sapi minimal 85 persen dan sisanya digunakan untuk fasilitas penunjang integrasi. Dana bantuan ini diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 19 Agustus 2010.

Dinas Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada kelompok tani dalam bentuk peralatan mesin pencacah buah kakao dan mesin penghalus buah kakao. Adapun gambar mesin pencacah dan mesin penghalus buah kakao dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Karakteristik Petani-ternak

Karakteristik peternak sapi potong penerima bantuan terdiri dari, peternak berada pada usia produktif (91,30%), tingkat pendidikan SLTP (39,13%), memiliki pengalaman beternak > 10 tahun (52.23%), dan pekerjaan utama sebagai petani-ternak (95,65%). Disamping umur produktif tingkat pendidikan formal turut mempengaruhi petani ternak dalam mengelola usaha, semakin tinggi tingkat pendidikan akan menambah wawasan, dengan demikian akan semakin mudah menerima inovasi teknologi. Sebagian besar tingkat pendidikan responden adalah SLTP, hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mengakibatkan rendahnya adopsi teknologi



Gambar 1. Mesin pencacah Kakao



Gambar 2. Mesin penghalus kakao

sebagai ukuran respon petani ternak terhadap perubahan teknologi. Sebagian besar responden memilih bertani sebagai usaha pokok, dan memiliki pengalaman memelihara sapi potong di atas 10 tahun.

Usaha Ternak Sapi Potong

Bibit dan Perkembangan sapi yang dipelihara. Bibit dan perkembangan sapi yang dipelihara disajikan pada Tabel 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis bibit yang dipelihara terdiri dari sapi Simental (100%), ternak dikawinkan melalui IB, rata-rata kepemilikan ternak 5,21 ekor/peternak (2,8 ekornya dari program). Bila dibandingkan dengan awal program sudah terlihat perkembangan sapi yang dipelihara sebesar 133,33 persen selama tiga tahun (rata-rata pening-

Tabel 3. Bibit dan perkembangan sapi program integrasi

No	Rincian	Bangsa Sapi	Awal (ekor)	Saat Penelitian (ekor)
1	Jantan Dewasa	Simental	-	-
	Betina Dewasa	Simental	24	24
2	Jantan Muda	Simental	-	5
	Betina Muda	Simental	-	5
3	Anak Jantan	Simental	-	6
	Anak Betina	Simental	-	4
	Jumlah		24	56
	Perkembangan (%)			133.33

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

katan 44,44%), masih belum optimal. Alasan peternak memilih sapi Simental karena pertumbuhannya cepat dan harga jual anak yang dihasilkan tinggi, keragaan reproduksi usaha ternak sapi potong disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keragaan reproduksi usaha pembibitan sapi potong

No	Komponen	Keterangan
1	Calving Interval	15 bulan
2	Service per Conception (S/C)	1,9
3	Masa Kosong	4,5 bulan

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Calving interval yang didapat relatif panjang yaitu mencapai 15 bulan, sedangkan interval yang baik adalah sekitar 12 bulan. Hal ini karena masih terbatasnya pelayanan IB oleh petugas (jumlah petugas yang kurang), sehingga waktu IB terlambat dan molor. Siregar *et al.* (1998) menyatakan bahwa keberhasilan IB dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni kondisi sapi, akseptor, keterampilan inseminator, keterampilan peternak dalam mengamati siklus berahi, dan ketepatan waktu pelaksanaan IB.

Pakan yang diberikan. Jenis pakan yang diberikan terdiri dari hijauan, konsentrat dan limbah perkebunan berupa limbah kakao yang sudah difermentasi. Hijauan yang diberikan berupa hijauan unggul (rumput gajah, benggala, raja) dan rumput lapangan, dengan rata-rata pemberian 35 kg/ut/hari. Hijauan unggul ditanam dilahan masing-masing peternak dengan luas lahan rata-rata 0,66 ha/peternak. Konsentrat yang diberikan berupa dedak, dan ampas tahu dengan jumlah pemberian berkisar antara 0,25-0,5 kg/ut/hr, sedangkan limbah kakao yang diberikan berupa limbah kakao yang sudah difermentasi sebanyak 5 kg/ut/hr.

Tatalaksana Pemeliharaan. Sistem pemeliharaan sapi dilakukan secara intensif sehingga memudahkan pengontrolan terhadap ternak. Kandang ternak dibuat sesederhana mungkin dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada, sebagian besar bangunan kandang terbuat dari kayu, atap seng atau rumbia, lantai kandang dari semen, dinding dari kayu dan bambu, ukuran kandang 2 x 1,5 m² per unit ternak. Kandang umumnya dibersihkan setiap hari, peralatan kandang terdiri dari tempat pakan, tempat minum dan

penampungan kotoran. Kotoran yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memupuk lahan hijauan pakan ternak, dan tanaman kakao. Sudah terlihat adanya peranan usaha ternak sapi terhadap usahatani dari sumbangan pupuk kandang yang dihasilkan (walaupun pupuk kandang yang diberikan belum diolah) dan penggunaan limbah kakao fermentasi untuk pakan ternak. Menurut Nurawan *et al.* (2004), system usahatani-ternak merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam rangka optimalisasi sumberdaya lokal, karena input pakan ternak berasal dari output tanaman dan input pupuk bagi tanaman berasal dari output ternak berupa kompos.

Produksi feses dan Pengolahannya. Jumlah kotoran sapi yang dihasilkan dapat diprediksi dari jumlah sapi yang dipelihara. Apabila satu ekor sapi yang dipelihara rata-rata setiap hari menghasilkan 7 kg kotoran kering (Budiyanto, 2011), maka kotoran kering yang dihasilkan dari 56 ekor sapi yang dipelihara kelompok adalah sebesar 392 kg/ekor/hari, atau setara dengan 143,1 ton pupuk organik pertahun. Jika kebutuhan pupuk organik untuk lahan coklat rata-rata 2 ton/ha/th, dengan pupuk organik yang dihasilkan akan dapat memenuhi kebutuhan lahan coklat seluas 71,55 Ha.

Usaha Tanaman Kakao

Luas Tanam. Luas tanaman Kakao milik anggota kelompok sebesar 17 Ha, sehingga rata-rata luas tanaman kakao yang dimiliki masing-masing anggota kelompok adalah sebesar 0.85 Ha, jarak antara kebun Kakao dengan kandang sapi potong cukup dekat lebih kurang 500 meter, sehingga memudahkan dalam kegiatan integrasi.

Pemupukan. Pemupukan yang dilakukan oleh petani-ternak terhadap tanaman Kakao menggunakan pupuk kandang yang dihasilkan. Jumlah pupuk kandang yang diberikan dengan dosis rata-rata 2 ton/ha/th, pupuk diberikan disekitar tanaman coklat dengan periode pemberian 2 kali per tahun.

Produksi Limbah. Dalam memperhitungkan potensi daya dukung kulit kakao sebagai pakan ternak berpatokan pada produksi per tahun. Hasil penelitian Priyanto *et al* (2004) didapatkan bahwa 1 ha kebun coklat menghasilkan 800 kg coklat kering, dengan konversi bahwa kakao kering mencapai 50% dari produksi kakao basah maka produksi kakao basah yang dihasilkan 1.600 kg/ha/th, dari produksi kakao basah sebanyak 1.600 kg ini dihasilkan buah kakao basah sebanyak 2.971 kg/ha/th (proporsi kulit buah kakao sebanyak 65% dari buah kakao). Jika luas kebun coklat kelompok tani-ternak sebanyak 17 ha dan peternak memberikan limbah coklat sebanyak 5 kg/ekor/hr dalam pakan ternak, maka potensi daya dukung ternak sapi berdasarkan produksi coklat adalah sebesar 26,35 UT/th.

Pemanfaatan Limbah di Lokasi Penelitian

Pemanfaatan Limbah Ternak Untuk Pupuk Tanaman Kakao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok tani-ternak program integrasi telah memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan untuk lahan tanaman coklat yang mereka miliki. Pupuk organik yang mereka gunakan berasal dari feses ternak sapi yang dipelihara, diolah secara sederhana dengan cara : feses ditempatkan disuatu tempat penampungan feses disekitar kandang (memiliki atap sederhana), feses disimpan selama 3 minggu sambil dibalik tanpa ada perlakuan lain, setelah tiga minggu pupuk organik yang sudah jadi langsung digunakan untuk tanaman coklat. Dengan penggunaan pupuk organik yang dihasilkan sendiri diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk an-organik dari luar usaha, sehingga biaya pupuk an-organik bisa dikurangi dan efisiensi usaha dapat ditingkatkan. Saat ini usaha peternakan untuk menghasilkan sapi bakalan dalam negeri (*cow-calf operation*) 99% dilakukan oleh peternak rakyat, ternak sapi dipelihara dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan usahatani tanaman. Adanya keterkaitan antara usahatani tanaman dan usaha ternak dapat meningkatkan efisiensi usahatani-ternak sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan (Diwyanto dan Priyanti, 2006).

Pemanfaatan Limbah Tanaman Untuk Pakan Ternak. Pemanfaatan limbah ta-naman Kakao untuk pakan ternak disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pemanfaatan limbah Kakao didaerah penelitian

No	Rician	Frekuensi Pemanfaatan			
		Memanfaatkan	%	Tdk memanfaatkan	%
1	Hijauan yg ada disekitar tanaman	20	100	--	--
2	Daun kakao bekas pemangkasan	--	--	20	100
3	Kulit buah kakao	8	40	12	60

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hijauan yang tumbuh disekitar tanaman coklat (rumput lapangan) seluruh peternak memanfaatkannya sebagai pakan ternak, daun kakao bekas pemangkasan belum dimanfaatkan oleh peternak, sedangkan kulit buah kakao 40% peternak sudah memanfaatkannya sebagai pakan (setelah melalui fermentasi). Peternak belum optimal memanfaatkan limbah kakao sebagai pakan ternak, karena masih banyaknya hijauan pakan yang tersedia dilahan mereka.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Integrasi

Kendala yang dihadapi oleh petani-ternak dalam melaksanakan program integrasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan integrasi

No	Rincian	Frekuensi	Persentase
1	Kurangnya pengetahuan tentang integrasi	12	60
2	Penguasaan Teknologi pengolahan limbah ternak	20	100
3	Penguasaan teknologi pengolahan limbah kakao	8	40

Sumber : Hasil Penelitian (2014)

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya pengetahuan petani-ternak tentang integrasi antara tanaman dan ternak, hal ini terlihat dari pupuk organik yang digunakan masih belum diolah, pada hal jika pupuk organik yang diolah potensi penggunaannya dapat ditingkatkan terutama kadar unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya penguasaan teknologi pengolahan limbah kakao untuk pakan ternak juga masih kurang (40%), hal lain yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan integrasi karena hijauan yang tersedia masih mencukupi kebutuhan ternak yang dipelihara, hijauan berasal dari lahan hijauan yang mereka punya, rata-rata luas lahan hijauan yang mereka punya adalah sekitar 0.65 ha yang ditanami dengan rumput gajah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program integrasi sapi potong dan tanaman Kakao belum optimal, limbah ternak sapi sudah dimanfaatkan untuk pupuk tanaman kakao akan tetapi pupuk organik yang digunakan masih menggunakan pengolahan sederhana, sedangkan limbah kakao berupa kulit buah kakao baru dimanfaatkan sebagai pakan ternak (40%).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program integrasi sapi potong dan tanaman kakao pengetahuan petani-ternak masih rendah.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program integrasi dimasa mendatang disarankan hal berikut Peningkatan pengetahuan peternak tentang integrasi tanaman dan ternak melalui penyuluhan dan pelatihan, terutama dibidang teknologi pengolahan limbah tanaman untuk pakan ternak dan pengolahan limbah ternak untuk pupuk tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS Kab. Lima Puluh Kota] Biro Pusat Statistik, Kabupaten Lima Puluh Kota. 2011. *Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka*. Payakumbuh; Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Budianto, Krisno. 2011. Tipologi Pendayagunaan Kotoran Sapi dalam Upaya Mendukung Pertanian Organik di Desa Sumpersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Gamma* 7 (1) 42-49
- [Ditjen Pet] Direktorat Jenderal Peternakan. 2010. *Petunjuk Teknis Program Sarjana Membangun Desa, Provinsi Sumatera Barat*. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- [Ditjen Pet] Direktorat Jenderal Peternakan. 2002. *Pedoman Teknis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Berbasis Pemberdayaan Kelompok Peternak*. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Diwyanto, K., dan A, Priyanti. 2006. Kondisi, potensi dan permasalahan agribisnis peternakan ruminansia dalam mendukung ketahanan pangan. *Proc. Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Peternakan di Bidang Agribisnis untuk Mendukung Ketahanan Pangan*. Fakultas Peternakan UNDIP, Semarang 3 Agustus 2006, hal : 1-11
- Nurawan, A., H, Hadiana., D, Sugandi., dan S, Bachrein. Sistem usahatani integrasi tanaman-ternak di kabupaten Ciamis, Jawa Barat. *Proc. Seminar Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan BPPT-Bali dan CASREN. Denpasar 20-22 juli 2004. Hal : 133-141
- Priyanto, D., A. Priyanti dan I. Inonu. 2004. Potensi dan Peluang Integrasi Ternak Kambing dan Perkebunan Kakao Rakyat. *Pemda Lampung*.
- Setiawan. 2000. Sistem Pertanian Terpadu. *Majalah AT Agribisnis* 143:24-26.
- Siregar, A.P., P. Situmorang, dan K. Diwyanto. 1998. Pemanfaatan teknologi IB dalam upaya peningkatan produktivitas sapi potong di Indonesia. *Proc. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner, Puslitbangnak*. Bogor.

URGENSI KEBUTUHAN KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN SUBSEKTOR PETERNAKAN DALAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI YANG BERKELANJUTAN DI SUMATERA BARAT

Basril Basyar

Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang

ABSTRAK

Kebijakan penyuluhan pertanian di Sumatera Barat kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia secara keseluruhan, apalagi kebijakan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan sapi potong. Sampai saat ini boleh dikatakan belum ada kebijakan-kebijakan berarti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan. Proses perumusan kebijakan yang membutuhkan waktu lama, serta banyaknya retorika pemerintah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan kebijakan penyuluhan di bidang tersebut tidak satupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini untuk melihat urgensi kebutuhan kebijakan penyuluhan pertanian subsektor peternakan sapi potong untuk membantu pencapaian tujuan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) khususnya di Sumbar. Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014, dimana kegiatan ini merupakan penelitian pendahuluan untuk menyusun proposal disertasi di Pascasarjana UNAND. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Kebijakan, Penyuluhan, Peternakan Sapi Potong, Swasembada Daging Sapi

PENDAHULUAN

Pembangunan dan kebijakan merupakan dua hal yang saling terkait, karena melalui pembangunan kebijakan dapat beroperasi, sehingga tujuan dari pembangunan tersebut dapat dicapai dengan baik. Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Carl Friedrich dalam Agustino, 2008). Dalam konteks pemerintah, kebijakan lebih dikenal dengan sebutan kebijakan publik. Dimana kebijakan publik tersebut adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Brigman dan Davis, 2005).

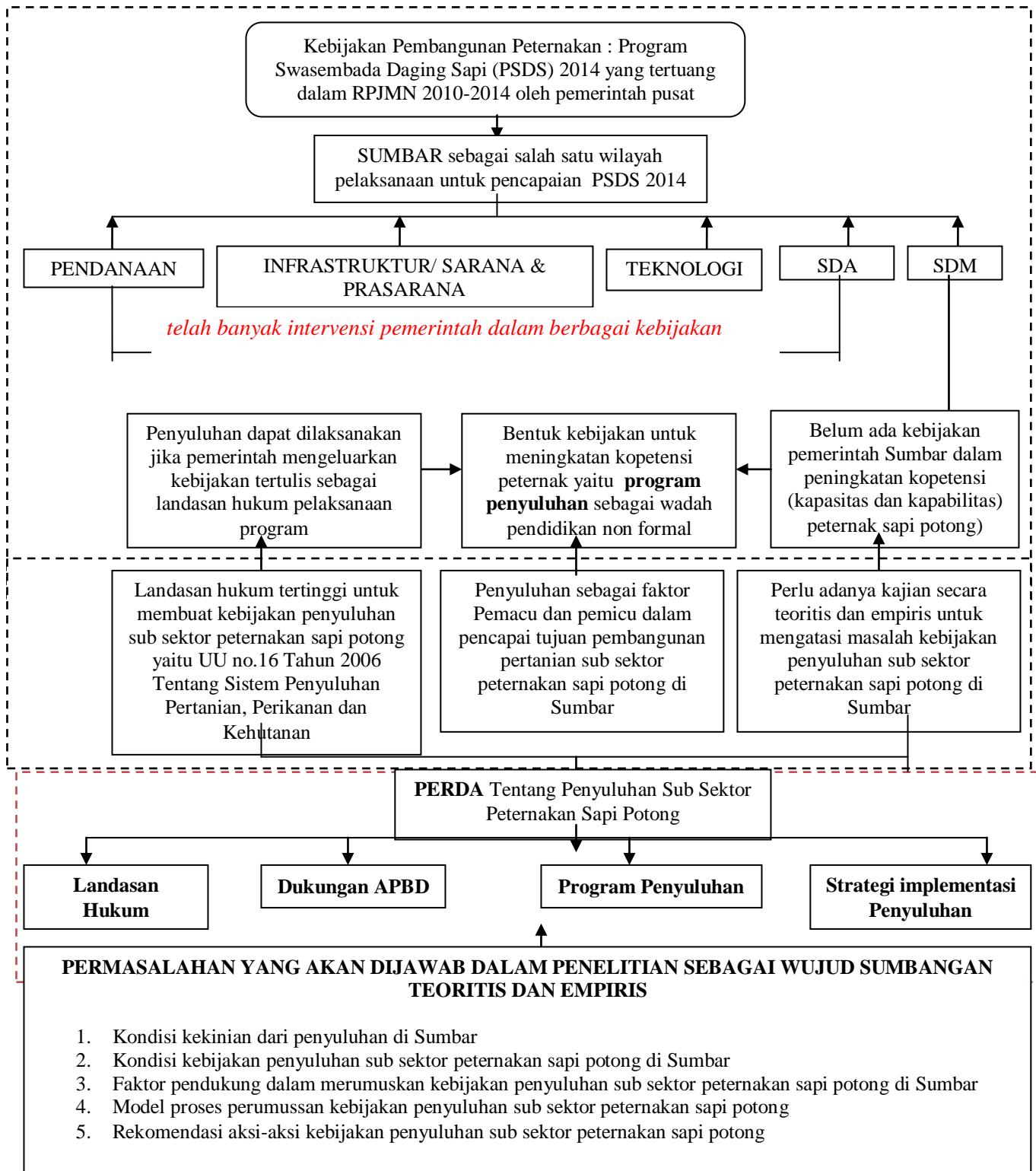
Kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 menetapkan empat target utama pembangunan pertanian diantaranya adalah swasembada daging sapi 2014 (Alisjahbana. S.A, 2013). Adapun harapan besar dari pemerintah terhadap program tersebut yaitu upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya domestik. Program ini merupakan peluang untuk dijadikan pendorong dalam mengembalikan Indonesia sebagai eksportir sapi seperti pada masa yang lalu, walaupun hal itu tidak mudah karena saat ini impor daging dan sapi bakalan sangat besar (30 persen dari kebutuhan daging nasional). Dengan terwujudnya swasembada daging sapi tersebut diharapkan impor sapi bakalan dan impor daging sapi menurun sampai 10% sedangkan 90% dipenuhi melalui penyediaan sapi lokal (Alisjahbana. S.A, 2013).

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, pemerintah menyadari cukup banyak faktor yang dapat mendukung terwujudnya tujuan program pembangunan pertanian, dalam konteks revitalisasi pertanian dilakukan dengan enam fokus, salah satunya adalah pengembangan SDM pertanian, karena untuk mewujudkan tujuan pembangunan diperlukannya SDM petani yang handal (Tambunan.T, 2010). Untuk melakukan pembangunan atau pengembangan SDM petani tersebut hanya bisa dilakukan dengan kegiatan pendidikan non formal yang lebih dikenal dengan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu dilahirkanlah UU No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pendapat tersebut sebenarnya telah lebih dahulu diungkapkan oleh Mosher (1996) dimana dijelaskan menyatakan kegiatan penyuluhan pertanian sangat diperlukan sebagai faktor pelancar pembangunan

pertanian. Bahkan Mardikanto (2009) justru menilai kegiatan penyuluhan sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, karena penyuluhan selalu hadir sebagai pemicu sekaligus pemacu pembangunan pertanian.

Jika kebijakan diartikan sebagai pilihan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, maka pemerintah berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan sapi potong sebagai salah satu kebijakan. Sebab secara empiris kebijakan itu memiliki peranan yang strategis sebagai pemicu maupun pemacu/pelancar pembangunan pertanian umumnya dan khususnya peternakan sapi potong di Sumatera Barat.

Kebijakan penyuluhan pertanian di Sumatera Barat kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, apalagi kebijakan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan sapi potong. Sampai saat ini boleh dikatakan bahwa belum ada kebijakan-kebijakan berarti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan. Proses perumusan kebijakan yang membutuhkan waktu lama, serta banyaknya retorika pemerintah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan kebijakan penyuluhan di bidang tersebut tidak satupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itulah, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan fokus kajian kepada "Urgensi Kebutuhan Kebijakan Penyuluhan Pertanian Sub Sektor Peternakan Sapi Potong Untuk Membantu Pencapaian Swasembada Daging Sapi". Berdasarkan deskripsi sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menuangkan ide berfikir penelitian dalam Figur 1.



Figur 1. Kerangka berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2013 s/d Februari 2014, dimana kegiatan ini merupakan penelitian pendahuluan untuk menyusun proposal disertai di Pascasarjana UNAND. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rujukan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Teori

Kebijakan dan pembangunan merupakan dua konsep yang saling terkait. Pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman pada pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek (Suharto.E, 2010). Menurut Ealau, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (Prewitt dalam Suharto.E, 2010). Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008) kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Marzali.A (2012) kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara member *rewards* dan *sanctions*. Sedangkan Ervin (2000) mendefenisikan kebijakan sebagai cetak biru bagi tindakan yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Anderson.J, 1984). Menurut Brigman dan Davis (2005), kebijakan publik adalah apasaja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hogwood dan Gunn (1990) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Kebijakan publik “ keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut” (Kenneth.P dalam Agustino, 2008).

Wahab (2008) mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal 7, hirarkinya yaitu; (1) UUD Negara RI Thn 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementai dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Sedangkan Agustino.L (2008) menyatakan bahwa bentuk kebijakan publik berdasarkan maksudnya dan guna yang melekat dalam dirinya ada 5 bentuk :

1. Kebijakan substansi atau kebijakan prosedural

Meliputi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti: pendidikan, kesehatan, bantuan, dll. Kebijakan substantif: mengarah kepada upaya pengentasan suatu masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. Kebijakan procedural : meruapakan kebijakan yang berbicara siapa yang akan melakukan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif

Kebijakan liberal adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan social mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Lebih jauh, kebijakan liberal menghendaki pemerintah melakukan koreksi atas kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan pemerintah sebelumnya. Kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan.

3. Kebijakan distributive, Kebijakan Restriktif, Kebijakan Regulator dan Kebijakan Self-Regulatory.

Kebijakan distributive → terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor-sektor khusus, baik untuk individu/kelompok/komunitas. Kebijakan redistributive → termasuk usaha hati-hati yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara kelompok penduduk contohnya dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kebijakan regulator → adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Kebijakan Self-Regulatory → semacam peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok.

4. Kebijakan material dan kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang berupaya untuk menyediakan sumber penghasilan yang nyata atau kekuasaan yang sesungguhnya kepada orang. Kebijakan simbolis secara jelas, membagikan keuntungan atau kerugian yang memiliki dampak kecil kepada manusia.

5. Kebijakan kolektif (kebijakan untuk orang banyak, ex: pertanahan nasional) dan kebijakan privat (kebijakan yang dapat dibagi menjadi satuan-satuan dan dibiayai untuk pemakai tunggal dan dapat dipasarkan, ex: pelayanan pos, kesehatan).

Sekilas Mengenai Kebijakan Pembangunan Peternakan Indonesia

Tujuan umum pembangunan peternakan, sebagaimana tertulis dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2010-2014, adalah meningkatkan penyediaan pangan hewani dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Secara khusus tujuan pembangunan peternakan adalah (1) Meningkatkan jaminan ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, (2) Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak ruminansia, (3) Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak non ruminansia, (4) Meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan, (5) Meningkatkan jaminan keamanan produk hewan dan (6) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Peternakan adalah Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014, melalui kegiatan pokok: (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal, (2) Peningkatan produksi ternak ruminansia dan nonruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal, (4) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis, (5) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan nonpangan dan (6) Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan (Ditjennak, 2009).

PSDS Tahun 2014. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 merupakan salah satu dari 21 program utama Departemen Pertanian terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal

ternak berbasis sumberdaya domestik. Saat ini kebutuhan daging sapi terus meningkat. Produksi daging sapi lokal selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2005 hingga tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 19,2%, lalu terjadi penurunan pada tahun 2007 menjadi 18,8% dan selanjutnya mengalami peningkatan lagi sampai dengan tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan 9,1% per tahun. Kekurangan kebutuhan untuk konsumsi dipenuhi dari impor ternak bakalan (feeder cattle) dan daging sapi. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,6% per tahun dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 5% dibanding tahun 2008. Sementara itu, pertumbuhan populasi sapi potong dari tahun 2005 hingga 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 populasi sapi sebanyak 10,5 juta ekor dan pada tahun 2006 menjadi 10,9 juta ekor, atau meningkat 2,8%. Kenaikan populasi meningkat tajam pada tahun 2007 dan 2008 yakni masing-masing 5,5% dan 6,9%. Kenaikan sapi ini kemudian melambat pada tahun 2009 yaitu menjadi 2,4%. (Ditjennak 2010).

Isu strategis yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan menuju swasembada daging sapi ini adalah masih rendahnya produktivitas sapi lokal, yang ditunjukkan dengan (1) tingginya tingkat kematian sapi di beberapa wilayah, yaitu untuk pedet antara 20 sampai 40% dan sapi induk 10 hingga 20 persen, (2) sapi betina produktif yang dipotong mencapai 150-200 ribu ekor per tahun (3) banyak sapi-sapi muda yang dipotong sebelum mencapai berat optimalnya, sehingga sapi hanya memproduksi daging sekitar 60-80% dari potensi maksimalnya, (4) produktivitas sapi yang masih sangat beragam, antara lain sapi persilangan hasil inseminasi buatan (IB) yang dipelihara dengan cara seadanya dan (5) langkanya sapi jantan di daerah sumber bibit dengan pola pemeliharaan ekstensif (digembalakan) karena semua sapi jantan dijual atau dipotong.

PSDS 2014 ini diimplementasikan melalui lima kegiatan pokok, yaitu (a) Penyediaan sapi bakalan/daging sapi lokal, (b) Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas sapi lokal, (c) Pencegahan pemotongan sapi betina produktif, (d) Penyediaan sapi bibit, (e) Pengaturan *stock* daging sapi dalam negeri. Secara lebih rinci, lima kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi 13 kegiatan operasional yang meliputi: (1) Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal, (2) Pengembangan pupuk organik dan biogas, (3) Pengembangan integrasi ternak-tanaman, (4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas rumah potong hewan, (5) Optimalisasi kegiatan IB dan intesivikasi kawin alam, (6) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air, (7) Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan, (8) Penyelamatan sapi betina produktif, (9) Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, (10) Pengembangan usaha perbibitan sapi potong melalui *village breeding center* (VBC), (11) Penyediaan bibit sapi melalui subsidi bunga (program kredit usaha pembibitan sapi/KUPS), (12) Pengaturan *stock* sapi bakalan dan daging, (13) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging serta operasional kegiatan pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Beberapa kegiatan operasional PSDS 2014 dalam mendukung kegiatan pokok sebagaimana tersebut di atas, antara lain melalui (1) penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha perbibitan, (2) pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui VBC dan (3) kegiatan optimalisasi IB. Khusus kegiatan optimalisasi IB, ini dilakukan mengingat (1) potensi populasi ternak sapi induk yang ada, (2) teknologi IB yang sudah dikuasai dan sudah banyak diadopsi oleh peternak, (3) jumlah SDM (inseminator, pemeriksa kebuntingan dan asisten teknik reproduksi) yang tersedia dan (4) dukungan infrastruktur (produksi semen, peralatan, kelembagaan IB dan peternak). Hal ini juga sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Peternakan 2009-2014, yaitu menjadi Direktorat Jenderal peternakan yang profesional dalam mewujudkan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

Urgensi Pencapaian Swasembada Daging Sapi Yang Berkelanjutan

Sapi potong merupakan salah satu komoditi peternakan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan protein hewani penduduk Indonesia umumnya dan Sumbar khususnya. Adapun data populasi ternak sapi potong di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Populasi Sapi Potong Di Indonesia

No	Indikator Wilayah	Nama Wilayah	Populasi (ribu ekor)
1	Wilayah terbanyak	Jawa Timur	4 727,3
2	Wilayah paling sedikit	DKI Jakarta	1,7
3	Wilayah penelitian	Sumatera Barat	327,0
4	Nasional	Indonesia	14 824,4

Sumber: Statistik Indonesia 2012

Berdasarkan data di atas, Sumatera Barat memiliki sekitar 2,3 % dari total populasi ternak sapi potong di Indonesia atau sekitar 327.000 ekor. Jumlah tersebut terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Populasi Sapi Potong Di Sumbar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rentang Umur Dengan Rumpun Sapi Simental, Sapi Pesisir, Sapi bali, dll.

No	Jenis Kelamin	Rentang Umur			Jumlah (ekor)
		Anak (ekor)	Muda (ekor)	Dewasa (ekor)	
1	Jantan	32 997	41 785	25 864	100 646
2	Betina	31 686	45 640	149 041	226 367

Sumber: Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau 2011 Sumbar

Kondisi produksi daging sapi tahun 2012 di Indonesia sebanyak 465 824 ton/tahun, dimana Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah terbanyak memproduksi daging sapi yaitu sebanyak 109 487 ton/tahun, sedangkan wilayah yang paling sedikit memproduksi daging sapi adalah Provinsi Maluku Utara yaitu 265 ton/tahun. Produksi daging sapi di Sumatera Barat sebanyak 22 641 ton/tahun. Artinya Sumatera Barat memiliki kemampuan produksi daging sapi sekitar 4,86 % /tahun dari total produksi di Indonesia (Statistik Indonesia, 2012).

Sedangkan jika dilihat dari kebutuhan daging sapi di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 549.670 ton dan perkiraan pada tahun 2014 kebutuhan daging sapi meningkat menjadi 593.040 ton (www.investor.co.id). Konsumsi daging sapi di Indonesia per tahun mencapai 4 juta ekor dari impor dan lokal. Sebanyak 4 juta ekor sapi itu setara dengan 600.000 ton daging sapi (<http://finance.detik.com>). Rata-rata konsumsi kalori (kkal) dan protein (gram) per kapita sehari penduduk Indonesia yang bersumber dari daging sapi pada tahun 2012 yaitu 2,34 kalori dan protein 0,22 /kapita (BPS, 2012). Konsumsi daging sapi di Sumatera Barat pada tahun 2011 yaitu sebanyak 11 553 ton atau sekitar 32 % dari total sumber pemenuhan kebutuhan daging yang dihasilkan dari komoditi ternak lainnya (Sumbar Dalam Angka, 2012).

Dari kondisi konsumsi daging sapi baik yang ada di Indonesia, maka negeri ini masih belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan daging sapi secara mandiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut pemerintah harus mendatangkan daging sapi dari luar. Padahal negeri ini memiliki potensi untuk menciptakan kemandirian pangan, salah satunya pangan hewani. Oleh karena itu, swasembada daging

sapi semestinya dapat terwujud di negeri ini dengan catatan seluruh wilayah yang memiliki potensi untuk dapat membantu pencapaian swasembada daging sapi harus di berdayakan seoptimal mungkin.

Secara data statistik, Sumbar sebenarnya telah mampu memenuhi kebutuhan daging sapi untuk masyarakatnya. Dimana total kebutuhan sapi untuk dapat memenuhi kebutuhan yaitu sebanyak ± 20.000 ekor/tahun. Secara kasat mata perbandingan populasi ternak sapi potong yang ada di Sumbar (327.000 ekor) dengan kebutuhan daging sapi, memang sudah aman. Akan tetapi, ada beberapa aturan yang membuat tidak keseluruhan populasi tersebut yang bisa di potong, seperti betina produktif, sapi yang berusia anak-anak dan muda. Artinya hanya peroh dari populasi tersebut yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi yaitu $\pm 163\ 500$ ekor, dengan demikian kondisi tersebut hanya bisa mengamankan kebutuhan daging sapi Sumbar ± 8 tahun kedepan.

Jika kondisi tersebut tidak dari sekarang difikirkan pengantisipasiannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Sumbar suatu saat nanti tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri. Selain itu, wilayah ini yang diharapkan mampu mendukung pencapaian swasembada daging sapi Nasional juga tidak bisa diharapkan lagi. Konsep swasembada daging sapi yang berkelanjutan harus difikirkan caranya untuk dapat diwujudkan, sehingga sampai kapanpun daerah ini mampu menghasilkan daging sapi secara mandiri atau bahkan mampu memenuhi kebutuhan daging sapi untuk provinsi tetangganya.

Kebijakan Pemerintah Sumbar Untuk Pencapaian Swasembada Daging Sapi

Pada kenyataannya pemerintah Sumatera Barat dari dahulu hingga saat sekarang ini telah banyak mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan komoditi sapi potong. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan dalam berbagai bentuk dan kegunaannya. Untuk lebih memudahkannya melihat apasaja kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Sumbar Dalam Mendukung Pencapaian Swasembada daging Sapi.

No	Kebijakan	Tujuan	Keterangan
1	KUR, KUPS, satu petani satu sapi	Penguatan permodalan	Nasional dan Sumbar
2	Inseminasi Buatan (IB), Embrio Transfer (ET), Kawin Silang	Teknologi Reproduksi	Nasional dan Sumbar
3	Sarjana Membangun Desa	Pendampingan	Nasional dan Sumbar
4	Penyelamatan sapi betina produktif,	Penyelamatan populasi	Nasional dan Sumbar
5	Pembuatan buku pemberdayaan kelompok tani ternak sapi	Dokumen pemberdayaan	Sumbar

Sumber: hasil diskusi dengan Kadis Peternakan Sumbar, 2013

Dari data yang ditampilkan di atas, terlihat bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tingkat nasional, maupun daerah (Sumbar), belum ada yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan. Pada hal kita sama-sama memahami, bahwa penyuluhan tersebut dibutuhkan sebagai pemacu dan pemicu untuk pencapaian tujuan program, melalui kegiatan pemberdayaan dan pendidikan non formal. Dengan kata lain penyuluhan akan membatu menyediakan SDM peternak yang handal dalam melakukan kegiatan peternakan sapi potong yang berkualitas.

Pentingnya Kebijakan Penyuluhan Dalam Pencapaian Tujuan Program Swasembada Daging Sapi Berkelanjutan

Sepanjang sejarah, dan diseluruh dunia, telah ada pola tentang pertukaran pengetahuan pertanian, dengan beberapa orang (misalnya pemimpin agama, pedagang, orang tua, dll). Istilah “penyuluhan” tersebut berasal dari akademisi dan penggunaan yang biasa pertama tercatat di Inggris pada tahun 1840-an, dalam konteks tentang “penyuluhan universitas. Kebanyakan Negara-negara yang berbahasa Inggris kini

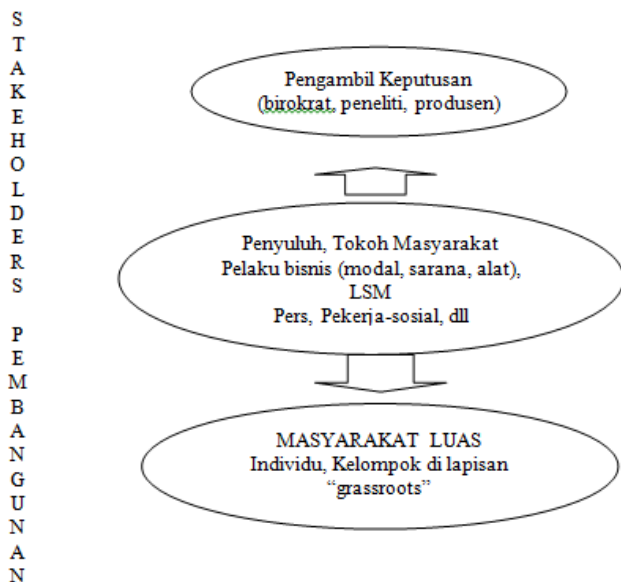
menggunakan istilah Amerika “penyuluhan”. Belanda menggunakan kata *voorlichting* yang berarti “penerangan jalan ke depan untuk membatu orang menemukan jalannya”. Indonesia juga menggunakan istilah penyuluhan yaitu berbicara tentang penerangan jalan dengan obor. Sementara Malaysia, kata penyuluhan diartikan sebagai perkembangan. Inggris dan Jerman berbicara tentang penasehat atau *berating*. Orang Australia berbicara tentang *forderung* yang berarti sesuatu seperti “menstimulir seseorang untuk pergi kerah yang diinginkan. Di Korea menggunakan istilah “pedoman pedesaan dan orang Prancis mengatakan *vulgarization*, yang menekankan tentang perlunya menyederhanakan pesan untuk orang biasa. Sementara orang Spanyol menggunakan kata *capacitacion* , yang mengindikasikan tentang maksud untuk memperbaiki keterampilan orang, walaupun biasanya digunakan untuk diartikan sebagai “pelatihan” (Leeuwis.C, 2009).

Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (orang dewasa) guna menumbuh kembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) petani, sehingga secara mandiri mereka dapat mengelola unit usahataniannya yang lebih baik dan menguntungkan, sehingga dapat memperbaiki pola hidup yang lebih layak dan sejahtera bagi keluarganya. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses belajar bagi petani melalui pendekatan kelompok dan diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerjasama yang efektif, sehingga mampu menerapkan inovasi, mengatasi berbagai resiko kegagalan usaha menerapkan skala usaha yang ekonomis untuk memperoleh pendapatan yang layak dan sadar akan peranan serta tanggungjawabnya sebagai pelaku pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, (Van Den Ban dan Hawkins, 1999).

Berbicara tentang kedudukan penyuluhan, Timmer (1983) dengan tepat menyebutnya sebagai “perantara” atau jembatan penghubung, yaitu penghubung antara :

- Teori dan praktek, terutama bagi kelompok sasaran (penerima manfaat) yang belum memahami “bahasa ilmu pengetahuan/tek-nologi”.
- Pengalaman dan kebutuhan, yaitu antar dua kelompok yang setara seperti sesama praktisi, sesama tokoh masyarakat, dll.
- Penguasa dan masyarakat, terutama yang menyangkut pemecahan masalah dan atau kebijakan-kebijakan pembangunan.
- Produsen dan pelanggan, terutama menyangkut produk-produk (sarana produksi, mesin/peralatan, dll.
- Sumber informasi dan penggunaannya, terutama terhadap masyarakat yang relatif masih tertutup atau kurang memiliki aksesibilitas terhadap informasi.
- Antar sesama stakeholder agribisnis, dalam pengembangan jeja-ring dan kemitraan-kerja, terutama dalam pertukaran informasi.
- Antara masyarakat (di dalam) dan “pihak luar”, kaitannya dengan kegiatan agribisnis dan atau pengembangan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Berkaitan dengan pemahaman tersebut, Lionberger (1983, 1991) meletakkan penyuluhan sebagai “variabel antara” (*interviening variable*), dalam pembangunan (pertanian) yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan masyarakatnya. Dalam posisi seperti itu, kegagalan pembangunan pertanian untuk memperbaiki kesejahteraan petani bukan semata-mata disebabkan oleh lemah atau rendahnya mutu/kinerja penyuluhan.



Figur 2. Kedudukan Penyuluhan Dalam Pembangunan Pertanian

Melihat gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa penyuluhan sebagai jembatan penghubung antara pembuat program pembangunan dengan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya penyuluhan tersebut juga dibutuhkan dalam pencapaian swasembada daging sapi. Untuk itu diperlukannya satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Sumbar terkait dengan penyuluhan pada sub sektor peternakan sapi potong.

Merujuk pada definisi kebijakan publik yaitu apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Serta kebijakan publik adalah sebuah instrumen pemerintah yang intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik (Suharto, 2010). Maka kebijakan penyuluhan pertanian merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang berfungsi untuk mengatur kegiatan penyuluhan pertanian tersebut agar tujuan yang ditetapkan dalam penyuluhan pertanian tersebut dapat tercapai dengan baik.

Pernyataan di atas mengenai kebijakan penyuluhan sebagai kebijakan publik tidaklah terlalu berlebihan hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- Pelaku/aktor pengambil kebijakan penyuluhan pertanian adalah pemerintah.
- Kebijakan penyuluhan pertanian menyelesaikan permasalahan peningkatan SDM petani dalam pembangunan pertanian.
- Bentuk kebijakan penyuluhan berupa UU, Perpu, Perda, Program, Juklak/Juknis, yang keseluruhannya membutuhkan legalitas hukum untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Tahapan dalam formulasi kebijakan penyuluhan pertanian tidak berbeda dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah.
- Melalui kebijakan penyuluhan tersebut, diharapkan keluarnya berbagai macam bentuk program atau kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para peternak sapi potong yang terdapat di Sumatera Barat.

Dilihat dari unit usaha pemelihara ternak sapi potong yang terdapat di Sumatera Barat, kebanyakan adalah rumah tangga pemelihara yaitu sebanyak 143 381 unit usaha, sedangkan perusahaan yang berbadan

hukum hanya 6 perusahaan (PSPK Sumbar, 2011). Dari kondisi tersebut, dapatlah kita lihat bahwasannya untuk meningkatkan populasi dan produksi daging sapi, pemerintah menyandarkan pada unit usaha rumah tangga sebagai pelaku utama dalam pencapaian swasembada daging sapi yang berkelanjutan.

Bila dilihat dari aspek cara pemeliharaannya, rumah tangga pemelihara ternak sapi yang menggunakan cara dikandangan sebanyak 130 586 rumah tangga, dikandangan dan lepaskan 184 090 rumah tangga, dilepaskan sama sekali 9 257 rumah tangga. Sedangkan jika dilihat dari tujuan pemeliharaannya, sebanyak 262 239 rumah tangga melakukan pengembangbiakan, untuk penggemukan sebanyak 56 397 rumah tangga dan pembibitan sebanyak 4 423 rumah tangga serta untuk perdagangan sebanyak 874 rumah tangga (PSPKP Sumbar, 2011). Dari cara pemeliharaan dan tujuan pemeliharaan yang dilakukan oleh rumah tangga usaha peternakan sapi, membutuhkan suatu kegiatan yang nantinya dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kopetensinya dalam menjalankan usahanya tersebut.

Pelaku usaha ternak sapi potong pada unit usaha rumah tangga, memiliki keterbatasan baik dalam manajemen, ilmu pengetahuan, teknologi dan akses informasi. Ditambah lagi sampai saat sekarang ini belum ada satupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumbar terkait dengan penyuluhan sub sector peternakan sapi potong. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan sebagai jembatan penghubung, peningkatan kopetensi dan akses informasi. Sehingga, unit usaha rumah tangga tersebut benar-benar dapat dijadikan sebagai basis atau pondasi dalam pencapaian swasembada daging sapi di Sumbar yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan tersebut diharapkan mampu melakukan:

1. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pelaku utama pembangunan peternakan, yaitu rumah tangga usaha peternakan sapi potong.
2. Menjadi jembatan penghubung antara pengambil kebijakan dengan rumah tangga usaha peternakan sapi potong.
3. Penyebar informasi yang terkait dengan kegiatan peternakan sapi potong
4. Membuka akses pasar yang berpihak pada peternakan sapi potong
5. Membangun jaringan atau organisasi peternakan sapi potong usaha rumah tangga yang mampu mengatasi nacaman pasar dari luar.
6. Pemberdayaan peternak sapi potong yang masih dalam skala kecil

KESIMPULAN

Pada saat kebijakan diposisikan sebagai pilihan terbaik sebagai senjata untuk mencapai tujuan pembangunan, maka kebijakan penyuluhan pertanian sub sektor peternakan adalah pilihan terbaik yang harus diciptakan untuk pemacu pencapaian tujuan pembangunan peternakan sapi potong di Sumatera Barat yaitu swasembada daging sapi yang berkelanjutan. Karena, melalui penyuluhan akan terselenggara kegiatan pendidikan non formal yang diberikan pada pelaku utama pembangunan peternakan. Selain itu, kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan dapat juga digunakan sebagai dasar hukum atau pedoman bagi praktisi, dalam merumuskan kegiatan atau program penyuluhan yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada daging sapi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino.L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Anderson, James E.2000. *Public Policy Making*. Boston. Houghton Mifflin.
- Alisjahbana. S.A. 2013. Ketahanan Pangan Dalam Program Pembangunan Nasional. Tempo Edisi 4235/28 Oktober-3November 2013 Halaman 127.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Indonesia 2012. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2012. Sumbar Dalam Angka 2012. Padang.

- Brigman.P & Glyn Davis.2004. *The Australian Policy Handbook. Crows Nest: Allen and Unwin.*
- Deptan. 2011. Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, Dan Kerbau 2011 (PSPK2011) Provinsi Sumatera Barat.
- Deptan. 2007. Undang Undang No.16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. www.deptan.go.id/feati/dokumen/uu_sp3k
- [Ditjennak] Direktorat Jenderal Peternakan. 2010. Blue print program swasembada daging sapi 2014. Direktorat Jenderal Peternakan. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Ervin. A.M. 2000. *Applied Anthropology:Tools and Perspectives for Contenporary Practice.* Boston. Allyn and Bacon.
- Hogwood dan Gunn. 1990. *Policy Analysis for the Real World. Oxford University Press Dubois. Boston.*
- <http://finance.detik.com/read>. Konsumsi Daging Indonesia Setiap Tahun Capai 4 juta ekor sapi. Di unduh tanggal 4 April 2014.
- <http://www.investor.co.id>. Agribusiness/Kebutuhan Daging Sapi-2014. Di unduh tanggal 4 April 2014.
- Leeuwis.C. 2009. Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan. “Berfikir Kembali Tentang Penyuluhan Pertanian”. Kanisius. Yogyakarta.
- Mardikato, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Kerjasama Lembag Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta.
- Marzali.A. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Kencana Prenanda Media Group. Jakarta.
- Mosher, A.T. 1996. *Getting Agriculture Moving.* New York : A Praeger, Inc. Publisher.
- Suharto.E, 2010. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta. Bandung.
- Tambunan, T. 2010. Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Van Den Ban. A.W. dan H.S Hawkins., 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.
- Wahab, A, S. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press. Malang.

ANALISIS USAHA TERNAK DOMBA HASIL PEMULIAAN DITINGKAT LAPANG (STUDY KASUS PETERNAKAN DOMBA DI DESA PANDANSARI, KECAMATAN PAGUYANGAN, KABUPATEN BREBES)

Broto Wibowo dan Sumanto
Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor

ABSTRAK

Penelitian pengembangan domba unggul (hasil pemuliaan dari Balitnak) dilaksanakan di desa Pandansari, kecamatan Paguyangan di Kabupaten Brebes sejak tahun 2010 yang diawali dengan dropping (introduksi ternak domba unggul) pada umur dewasa sebanyak 50 ekor (jantan dan betina), peternak penerima sebanyak 17 orang. Introduksi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut Group A (bulan April 2010 dengan jumlah peternak 11 orang, dengan domba 32 ekor), tahap kedua disebut Group B (bulan September 2011, jumlah peternak 6 orang dengan jumlah domba 18 ekor). Sampai dengan akhir tahun 2012 maka lama waktu pemeliharaan (Group A sebanyak 32 bulan sedangkan Group B sebanyak 15 bulan). Dalam kurun waktu tersebut dilakukan pembinaan dan pengawalan dalam bentuk peningkatan pengetahuan tentang pemeliharaan domba melalui komunikasi langsung kepada peternak. Dilakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan ternak (reproduksi, pertumbuhan, kematian,) maupun (pendapatan dari penjualan, biaya yang dikeluarkan yang bersifat tunai maupun non tunai). Data yang diperoleh digunakan untuk menghitung besarnya keuntungan dan manfaatnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Group A memperoleh keuntungan sebanyak Rp 63.857.000, sedangkan Group B sebanyak Rp 25.812.500. Perlu diketahui bahwa dalam pemeliharaan domba maka petani tidak mengeluarkan biaya pakan secara tunai, karena pakan hijauan melimpah dan mudah didapatkannya.

Kata Kunci: Domba Unggul, Kelompok Peternak, Populasi dan Nilai ekonomi.

ABSTRACT

A Study on the development of the composit sheep (superior product of Balitnak) implemented in Pandansari village, subdistrict Paguyangan in the Brebes district since 2010 beginning with dropping of the sheep (introduction of sheep superior) are 50 adult individuals (male and female) for 17 farmer recipients. The introductions take of in 2 stages, the first stage is called Group A (in April 2010 consisting of 11 farmers , with 32 head of sheep), the second stage is called Group B (In September 2011, covering 6 people with 18 head of sheep). The end of 2012 the farming period of Group A was 32 months Group B was 15 months. During this period coaching and escorting were conducted to increase the knowledge of the farmers on the composit sheep through direct communication to the farmer. Monitoring conducted to determine the development of sheep (reproduction, growth, death,) and (revenue from sales, total both in cash and non-cash). The data obtained were used to calculate the amount of profits and benefits. The calculations show that Group A gain of IDR 63,8570 million, while Group B IDR 25,8125 million. Keep in mind that the farmers not to pay in cash for feed, because forage is abundant in available and easily acquired.

Keyword: Composit sheep, farmer group, Population and economic value.

PENDAHULUAN

Peternakan merupakan kegiatan biologis yang dilakukan oleh manusia terhadap ternak dan lingkungan. Manusia berfungsi sebagai pengelola (mengatur) seluruh faktor yang mempengaruhi kehidupan ternak sehingga mampu memproduksi secara maksimal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui kegiatan pasar. Komoditas ternak yang diusahakan masyarakat terdiri dari berbagai jenis dengan tujuan pemeliharannya untuk produksi daging, susu, telur dan kulit bulu (fur), dan ternak kesayangan. Iskandar S. .2010. Bagi manusia ternak mempunyai peran dan fungsi yang sangat banyak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Djayanegara .A. *dkk.* (1993) bahwa secara nasional dan bagi petani, hampir terdapat 12 poin manfaat ternak dimana salah satunya adalah sarana sumber pendapatan. Kenyataan

lapang menunjukkan bahwa produktivitas usahaternak domba yang sebagian besar dikelola oleh peternak kecil masih sangat beragam dan umumnya relatif rendah. Rendahnya produktivitas antara lain dipengaruhi oleh keragaman genetik, diantara permasalahan keragaman genetik karena peternak kurang memperhatikan aspek perbibitan yang didalamnya menyangkut aspek pemuliaan dan reproduksi. Penggunaan bibit ternak yang mempunyai keunggulan genetik, akan memberikan manfaat peningkatan produktivitas yang bersifat permanen.

Balai Penelitian Ternak telah melakukan penelitian untuk memperoleh rumpun baru domba yang merupakan gabungan keunggulan dari berbagai rumpun domba di dunia. Rumpun domba baru yang dibentuk antara lain domba Komposit Sumatera, Komposit Garut, Barbados Cross, dan St. Croix Indonesia. Rumpun-rumpun domba tersebut dapat beranak sepanjang tahun dengan litter size sekitar 1,5; mempunyai kerangka tubuh yang besar yang memberi peluang kepada pertumbuhan fetus secara optimal, daya tahan terhadap cuaca panas dan lembab, relatif adaptif terhadap pakan lokal, serta komposisi perdagangan yang baik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada kondisi lapang, produksi domba komposit 20 – 50% lebih tinggi dibanding domba lokal yang dipelihara petani (Setiadi *,dkk.*, 2011).

Ternak domba merupakan salah satu komoditas yang perlu diperhitungkan sebagai sumber daging di kabupaten Brebes, sebagai gambaran bahwa pada tahun 2011 populasi domba di Kabupaten Brebes mencapai 164.177 ekor (Brebes Dalam Angka 2012). Balitnak pada tahun 2010 dan 2011 telah mengintroduksi domba unggul tersebut (50 ekor) di desa Pandansari dengan tujuan untuk perbaikan produktivitas domba lokal dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja ekonominya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan sejak April 2010 hingga Desember 2012 pada kelompok peternak Domba Mugi Lestari di Desa Pandansari , Kecamatan Paguyangan , Kabupaten Brebes. Ternak Domba unggul (hasil seleksi Balitnak) diintroduksi dalam 2 tahap , yaitu tahap I (group A) pada bulan April 2010 sebanyak 32 ekor (9 jantan dan 23 betina) kepada 11 peternak , tahap II (group B) pada bulan September 2011 sebanyak 18 ekor (6 jantan dan 12 betina) kepada 6 peternak. Bimbingan teknis diberikan melalui pertemuan yang terencana. Monitoring dan recording dilakukan secara reguler guna memperoleh data teknis (reproduksi, produksi dan mortalitas) maupun finansial (penerimaan dan biaya). Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan biaya dalam kurun waktu tertentu. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;Desa Pandansari bercirikan , daerah subur ,bergelombang dengan elevasi 1300 – 1500 m dpl, curah hujan tinggi , sesuai untuk pertanian hortikultura. Luas Wilayah sekitar 2.058 ha seluruhnya berupa lahan kering, sebanyak 770 hektar lahan digunakan untuk usahatani sayuran meliputi kentang, kubis, wortel dan bawang daun..Desa ini bagian dari 12 desa di Kecamatan Paguyangan, dan dari 290 desa di Kabupaten Brebes (Brebes Dalam Angka, 2012). Kepadatan penduduk mencapai 367 orang/km². Tingkat pendidikan yang dominan pada jenjang SD mencapai 80% (BPS Kabupaten Brebes,2012).

Identitas Peternak Domba ;Peternak penerima domba unggul telah membentuk kelompok “ Mugi Lestari”. Rata-rata umur peternak 45 tahun, pendidikan setara SD, pengalaman memelihara 20 tahun. Rata-rata jumlah ternak yang dipelihara sebanyak 6 ekor/peternak. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan agar terwujud kebersamaan,effisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan. Sinung Rustiyarno (2010) mengatakan bahwa Program pengembangan kelompok peternakan berpeluang dalam pengembangan kekuatan organisasi kelompok melalui kegiatan agribisnis dan jalinan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak terkait. Usaha berkelompok tersebut mempunyai pola spesifik sesuai dinamika masyarakat.

Budidaya Ternak Domba ; Peternak domba di desa Pandansari secara turun temurun telah mengenal dan memelihara domba secara intensif. Mubyarto (1979) mengatakan bahwa intensifikasi dimaksudkan untuk peningkatan produksi. Pola ini mempunyai konsekwensi antara lain; a)Penyediaan pakan : Hijauan yang diberikan dari jenis rerumputan yang berasal dari berbagai lahan yang terjangkau dengan cara mengarit yang dilakukan pada waktu luang yaitu mulai jam 10 sampai jam 12.b)Penyediaan kandang : Peternak telah menyediakan kandang panggung. Nilai kandang diperkirakan Rp 3 juta, daya tahan 8 tahun dan mampu diisi 12 ekor. c) Perawatan Kandang dan kesehatan : setiap hari pembersihan kotoran yang berada dilantai kandang, sedangkan pembongkaran kotoran yang berada dibawah kandang dilakukan setiap 15 hari sekali.

Analisa Finansial Usaha Domba : Analisa kedua tahap (Group A dan B) introduksi domba unggul Balitnak ditampilkan pada Tabel 1. Dari kedua tahap introduksi tersebut terlihat bahwa usaha pembibitan domba Balitnak di kelompok peternak desa Pandansari telah memberikan keuntungan yang berarti, dimana tahap Group A telah memperoleh Rp 63.857.000,-/32 bln dan tahap Group B memperoleh Rp 25.812.500,-/15 bln.

Tabel 1. Analisa penerimaan dan biaya usaha pemeliharaan domba (Rp)

Uraian	Group	
	A	B
Waktu pemeliharaan	32 bln	15 bln
I. Biaya	64.043.000	31.987.500
Bibit Domba	49.600.000	28.200.000
Penyusutan		
- Bangunan kdg	10.725.000	2.812.500
- Peralatan kdg		
- Cangkul	1.430.000	375
- Sabit	1.430.000	375
- pemikul rumput	858	225
Pakan	0	0
II. Penerimaan	127.900.000	57.800.000
Penjualan Domba	47.300.000	10.900.000
Aset ternak	80.600.000	46.900.000
III. Keuntungan		
(Penerimaan – Biaya)	63.857.000	25.812.500

KESIMPULAN

Peternak domba sudah membentuk kelompok dengan nama “Mugi Lestari”, pola pemeliharaan secara intensif terkurung. Lokasi pemeliharaan sangat mendukung dengan adanya produksi hijauan yang memadai yang berasal dari lahan perkebunan, lahan pekarangan dan lahan tanaman hortikultura. Group peternak berdasarkan waktu penerimaan ternyata masing – masing group (A dan B) mempunyai keuntungan dalam pemeliharaan domba.

DAFTAR PUSTAKA

- Djajanegara, A, Suparyanto, A Dan Hanafiah .1993. Pola Usaha Pembesaran Domba. Pros. Pengolahan dan Komonikasi Hasi-hasil Penelitian Unggas dan Aneka Ternak. Balai Penelitian Ternak Ciawi. Bogor. Hal 55-61. Dalam Prospek dan Kendala Penerapan Teknologi Usaha ternak itik (A.P Sinurat dan A.R. Setioko). Proseding ; Pengolahan dan Komonikasi Hasil-hasil Penelitian Peternakan di Pedesaan. Januari 1993. Ciamis, Jabar. Balitnak , Puslit. 1993
- Iskandar, S.2010. Hasil-hasil Penelitian Balai Penelitian Ternak TA 2006-2008. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner . Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Industrialisasi Sistem Pertanian untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Peternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan . Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian . Kementrian Pertanian

Kabupaten Brebes Dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. BAPEDA Brebes.

Kecamatan Paguyangan Dalam Angka .2011. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. BAPEDA Brebes.

Mubyarto. 1979. Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES.PT Intermedia . Jakarta

Setiadi,B.,E.Juarini,Subandriyo, E.Romjali, D.Loebis Dan Syaeri, 2011. Penguatan *Village Breeding Centre* Domba melalui Introduksi Domba Hasil Pemuliaan. Laporan Penelitian . Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor

Sinung Rustiyarno, 2010, Kelembagaan Agribisnis Pembibitan Sapi Potong Sistem Komunal di Wilayah Pesisir Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner . Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Industrialisasi Sistem Pertanian untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Peternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.

”SUCCESS STORY” USAHA SAPI PERAH RAKYAT DI KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dwi Priyanto dan Taty Herawati
Balai Penelitian Ternak, Ciawi Bogor

ABSTRAK

Profil usahaternak sapi perah peternakan rakyat sangat bervariasi yang ditentukan oleh kondisi agro-ekosistem maupun manajemen. Untuk meningkatkan pendapatan peternak dalam mendukung swasembada susu nasional perlu dilakukan identifikasi profil usaha spesifik. Penelitian prospek pengembangan usaha sapi perah di luar Jawa (Dataran sedang) dilakukan di Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan) yang merupakan salah satu areal pengembangan ternak sapi perah (di luar Pulau Jawa). Penelitian dilakukan melalui survei terstruktur terhadap 31 peternak sapi perah yang meliputi peubah teknis (skala usaha, produksi dan produktivitas) dan ekonomi (analisis ekonomi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha relatif tinggi rata-rata 8,85 ekor/peternak, dan proporsi induk dipelihara sebesar 52,41 persen, dengan proporsi induk laktasi sebesar 41,34 persen. Hasil perhitungan dari 106 ekor sapi yang dilakukan rekording dari hasil produksi ”dangke” (produk susu masyarakat Enrekang), dengan rata-rata harga per buah mencapai Rp.12.586/buah, maka dapat diperhitungkan produksi susu hanya mencapai 7,03 liter/ekor/hari, tetapi harga susu sangat tinggi (Rp.10.072/liter) yang jauh lebih tinggi dibanding di Pulau Jawa (Rp.3.500/lt). Usaha ternak sapi perah tersebut sudah ditangani peternak sampai pada industri pasca panen (dari hulu s/d hilir). Hasil keuntungan bersih mencapai Rp. 54.929.899, setara dengan Rp. 4.577.491/peternak/bulan (*Cost and Return Analisis*/tenaga kerja diperhitungkan). Industri tersebut masih dinyatakan belum mampu memenuhi permintaan produk dangke di lokasi. Produksi susu masih rendah karena pakan yang diberikan hanya berupa dedak padi dan belum memberikan konsentrat hasil olahan, tetapi penanganan pasca panen memberikan prospek keuntungan spesifik lokasi.

Kata Kunci : *Success story*, Profil Usaha, Sapi Perah Rakyat, Enrekang.

ABSTRACT

Dairy cattle farm profile is varied and determined by condition of agro-ecosystems and management. To increase the farmer's income in supporting milk national self-sufficiency is necessary to identify business profiles. Research to know the prospects of dairy business had been conducted in Enrekang (South Sulawesi), which is one of dairy cattle development area in outside Java. The study was conducted through a structured survey of the 31 dairy farmers covering technical components (scale enterprises, production and productivity) and also economic variables. The results showed that relatively high business own 8.85 head/farmer, and the proportion of cow 52.41 per cent and 41.34% in lactation period. The recording results from 106 cattle, showed that the average price of "dangke" (milk product in Enrekang) is Rp.12.586/pc. So, based on this price, however milk production reached only 7.03 liters/head/day, but the price of milk is very high Rp.10.072/liter. It is much higher than in Java (Rp.3.500/lt). Dairy cattle business has been handled by farmer from upstream to downstream that up to post-harvest one. Therefore, it can be calculated that the net profit can reached Rp.54,929,899, equivalent to Rp 4,577,491/farmer/month (*Cost and Return Analysis*/ with labor accounted). The industry still has not been able to meet the demand of 'dangke' products on location. Milk production is still low because of the feed given only in the form of rice bran without concentrat, but the prospect of post-harvest handling has an advantages.

Keywords: Success story, Business Profiles, Dairy Cattle Farmer, Enrekang.

PENDAHULUAN

Usahaternak sapi perah di Indonesia masih tertumpu pada usaha peternakan rakyat, yang sistem manajemen pemeliharaan masih mengandalkan pada potensi sumber daya yang ada sehingga tingkat pendapatan secara umum masih belum optimal. Ditinjau dari produksi susu nasional selama ini masih

belum mampu memenuhi kebutuhan, yang hal tersebut masih dilakukan impor susu bubuk yang mencapai 70 persen dari kebutuhan (ANONYMOUS, 2008). Kasus tersebut terjadi karena ketidak seimbangan antara kemampuan produksi susu nasional dibandingkan dengan permintaan konsumen. Produksi susu nasional selama periode tahun 200 – 2005 hanya mencapai rata-rata 485.717 ton/tahun, sedangkan permintaan konsumen susu pada periode tersebut sudah mencapai rata-rata 1.921.383 ton/tahun (DITJEN PETERNAKAN, 2006).

Kondisi demikian perlu dilakukan upaya dalam peningkatan produksi susu nasional, untuk mengantisipasi kesenjangan antara produksi susu nasional dengan permintaan konsumen pada tahun kedepan. Hal tersebut merupakan peluang yang terbuka luas bagi pengembangan peternakan sapi perah yang mengarah pada usaha agribisnis sapi perah. Usaha dengan konsep agribisnis berprinsip dasar merubah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*), dimana harus ditangani dari sektor hulu sampai hilir, dan yang diutamakan adalah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat (SARAGIH, 2001). Fungsi-fungsi agribisnis terdiri atas kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, kegiatan produksi primer (budidaya), pengolahan (agro-industri), dan pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut kemudian disusun menjadi suatu sistem, dimana fungsi-fungsi diatas menjadi subsistem dari sistem agribisnis (SA' ID, E.G. dan A.H. INTAN, 2001). Lebih lanjut ditegaskan bahwa saat ini usaha peternakan sudah harus memasuki dalam industri pertanian yang berbasis peternakan. Pembangunan tersebut harus tetap diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani peternak, mendorong diversifikasi pangan, perbaikan mutu gizi masyarakat, dan mengembangkan ekspor (PAMBUDI, *et. all.*, 2001). Untuk mengetahui prospek pengembangan sapi perah di luar P. Jawa perlu dilakukan kajian analisis profil usaha di peternakan rakyat yang telah direkomendasikan di lokasi pengembangan, dalam mendukung swasembada susu nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, yang merupakan wilayah dataran sedang (300-700 m dpl). Penelitian dilakukan melalui 2 kegiatan yakni *Participatory Rural Appraisal* (PRA), dan survei terstruktur terhadap 30 peternak sapi perah. Untuk mengetahui tingkat produksi susu dan harga susu yang berlaku di lokasi diperhitungkan dari produksi dan harga "Dangke" yang dihasilkan peternak.

Analisis yang dilakukan adalah analisis agro-ekosistem (CONWAY, 1985 ; GIBBS, 1985). Didalam analisis usahaternak tersebut dilakukan berdasarkan 2 katagori analisis yakni *Net Cash Benefit* (NCB) yakni diperhitungkan berdasarkan pengaluan dan penerimaan yang sifatnya tunai (Cash), dan *Cost and Return Analysis* (CRA) yakni memasukkan semua komponen yang diperhitungkan dalam usahatani termasuk curahan tenaga kerja (alokasi tenaga kerja). Perhitungan alokasi tenaga kerja diperhitungkan berdasarkan curahan harian (jam) yang dikonversikan dalam tahunan, dan dikalikan dengan upah buruh tani di lokasi pengamatan (Rp.15.000,-/hari/5 jam kerja) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$CH \times 365$$

$$\text{Nilai Tenaga Kerja/th} = \text{-----} \times \text{UBT}$$

5

Dimana : CH = Curahan tenaga kerja selama sehari dalam usahaternak (jam)

365 = Konversi tahunan (365 hari kerja)

5 = Curahan alokasi tenaga kerja 5 jam/Hari orang kerja (HOK)

UBT = Upah Buruh Tani (Rp.15.000,-/HOK, sesuai upah di lokasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

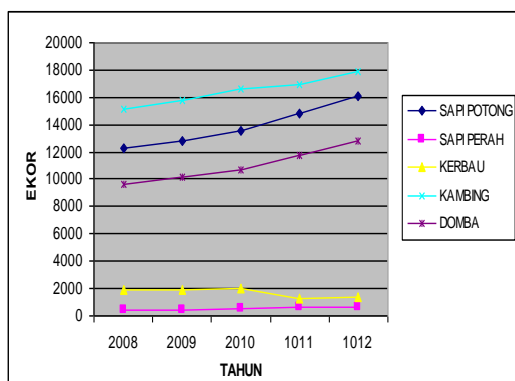
Perkembangan dan Distribusi Populasi Sapi Perah di Indonesia.

Perkembangan populasi ternak ruminansia yang cenderung memiliki kepentingan dalam membutuhkan pakan hijauan sebagai pakan sumber serat kasar. Populasi sapi perah menduduki populasi paling rendah dibandingkan populasi ternak ruminansia secara umum. Populasi sapi perah di Indonesia hanya mencapai 622.000 ekor, (DITJENNAK dan KESWAN, 2012). Dilihat dari trend peningkatan populasi selama 5 tahun terakhir (2008-2012), terlihat bahwa trend peningkatan populasi tertinggi terjadi pada ternak sapi perah yang mencapai 8,95 persen/tahun. Ternak kerbau justru mengalami trend penurunan populasi cukup tajam (-10,00 persen/tahun) (Gambar 1).

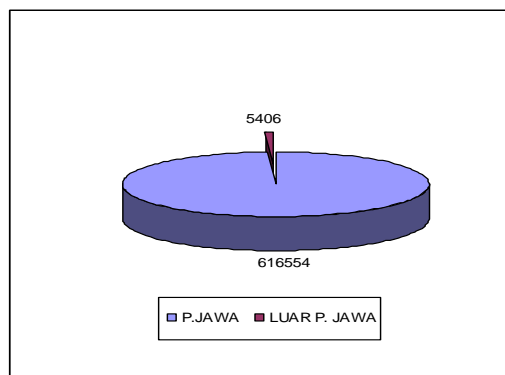
Tabel 1. Perkembangan populasi ternak ruminansia di Indonesia.

Jenis Ternak	2008	3009	2010	2011	2012	Trend/th
S. POTONG	12.257	11.760	13.582	14.824	16.034	7,70
S. PERAH	458	475	488	597	622	8,95
KERBAU	1.931	1.933	2.000	1.305	1.378	-10,00
KAMBING	15.147	15.815	16.620	16.946	17.862	4.48
DOMBA	9.605	10.199	10.725	11.791	12.768	8.23

Distribusi penyebaran populasi sapi perah di Indonesia, masih terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa yakni mencapai total populasi sebesar 616.554 ekor (97,92 persen), dan di luar Pulau Jawa hanya sebesar 5,406 (2,08 persen) (Gambar 2). Hal demikian patut menjadikan pertimbangan dalam rekomendasi kebijakan pengembangan usahaternak sapi perah di luar Pulau Jawa mendukung kebutuhan susu nasional tanpa ketergantungan akan impor. Pengembangan usaha sapi perah di luar Pulau Jawa dipandang tepat karena faktor sumberdaya lahan yang sangat mendukung. Kondisi tersebut tidak mudah dicapai tanpa adanya analisis potensi wilayah pengembangan yang meliputi analisis agro-ekosistem wilayah, yang mengarah pada rekomendasi kebijakan baik dari aspek hulu (produksi) sampai dengan aspek hilir (pasar) dan bahkan pada konsumen akhir.



Gambar 1. Trend peningkatan populasi ternak ruminansia di Indonesia.



Gambar 2. Distribusi populasi sapi perah di Indonesia.

Pengembangan peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa direkomendasikan di beberapa wilayah (SETIAWATI, 2008), yakni di 9 provinsi yang terdistribusi di 13 wilayah Kabupaten (Tabel 2) walaupun tingkat populasi masih rendah. Hal demikian perlu dibahas tentang perkembangan dan keberlanjutan program tersebut dengan mempelajari permasalahan dan analisis ekonomi dan kelembagaan yang telah terbentuk sebelumnya. Diharapkan studi tersebut mampu memperbaiki kinerja pengembangan peternakan

sapi perah khususnya di Luar Pulau Jawa yang telah dikembangkan oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 2. Wilayah pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa.

Provinsi	Kabupaten
1. Sumetra Utara	Karo
2. Sumatera Barat	Padang Panjang
	Tanah datar
3. Riau	Kampar
4. Bengkulu	Rejang Lebong
	Kepahyang
5. Lampung	Metro
	Tanggamus
6. Kalimantan Selatan	Banjaeburu
7. Sulawesi Selatan	Enrekang
	Sinjai
8. Bali	Karang Asem
9. Gorontalo	Bone Bolango

Prospek Pengembangan Sapi Perah di Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan agro-ekosistem dataran sedang. Kabupaten Enrekang adalah merupakan wilayah tertinggi tingkat populasi sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan (Tabel 3). Di Provinsi Sulawesi Selatan populasi sapi perah mampu berkembang bagus adalah di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Enrekang dan Sinjai, sedangkan di 2 kabupaten lainnya tidak mampu berkembang, dimana di Makassar malah populasi cenderung menghilang, dan di kabupaten Lutrapun demikian. Secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan populasi sapi perah cenderung meningkat (pada periode 2003 – 2008), dengan trend populasi tertinggi pada periode tahun 2005 – 2006 yang mencapai 84,5 persen dan 2006 – 2007 32,7 persen. Hal tersebut karena adanya program pengembangan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam program pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa.

Tabel 3. Populasi sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan dan perkembangannya.

Kabupaten/kota	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	ekor					
Sinjai	73	117	139	328	501	397
Enrekang	500	587	620	1.056	1.342	1.518
Makassar	29	29	15	14	-	-
Lutra	-	-	-	-	12	2
Total	602	662	735	1.398	1.855	1.917
Tren pnkt (%)		21,0	5,6	84,5	32,7	3,3

Sumber : DINAS PETERNAKAN SULAWESI SELATAN, 2011.

Populasi sapi perah di Kabupaten Enrekang terdapat di wilayah Kecamatan Cendana 519 ekor, Alla 102 ekor dan wilayah lainnya (ENREKANG DALAM ANGKA, 2012). Di lokasi terdapat produk susu baik dari susu kerbau awalnya maupun susu sapi yakni berupa produk "Dangke". Dangke adalah produk olahan susu yang dibuat menyerupai tahu susu yang khusus dibuat di Kabupaten Enrekang yang bagus untuk konsumsi. Produk dangke di Kabupaten Enrekang sekarang sekitar 3.000 biji setiap hari. Produk dangke tersebut dinyatakan baru dapat memenuhi sekitar 20 persen dari kebutuhan lokal masyarakat di

Bumi Massenrempulu (Istilah Kabupaten Enrekang). Bahkan bisa dijadikan sebagai *brand* daerah Enrekang sebagai Kabupaten Dangke dengan alasan antara lain, dangke sebagai *food cultur* (makanan tradisional) yang bergizi tinggi, produk lokal bernilai ekonomi yang hanya terdapat di Kabupaten Enrekang. Pengembangan produk dangke akan memberikan penambahan nilai ekonomi yang cukup tinggi di tengah masyarakat lantaran merupakan salah satu produk agribisnis (diolah peternak). Dari usaha peternakan sapi, menghasilkan susu, susu dijadikan dangke serta turunan produk lainnya berupa pembuatan krupuk dangke yang kini mulai dicobakan di Kabupaten Enrekang.

Di masa-masa lalu, Dangke Enrekang lebih banyak dibuat dari susu kerbau. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian lebih banyak dipilih bahan baku dari susu sapi yang kandungan lemaknya 2,6 – 2,8 persen. Dangke susu sapi lebih gurih dibandingkan menggunakan susu kerbau yang kandungan lemaknya mencapai 3,2 persen. Saat ini di seluruh Kabupaten Enrekang terdapat sekitar 300 pengrajin dangke. Keberadaan sapi perah didapatkan dari program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Pihak perbankan telah mengucurkan bantuan permodalan usaha kepada 14 kelompok tani peternak dan pengrajin dangke di Kabupaten Enrekang. KKPE diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang dinilai potensial di pedesaan dengan bunga 6 persen per tahun, dan nilai pemberian kredit bisa mencapai maksimal Rp 100 juta. Persyaratan pemberian KKPE hampir sama dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bedanya, bunga KUR 14 persen setahun dengan plafon kredit maksimum Rp 20 juta. KUR diberikan tanpa agunan, sedangkan KKPE selain hanya diberikan terhadap usaha yang sedang berjalan (bukan usaha yang baru dimulai) dan juga harus ada agunan, lantaran dipertanggung jawabkan oleh masing-masing individu dalam kelompok. Saat ini sudah ada dana permodalan usaha sekitar Rp 3 miliar melalui KKPE yang disalurkan kepada kelompok-kelompok tani peternak dan pengrajin dangke yang direkomendasi pihak Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Enrekang.

Analisis Agro-Ekosistem Lokasi Penelitian.

Desa Pinang adalah merupakan salah satu di wilayah kecamatan Cendana, kabupaten Enrekang, yang terletak dalam wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK) Kecamatan Cendana dengan luas wilayah 14, 51 km². Lokasi wilayah merupakan wilayah dataran sedang (300 – 700 m dari permukaan laut), dengan kemiringan lahan 3° – 6°, dan rata-rata curah hujan sekitar 50 – 500 mm/tahun. Untuk akses masuk ke Desa Pinang dibatasi oleh sungai besar (Sungai Sadang) yang dihubungkan dengan jembatan gantung dan tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda empat. Berdasarkan analisis pola ruang, Desa Pinang terletak pada ketinggian antara 400 – 700 m dari permukaan laut (Gambar 3). Berdasarkan potongan melintang arah Barat ke Timur menunjukkan bahwa semakin ke arah Timur lokasi semakin tinggi yang untuk mencapai lokasi paling Timur wilayah harus melewati jembatan gantung (2 buah memotong sungai Sadang). Berdasarkan penggunaan lahan terlihat bahwa terdapat areal sawah di areal paling rendah setelah lokasi penyeberangan sungai. Ada kecenderungan bahwa pemanfaatan sebagai kebun tanaman pangan dan kebun hijauan terletak hampir di seluruh wilayah desa, sedangkan keberadaan usahaternak sapi perah terletak di areal pemukiman yang merupakan areal datar (disekitar rumah penduduk). Komoditas yang ditanam di kebun adalah jagung, kakao, dan buah-buahan (pisang, dan mangga). Di areal dataran tinggi umumnya didominasi oleh hutan jati maupun tanaman liar (semak belukar). Permasalahan yang masih terjadi adalah, pada kondisi pertanaman masih belum intensif sehingga produktivitas masih rendah, sedangkan untuk usaha sapi perah permasalahan pakan konsentrat masih sulit diperoleh, sehingga pakan konsentrat hanya berupa dedak padi (didatangkan dari luar) wilayah, dan diberikan tambahan `air sisa pengolahan produk dangke.



Gambar 3. Peta Desa Pinang dan transek biofisik yang merupakan potensi pengembangan sapi perah di Kabupaten Enrekang.

Profil “Success Story” Usahaternak Sapi Perah di Lokasi Pengamatan.

Aset Penguasaan Lahan dan Skala Usaha Dalam Mendukung Usahaternak Sapi Perah.

Sumberdaya lahan merupakan aset penting dalam mendukung sistem produksi usahatani oleh masyarakat di pedesaan. Penguasaan lahan responden di Desa Pinang cukup luas yakni mencapai total luasan 9.952 m²/peternak. Pemilikan lahan berupa rumah, pekarangan, dan bahkan kebun rumput dimiliki oleh 100 persen peternak responden. Pemilikan lahan sawah hanya dimiliki oleh sebagian kecil peternak (24 persen peternak), dimana sawah tersebut hanya terdapat di bagian barat lokasi dengan pola tanam hanya satu kali setahun. Terlihat bahwa aset kebun rumput sudah dikembangkan rumput unggul dan sudah 100 persen dimiliki peternak dengan rata-rata luasan mencapai 9.051 m² (sekitar 1 ha), yang dipersiapkan sebagai sumber bahan pakan (Tabel 4). Kebun rumput tersebut pada umumnya dikembangkan di sekitar rumah tetapi ada pula yang dikembangkan jauh dari rumah tinggal peternak.

Tabel 4. Aset Pemilikan lahan sebagai pendukung usahatani.

Penggunaan	Luas (m2)	Persen pemilik
Rumah	156	100
Pekarangan	145	100
Sawah	600	24
Kebun rumput	9.051	100
Total	9.952	100

Ditinjau dari skala usaha sapi perah terlihat cukup tinggi yakni mencapai rata-rata 8,85 ekor sapi/peternak. Dibedakan atas skala fisiologis terlihat bahwa skala pemilikan induk relatif banyak yakni mencapai 4,62 ekor, yang hal tersebut merupakan aset utama dalam usaha sapi perah. Ternak jantan dewasa relatif tidak

dimiliki oleh (Tabel 5). Demikian pula ternak jantan muda juga jarang dipelihara dan cenderung dijual, tetapi untuk anak betina cenderung dipertahankan peternak yang dipersiapkan sebagai pengganti induk (*replacement*). Ditinjau dari skala pemilihan yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa pola usaha sapi perah tersebut sudah merupakan pola usaha yang dipersiapkan sebagai sumber pendapatan utama tumpuan ekonomi masyarakat di lokasi. Tingginya skala usaha tersebut juga karena faktor ekonomi yakni sebagai produk dangek yang merupakan makanan unggulan di Enrekang.

Tabel 5. Rataan skala pemilihan sapi perah yang dikuasai peternak.

Status fisiologis	Rataan (ekor)	Persen pemilik
Dewasa Jantan	0,47	3,44
Betina	4,62	100
Muda Jantan	0,62	27,58
Betina	0,86	47,82
Anak Jantan	1,34	58,62
Betina	1,24	62,06
Total	8,85	100

Rekapitulasi Penjualan Sapi Perah di Lokasi Sebagai Sumber Pendapatan Sambilan.

Pencatatan rekording penjualan ternak dilakukan 2 tahun untuk menghindari bias data yang dihasilkan karena ternak sapi perah memiliki masa reproduksi yang relatif panjang. Penjualan ternak yang dilakukan peternak adalah merupakan sumber ekonomi keluarga disamping dari penjualan susu sapi yang dihasilkan. Penjualan yang dilakukan adalah merupakan hasil samping dari kelahiran induk-induk yang dipelihara disamping sapi afkir. Semakin banyak induk yang dipelihara, semakin banyak pula ternak anakan yang dapat dijual sebagai pendukung ekonomi rumah tangga. Dari hasil rekording penjualan ternak selama 2 tahun terakhir terlihat bahwa penjualan sapi muda jantan adalah tertinggi yang disusul anak jantan (25 ekor dan 16 ekor), yang hal tersebut menunjukkan bahwa ternak jantan yang dilahirkan cenderung dijual. Sebaliknya penjualan sapi betina relatif rendah (14 dan 9 ekor) pada sapi anak dan muda, sedangkan sapi betina dewasa yang dijual adalah sapi afkir atau yang dinyatakan tidak mampu bereproduksi (majir) (Tabel 6). Rataan penjualan ternak selama 2 tahun mencapai 2,93 ekor/peternak, yang hal tersebut cukup tinggi.

Tabel 6. Penjualan ternak sapi perah yang dilakukan peternak (rekording 2 Tahun terakhir).

Status fisiologis	Total dijual	Rat (ekor)	Rataan Harga (Rp)	Pelaku penjualan (Orang)	Harga Jual (Rp)	Rataan Peternak/th
Dewasa Jantan	9	0,31	2.465.517	5	7.944.444	1.232.758
Betina	12	0,41	3.593.103	10	8.683.333	1.796.551
Muda Jantan	25	0,82	3.886.206	9	4.508.000	1943.103
Betina	9	0,31	1.017.241	4	3.277.777	508.621
Anak Jantan	16	0,55	2.610.344	6	4.731.250	1.305.172
Betina	14	0,48	2.051.724	7	4.250.000	1.025.862
Total	85	2,93	15.624.135	-	-	7.812.067

Tingkat Produksi Susu Yang Dipelihara Peternak.

Produksi susu di lokasi tidak dapat diperhitungkan langsung, karena produksi susu tersebut tidak dilakukan pengukuran seperti layaknya di lokasi Pulau Jawa yang langsung disetor ke KUD, yang tercatat

langsung dalam penjualan susu oleh KUD. Di lokasi semua susu sapi yang dihasilkan langsung diolah menjadi produk "Dangke" yang dilakukan oleh peternak masing-masing, dan baru dilakukan penjualan berupa produk dangke. Harga dangke yang dijual oleh peternak bervariasi dari yang harga tertinggi Rp.15.000,-/buah sampai terendah Rp.12.000,- yang tergantung pada besar kecilnya dangke yang dicetak (pada tempurung kelapa) (Gambar 4). Hasil informasi bahwa untuk dangke yang harganya Rp.15.000,- diperlukan susu segar sebanyak 1,5 lt, demikian susu segar yang dibutuhkan semakin kecil dengan menurunnya harga dangke. Maka dari itu produksi susu sapi perah dan harga susu/lt diperhitungkan dari total nilai jual dangke yang dipasarkan peternak.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 106 ekor sapi yang dilakukan rekording dan hasil produksi dangke (597 buah), dengan rata-rata harga/buah mencapai Rp.12.586,-/buah, maka dapat diperhitungkan produksi susu mencapai 7,03 liter/ekor/hari, dan harga susu sebesar Rp.10.072,-/liter (dirinci dari nilai penjualan dangke) (Tabel 7). Tingginya harga susu tersebut karena produk susu telah diolah menjadi produk dangke yang memiliki harga jual yang relatif tinggi. Hal tersebut berimplikasi bahwa nilai harga susu di peternak sangat tinggi yang hal tersebut karena harga susu dikendalikan oleh peternak sendiri menjadi produk bernilai jual tinggi. Nilai jual susu yang tinggi tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap tingginya keuntungan usahaternak. Di pulau Jawa harga susu di tingkat peternak hanya mencapai Rp.3.000,- - Rp.3.500,-/liter, walaupun tingkat produksi susu di lokasi masih dinyatakan rendah.



Gambar 4. Pengolahan dangke dari hasil susu sapi, dan cetakan (batok kelapa) di Lokasi pengamatan Desa Pinang.

Tabel 7. Perhitungan rata-rata produksi susu/ekor/hari (konversi dari produk dan harga dangke)

Peubah	Perhitungan	Total nilai Jual (Rp)	Rataan harga /Buah
Total sapi diperah (ekor)	106	-	-
Total prod Dangke	597	7.513.824	12.586
Prod susu (lt)	746 (597x1,25, 1 dangke 1,25 lt)	-	-
Rataan Prod susu/ekor (Lt)	7.03 (746/106)	-	-
Harga susu (Rp)	10.072 (7.513.824/746)	-	-

Analisis Usahaternak Sapi Perah Sebagai Produk Olahan "Dangke".

Hasil perhitungan analisis ekonomi usahaternak sapi perah di desa Pinang menunjukkan bahwa penerimaan usahaternak yang sangat tinggi, yang hal tersebut karena dinilai berdasarkan hasil penjualan dangke yang dikelola peternak sendiri. Nilai jual dangke tersebut dikonversi dengan harga susu mencapai

Rp.10.072,-/liter, yang hal tersebut sangat memberikan keuntungan usaha, yang mencapai penerimaan usaha sapi perah sebesar Rp.86.686.873,-/peternak/tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk operasional pakan cukup tinggi (Rp. 22.633.475,-/peternak/tahun), walaupun secara umum peternak hanya memberikan pakan konsentrat berupa dedak padi saja. Dedak padi yang diberikan masih berasal dari luar daerah yakni dari Kabupaten Pinrang atau Kabupaten Sidrap, yang didatangkan secara rutin. Harga dedak di lokasi peternak sebesar Rp.2.000,- - Rp.2.500,-/kg. Kondisi kandang yang dibangun oleh peternak adalah kandang terbuka sehingga biaya pembuatan kandang tidak terlalu mahal, dengan penyusutan kandang rata-rata mencapai 637.500,-/peternak/tahun. Biaya tenaga kerja di lokasi masih cukup yakni mencapai Rp.8.485.999,-/peternak/tahun, yang hal tersebut termasuk tenaga kerja dalam proses pembuatan dangke (Tabel 8).

Tabel 8. Analisis usahaternak sapi perah di Desa Pinang, Kabupaten Enrekang.

Peubah	(Rp/peternak/th)	Keterangan
1. Usahaternak sapi perah		
Penjualan susu	79.000.795	Survei produksi dan harga dangke berlaku Penjualan sapi 2 tahun terakhir
Penjualan sapi	7.686.068	
Sub total	86.686.873	
2. Biaya dikeluarkan		
Penyusutan kandang	637.500	Biaya pembelian konsentrat ()
Pakan konsentrat	22.633.475	
Tenaga kerja mengambil rumput	2.336.000	Diperhitungkan Hari Orang Kerja (HOK) x Upah buruh tani (Rp15.000,-/HOK)
Merawat sapi (pagi)	3.869.999	
Merawat sapi (sore)	2.280.000	
Sub total tenaga kerja	8.485.999	
Sub total Biaya	31.756.974	Jumlah biaya curahan kerja
Analisis NCB/tahun	63.415.898	<i>Net Cash benefit</i> (biaya tunai)
/bulan	5.284.658	
Analisis CRA/tahun	54.929.899	<i>Cost and Return Analysis</i> (tenaga kerja diperhitungkan)
/bulan	4.577.491	

Pendapatan tunai yang diterima peternak sapi perah di Desa Pinang mencapai rata-rata Rp.63.415.898,-/tahun, yang setara dengan Rp.5.284.658,-/peternak/bulan, dimana alokasi tenaga kerja tidak diperhitungkan. Dalam proses usahaternak kenyataan bahwa tenaga kerja yang dicurahkan tersebut umumnya masih bertumpu pada tenaga kerja keluarga. Selanjutnya apabila tenaga kerja diperhitungkan berdasarkan alokasi curahan dalam proses manajemen sapi perah meliputi perawatan sapi, mengambil rumput, dan proses pembuatan dangke, akan diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 54.929.899,-/tahun atau setara dengan Rp.4.577.491,-/peternak/bulan. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pendapatan yang cukup tinggi, yang salah satunya sebagai dampak industri rumah tangga pembuatan dangke, disamping faktor skala usaha yang relatif memenuhi skala ekonomi (skala usaha tinggi).

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang "success story" pengembangan sapi perah rakyat di Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis potensi daya dukung pakan dalam mendukung usahaternak sapi perah cukup potensial dalam pengembangan populasi di lokasi, karena lahan yang tersedia masih sangat luas sebagai peningkatan daya dukung pakan.
2. Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan usahaternak sapi perah di lokasi sangat menjanjikan, yang ditunjukkan keuntungan usaha yang cukup tinggi. Hal tersebut karena produk susu langsung diolah menjadi "Dangke" oleh peternak sendiri yang memiliki nilai jual yang tinggi (produk pangan lokal), yang permintaannya tinggi.
3. Penanganan pasca panen dalam hal ini sangat dominan dalam memberikan kontribusi pendapatan usaha, yang mempengaruhi nilai jual susu yang tinggi (Rp. 10.072,-/liter), walaupun produksi susu per ekor masih rendah (7,03 lt/hari). Hal tersebut Karena pakan konsentrat yang diberikan hanya berupa dedak padi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, P. And Knipscheer. 1989. Conducting On-Farm Animal Research Procedure An Economic Analysis. Winrock International Institute For Agricultural Development And International Development Research Centre. Morrilton, Arkansas, Usa.
- Anonymous, 2008. Masih Mengandalkan Susu Impor. Majalah Tani Merdeka.
[Http://Www.Tanimerdeka.Com/Modules.Php?Name=News&File=Article&Sid=184](http://Www.Tanimerdeka.Com/Modules.Php?Name=News&File=Article&Sid=184)
- Conway, G.R., 1985. Agro-Ecosystem, Analysis For Research And Development. Winrock International. Bangkok, Thailand.
- Dinas Peternakan Sulawesi Selatan, 2011. Laporan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011. Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Enrekang, 2011. Laporan Dinas Peternakan Tahun 2011. Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Enrekiang.
- Ditjen Peternakan, 1996. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Agribisnis Persusuan Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- Ditjennak Dan Keswan (A). 2012. Program Pengembangan Sapi Perah Dalam Kesiapan Penyediaan Susu. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Susu Nusantara. Yogyakarta, 1 Juni 2012.
- Ditjennak Dan Keswan (B). 2012. Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah Diluar Pulau Jawa. Disampaikan Pada Semiloka "Pembangunan Gizi Bangsa Melalui Gerakan Percepatan Produksi Susu Nasional. Gedung D, Kementerian Pertanian. Jakarta, 27 Juni 2012.
- Enrekang Dalam Angka, 2011. Statistik Kabupaten Enrekang. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.
- Gibbs, C. 1985. Rapid Rural Appraisal : An Overview Of Concepts An Application. Paper Presented In The International Conference On Rapid Rural Appraisal, September 2-5, 1985. Khon Kaen, Thailand.
- Pambudi, R., T. Sipayung, W.B. Priatna, Burhanuddin, A. Kriswantriyono, Dan A. Satria., 2001. Kumpulan Pemikiran. Biasni Dan Kewirausahaan Dalam Sistem Agribisnis. Pastaka Wirausaha Muda, Bogor. Cetakan Ketiga (Edisi Revisi).

- Sa' Id, E.G. Dan A.H. Intan, 2001. Manajemen Agribisnis. Pt. Ghalia Indonesia Dengan Mma – Ipb. Jakarta.
- Saragih, B. 2001. Kumpulan Pemikiran. Agribisnis. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Yayasan Mulia Persada Indonesia Dan Pt. Suveyor Indonesia Bekerjasama Dengan Pusat Studi Pembangunan Ipb Dan Unit For Sosial And Economic Studies And Evaluation (Usese) Foundation. Jakarta.
- Setiawati, T., 2008. Revitalisasi Agribisnis Sapi Perah Yang Berdaya Saing Dan Ramah Lingkungan. Prosiding : Prospek Industri Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Bekerjasama Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Indonesia Stektpi. Jakarta.

PENENTUAN HARGA JUAL KERBAU BELANG BERDASARKAN KARAKTERISTIKNYA DI PASAR HEWAN BOLU KABUPATEN TORAJA UTARA

Ikrar Mohammad Saleh dan Aslina Asnawi
Staf Pengajar Bagian Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan UNHAS
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kerbau Belang yang menentukan harga jual di Pasar Hewan Bolu Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan terhitung mulai dari bulan Mei sampai Juni 2013 di Pasar Hewan Bolu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan metode Deplhi. Jenis data adalah kualitatif dan kuantitatif. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan harga jual kerbau belang di Pasar Hewan Bolu berdasarkan karakteristik motif belang, warna mata, kondisi (model dan warna) tanduk, kondisi ekor, dan letak pusaran bulu.

Kata kunci: penentuan harga jual, karakteristik, kerbau belang.

ABSTRACT

This study aims to investigate the characteristics of Tedong Bonga that determine its prices in the Market Animal Bolu North Toraja Regency. The research was conducted for approximately one month starting from the month of May to June 2013 in the Market Animal Bolu, District Tallunglipu, North Toraja Regency. Type of research was descriptive quantitative with Deplhi methods. This type of data was qualitative and quantitative. Sources of data are primary and secondary data. The results indicate that the selling price in the Market Animal striped buffalo Bolu based motifs characteristic stripes, eyes color, condition (model and color) horns, tail shape, and location of the navel.

Keywords: characteristics, determination, price, striped buffalo

PENDAHULUAN

Prospek pengembangan kerbau sangat baik disebabkan karena peran kerbau tidak hanya digunakan untuk membajak sawah, tenaga kerja dan penghasil daging namun kerbau memiliki nilai sosial-budaya di beberapa daerah seperti Batak, Tana Toraja dan beberapa suku di Indonesia (Bo'do, 2008). Khusus di kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara (pemekaran kabupaten Tana Toraja), populasi ternak kerbau cukup besar yaitu sebesar 48.557 ekor atau 40% dari jumlah populasi kerbau di Provinsi Sulawesi Selatan (Statistik Peternakan, Dinas Peternakan Sulawesi Selatan, 2011). Semakin besar jumlah kerbau yang disembelih pada saat pesta adat menunjukkan status sosial seseorang semakin tinggi. Disisi lain besarnya permintaan akan kerbau ini tidak diikuti oleh ketersediaan kerbau sehingga perlu didatangkan dari daerah lain.

Jenis ternak kerbau yang digunakan dalam pesta adat di kabupaten Toraja Utara bukanlah kerbau biasa akan tetapi kerbau yang memiliki karakteristik yang unik dan tidak dijumpai di daerah lainnya. Salah satu kerbau yang digunakan adalah kerbau Belang. Disebut sebagai kerbau Belang karena disekujur tubuhnya terlihat seperti Belang hitam putih. Harga kerbau Belang ini sangat mahal bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Permintaan ternak kerbau biasanya sangat meningkat pada saat upacara pesta adat kematian (Rambu Solo') dan prosesi syukuran (Rambu Tuka"). Jumlah pematangan kerbau untuk keperluan ritual upacara adat kurang lebih 13.000 ekor per tahunnya (Sirajuddin, dkk, 2012) dan Rombe (2010).

Dewasa ini permintaan kerbau di kabupaten Toraja Utara menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar orang Toraja yang merantau dan sukses dari sisi finansial ketika meninggal dunia maka jenazahnya akan dibawa pulang ke Tana Toraja untuk dimakamkan di tanah asal leluhurnya. Seiring dengan hal tersebut maka terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kerbau yang disembelih pada acara ritual pemakamannya. Pada masa lalu, bagi seorang bangsawan jumlah kerbau

yang dibutuhkan cukup dengan dua ekor kerbau sebagai standar persyaratan tertentu (Sapu Randanan) maka sekarang ini jumlahnya tergantung pada kemampuan finansialnya yaitu bisa sampai ratusan ekor sebagai bentuk penghormatan kepada kerabatnya yang meninggal (Rombe, 2010; Saleh, dkk, 2013).

Pasar Hewan Bolu yang terletak di kabupaten Toraja Utara merupakan tempat dimana kerbau Belang ini diperjualbelikan. Pasar hewan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan dikenal juga sebagai Pasar Rantepao. Kegiatan pemasaran ternak kerbau di pasar tersebut berlangsung selama lima kali dalam sebulan. Selain kerbau hitam dan kerbau Belang, di pasar ini juga banyak dipasarkan ternak babi. Khusus untuk kerbau Belang, ada yang berasal dari daerah Tana Toraja namun ada pula yang didatangkan dari luar daerah.

Penentuan harga jual kerbau Belang di daerah ini tidak hanya ditentukan oleh bobot badan dan umur kerbaunya namun sangat tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh kerbau Belang tersebut. Selain motif belangnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat Tana Toraja bahwa penilaian harga terhadap kerbau ini ditentukan oleh karakteristik yang ada diseluruh tubuh kerbau tersebut. Hal inilah yang mendasari mengapa penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Toraja Utara yaitu di Pasar Hewan Bolu Kecamatan Tallunglipu pada bulan Mei-Juni 2013. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan pasar tempat transaksi penjualan hewan terbesar di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang salah satu komoditinya adalah kerbau. Selain itu pertimbangannya adalah Tana Toraja merupakan tujuan wisata dengan salah satu budaya yang menarik turis domestik dan manca negara adalah upacara pesta adat kematian (Rambu Solo') yang menggunakan cukup banyak kerbau Belang. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah pedagang yang berada di pasar Hewan Bolu sebanyak 150 orang dengan jumlah sampelnya adalah 20% dari populasi yaitu 30 orang. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan metode Delphi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk melihat penilaian responden terhadap karakteristik yang dianggap menentukan harga jual kerbau Belang di pasar Hewan Bolu di kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode delphi. Pada tahap pertama, responden diberi kebebasan untuk menuliskan karakteristik yang dianggap mendominasi penilaiannya terhadap penentuan harga jual. Tahap berikutnya, kuesioner diberikan kembali kepada responden untuk memilih jawaban yang telah disiapkan dan dikelompokkan berdasarkan jawaban yang telah ada pada kuesioner pertama. Pada tahap ini responden menentukan karakteristik yang sangat mendominasi (SM) diberi skor 5, mendominasi (M) diberi skor 4, cukup mendominasi (CM) diberi skor 3, kurang mendominasi (KM) diberi nilai 2 dan tidak mendominasi (TM) diberi nilai 1. Setelah diperoleh jawaban pada tahap kedua maka selanjutnya tahap ketiga akan diberikan lagi kuesioner dengan pilihan karakteristik yang sudah dikurangi berdasarkan kebutuhan, selanjutnya akan diberi skor yang sama dengan tahap kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian karakteristik kerbau Belang yang mendominasi dalam penentuan harga jual diperoleh berdasarkan tahapan menurut Metode Delphi. Hasil penelitian, diperoleh ada enam kategori jawaban penilaian yang berasal dari pedagang di Pasar Hewan Bolu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1. penilaian karakteristik kerbau Belang yang menentukan harga jual ada enam karakteristik yaitu motif belang, warna mata, model dan warna tanduk, kondisi ekor, pusaran bulu dan postur tubuh. Dari keenam karakteristik tersebut, motif belang (letak antara warna hitam dan putih) di kulitnya merupakan pilihan yang memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 148 sedangkan yang memiliki skor penilaian terkecil adalah postur tubuh sebesar 11. Hal ini berarti bahwa penentuan harga jual sangat ditentukan oleh kriteria motif belang.

Tabel 1. Karakteristik Kerbau Belang yang Menentukan Harga Jual di Pasar Hewan Bolu, Kabupaten Tana Toraja

No	Karakteristik	Skor Penilaian	
		Tahap II	Tahap III
1.	Motif belang (letak warna hitam dan putih pada kulitnya)	148	148
2.	Warna mata	110	114
3.	Model dan warna tanduk	66	95
4.	Kondisi ekor (warna dan panjang ekor)	38	52
5.	Pusaran bulu	37	44
6.	Postur tubuh	11	

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2013.

Postur tubuh merupakan karakteristik yang memiliki nilai paling kecil yaitu 11, sehingga pada tahapan III, responden diminta untuk memilih hanya lima karakteristik yang paling mendominasi sehingga hasilnya nampak pada Tabel 1. Pada kolom keempat. Adapun hasil penilaian menurut lima karakteristik kerbau Belang dan penilaian yang mendominasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2. maka dapat dikatakan bahwa penentuan harga jual kerbau Belang di Pasar Hewan Bolu Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh karakteristik sebagai berikut:

Motif Belang (Letak Warna Hitam dan Putih di kulitnya)

Motif belang merupakan karakteristik yang mendapatkan penilaian yang paling tinggi dalam menentukan harga jual kerbau Belang dengan total nilai sebesar 140. Jumlah responden yang menjawab sangat mendominasi sebanyak 28 orang (93,33%) dan 2 orang yang menjawab mendominasi dengan jumlah responden sebanyak 2 orang (6,66%). Hal ini menunjukkan bahwa motif belang kerbau Belang memang sangat menentukan dan mendominasi dalam penentuan harga jualnya.

Bagi masyarakat Tana Toraja, ada 8 jenis kerbau menurut motif belangnya (sura'). *Bonga saleko* dan *Bonga doti* merupakan jenis kerbau belang yang memiliki harga paling tinggi. Penilaian ini didasarkan pada kombinasi hitam dan putih yang berada pada kulitnya dengan komposisi yang hampir seimbang dan ditandai dengan taburan bintik-bintik di sekujur tubuhnya. Harga kerbau jenis ini sangat mahal karena bisa mencapai 300-350 juta rupiah per ekornya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yulius (2012) sebelumnya bahwa warna bulu pada kerbau Belang mempertimbangkan warna bulu dalam penentuan harga jual kerbau Belang di pasar Hewan Bolu.

Warna Mata

Karakteristik kedua yang menentukan harga jual kerbau Belang adalah warna matanya. Pada tahapan ketiga total nilainya adalah 114, responden yang menjawab sangat mendominasi sebanyak 1 orang (3,33%) dengan nilai 5, mendominasi 22 orang (73,33%) dengan nilai 88 dan sebanyak 7 orang (23,33%) yang menjawab cukup mendominasi dengan nilai 21. Penilaian warna mata didasarkan pada bola matanya. Kerbau Belang yang memiliki warna mata putih akan memiliki harga jual yang tinggi. Bagi masyarakat Tana Toraja, jenis kerbau Belang ini dikenal dengan sebutan mata *gara*'.

Tabel 2. Jawaban Responden Berdasarkan Penentuan Harga Jual Kerbau Belang Menurut Karakteristiknya

Jawaban Responden	Karakteristik Kerbau Belang														
	Motif Belang			Warna Mata			Model dan Warna Tanduk			Kondisi Ekor			Pusaran Bulu		
	Frekuensi (Orang)	Nilai	%	Frekuensi (Orang)	Nilai	%	Frekuensi (Orang)	Nilai	%	Frekuensi (Orang)	Nilai	%	Frekuensi (Orang)	Nilai	%
SM	28	140	93,33	1	5	3,33	1	5	3,33	0	0	0	0	0	0
M	2	8	6,66	22	88	73,33	6	24	20,00	0	0	0	0	0	0
CM	0	0	0	7	21	23,33	19	57	63,33	2	6	6,66	2	6	6,66
KM	0	0	0	0	0	0	4	8	13,33	18	36	60,00	10	20	56,66
TM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	33,33	18	18	36,66
	30	148	100	30	114	100	30	95	100	30	52	100	30	44	100

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2013.

Keterangan:

SM = Sangat Mendominasi

M = Mendominasi

CM = Cukup mendominasi

KM = Kurang mendominasi

TM = tidak mendominasi

Model dan Warna Tanduk

Model dan warna tanduk dalam penilaian responden memiliki total nilai 94 sedangkan tingkat penilaiannya sebanyak 19 orang (63,33%) yang menjawab cukup mendominasi, mendominasi 6 orang (20,00%), 4 orang (13,33%) menjawab kurang mendominasi dan hanya 1 orang (3,33%) yang menjawab sangat mendominasi. Hal ini berarti bahwa karakteristik model dan warna tanduk cukup mendominasi dan turut dipertimbangkan dalam penentuan harga jual.

Bagi masyarakat Tana Toraja, harga kerbau Belang ditentukan oleh bentuk tanduk yang proporsional dengan postur tubuhnya dan berwarna putih ke kuning-kuningan. Jenis kerbau Belang ini akan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerbau dengan tanduk yang berwarna hitam. Hal ini sesuai dengan penelitian Susanti (2000) bahwa kerbau yang memiliki model tanduk yang seimbang dengan kepala akan memiliki harga yang tinggi.

Kondisi Ekor (Warna dan Panjang Ekor)

Karakteristik lainnya yang dipertimbangkan dalam penentuan harga jual kerbau Belang adalah kondisi ekornya, adapun yang dinilai adalah warna dan panjang ekornya. Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa untuk karakteristik ini nilai totalnya hanya 51 dengan komposisi jawaban yang menganggap karakteristik ini kurang dominan adalah yang paling banyak yaitu 18 orang (60,00%), disusul oleh jawaban tidak mendominasi sebanyak 10 orang (33,33%) dan jawaban cukup mendominasi hanya 2 orang (6,66%).

Penilaian terhadap ekor kerbau Belang dilihat dari panjang ekornya yaitu jika melewati lutut maka harganya akan lebih mahal. Selain itu bulu ekornya harus bersih dan berwarna putih, terlihat gemuk, dan pada bagian ujung ekornya terdapat banyak bulu. Hal ini mengkonfirmasi penelitian Rombe (2010) bahwa di lingkungan masyarakat Tana Toraja, kondisi ekor kerbau yang memiliki ekor yang panjang, bersih, gemuk, dan bagian ujung ekornya terdapat banyak bulu akan memiliki nilai sosial-ekonomi yang tinggi.

Pusaran Bulu

Karakteristik kelima yang menentukan harga jual seekor kerbau Belang adalah pusaran bulunya. Meskipun hal tersebut dianggap menentukan namun berdasarkan Tabel 2. karakteristik ini hanya memperoleh nilai sebesar 44. Jawaban terbanyak dari responden adalah yang menyatakan tidak mendominasi yaitu 18 orang (36,66%), disusul oleh jawaban kurang mendominasi sebanyak 10 orang (56,66%), dan jawaban cukup mendominasi sebanyak orang (6,66%).

Penilaian pusaran bulu dilihat dari letak pusaran bulu atau pusar rambutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Batosamma, 1985) bahwa pusar rambut yang normal terdapat di bagian hidung, pundak dan pinggul. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pusar rambut yang berada di bagian tengah leher sebelah atas tidak disenangi karena menurut kepercayaan orang Tana Toraja, bahwa jika pusaran bulu tersebut dipotong atau hilang maka pemiliknya akan cepat meninggal dunia. Sedangkan pusar rambut yang terletak di bagian scapula, maka apabila kerbau tersebut pergi atau hilang maka kerbau tersebut tidak akan kembali dan kerbau tersebut tidak panjang umur. Kepercayaan-kepercayaan tersebut diyakini dapat dipertimbangkan dalam pemilihan kerbau dan penentuan harganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa dalam penentuan harga jual kerbau Belang di pasar Hewan Bolu di kabupaten Tana Toraja adalah: motif belang, warna mata, model dan warna tanduk, kondisi ekor, dan pusaran bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Batosamma, T.J. 1985. Penerapan Teknologi Insmeinasi Buatan untuk Pelestarian Sumber Daya Kerbau di Tana Toraja. Disertasi. IPB, Bogor.

- Bo'do, S. 2008. Kerbau dalam Tradisi Orang Toraja. Pusat Kajian Indonesia Timur. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rombe, M.B. 2011. Nilai-nilai Sosial Ekonomi Kerbau Pemandang di Lingkungan Masyarakat Toraja. Makalah. Seminar Nasional dan Teknologi Peternakan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- Saleh, I.M., Sirajuddin, S.N., Abdullah, A., Aminawar. 2013. Pengaruh Populasi dan Tingkat Pemotongan terhadap Pengembangan Agribisnis Ternak Kerbau di Kabupaten Toraja Utara. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis Peternakan Menuju Swasembada Protein Hewani. Kerjasama Fakultas Peternakan UNSOED dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, 8 Desember 2012.
- Sirajuddin, S.N., Kasim, K., Mappigau, P., dan Rombe, M.R. 2012. Aspek Sosial Ekonomi pada Pemasaran Ternak Kerbau di Kabupaten Tana Toraja (Toraja Utara). Laporan Penelitian DPP. Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Susanti, B.E. 2000. Analisis Sikap Konsumen terhadap Ternak Kerbau Asal Daerah Lain di Pasar Hewan Rantepao Kabupaten Tana Toraja, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Yulius, A.N. 2012. Penentuan Harga Jual Kerbau Belang Berdasarkan Karakteristik di Pasar Hewan Bolu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara. Fakultas Peternakan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

ANALISIS PEMASARAN SAPI POTONG PADA KELOMPOK PETERNAK PEMBIBIT DI PROPINSI BALI

I.G.M. Budiarsana, Sumanto, dan Komarudin
Balai Penelitian Ternak Ciawi-Bogor PO Box 221 Bogor

ABSTRAK

Pemasaran merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan penyaluran barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat konsumen pada waktu yang tepat. Dengan menggunakan saluran pemasaran yang tepat diharapkan dapat memberikan hasil akhir yaitu keuntungan yang optimum. Penelitian bertujuan untuk; 1). mengetahui berbagai masalah yang dihadapi dalam pemasaran ternak sapi potong 2). berbagai pola pemasaran dan biaya pemasaran ternak sapi potong oleh kelompok peternak sapi Bali di Provinsi Bali. Penelitian dilakukan pada bulan September 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, analisis data dilakukan secara deskriptif. Responden terdiri dari para peternak sapi Bali yang tergabung kedalam suatu kelompok peternak sapi Bali, para pelaku pemasaran sapi bali. Sampel pedagang dipilih secara sengaja sebanyak masing-masing 5 orang dari berbagai pedagang dominan dan sudah berpengalaman dalam berdagang sapi minimal 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat saluran pemasaran yang melibatkan; peternak, blantik, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pemotong/jagal. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pemasaran yang melibatkan (peternak - blantik - pedagang pengumpul - pedagang besar - jagal - konsumen). Saluran pemasaran yang hanya melibatkan (peternak-konsumen) merupakan saluran yang paling efisien dengan tingkat *farmer's share* yang paling tinggi yaitu 100%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin panjang saluran pemasaran menghasilkan tingkat *Farmer's share* semakin rendah.

Kata kunci : sapi Bali, saluran pemasaran dan margin pemasaran

ABSTRACT

Marketing is the activities related to the provision of goods or services from the producer to the consumer at the right time. Marketing channels is related to best price of the product received by the producer. The aimed of this research was: 1). To study problems encountered in the beef cattle marketing system 2). To study beef cattle marketing systems in Bali as well as its cost. The study was conducted in September 2013. The method of the Research was a survey. Respondents consisted of Bali cattle breeders farmers who are in a group of cattle ranchers. 5 cattle traders who has been experinced in cattle trading for at least 5 years. The results showed that the marketing institutions involved in cattle trading were; breeder, broker, traders, wholesalers and cutters / butchers. The highest Marketing margins was in the marketing marketing system no 1. Which were (breeders - broker - middlemen - wholesalers - slaughterhouse - the consumer). The most efficient channel and the highest farmer's share was the marketing system no 3 which was 100%. The results also showed that the longer the marketing channel resulted in the lower Farmer's share.

Keyword: Bali Catle, marketing Channels and Marketing Margin.

PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah sentra produksi sapi potong (sapi Bali). Selain untuk memenuhi konsumsi lokal, produksinya sapi ini juga dipasarkan ke beberapa daerah lainnya terutama pasar Jakarta dan sekitarnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peternakan sapi di Bali merupakan usaha rakyat. Tujuan pemeliharaan yaitu memperoleh pendapatan. Dengan tujuan menghasilkan pendapatan ini maka usaha peternakan sapi ini dapat dikatagorikan sebagai usaha yang bersifat komersial. Kondisi tersebut senada dengan hasil penelitian yang pernah dilaporkan Sukanata, et. al. (2010), bahwa alasan peternak memelihara sapi adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Sumber pakan pada umumnya dengan memanfaatkan hijauan atau limbah pertanian hasil sampingan dari sawah, kebun dan atau tegalan mereka. Laporan senada juga dilaporkan oleh Patrick, et. al. (2010) yang menyatakan bahwa alasan utama peternak memelihara sapi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, perhatian dalam beternak sapi tidak cukup hanya fokus pada teknis produksi, melainkan juga harus memperhatikan aspek pemasaran. Tingginya produksi tidak akan mampu meningkatkan pendapatan peternak secara maksimal, jika tanpa diikuti dengan sistem pemasaran yang efisien. Pemasaran yang lebih efisien sangat penting diperhatikan sehingga dapat memberikan harga yang lebih tinggi bagi peternak.

Peningkatan pendapatan tersebut akan memotivasi peternak untuk memelihara sapi dalam skala yang lebih besar dan juga mendorong peternak untuk melakukan pemeliharaan dengan cara yang lebih baik sesuai petunjuk pemeliharaan ternak sapi perbibitan yang baik (*good breeding practice*), diantaranya pemberian pakan yang lebih berkualitas, penerapan sistem kawin yang lebih baik (penerapan IB). Hasil akhir dari semua harapan tersebut yaitu meningkatnya populasi dan kualitas sapi di Bali, seperti yang diinginkan oleh pemerintah.

Dari usaha penggemukkan terlihat bahwa sapi Bali cukup efisien secara teknis. Kondisi hal ini dilaporkan Sukanata, et. al. (2009) yang menyatakan bahwa usaha penggemukkan sapi potong di Bali cukup efisien yang ditunjukkan oleh kondisi usaha yang berada pada kondisi *constant return to scale*. Penggunaan faktor-faktor produksi seperti pakan dan bibit juga sudah mendekati efisien secara ekonomis yang ditunjukkan oleh nilai indeks efisiensinya yang mendekati satu. Namun demikian jika ditinjau dari keuntungannya, peternakan sapi ini belum memberikan keuntungan yang layak. Hasil analisis finansial pada usaha sapi penggemukkan yang dilakukan oleh Sukanata, et. al. (2009) menunjukkan bahwa sapi di Bali belum memberikan keuntungan yang layak bagi peternak. Salah satu penyebab perolehan tingkat keuntungan usaha peternakan ini yaitu sistem pemasaran sapi di Bali yang belum efisien. Sistem pemasaran sapi Bali ini diwarnai dengan berbagai masalah yaitu diantaranya kebijakan pemasaran yang kurang tepat, struktur pasar yang cenderung mengarah ke pasar monopsoni, rantai pasar yang panjang dan rendahnya jiwa *entrepreneurship* para peternak. Oleh karena itu maka kondisi ini harus diperbaiki.

Penelitian ini menganalisis sistem pemasaran sapi Bali di provinsi Bali dengan harapan dapat menggambarkan sistem pemasaran yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan yang ada. Harapan ke depan yaitu sistem pemasaran sapi lebih menguntungkan bagi peternak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan study kasus pola pemasaran sapi Bali di Provinsi Bali. kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey* mewawancarai para pelaku pemasaran yang terdiri dari peternak sapi selaku produsen, pedagang perantara sampai konsumen). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Jumlah responden dari kelompok produsen (peternak) yaitu sebanyak 50 orang yang tersebar di 3 kelompok peternak sapi potong. Kelompok peternak ini merupakan kelompok peternak sapi potong yang mendapat binaan dari BPTU sapi Bali Pulukan Jembrana Bali. Responden pedagang pengumpul keliling sebanyak 5 orang, pedagang pengumpul sedang 3 orang dan pedagang pengumpul besar 2 orang.

Jumlah sample ditentukan dengan metode (*Snowballs sampling*) yaitu pemilihan sample yang dimulai dari beberapa orang. Orang yang telah terpilih menjadi sample tersebut kemudian menunjukkan orang lain yang cocok sebagai sample. Selanjutnya orang yang telah menjadi sample tersebut kemudian diminta menunjukkan orang lain lagi menjadi anggota sample (Sujanto, 2000).

Daftar pertanyaan memuat pertanyaan tentang pola pemasaran yang ada di wilayah tersebut, preferensi peternak terhadap berbagai pola pemasaran sapi potong, lembaga yang terlibat dalam pemasaran sapi, jenis dan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasaran sapi. Jarak pasar yang ditempuh serta perlakuan ternak sapi yang dipasarkan, sejak sapi dijual oleh peternak (produsen) sampai konsumen, termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Data yang berkaitan dengan pola pemasaran serta lembaga pemasaran yang terlibat, datanya dianalisis secara deskriptif kualitatif sedangkan data yang menyangkut tentang nilai ekonomi pemasaran dianalisis melalui pengukuran margin pemasaran serta analisis efisiensi.

Analisis Margin Pemasaran dilakukan untuk menganalisis kinerja suatu pasar sehingga dapat diketahui apakah ada kesesuaian antara proporsi kerja yang dilakukan dengan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing lembaga menurut (Arshad, 1980)

$$M = Pr - Pf \dots\dots\dots(1)$$

$$M = Bp + K \dots\dots\dots(2)$$

$$K_i = P_{ji} - (PB + \sum_{I=1}^n B_{pi}) \dots\dots\dots(3)$$

Untuk mengetahui besaran share keuntungan terhadap keseluruhan margin pemasaran dapat dirumuskan dengan menggabungkan persamaan (1) dan (3).

Persamaan menjadi

$$S_{ki} = \frac{K_i}{Pr - Pf} \times 100\% \text{ atau } S_{ki} = \frac{K_i}{M} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Untuk bagian (share) biaya lembaga pemasaran (Saefudin), 1982 sebagai berikut:

$$S_{bi} = \frac{B_i}{Pr - Pf} \times 100\% \text{ atau } S_{bi} = \frac{B_i}{M} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Dimana :

- M = Margin pemasaran
- Pr = Harga tingkat pengecer (Konsumen akhir) (Rp/Kg)
- Pf = Harga tingkat peternak (Produsen) (Rp/kg)
- BP = Biaya pemasaran lembaga ke-i (Rp/kg)
- K = Keuntungan pemasaran lembaga ke-i(Rp/kg)
- K_i = Keuntungan Lembaga pemasaran i (1.....m)
- P_{ji} = Harga jual lembaga lembaga pemasaran i
- P_{bi} = harga beli lembaga pemasaran i dari jenis –jenis biaya pemasara i ke n
- S_i = Jenis Biaya ke –i
- S_{ki} = bagian share keuntungan lembaga pemasaran i
- S_{bi} = bagian (share) biaya pemasaran lembaga pemasaran ke- i
- B_i = biaya pemasaran lembaga ke i.

Apabila perbandingan share keuntungan tiap lembaga yang terlibat dalam pemasaran tidak merata, maka sistem pemasaran dikatakan tidak efisien

Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran tiap lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran merata, maka pemasaran dikatakan efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peternak Sapi di Provinsi Bali.

Gambaran karakteristik peternak sapi potong di berbagai lokasi pengamatan seperti ditunjukkan pada (Tabel 1). Secara umum peternak sapi di Provinsi Bali dapat dikategorikan sebagai usaha peternakan rakyat. Manajemen pemeliharaan diantara lokasi sangat bervariasi. Di Kabupaten Jembrana banyak ditemui peternak yang tidak memiliki kandang untuk ternak sapi, namun di beberapa Kabupaten kandang sapi milik peternak sudah memenuhi persyaratan.

Pakan yang diberikan lebih banyak berupa hijauan yang sumbernya mengharapkan dari limbah hasil pertanian milik peternak atau hijauan yang bersumber dari ladang maupun sawah. Pemberian pakan penguat sangat jarang dan dapat dikatakan tidak pernah dilakukan.

Rataan skala pemilikan berkisar 2-5 ekor/peternak, dengan struktur populasinya sangat bervariasi diantara wilayah kajian, namun demikian rata-rata pemilikan induk merupakan jumlah terbanyak yaitu mencapai (31-67%). Kondisi ini mengindikasikan usaha yang dilakoni peternak yaitu usaha produksi anak (breeding). Yang menarik dari seluruh kelompok peternak di lokasi pengamatan yaitu tingkat pemilikan pejantan yang sangat rendah. Di beberapa lokasi kajian kasus tidak terdapat ternak pejantan sering ditemui. Rendahnya pemilikan pejantan harus didukung program Inseminasi buatan (IB) yang tangguh. Tidak hanya kualitas SDM (inseminator) namun harus diikuti dengan sarana dan prasarana (Pos IB dan tangki berikut LN2 cair) yang memadai.

Tabel 1. Karakteristik kelompok peternak.

Status Fisiologis	Lokasi Kelompok peternak (Kabupaten)			
	Jembrana	Badung	Tabanan	Bangli
Induk	1,4 (30,9)	1,8 (46,7)	1,4(57,9)	3,5 (63,6)
Pejantan	-	-	-	0,3 (4,5)
Muda Jantan	-	-	0,1 (5,3)	0,3 (4,5)
Muda Betina	1,0 (21,6)	1,4 (36,6)	0,3 (10,5)	0,3 (4,5)
Anak Jantan	1,2 (25,9)	0,4 (10,0)	0,6 (26,3)	1,0 (18,2)
Anak Betina	1,0 (21,6)	0,3 (6,7)	-	0,3 (4,5)
Total	4,6 (100)	3,8 (100)	2,4 (100)	5,5 (100)
Jumlah Kelahiran (%/tahun)	61,4	51,9	72,0	50,7
Rataan BCS Induk	3,7	3,1	3,4	4,6

Pemasaran Ternak

Hasil wawancara dengan para peternak menunjukkan bahwa seluruh peternak mengandalkan para belantik untuk memasarkan ternak sapi. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Suparta (2009); yang menyatakan bahwa peternak umumnya lebih senang konsentrasi di proses produksi yang senantiasa dekat dengan ternaknya, sehingga mereka lebih senang menyerahkan pemasaran hasilnya kepada orang atau lembaga lain.

Harga berdasarkan taksiran dan tingkat harga disepakati tanpa ada tekanan dari salah satu pihak. Hampir seluruh peternak menyatakan sangat mudah menjual sapi dengan mengadakan Belantik. Begitu mudahnya berurusan dengan belantik sampai-sampai para peternak berpendapat bahwa menjual ternak sapi lebih mudah dibandingkan menjual emas atau barang lainnya. Pengalaman yang disampaikan oleh peternak bahwa untuk menjual sapi mereka hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 jam.

Karakteristik Pemasaran Sapi di Bali

Secara umum kegiatan pemasaran sapi di Bali dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran lokal dan perdagangan antar pulau.

Pemasaran lokal meliputi kegiatan-kegiatan pemasaran sapi untuk memenuhi kebutuhan sapi yang dipotong maupun yang dijadikan bibit untuk di wilayah Provinsi Bali. Pemotongan lokal merupakan pemotongan sapi untuk memenuhi konsumsi masyarakat lokal di daerah Bali setempat, sedangkan pemotongan industri merupakan pemotongan sapi untuk memenuhi kebutuhan industri seperti industri pengalengan daging, sosis, dendeng, bakso, daging beku, restoran/hotel, swalayan, dan lain sebagainya. Hasil olahan industri tersebut tidak hanya untuk memenuhi permintaan lokal, namun juga untuk memenuhi permintaan pasar di luar Bali.

Perdagangan antar pulau merupakan kegiatan pemasaran sapi potong hidup. Pasar ternak hidup ini umumnya untuk memenuhi permintaan dari luar Bali. Daging sapi bali sangat digemari oleh konsumen, dan permintaannya terus meningkat.

Profil dan Peranan para pelaku tata niaga.

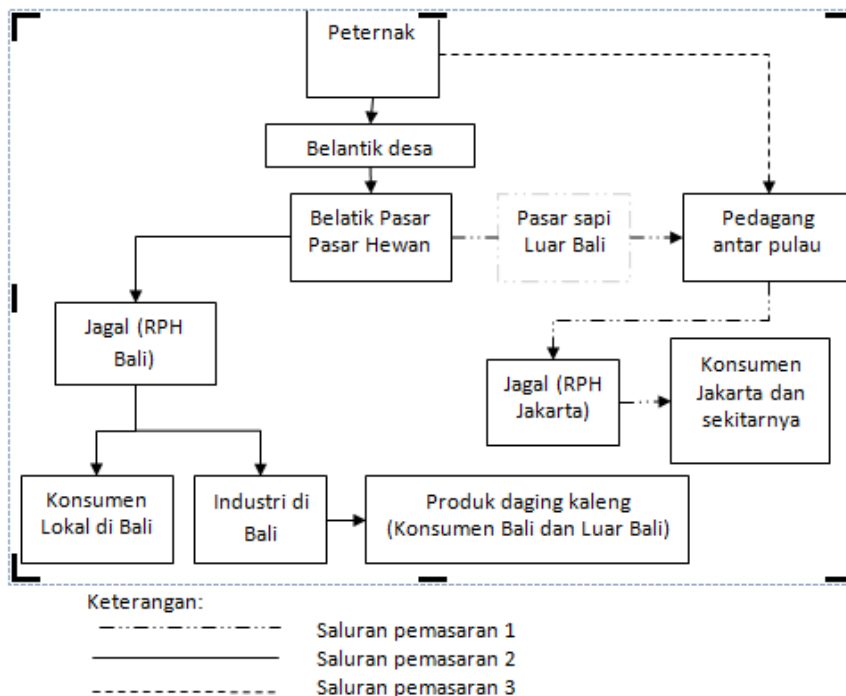
Seperti telah diuraikan diatas bahwa peran belantik (pedagang perantara sapi) dalam pemasaran sapi milik peternak di Bali sangat dominan. Gambar 1. menggambarkan struktur perdagangan sapi di Bali. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa saluran pemasaran sapi di Bali yaitu terdiri dari ; 1) Peternak - Belantik Desa - Belantik pasar – pedagang antar pulau. 2). Produsen (peternak) – belantik pasar hewan dan pedagang antar pulau 3. Produsen – Pedagang antar pulau

Peran belantik desa yaitu mendatangi peternak untuk melakukan tawar menawar sapi yang akan dijual oleh peternak. Lingkup kerja belantik desa yaitu hanya melakukan fungsi pembelian ditingkat peternak. Selanjutnya hasil pembelian sapi dari peternak di salurkan langsung atau di simpan untuk sementara waktu di suatu tempat. Pada akhirnya ternak akan dipasarkan ke pasar hewan melalui perantara belantik pasar. Jual beli antara belantik desa dengan belantik pasar dapat terjadi di desa maupun di pasar hewan. Belantik pasar ini berfungsi selain sebagai pelaku pasar juga berfungsi sebagai pengelola pasar ataupun penyedia transportasi ternak. Belantik pasar ini akan berhubungan dengan pembeli regional (pedagang antar pulau). Seluruh lembaga pemasar (belantik maupun pedagang antar pulau mempunyai peran yaitu memindahkan ternak dari produsen ke konsumen. Alat angkut yang digunakan untuk angkutan ternak khususnya di daerah Bali yaitu truk atau kendaraan bak terbuka. Kemampuan angkut kendaraan truk yaitu 8-12 ekor sedangkan dengan bak terbuka hanya mampu mengangkut ternak sapi tidak lebih dari 6 ekor. Pada sistem angkutan ternak sapi antar pulau jumlah kendaraan yang digunakan dengan kapasitas angkut jauh lebih besar.

Dari semua pelaku pasar yang terlihat dalam saluran pemasaran ternak, terlihat bahwa petani mempunyai posisi yang paling lemah. Hal ini karena petani pada umumnya tidak mempunyai akses terhadap informasi pasar yang berlaku yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan tawar menawar, sementara itu lembaga lainnya secara seksama mampu mengikuti perkembangan harga yang terjadi di tingkat konsumen. Permasalahan pemasaran sapi yang terjadi terutama yang menggunakan sistem taksiran juga sangat rentan bahwa jual beli ternak sapi tidak memihak pada peternak artinya harga yang diperoleh peternak tidak optimal. Yusuf, et al.(2002), melaporkan bahwa jual beli dengan cara taksiran menyebabkan peternak pada posisi tawar yang lemah.

Perubahan harga sapi melalui berbagai saluran pemasaran

Hasil kajian menunjukkan terjadi perubahan harga sapi pada saat penyaluran sapi dari produsen ke konsumen. Perubahan harga ini terjadi akibat adanya biaya maupun keuntungan di masing-masing lembaga pemasaran. Pada saluran pemasaran 1. Tingkat harga sapi dari produsen ke konsumen yaitu sebesar masing-masing berturut-turut sebesar Rp. 6 juta dan Rp. 8,9 juta. Atau bagian petani akibat dari perubahan harga tersebut yaitu hanya 67,4% (Tabel 2).



Gambar 1. Struktur Perdagangan sapi di Provinsi Bali.

Tabel 2. Perkembangan harga sapi dari Produsen ke konsumen melalui saluran 1.

Keterangan	Lembaga Saluran Pemasaran			
	Peternak	Belantik desa	Belantik Pasar	Padagang antar pulau
Harga Beli (Rp)		6.200.000	6.750.000	8.000.000
Harga Jual (Rp)	6.000.000	6.500.000	8.000.000	8.900.000
Biaya-biaya (Rp)		55.000	75.000	500.000
Keuntungan (Rp)		245.000	175.000	750.000
Perubahan harga sapi (%)	67,4%	73,0%	89,9%	100,0%

Sumber Data : Data Primer (diolah)

Dari Tabel 3, diketahui bahwa bagian harga yang diterima petani pada saluran pemasaran 2 yaitu 75,5% (masih dikategorikan sebagai saluran pemasaran panjang). Oleh karena merupakan saluran panjang, maka harga di tingkat petani tetap ditekan sehingga bagian harga yang diterima petani masih lebih rendah dibandingkan dengan bagian harga yang diterima petani pada saluran pendek yaitu 78,7% (Tabel 4).

Tabel 3. Perkembangan harga sapi dari Produsen ke konsumen melalui saluran 2.

Keterangan	Lembaga Saluran Pemasaran		
	Peternak	Belantik Pasar	Padagang antar pulau
Harga Beli (Rp)		6.750.000	7.400.000
Harga Jual (Rp)	6.750.000	7.400.000	8.900.000
Biaya-biaya (Rp)		75.000	500.000
Keuntungan (Rp)		575.000	1.000.000
Perubahan harga sapi (%)	75,8%	83,1%	100,0%

Sumber Data : Data Primer (diolah)

Berbeda halnya dengan saluran no. 3 nilai harga pada tingkat peternak sudah semakin tinggi yaitu mencapai 78,7%. Hal ini tidak terlepas dari pendeknya rantai yang harus dilalui sebagai pemasaran ternak sapi.

Tabel 4. Perkembangan harga sapi dari Produsen ke konsumen melalui saluran 3.

Keterangan	Lembaga Saluran Pemasaran	
	Peternak	Padagang antar pulau
Harga Beli (Rp)		7.000.000
Harga Jual (Rp)	7.000.000	8.900.000
Biaya-biaya (Rp)		500.000
Keuntungan (Rp)		1.400.000
Perubahan harga sapi (%)	78,7%	100,0%

Sumber Data : Data Primer (diolah)

Biaya pemasaran

Pedagang perantara dalam rangka menyalurkan produknya untuk dipasarkan ke konsumen senantiasa harus mengeluarkan biaya. Nilai pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk masing-masing lembaga akan berbeda yang dipengaruhi oleh jarak tempuh dari produsen ke konsumen dan banyaknya lembaga pemasaran yang dilalui. Hal ini dapat dilihat dari pengorbanan (biaya) yang harus dikeluarkan pada saluran pemasaran 1. Total biaya yang harus dikeluarkan pada saluran 1 yaitu Rp. 670.000,-. Nilai tersebut tersebar di 3 lembaga pemasaran.

Tabel 5. Biaya yang dikeluarkan pedagang perantara di berbagai saluran pemasaran (Rp/ekor).

Saluran	Belantik desa	Belantik Pasar	Pedagang antar Pulau	Jumlah
1	55.000	75.000	500.000	630.000
2		75.000	500.000	575.000
3			500.000	500.000

Sumber Data : Data Primer (diolah)

Keuntungan Pedagang

Keuntungan pedagang merupakan imbalan atas jasa yang dilakukan selama melakukan proses pemasaran. Keuntungan pedagang berbeda-beda antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Hal ini diduga karena jasa yang telah dilakukan oleh para pedagang tersebut berbeda beda.

Besarnya keuntungan pedagang dari berbagai jenis saluran pemasaran dapat dilihat pada (Tabel 6). Terlihat bahwa keuntungan terbesar diperoleh dari pedagang adalah pada saluran 2 yaitu sebesar Rp.1.557.000/ekor.

Tabel 6. Tingkat Keuntungan pedagang perantara di berbagai saluran pemasaran (Rp/ekor)

Saluran	Belantik desa	Belantik Pasar	Pedagang antar Pulau	Jumlah
1	245.000	175.000	750.000	1.170.000
2		575.000	1.000.000	1.575.000
3			1.400.000	1.400.000

Sumber Data : Data Primer (diolah)

Margin Pemasaran

Margin pemasaran adalah merupakan perbedaan harga yang diterima antara lembaga pemasaran satu dengan lembaga pemasaran lainnya.

Harga yang diterima petani dengan pedagang perantara dalam pemasaran ternak potong berbeda besarnya. Perbedaan ini disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan pedagang perantara dalam fungsi pemasaran berbeda dengan petani. Besarnya margin pemasaran untuk pedagang perantara dipengaruhi oleh unsur-unsur biaya pemasaran dan target keuntungan pemasaran sebagai imbal jasa atas pedagang perantara dalam memasarkan ternak. Rincian margin pemasaran pada berbagai saluran pemasaran seperti pada (Tabel 7). Terlihat bahwa margin pemasaran yang paling besar adalah pada saluran 1 yaitu sebesar Rp.2.450.000/ekor dan yang terkecil pada saluran 3 yakni Rp.1900.000,-/ekor. Besarnya margin pemasaran pada saluran 1 di pengaruhi oleh banyaknya lembaga yang terlibat.

Tabel 7. Besaran nilai margin pemasaran pada berbagai saluran pemasaran. (Rp/ekor).

Saluran	Belantik desa	Belantik Pasar	Pedagang antar Pulau	Jumlah
1	300.000	1.250.000	900.000	2.450.000
2		650.000	1.500.000	2.150.000
3			1.900.000	1.900.000

Sumber Data : Data Primer (diolah)

Analisis Usaha pada Jagal/ Pedagang Pemotong Ternak

Analisis usaha Jagal/ Pedagang Pemotong Ternak diperlihatkan pada Tabel 8. Total biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 42.097.500 untuk pembelian sapi dan retribusi di pasar hewan Bringkit, pembayaran transport dari pasar hewan ke RPH Denpasar, pembelian tali/tambang untuk mengikat sapi, pembelian pakan dan air minum, membayar tenaga perawat sapi, tenaga pengolahan dan retribusi di RPH. Sementara penerimaan Jagal/Pedagang Pemotong Ternak berjumlah Rp.46.965.000,- yang terdiri dari penjualan daging, kulit, kepala, jeroan, dan lain-lain. Dengan demikian, laba bersih yang diterima Jagal/Pedagang Pemotong Ternak untuk 5 ekor sapi yang dibeli dan selanjutnya dipotong adalah sebesar Rp 4.867.500.yang hanya merupakan 2.31% dari total biaya. Persentase laba tersebut sangat kecil sehingga jika Jagal/Pedagang Pemotong Ternak salah menafsir berat daging dan/atau ada pencurian daging oleh pekerja pengolah, maka Jagal/ Pedagang Pemotong Ternak bisa menderita kerugian.

Analisis Usaha pada Pedagang Pengecer Daging Sapi

Hasil analisis usaha pedagang pengecer daging diperlihatkan pada Tabel 8, yang mengindikasikan bahwa total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 9.370.167. Dari 150 kg daging yang dibeli, hanya 145 kg yang dapat dijual karena susut berat 5 kg sebagai akibat penurunan kadar air dan lemak yang dibuang. Dengan susut tersebut, jumlah penerimaannya adalah sebesar Rp 9.725.000, sehingga laba bersih yang diterima pedagang ini adalah Rp 354.833 yang hanya merupakan 3.8% dari total biaya.

Tabel 8. Analisis usaha pemotongan ternak di RPH Denpasar.

Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp/sat)	Nilai (Rp)
A. Biaya				
1. Harga beli sapi di pasar hewan Beringkit				
- Jantan (450 kg)	ekor	3	8.900.000	26.700.000
- Betina (300 kg)	ekor	2	7.000.000	14.000.000
2. Retribusi di pasar hewan	ekor	5	12.000	60.000
3. Transport ke RPH	ekor	5	70.000	350.000
4. Tali dll	ekor	5	5.000	25.000
5. Pakan dan air minum 5 hr di RPH	ekor	5	60.000	300.000
6. Tenaga kerja perawatan di RPH	hok	5	65.000	325.000
7. Tenaga kerja pengolahan di RPH	orang	5	50.000	250.000
8. Retribusi di RPH	ekor	5	17.500	87.500
Total Biaya				42.097.500
B. Penerimaan:				
1. Daging	kg	686	65.000	44.590.000
2. Kulit	lembar	5	75.000	375.000
3. Kepala, jeroan, dll	ekor	5	400.000	2.000.000
Total Penerimaan				46.965.000
C. Laba				
Keuntungan per ekor (%)				2,31%

Sumber : Data Primer (diolah)

Tabel 9. Analisis usaha pengecer daging di Denpasar

Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp/sat)	Nilai (Rp)
A. Biaya:				
1. Pembelian daging	Kg	150	60.000	9.000.000
2. Tenaga kerja di lapak	Orang	2	30.000	60.000
3. Biaya keamanan (Rp 5.000/bulan)	Hari	1	167	167
4. Biaya kebersihan	Hari	1	10.000	10.000
5. Biaya angkut dari RPH ke lapak	Kg	150	2.000	300.000
Total Biaya				9.370.167
B. Penerimaan*):				
1. Daging has	Kg	30	75.000	2.250.000
2. Daging paha	Kg	115	65.000	7.475.000
Total penerimaan				9.725.000
C. Laba				
	Rp			354.833
	%			3,8%

Keterangan: *) Susut 5 kg (penurunan kadar air dan pembuangan lemak)

KESIMPULAN

1. Terdapat tiga bentuk aliran pemasaran ternak potong dari produsen sampai ke konsumen, yaitu : (1) Produsen - blantik desa - blantik pasar hewan - pedagang antar pulau, (2) Produsen - blantik pasar hewan - pedagang antar pulau, (3) Produsen - pedagang antar pulau.

2. Margin pemasaran yang paling besar adalah pada (saluran 1) yakni Rp.2.450.000/ekor, terbesar kedua yaitu (saluran ke 2) dengan nilai Rp.2.150.000,- dan terkecil yaitu pada saluran 3 yakni Rp.1.900.000/ekor.
3. Analisis usaha pemotongan dan analisis pengecer daging di pasar menunjukkan bahwa tingkat keuntungan relatif kecil dibandingkan dengan resiko yang ada. Resiko pada usaha pemotongan yaitu kesalahan dalam menaksir prosentase daging yang diperoleh dari ternak. Sedangkan pada usaha eceran resiko yang ada yaitu pada saat daging tidak terjual habis sehingga perlu sarana pendingin untuk mengamankan daging tidak rusak.
4. Penting adanya perubahan sistem pemasaran sapi yang mendukung transparansi harga di berbagai lembaga pemasar khususnya para peternak selaku produsen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arshad, F.M., 1980. The Integration of palm oil market in Peninsular Malaysia. Indian Journal Agriculture Development Council, Inc, New York.
- Kotler (1992) mendefinisikan saluran pemasaran merupakan saluran distribusi yang terdiri dari seperangkat pedagang yang melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen.
- Patrick, I. W., G. R. Marshall., I G.A.A. Ambarawati., M. Aburahman. 2010. Social Capital and Cattle Marketing Chains in Bali and Lombok, Indonesia. ACIAR Technical Report No 74. Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR). Canberra, Australia.
- Saefuddin, A.M., 1982. Pengkajian Pemasaran Komoditi, IPB, Bogor.
- Sujanto, J. 200. Teknik Sampling, untuk Survey dan Eksperimen. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanata I W., I G.N. Kayana., B.R.T. Putri., W. Parimarta. 2009. Analisis Efisiensi Ekonomis Usahatani Penggemukan Sapi Potong (Studi Kasus di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar). Laporan Akhir Penelitian. Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Denpasar.
- Sukanata, I W., Suciani, I G.N. Kayana., I W. Budiarta. 2010. Kajian Kritis terhadap Penerapan Kebijakan Kuota Perdagangan dan Efisiensi Pemasaran Sapi Potong Antar Pulau. Laporan Akhir Penelitian. Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Denpasar.
- Suparta, I N. 2009. Tata Niaga Sapi Potong dan Distribusi Bisnis Peternakan Sapi Potong Lokal dan Import. Makalah disampaikan pada acara public training "Magemen Pembiayaan Bisnis Ternak Sapi Potong", yang diselenggarakan oleh PT. FABA Indonesia Konsultan, Tgl 18-20 Maret 2009.
- Yusuf, B. de Rosari, dan C. Lie, 2000. Pemasaran Ternak Sapi Bali di Nusa Tenggara. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Vol. 5 No. 1, Januari 2002. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang, Deptan

PENGARUH KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN DAN SISTEM KEMITRAAN TERHADAP MOTIVASI PETERNAK AYAM PEDAGING DI KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

Ilham Rasyid, Amrulah, Muhammad Darwis

Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin; Email: hilhamrasyid@yahoo.com; natjtjas@gmail.com; darwism24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April – Mei 2012. Jenis penelitian adalah eksplanasi yang bertujuan melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini seluruh peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung berjumlah 155 orang, kemudian dilakukan penarikan sampel dengan rumus Slovin sebanyak 61 orang peternak. Analisa data digunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan berpengaruh terhadap motivasi peternak ayam pedaging dan secara parsial faktor sistem kemitraan lebih dominan mempengaruhi motivasi peternak ayam pedaging di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Kemampuan Kewirausahaan, Sistem kemitraan, Motivasi, Peternak Ayam Pedaging

ABSTRACT

The objectives of the research were to find out the impact of the entrepreneurship capability and the business partnership system towards the motivation of the broiler farmers in Bantimurung District, Maros Regency. The research was until April to May 2012. The research was explanatory to know influence independen with dependen variabel. Population in research all broiler farmers in Bantimurung District 155 people and sample with Slovin method are 61 farmers. Data analysis used multiple linear regression. Result of research indicate that by together ability of entrepreneurship capability and partnership system have an effect on to motivation of broiler farmers and by parsial is factor of partnership system more dominant influence the motivation of broiler farmers in Bantimurung District, Maros Regency.

Keywords: Entrepreneurship Capability, Partnership System, Motivation, Broiler Farmers

PENDAHULUAN

Usaha peternakan ayam pedaging dimulai dengan usaha mandiri agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang umumnya diusahakan dalam skala kecil. Peternak memulai usahanya dengan modal sendiri dan menanggung resiko sendiri. Seiring tuntutan ekonomi dan perkembangan teknologi, usaha peternakan ini pun mulai dikembangkan dalam skala menengah dan besar. Keterbatasan dalam hal permodalan, teknologi, dan sumberdaya manusia membuat terbentuknya kerjasama dalam agribisnis peternakan antara peternak dengan perusahaan peternakan.

Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak kecil, hal ini tidak saja bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peternak tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan daging ayam dalam dimensi jumlah, kualitas, waktu, dan keterjangkauan. Dengan adanya hubungan kemitraan tersebut dapat memotivasi peternak mandiri beralih bergabung dengan sistem kemitraan.

Kemitraan usaha ayam pedaging ini merupakan salah satu alat kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan dan keselarasan serta didasari rasa saling mempercayai antara pihak yang bermitra. Melalui kemitraan diharapkan terwujud sinergi yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dalam usaha. Oleh karena itu sangatlah penting jika kemitraan didasari oleh pemahaman tentang kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan

komunikasi terbuka yang terangkum dalam etika bisnis sehingga kemitraan akan kuat dan bertahan lama (Dewi, 2006).

Selain itu, seorang peternak harus memiliki dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah populasi ternak ayam potong dengan menjajaki peluang baru melalui kombinasi baru dari sumber daya yang sudah ada. Kemampuan kewirausahaan peternak melakukan proses penciptaan kekayaan dan peningkatan nilai tambah, melalui gagasan-gagasan, meramu sumber-sumber dan membuat segala sesuatunya menjadi kenyataan termasuk didalamnya bagaimana menjalin kemitraan dengan perusahaan inti.

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah sentra produksi ayam ras pedaging di Sulawesi Selatan, dengan jumlah populasi sebanyak 7.985.518 ekor yang diusahakan oleh sebanyak 1.774 orang peternak (Badan Pusat Statistik Maros, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan Mei 2012 di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanasi yang bertujuan melihat pengaruh independen terhadap variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peternak pada usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros berjumlah 155 orang. Penarikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak yaitu 61 orang. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu kemampuan kewirausahaan, sistem kemitraan dan motivasi peternak ayam pedaging. Untuk sumber data meliputi data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dari peternak ayam pedaging sebagai responden yang berpedoman dengan kuesioner dan data sekunder yaitu dari instansi terkait. Analisis data yang digunakan. Analisa data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan terhadap motivasi peternak ayam pedaging digunakan Regresi Linear Berganda dimana :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \text{ (Sugiyono, 2004).}$$

Y = Motivasi Peternak Ayam Pedaging

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi Variabel X_1 dan X_2

X_1 = Kemampuan Kewirausahaan

X_2 = Sistem Kemitraan

e = Standart kesalahan (*Error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kemampuan Kewirausahaan dan Sistem Kemitraan terhadap Motivasi Peternak

Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS *for windows*. Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini yaitu terdiri atas variabel bebas (*independen*) meliputi kemampuan kewirausahaan (X_1) dan sistem kemitraan (X_2). Sementara untuk variabel terikat (*dependen*)

adalah motivasi peternak ayam pedaging (Y). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Pengaruh Kemampuan Kewirausahaan dan Sistem Kemitraan terhadap Motivasi Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Regresi (B)	t _{Hitung}	Sig	Keterangan
Konstanta	Motivasi Peternak (Y)	16,970	10,406	0,000	
Kemampuan Kewirausahaan (X ₁)		0,248	3,652	0,001	Signifikan
Sistem Kemitraan (X ₂)		0,290	4,433	0,000	Signifikan

Multiple R = 0,793; R Square = 0,629; F_{Sign} = 0,000; F_{hitung} = 49,258;

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2012; Keterangan : Signifikan pada $\alpha = 0,05$

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari hasil analisis regresi linear berganda dapat diketahui koefisien regresi masing-masing variabel bebas (*independen*) dan nilai konstanta sehingga dapat bentuk persamaannya sebagai berikut :

$$Y = 16,970 + 0,248X_1 + 0,290X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut, diketahui nilai konstanta pengaruh variabel bebas X₁ dan X₂ terhadap Y sebesar 16,970. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel bebas bernilai 0 atau tidak ada maka motivasi peternak ayam pedaging sebesar 16,970. Sementara nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas yang berpengaruh terhadap motivasi peternak ayam pedaging adalah sebagai berikut: (a) Koefisien regresi variabel kemampuan kewirausahaan (X₁) sebesar 0,248, artinya bahwa kemampuan kewirausahaan memberikan pengaruh terhadap motivasi peternak ayam pedaging, yang berarti bahwa jika kemampuan kewirausahaan meningkat sebanyak 1 satuan maka motivasi peternak ayam pedaging meningkat sebesar 0,248 satuan, dengan asumsi variabel lain konstant. (b) Koefisien regresi variabel sistem kemitraan (X₂) sebesar 0,290, artinya bahwa sistem kemitraan memberikan pengaruh terhadap motivasi peternak ayam pedaging, yang berarti bahwa jika sistem kemitraan meningkat sebanyak 1 satuan maka motivasi peternak ayam pedaging meningkat sebesar 0,290 satuan, dengan asumsi variabel lain konstant.

Untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh diantara variabel bebas yang ada terhadap variabel terikat, maka digunakan metode analisis yang membandingkan besar koefisien regresi antar masing-masing variabel bebas tersebut. Dari hasil koefisien regresi masing-masing variabel bebas maka variabel sistem kemitraan memiliki koefisien regresi (B) yang paling besar yaitu 0,290. Dengan demikian variabel sistem kemitraan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap motivasi peternak ayam pedaging.

Kuatnya pengaruh dan besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi berganda (R) dan koefisien determinasi (R²). Adapun nilai koefisien korelasi berganda (R) 0,793, hal ini berarti bahwa pengaruh kemampuan kewirausahaan (X₁) dan sistem kemitraan (X₂) hubungannya kuat dan positif terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Sementara nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,629 berarti bahwa pengaruh atau besarnya persentase sumbangan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi naik turunnya motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros sebesar 62,9%, sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1 menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 49,258 dan F_{signifikan} sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas kemampuan kewirausahaan (X₁) dan sistem kemitraan (X₂) secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Setelah melakukan pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, maka selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri (*parsial*). Adapun pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t. pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} variabel bebas X_i dengan t_{tabel} atau nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$. Untuk melihat pengaruh secara sendiri-sendiri masing-masing variabel bebas akan dipaparkan sebagai berikut:

Analisis Pengaruh Kemampuan Kewirausahaan (X_1) terhadap Motivasi Peternak Ayam Pedaging.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X_1 adalah $(0,001) < (0,05)$. Hal ini berarti bahwa variabel kemampuan kewirausahaan (X_1) secara sendiri-sendiri berpengaruh signifikan (nyata) terhadap motivasi peternak ayam pedaging (Y) di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Analisis Pengaruh Sistem Kemitraan (X_2) terhadap Motivasi Peternak Ayam Pedaging.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X_2 adalah $(0,000) < (0,05)$. Hal ini berarti bahwa variabel sistem kemitraan (X_2) secara sendiri-sendiri berpengaruh signifikan (nyata) terhadap motivasi peternak ayam pedaging (Y) di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan berpengaruh signifikan (nyata) terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Artinya tinggi rendahnya motivasi peternak ayam pedaging tergantung pada kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan. Hal ini sesuai dengan pendapat Harris (2000), bahwa wirausaha yang sukses pada umumnya ialah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Wirausaha tidak hanya memerlukan pengetahuan tapi juga keterampilan. Sedangkan menurut Hafisah (2000), bahwa mekanisme pelaksanaan kemitraan usaha ayam ras pedaging didasarkan atas hubungan langsung antara perusahaan dengan petani peternak. Permodalan petani peternak umumnya masih lemah dan pengetahuan/keterampilan petani dalam berusaha tani ternak dengan baik juga masih rendah, oleh karena itu perusahaan inti menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, serta memberikan pembinaan teknis dan manajemen kepada petani peternak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri kemampuan kewirausahaan (X_1) berpengaruh nyata terhadap motivasi peternak ayam pedaging (Y). Hal ini berarti, bahwa peningkatan motivasi peternak ayam pedaging tergantung kemampuan kewirausahaan peternak pada produksi usaha, pemasaran, keuangan, memecahkan masalah-masalah usaha, pengambilan resiko, dan organisasi serta kepemimpinan. Peternak menganggap kemampuan kewirausahaan yang dimiliki sekarang ini sesuai dengan kebutuhan untuk berusaha peternakan ayam pedaging. Hal ini sesuai pendapat Meredith (1992), bahwa potensi adalah kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi pada dasarnya seorang peternak memiliki potensi wirausaha yang belum dimanfaatkan dengan maksimal sehingga diperlukan bantuan pihak perusahaan mitra untuk menggali dan menemukan potensi wirausaha peternak tersebut supaya lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha peternakan ayam pedaging.

Selain kemampuan kewirausahaan, sistem kemitraan (X_2) juga berpengaruh nyata terhadap motivasi peternak ayam pedaging (Y). Hal ini berarti, bahwa peningkatan motivasi peternak ayam pedaging tergantung pada sistem kemitraan karena peternak merasa adanya keterbukaan pihak perusahaan, jaminan yang diperoleh peternak, sumber sarana produksi ternak, ketentuan harga garansi ayam hidup, ketentuan jadwal panen, jadwal pengiriman sarana produksi ternak, penghitungan bagi hasil (keuntungan) antara perusahaan inti dan peternak. Peternak menganggap sistem kemitraan usaha ayam potong yang berlaku saat ini sesuai dengan keinginan para peternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharno (1999), yang mengemukakan bahwa pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha dengan peternak

dalam upaya pengelolaan usaha peternakan. Dalam kemitraan antara pihak pengusaha dengan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai.

Salah satu alasan peternak melakukan kemitraan adalah karena melalui sistem kemitraan usaha peternakan ayam pedaging dapat menguntungkan dan efisien. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2006), menunjukkan bahwa usaha ayam pedaging pola kemitraan sangat menguntungkan dan sangat efisien. Selain menguntungkan dan efisien bagi sebagian peternak menganggap bahwa sistem kemitraan memberikan banyak manfaat diantaranya penyediaan sarana produksi sehingga peternak dapat mengurangi biaya produksinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2005), menunjukkan bahwa biaya serta penerimaan peternak berpengaruh positif terhadap keuntungan, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengikuti usaha ayam potong pola kemitraan.

Disinilah peran dan pentingnya motivasi karena setiap pekerjaan dan usaha yang akan dilakukan memerlukan motivasi. Pada umumnya tingkah laku manusia dilakukan secara sadar, artinya selalu didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat Alma (1999), mengemukakan bahwa motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan dorongan atau *impuls*. Motivasi seseorang tergantung kepada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan yang sangat besarlah yang akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat ini seringkali berkurang apabila telah mencapai kepuasan ataupun karena menemui kegagalan.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan kewirausahaan dan sistem kemitraan baik secara bersama-sama (*simultan*) maupun secara sendiri-sendiri (*parsial*) berpengaruh signifikan (nyata) terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dan variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap motivasi peternak ayam pedaging di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros adalah sistem kemitraan. Disarankan sebaiknya pengembangan usaha peternakan ayam pedaging perlu mendapat perhatian dari pemerintah kepada para peternak di Kabupaten Maros, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan teknis manajemen usaha peternakan ayam potong.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma B. 1999. Dasar-dasar Bisnis dan Pemasaran. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2009. Maros Dalam Angka.
- Dewi I. 2006. Kestinambungan Usaha Bisnis Kemitraan Ayam Ras Pedaging (Kasus di Tunas Mekar Farm Bogor). Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hafsah M.J. 2000. Kemitraan Usaha, Konsep dan Strategi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Harris M. 2000. *Human Recourses Management*, USA.
- Kurniawan A. 2005. Analisis Usaha Peternakan Ayam Potong Pola Kemitraan PT. Nusantara Unggas Jaya (NUJ) Kabupaten Jember. <http://www.sistemkemitraan ayam potong>. diakses 27 Mei 2011.
- Meredith G.G. 1992. *The Practice of Entrepreneurship (Kewirausahaan Dalam Teori dan Praktek)*. Penerjemah: Andre Aspar Sayogi. Penerbit PT. Pustaka Binaman pressindo, Jakarta.
- Prayogo S.S. 2006. Analisis Usaha Peternakan Ayam Pedaging Pola Kemitraan Di PT. Ciomas Adisatwa Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. <http://www.sistemkemitraan ayam potong>. diakses 27 Mei 2011.
- Sugiyono. 2004. Statistika Untuk Penelitian. ALFABETA, Jakarta.
- Suharno B. 1999. Kiat Sukses Berbisnis Ayam. Penebar Swadaya, Jakarta.

HUBUNGAN ANTARA CURAHAN WAKTU KERJA WANITA DAN PENDAPATAN PADA USAHA PENETASAN TELUR ITIK DI KELURAHAN MANISA, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDRAP

Kasmiyati Kasim dan Sitti Nurani Sirajuddin
Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap selama 3 (tiga) bulan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil adalah 30 responden. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah statistik parametrik dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson Product Moment (r). Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya hasil korelasi yaitu 0,762 yang bermakna bahwa terdapat hubungan yang kuat antara curahan waktu kerja wanita dengan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Kata kunci: Curahan waktu, wanita, Pendapatan, penetasan, telur itik

ABSTRACT

The purpose of this research was to know Between time allocation of woman and income of duck hatchery. It was done in Manisa District, Baranti Sub district, Sidrap Regency for 3 months. Kind of the research was quantitative. Numbers of sample were 30 duck farmers. Sources of data were primary date and secondary. Data analysis used in this research was parametric statistic with using Correlation Person Product Moment (r). Result of the research indicated that corelation between variable X and Y was 0,762. there was strong correlation between utilizing of work time and income of duck hatchery.

Key words: Time allocation, woman, income, hatchery, duck eggs

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan peternakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Untuk mencapai hal itu, maka pembangunan peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan yang lebih maju melalui penerapan teknologi yang tepat guna. Pembangunan peternakan dilakukan untuk mencapai suatu pengembangan yang diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam dan tenaga kerja manusia dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu komoditi peternakan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah ternak itik. Di Indonesia, ternak itik memegang peranan yang cukup penting bagi sebagian masyarakat pedesaan. Pemeliharaan itik merupakan usaha sampingan bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Ternak itik bersama dengan ternak unggas lainnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari telur dan daging. Hasil penjualan telur dan ternaknya sendiri dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berpotensi untuk pengembangan usaha peternak itik adalah Kabupaten Sidrap. Usaha peternakan tersebut merupakan usaha peternakan rakyat yang dikelola oleh rumah tangga peternak. Di daerah ini memiliki potensi lingkungan yang baik karena merupakan salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi Selatan, mempunyai areal persawahan dengan pengairannya yang dapat menunjang pelaksanaan dan pengembangan usaha ternak itik. Jumlah populasi ternak itik di Kabupaten Sidrap terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurung waktu 3 tahun yaitu

dari tahun 2009 – 2011 sebesar 361.540 meningkat menjadi 397.802 ekor (Statistik Peternakan Kabupaten Sidrap, 2012)

Melihat populasi ternak itik di Kabupaten Sidrap yang cukup tinggi, maka diharapkan dapat melakukan usaha pemeliharaan itik dengan tujuan komersial. Untuk meningkatkan populasi ternak itik di Kabupaten Sidrap maka diperlukan peningkatan produksi bibit itik dalam hal ini menyangkut teknologi pembibitan ternak itik untuk mempersiapkan generasi itik baru dari bibit yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang tinggi. Salah satu usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh bibit itik yaitu usaha penetasan telur itik.

Di Kabupaten Sidrap, Kecamatan Baranti, khususnya Kelurahan Manisa, terdapat usaha penetasan yang sudah digeluti oleh sebagian masyarakat. Usaha penetasan telur itik ini dilakukan oleh wanita peternak itik. Adanya usaha tersebut dilakukannya untuk membantu mencari nafkah guna memperoleh pendapatan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian wanita dilokasi penelitian mempunyai peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah tambahan, dalam hal ini mereka harus mampu mengatur waktunya. Melihat hal tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai: Hubungan curahan kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana curahan waktu kerja wanita pada usaha penetasan telur itik yang dilakukan selama 1 periode ?
2. Bagaimana pendapatan yang diperoleh pada usaha penetasan telur itik selama 1 periode ?
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik ?

Adapun tujuan dari penelitian kajian wanita ini adalah :

1. Untuk mengetahui curahan waktu kerja wanita pada usaha penetasan telur itik dalam 1 periode.
2. Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh pada usaha penetasan selama 1 periode.
3. Untuk mengetahui hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan. Dan penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat banyak masyarakat yang menggeluti usaha penetasan telur itik.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang ingin melihat gambaran jumlah curahan waktu kerja wanita, jumlah pendapatan dan besarnya hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Populasi dan Sampel

Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebesar 30 responden yang dianggap sudah dapat mewakili populasi dalam penelitian.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

- Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner.
- Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini serta sumber-sumber pustaka penunjang lainnya.

Analisa Data

Untuk mengetahui curahan waktu kerja wanita dalam usaha penetasan telur itik dilakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan rumus :

Curahan kerja Wanita = Jumlah jam kerja perempuan X HKSP

(HKSP Wanita = 0,8).

Untuk mengetahui besarnya pendapatan pada usaha penetasan digunakan dilakukan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan rumus pendapatan yaitu :

$Pd = TR - TC$ (Soekartawi, 2003)

Dimana :

Pd = Total Pendapatan yang diperoleh dalam usaha penetasan telur itik (Rp/periode)

TR = Total Revenue/Penerimaan yang diperoleh pada usaha penetasan telur itik (Rp/periode)

TC = Total Cost/Biaya yang dikeluarkan pada usaha penetasan telur itik (Rp/periode)

Untuk mengetahui hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan rumus *korelasi pearson product Moment* yaitu :

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana :

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel

$\sum X$ = Jumlah Data X

$\sum Y$ = Jumlah Data Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Responden

Tingkatan Umur

Umur dapat mempengaruhi kemampuan fisik dan pola berpikir seorang dalam mengelola usaha peternakan dan usaha tambahan lainnya. Adapun keadaan umum responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Umur di Kelurahan Desa Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Tingkatan Umur (tahun)	Jumlah (orang)	(%)
24 – 28	11	36,6
29 – 33	7	23,3
34 – 39	8	26,7
40 – 44	2	6,7
45 – 49	2	6,7
Jumlah	30	100.00

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

Pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa responden peternak yang berumur 24 – 28 tahun memiliki jumlah yang terbesar yaitu 11 orang dengan persentase 36,6 % dan yang terkecil adalah pada tingkatan umur 40 – 44 tahun dan 45 – 49 tahun yaitu masing-masing 6,7 %. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa responden rata-rata berada pada usia produktif yang masih memiliki kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan usaha pentasannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Swasta dan Sukotjo (1999) bahwa tingkat produktivitas kerja seseorang akan mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan umur, kemudian akan menurun kembali menjelang usia tua. Selanjutnya dikatakan pula bahwa umur seorang pengusaha dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja, sebab umur erat kaitannya dengan kemampuan kerja serta pola pikir dalam menentukan pola manajemen yang diterapkan dalam usaha.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan formal. Tingkat pendidikan ini adalah salah satu indikator yang dapat mencerminkan kemampuan seseorang dalam pengelolaan suatu usaha dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan tertentu terutama dalam hal penerimaan informasi dan teknologi serta inovasi yang relevan dengan usaha yang digelutinya. Adapun keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	(%)
Tamat SD	10	33,3
Tamat SMP	14	46,7
Tamat SMA	6	20
JUMLAH	30	100,00

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

Pada tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar responden menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat SMP yaitu sebanyak 14 orang dengan persentase 46,7 %, dan persentase terkecil (20 %) yaitu tamat SMA sebanyak 6 orang. Melihat tingkat pendidikan responden rata-rata berada pada tingkat sekolah menengah ke bawah, maka diperlukan adanya upaya peningkatan keterampilan, wawasan dan pengetahuan. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan non-formal seperti mengikuti kursus-kursus, aktif dalam mengikuti penyuluhan dari Dinas Peternakan atau pihak-pihak yang terkait (seperti LSM, pengusaha di bidang peternakan yang sudah berhasil dan pihak swasta) sehingga peternak mendapatkan inovasi baru dan informasi baik mengenai teknologi, produksi, pemasaran dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Hariandja (2002) bahwa dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif lebih

memadai akan terdapat kecenderungan mereka lebih mampu melihat peluang dan bersifat dinamis dalam melaksanakan kinerja dan aktifitasnya.,

Pengalaman Berusaha

Pengalam berusaha merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seseorang dalam meningkatkan produktifitas dan kemampuan kerjanya. Adapun keadaan responden berdasarkan pengalaman berusaha dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi responden berdasarkan pengalaman pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Pengalaman Berusaha (tahun)	Jumlah (orang)	(%)
4 - 6	4	13,33
10 -12	24	80,0
13 -15	1	3,33
16 - 18	1	3,33
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2008.

Pada tabel 3, terlihat bahwa jumlah responden terbanyak yaitu 24 orang mempunyai pengalaman berusaha 10 - 12 tahun dengan perentase 80%., Kenyataan ini menunjukkan bahwa usaha peternakan itik di bidang usaha penetasan telur itik sudah sejak lama dilakukan oleh anggota masyarakat, walaupun cara pengelolannya masih menggunakan lampu minyak tanah dan listrik sebagai sumber panas bagi usaha penetasan telur itik. Responden yang mempunyai pengalaman yang cukup lama umumnya mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibanding dengan responden yang baru saja menekuni usahanya. Dalam hal ini mereka sudah dapat melihat bagaimana cara mengelola usah penetaan yang dapat meningkatkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (1994) bahwa lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku, serta lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahnya akan mempengaruhi produktivitasnya.

Curahan waktu kerja wanita Pada usaha penetasan

Pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap sebagian besar aktifitas kegiatan sehari-harinya dilakukan oleh wanita peternak. Disamping itu, juga tetap memakai tenaga kerja dalam rumah tangga. Keterlibatan wanita untuk mencurahkan waktunya dalam usaha penetasan tersebut guna membantu mencari nafkah untuk memperoleh tambahan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya . Di daerah tersebut, wanita berperan ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Dalam hal ini mereka harus mampu mengatur waktunya, yaitu waktu untuk bekerja dan waktu untuk mengurus rumah tangganya. Hal ini sesuai pendapat White (1986) Kegiatan ekonomi rumahtangga sangat beragam, kepala rumahtangga dan anggota rumahtangga bersama-sama akan mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Mengingat rumahtangga adalah satu kesatuan unit konsumsi dan produksi dengan lahan serta tenaga kerja yang terdapat dalam rumah tangga tersebut sebagai faktor produksi utama (Firman, 1990).

Dalam melakukan usaha penetasan telur itik, curahan waktu yang digunakan wanita dalam usaha penetasannya selama 1 periode penetasan yaitu rata- ratanya 97,3 jam/periode atau rata-rata anatar 3- 4 jam perhari. Selebihnya digunakan untuk mengurus rumah tangga, kegiatan sosial dan istirahat. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah pembalikan telur, mengatur suhu penetasan, memeriksa telur, membersihkan kandang, memberikan makanan dan minuman yang telah diberi vitamin setelah menghasilkan DOD, sambil menunggu pembeli yang telah memesan DOD tersebut. Dalam usahanya ini

tetap menggunakan tenaga kerja keluarganya dengan upah yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya usaha penetasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sajogjo (1988) bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga baik di desa sub-urban maupun rural pertanian dan semua lapisan ekonomi rumah tangga masih cukup besar. Rata-rata 5–6 jam sehari dicurahkan wanita untuk pekerjaan rumah tangga, sedangkan pria mencurahkan waktu 0,5-2 jam sehari untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, wanita juga terlibat mencari nafkah yang berkisar 2-4 jam perhari sedangkan pria 5–6 jam perhari.

Pendapatan dari Usaha Peternakan Itik

Pendapatan merupakan hasil pengurangan antara rata-rata total penerimaan yang diperoleh dengan rata-rata total biaya produksi yang telah dikeluarkan wanita peternak itik selama satu tahun. Dimana satu periode lamanya adalah 34 hari yang terdiri dari 28 hari proses penetasan dari telur sampai menjadi DOD dan 6 hari pemeliharaan menunggu pedagang DOD.

Adapun penerimaan yang diperoleh rata-rata totalnya adalah Rp. 13.371.750 per periode, dimana dalam satu tahun rata-rata hanya berproduksi sebanyak empat periode, hal ini tergantung dari jumlah permintaan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi DOD yaitu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, dan rata-rata total biaya produksinya perperiode adalah Rp 8.809.453. Sehingga rata-rata total pendapatan yang diperoleh dari usaha penetasan itik tersebut dari 30 responden selama 1 periode adalah Rp 4.762.297. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyono (2000) bahwa pendapatan usaha tani ada dua yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih (keuntungan). Pendapatan kotor usaha tani yaitu keseluruhan hasil atau nilai uang dari hasil usaha tani. Pendapatan bersih usaha tani yaitu jumlah pendapatan kotor usaha tani dikurangi dengan biaya.

Hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik

Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan analisis koefisien korelasi pearson dengan menggunakan bantuan program SPSS mengenai hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil korelasi sederhana mengenai hubungan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kel. Manisa, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Variabel Penilitia	Curahan Waktu	
	Kerja	Pendapatan
Curahan Waktu Kerja	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.762**
	N	30
Pendapatan	Pearson Correlation	.762**
	Sig. (2-tailed)	1
	N	30

Pada Tabel 3 terlihat bahwa hasil korelasi antara curahan waktu kerja dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik dari 30 responden adalah 0,762. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara curahan waktu kerja dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik kuat dan berkorelasi positif, artinya apabila curahan waktu kerja wanita ditingkatkan maka pendapatan juga ikut meningkat. Dan setelah diuji korelasi pada $\alpha = 0,01$ maka terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara curahan waktu kerja wanita dan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti,

Kabupaten Sidrap. Hal ini didukung oleh pendapat Damsar (2002) yang menyatakan bahwa perempuan terdorong untuk melakukan kegiatan produktif karena mereka ingin mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan mereka juga ingin memanfaatkan keterampilan yang mereka punya dengan suatu keberanian yang dimiliki serta merasa ikut bertanggung jawab terhadap roda ekonomi keluarga. Selanjutnya dikatakan pula bahwa wanita adalah ibu rumah tangga yang melakukan peran kodrati seperti melahirkan, mengasuh dan mendidik anak, melakukan kegiatan domestic (tugas rumah tangga), tugas sosial kemasyarakatan lainnya, juga terlibat secara aktif dan produktif berkarir dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan. Dikatakan pula bahwa faktor yang mempengaruhi wanita bekerja di luar rumah meliputi: menambah penghasilan keluarga, secara ekonomis tidak tergantung pada suami, menghindari kebosanan di rumah atau mengisi waktu luang, memperoleh status dan penghargaan diri.

KESIMPULAN

Dari hasil hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Curahan waktu yang digunakan wanita dalam usaha penetasannya selama 1 periode penetasan yaitu rata-ratanya dari 30 responden yaitu 97,3 jam/periode atau rata-rata antara 3- 4 jam perhari
2. Rata-rata pendapatan yang diperoleh dari usaha penetasan itik tersebut dari 30 responden selama 1 periode adalah Rp 4.762.297
3. Besarnya hasil korelasi yaitu 0,762 yang bermakna bahwa terdapat hubungan yang kuat antara curahan waktu kerja wanita dengan pendapatan pada usaha penetasan telur itik di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. Statistik Peternakan Kabupaten Sidrap. Sidrap.
- Cahyono. 1995. Peternakan dan Permasalahannya. Bina Aksara, Jakarta..
- Damsar. 2002. Sosiaologi Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firman, T, 1990. Strategi Alokasi Tenaga Kerja pada Rumahtangga Pedesaan: Studi Kasus Desa Slendro Kabupaten Sragen. Prisma Nomor 2 LP₃ES. Jakarta.
- Hariandja, Marihot T.E. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Sajogyo, P. 1998. Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa. Rajawali Press, Jakarta.
- Swastha dan Sukotjo. 1999. Pengantar Bisnis Modern. Liberty, Yogyakarta.
- Sukirno. 1994. Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekartawi. 2003. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- White, B, 1979. Political Aspect of Poverty, Income Distribution and Their Measurement: Some Example From Rural Java In : Development and Change No. 1.

EFISIENSI BIAYA TERHADAP PENERIMAAN PETERNAKAN ITIK PETELUR DENGAN JUMLAH TERNAK BERBEDA DI KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Martha B. Rombe¹, Ilham Rasyid² dan Aidil Setiadi

^{1,2} **Fakultas Peternakan Unhas; e-mail : martharombe@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efisiensi biaya dari pemeliharaan ternak itik petelur dengan jumlah ternak yang berbeda di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan tehnik deskriptif kuantitatif. Sebanyak 36 responden sebagai sumber data ditentukan dengan *proporsionate random sampling*. Data dikumpulkan dengan kuesioner meliputi data teknis dan data ekonomi berupa produksi telur, itik afkir, biaya tetap, biaya variabel, harga dan penerimaan selama satu periode. Selanjutnya data ditabulasi dan dianalisa menggunakan rasio pengeluaran dan penerimaan. Hasil penelitian memperlihatkan pemeliharaan di bawah 500 dengan rata-rata 233 ekor sementara pemeliharaan di atas 500 rata-rata 753 ekor. Kedua jumlah pemeliharaan peternakan itik masih mendapatkan keuntungan per periode, namun pemeliharaan di bawah 500 ekor dengan R/C ratio sebesar 1,79 lebih efisien dibandingkan pemeliharaan di atas 500 ekor dengan R/C sebesar 1,32 yang disebabkan perbedaan harga jual produk.

Kata kunci: efisiensi biaya, itik petelur

ABSTRACT

The aim of this study was to compare cost efficiency of large-scale and small-scale laying duck farms at Watang Sawitto Residence, Pinrang District, South Sulawesi Province. This study uses quantitative descriptive in technique case study. A total of 36 respondents as the source of the data have determined by proportionate random sampling. Data were collected by questionnaire includes technical data and economic data in the form of egg production, culled duck, fixed costs, variable costs, price and income of admission for one period. Data was tabulated and analyzed by using output/input ratio. The results showed an average of less than 500 maintain ducks while another average of more than 500 ducks. Both maintenance duck farms were profitable per period, the advantage of less than 500 maintenance system is more efficient than more 500 ducks, cause of diffren price of product.

Key words: Cost efficiency, laying ducks

PENDAHULUAN

Usaha ternak itik merupakan salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi masyarakat dipedesaan. Pada umumnya itik dipelihara secara tradisional (ekstensif) dengan penggembalaan di lahan sawah atau rawa. Akhir-akhir ini ketersediaan pakan itik secara alami menjadi berkurang, akibat semakin intensifnya pola tanam lahan sawah serta banyaknya bahan kimia yang digunakan, bahkan termasuk kematian akibat keracunan pestisida. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui budidaya intensifikasi atau semi-intensif.

Menurut Sri Hartati (2011), pemeliharaan semi intensif adalah pemeliharaan dengan cara mengurung itik pada saat-saat tertentu, biasanya pada malam hari sampai pagi hari. Setelah itik dilepas disekitar halaman kandang atau digembalakan ditempat penggembalaan yang dekat. Pada pemeliharaan ini pengadaan pakan sebagian besar disediakan oleh peternak sehingga penggunaan pakan masih kurang efisien.

Namun, pemeliharaan itik dengan sistem tersebut memiliki beberapa keunggulan, diantaranya : produktivitas telur lebih banyak, kesehatan dan keselamatan itik lebih terjamin, biaya pemeliharaan lebih efisien serta menghemat tenaga. Beberapa bangsa itik lokal yang sudah dikenal masyarakat dan mempunyai ciri tersendiri diberi nama sesuai daerah asalnya seperti itik Mojosari, Alabio, Tegal, Cirebon dan Magelang (Anonim, 2011).

Usaha ternak Itik petelur ini dapat dikatakan berhasil bila telah memberikan kontribusi pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup peternak sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari berkembangnya jumlah kepemilikan ternak, dan tambahan pendapatan keluarga. (Budiharjo dan Handayani, 2008). Namun skala besar kecilnya usaha peternakan itik tersebut sangatlah menentukan.

Pendapatan atau dapat juga disebut keuntungan, adalah merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Dimana biaya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Secara matematis analisis pendapatan dapat ditulis dan digambarkan sebagai berikut (Soekartawi, 1995) dalam Siswo (2010):

$$Y = TR - TC$$

$$TR = P \times Q$$

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

Y = Pendapatan (Rp)

TR = Total Penerimaan (Rp)

TC = Total Biaya (Rp)

P = Harga per satuan (Rp)

Q = Jumlah Produksi (butir)

TVC = Total Biaya Variabel (Rp)

TFC = Total Biaya Tetap (Rp)

.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah yang mempunyai prospek pengembangan itik sangat baik, karena kabupaten Pinrang dari tahun 2009 sampai tahun 2011 keadaan peternakan itiknya menduduki populasi unggas terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sistem pemeliharaan itiknya juga sudah semi-intensif dengan jumlah kepemilikan yang berbeda-beda, yaitu antara 100 ekor sampai dengan 900 ekor (Dinas Peternakan Kabupaten Pinrang, 2012).

Keuntungan yang diperoleh petani merupakan hasil dari penjualan telur dan itik afkir dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa produksi. Hal ini menurut pernyataan Wasito dan Eni (1994), pada setiap akhir panen petani akan menghitung hasil bruto yang diperolehnya. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut dikurangkan barulah petani memperoleh apa yang disebut dengan hasil bersih atau keuntungan.

Terdapat perbedaan keuntungan yang diperoleh masing-masing peternak, hal itu disebabkan karena perbedaan jumlah populasi ternak itik yang dimiliki, dimana peternak yang memiliki jumlah populasi ternak paling sedikit (skala kecil) yaitu 100 - 500 ekor memperoleh keuntungan rata-rata terendah, sedangkan peternak yang memiliki jumlah ternak tertinggi yaitu >500 ekor ke atas (skala besar) memperoleh rata-rata keuntungan tertinggi. Sampai sejauh mana kebenaran data ini, maka telah dilakukan penelitian dengan cara membandingkan kelompok yang jumlah populasi ternak itiknya paling sedikit (skala kecil) dengan kelompok yang jumlah populasi ternak itiknya banyak (skala besar).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa survey dengan pengamatan pada peternak itik yang menjadi anggota kelompok pemelihara kurang dari 500 ekor dan anggota kelompok lebih dari 500 ekor. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dalam studi kasus teknik.

Data yang diambil meliputi data teknis (sistem pemeliharaan skala besar dan skala kecil) dan data ekonomi atau keuntungan bisnis yang didasarkan pada keuntungan input-output selama satu periode. Data teknis dan ekonomi dikumpulkan, ditabulasi, dan dianalisis sederhana.

Setiap orang sebagai responden masing-masing jumlah ternak itik diwawancarai terhadap jumlah kepemilikan itik, manajemen, pakan dan pemberiannya, pemasaran, pengetahuan peternakan,

pengetahuan tentang penyakit, harga DOD pembelian dan penjualan itik dewasa, itik afkir, dan biaya-biaya lain dari penerimaan hasil operasi.

Sebaran responden peternak dikelompokkan sebagai berikut :

- Kelompok I, yaitu peternak dengan Skala pemeliharaan ≤ 500 ekor itik terdapat responden sebanyak 20 orang
- Kelompok II, yaitu peternak dengan Skala pemeliharaan < 500 itik terdapat responden sebanyak 16 orang

Tabel 1. Kriteria Responden Sesuai Kepemilikan Itik

No	Kepemilikan itik (ekor)	Jmlh responden (orang)	Kriteria
1	100	6	
2	200	5	Kelompok I 20 orang
3	300	5	
4	400	4	
5	500	4	
6	600	4	Kelompok II 16 orang
7	700	3	
8	800	3	
9	900	2	
Jumlah Total			36 orang

Selanjutnya, dalam penelitian ini, variable-variabel yang digunakan didefinisikan sebagai berikut :

1. Biaya Variabel: Produksi dan Pemasaran

- Biaya Pakan = harga rata-rata per kg /periode
- Biaya DOD = yang dipelihara dalam satuan ekor/periode
- Biaya Tenaga Kerja = upah tenaga kerja sesuai curahan hari kerja/periode
- Biaya Obat-Obatan = total nilai pengeluaran untuk obat/periode
- Mortalitas = jumlah itik yang mati (dihitung dalam rupiah)/periode
- Listrik = jumlah biaya penggunaan lampu/periode
- Biaya pemasaran = total nilai pengeluaran untuk pemasaran telur

2. Biaya Tetap: Investasi

- Investasi Fisik = Kandang (Biaya Kandang/Lama Pemakaian)
- Penyusutan Peralatan = Biaya Perawatan alat/Lama Pemakaian)
- Biaya Operasional = $\frac{\text{Harga awal} - \text{Harga Akhir}}{\text{Lama Pemakaian}}$

3. Total Pengeluaran = Biaya variable + Biaya tetap yang dikeluarkan sebagai biaya produksi

4. Penerimaan (Revenue) adalah:

- Penjualan Telur (Harga/butir x Jumlah Telur/ Periode)
- Penjualan Itik Afkir (Harga/ekor x Jumlah / Periode)

5. Keuntungan usaha = selisih antara total nilai output dengan total nilai input

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan struktur biaya yang ada pada kedua kelompok jumlah pemeliharaan itik tersebut, maka dapat dihitung atau ditetapkan besaran ekonomi masing-masing seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Analisa Keuntungan Usaha Ternak Itik Rata-rata Per Periode Pada Dua Sistim Skala Usaha Pemeliharaan

Uraian	Jumlah (Rp .000)/jumlah kepemilikan	
	≤ 500	> 500
Penerimaan (Revenue)	943.286	1.798.563
Penjualan telur	764.856	1.440.023
Penjualan itik afkir	178.430	358.540
Total Pengeluaran (Cost)	527.220	1.367.578
Produksi	468.023	1.298.121
Pemasaran	22.630	23.672
Investasi	36.567	45.785
Keuntungan	416.066	430.985
Analisa Ekonomi Usaha:		
R – C rasio	1,79	1,32
B – C rasio	0,79	0,32

Tabel 2 memperlihatkan adanya penerimaan peternak dari hasil penjualan telur maupun dari penjualan itik afkir, masing-masing untuk peternak kurang 500 ekor (= Rp 943.286,-) dan peternak lebih 500 ekor (= Rp 1.798.563,-). Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri dari: biaya produksi, biaya pemasaran serta biaya investasi berupa kandang, untuk masing-masing peternak kurang 500 ekor (= Rp 527.220,-) dan peternak lebih 500 ekor (= Rp 1.367.578,-).

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari masing-masing peternak adalah :

$$\text{Jumlah } \leq 500 \text{ ekor} = \text{Rp } 943.286,- - \text{Rp } 527.220,- = \text{Rp } 416.066,-$$

$$\text{Jumlah } > 500 \text{ ekor} = \text{Rp } 1.798.563,- - \text{Rp } 1.367.578,- = \text{Rp } 430.985,-$$

Berdasarkan data tersebut, masing-masing kelompok peternak telah memperlihatkan adanya hasil perolehan keuntungan. Namun untuk mengetahui segi efisiensi biaya dari masing-masing kelompok peternak ini dilakukan pengujian R/C rasio dan B/C rasio yang hasilnya adalah :

Perhitungan R/C rasio

$$\text{Jumlah } \leq 500 \text{ ekor} = \text{Rp } 943.286,- / \text{Rp } 527.220,- = 1,79$$

$$\text{Jumlah } > 500 \text{ ekor} = \text{Rp } 1.798.563,- / \text{Rp } 1.367.578,- = 1,32$$

Perhitungan B/C rasio

$$\text{Jumlah } \leq 500 \text{ ekor} = \text{Rp } 416.066,- / \text{Rp } 527.220,- = 0,79$$

$$\text{Jumlah } > 500 \text{ ekor} = \text{Rp } 430.985,- / \text{Rp } 1.367.578,- = 0,32$$

Hal ini menunjukkan bahwa baik R/C rasio maupun B/C rasio peternak ≤ 500 ekor lebih efisien dibandingkan peternak > 500 ekor, yang ditandai dengan R/C rasio 1,79 > 1,32 dan BC rasio 0,79 > 0,32.

KESIMPULAN

1. Kedua kelompok peternak itik masih mendapatkan keuntungan per periode.
2. Pembiayaan peternak ≤ 500 ekor dengan R/C ratio 1,79 lebih efisien disebabkan harga jual telur maupun ternak afkir lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan peternak yang memelihara > 500 ekor.dengan R/C ratio 1,32.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2011. Analisa Budidaya Itik, Peluang Usaha Rumah Tangga Menjanjikan.<http://www.analisa-budidaya-itik-peluang-usaha-rumah-tangga-menjanjikan.html>. Diakses 19 september 2012.

- _____ 2012. Laporan Data Populasi Ternak di Kabupaten Pinrang. Dinas Peternakan Kabupaten Pinrang.
- Budiraharjo, K Dan Migie Handayani. 2008. Analisis Profitabilitas Dan Kelayakan Finansial Usaha Ternak Itik. <http://www.google.co.id/urlsa>. Diakses 19 september 2012.
- Siswo Agus Widodo. 2010. Teori Pendapatan.<http://godagadoartikel.blogspot.com/2010/01/teori-pendapatan.html>. Diakses 19 september 2012.
- Soekartawi. 1995. Analisis Usaha Tani. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Hartati. 2011. Penyediaan Pakan Ternak Itik Petelur. <http://cybex.deptan.go.id/penyuluhan/penyediaan-pakan-ternak-itik-petelur>. Diakses 15 Oktober 2012.
- Wasito dan Eni Siti Rohaeni. 1994. *Beternak Itik Alabio*. Penerbit Kanisius. Malang.

POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA PETERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Moch. Sugiarto dan Oentoeng Edy Djatmiko
Fakultas Peternakan UNSOED, Email: zoegic@yahoo.com

ABSTRAK

Pola pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga peternak sapi potong. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi besaran pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong dan (2) menganalisis pola pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara di dasarkan pada pola pemeliharaan (penggemukan dan pembibitan). Pola pengeluaran rumah tangga tidak termasuk pengeluaran untuk usaha ternak sapi potong. Data yang digunakan merupakan data primer dari 225 responden (peternak sapi potong) pada kedua pola pemeliharaan tersebut yang terpilih melalui metode *multistage sampling* dengan tahapan (1) *stratified random sampling* dan (2) *quota sampling*. Uji t digunakan untuk menganalisis perbedaan berbagai variabel pengeluaran rumah tangga peternak yang menggunakan pola pemeliharaan penggemukan dan pembibitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong dengan pola penggemukan sebesar Rp 1,561,212.75 per bulan dan Rp 1,400,493.58 pada peternak dengan pola pembibitan. Besaran pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong menunjukkan perbedaan ($p < 0.05$) antara pola penggemukan dan pembibitan. Pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga peternak dengan pola pembibitan lebih tinggi (57,3 persen) dibanding pada pola penggemukan (47.0 persen). Selanjutnya secara lebih detail digambarkan bahwa pengeluaran peternak dengan pola penggemukan untuk kegiatan sosial, rokok, alat mandi, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan dan bensin secara signifikan lebih tinggi dibandingkan peternak sapi potong pola pembibitan ($P < 0.05$). Berdasarkan hasil tersebut disarankan agar peternak sapi potong dengan pola usaha pembibitan perlu di diversifikasi dengan pola usaha penggemukan untuk memperkuat pola pengeluaran rumah tangga peternak khususnya pengeluaran non pangan.

Kata kunci : pola pengeluaran, sapi potong, penggemukan, pembibitan

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian khususnya bidang peternakan di Kabupaten Banjarnegara ditujukan untuk peningkatan populasi ternak dan pendapatan peternak. Secara ekonomi pembangunan peternakan mengarah pada perubahan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan peternak adalah tingkat pendapatan. Beragam pekerjaan di sektor pertanian yang dilakukan masyarakat/peternak mendorong perbedaan sumber pendapatan yang dimiliki. Demikian halnya pada masyarakat dan peternak di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki lebih dari 1 sumber pendapatan.

Peternakan sapi potong di Kabupaten Banjarnegara telah memberikan gambaran adanya manfaat ganda dari agribisnis sapi potong untuk penguatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Peternak mengusahakan agribisnis sapi potong dengan pola penggemukan dan pembibitan serta sebagian besar (98 persen) dilakukan sebagai usaha sampingan. Aktifitas kebun sayur hortikultura, karyawan, pegawai, dan pertanian tanaman pangan masih menjadi pekerjaan utama peternak sapi potong. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga peternak sapi potong memiliki lebih dari 1 sumber usaha dalam pengembangan ekonomi rumah tangga. Sejalan pendapat Nurmanaf (1988) bahwa di pedesaan sebagian besar masyarakat memiliki dua atau lebih sumber pendapatan. Sementara itu sebaran pendapatan rumah tangga bervariasi antar darah dan antar tahun.

Pekerjaan merupakan faktor penting dalam suatu rumah tangga karena hal inilah yang nantinya akan menentukan pendapatan yang diperoleh untuk kelangsungan hidup suatu rumah tangga peternak. Pendapatan keluarga peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara diperoleh dari usaha sapi potong dan non sapi potong yang terkait dengan pengeluaran rumah tangga peternak. Pola pengeluaran

merupakan struktur pengeluaran yang dibedakan atas pengeluaran pangan dan pangan. Struktur pengeluaran merupakan salah satu indikator ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Handewi dkk, (2006) menyatakan bahwa. salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan keluarga adalah melalui struktur pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang lebih tinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan yang rendah.

Terkait dengan hal tersebut kajian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi besaran pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong dan (2) menganalisis pola pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara di dasarkan pada pola pemeliharaan (penggemukan dan pembibitan).

METODE PENELITIAN

Kajian tentang Pola Pengeluaran Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan metode survey melalui wawancara menggunakan kuisioner dan pengamatan terhadap peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara. Metode survey digunakan untuk memperoleh fakta-fakta sosial, ekonomi, atau teknis dari agribisnis sapi potong. 225 peternak yang melakukan usaha sapi potong dengan pola penggemukan dan pola pembibitan dipilih sebagai responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel berjenjang (*multistage sampling*). Pertama, wilayah yang dijadikan sampel penelitian dipilih secara stratified random sampling berdasarkan tinggi tempat (tinggi, sedang dan rendah). Pada masing masing strata dipilih 20 persen kecamatan sebagai sampel wilayah. Kedua, responden (peternak) dipilih dengan metode Quota Sampling sebanyak 30 peternak pada masing masing wilayah kecamatan terpilih.

Variabel yang diamati pada kajian ini adalah pengeluaran peternak yang meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, listrik, gas, pulsa, rokok, sosial, alat mandi, pajak kendaraan, bensin dan pajak bumi bangunan. Variabel variable tersebut diamati pada peternak di dua pola usaha berbeda (penggemukan dan pembibitan). Data dianalisis dengan statistic deskripsi dan uji t untuk mengetahui perbedaan pengeluaran peternak pada pola penggemukan dan pembibitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Peternak

Peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara mengusahakan sapi potong dengan pola penggemukan dan pembibitan. Sebagian besar peternak (81 persen) melakukan usaha menggunakan pola penggemukan (periode 3-4 bulan produksi) dengan hasil utama daging/pertambahan bobot badan sapi. Sebanyak 19 persen usaha sapi potong dilakukan dengan pola pembibitan.

Peternak pada usaha sapi potong pola penggemukan mengusahakan ternak dengan kisaran 3-4 sapi bakalan per periode. Sedangkan pada usaha pembibitan peternak memiliki induk sapi potong dengan rata-rata 2 ekor per peternak. Rataan umur peternak sapi potong pola pembibitan 51,5 tahun dan rata-rata umur tersebut lebih tua dibanding peternak yang berusaha di pola penggemukan (45,6 tahun). Peternak pada pola penggemukan memiliki rata-rata pendidikan lulus Sekolah Dasar (SD) sedangkan pada pola pembibitan terdapat 44 persen responden yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Namun demikian peternak memiliki rata-rata pengalaman dan sejarah yang cukup lama (15,6 tahun) dalam berusaha ternak dengan pola pembibitan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa petani yang lebih muda dan pendidikan yang lebih tinggi banyak terlibat pada usaha sapi potong pola penggemukan. Insentif ekonomi yang lebih banyak pada pola penggemukan menjadi daya tarik untuk peternak yang lebih muda terlibat pada pola usaha tersebut. Perkembangan teknologi pakan pada usaha pola penggemukan dan penyediaan pakan yang lebih intensif membutuhkan tenaga dan kemampuan akademik lebih tinggi. Oleh karena itu peternak dengan umur yang lebih muda dan pendidikan yang lebih tinggi pada usaha penggemukan diharapkan dapat menjadi *driving force* perkembangan usaha sapi potong. Mardikanto, (2009) menyatakan bahwa umur petani akan

mempengaruhi kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal yang baru dalam menjalankan usaha taninya. Hal tersebut di dukung pendapat Djamali (2000) bahwa pendidikan dan pengalaman yang memadai akan membuka cakrawala pemahaman terhadap prinsip teknik dan prinsip ekonomis yang menjadi syarat bagi keberhasilan seorang pengelola usahatani.

2. Pengeluaran Rumah Tangga Peternak

Secara umum pengeluaran rumah tangga peternak meliputi pengeluaran untuk pangan dan non pangan. Pendapatan yang diterima dari usaha tani dan non usaha tani digunakan rumah tangga peternak untuk mengkonsumsi barang dan jasa dalam periode tertentu. Pada kondisi pendapatan yang terbatas, lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan hukum engel yang mengemukakan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan terlebih dahulu. Sugiarto (2008) menyatakan bahwa pergeseran dan peningkatan pendapatan akan menurunkan tingkat pengeluaran untuk pangan dan menaikkan tingkat pengeluaran non pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong dengan pola penggemukan sebesar Rp 1,561,212.75 per bulan dan Rp 1,400,493.58 pada peternak dengan pola pembibitan. Besaran pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong menunjukkan perbedaan ($p < 0.05$) antara pola penggemukan dan pembibitan. Besaran pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong dengan pola penggemukan yang lebih tinggi dari pola pembibitan juga didorong dari pendapatan rumah tangga yang lebih besar (Rp 2,252,235.2/bulan) dibandingkan pada pola pembibitan (Rp 1,672,530/bulan). Proporsi pengeluaran rumah tangga pada pola penggemukan sebesar 69,3 persen sedangkan pada pola pembibitan sebesar 83,7 persen dari pendapatan rumah tangga peternak. Putra (2012) menggambarkan bahwa pendapatan petani mempengaruhi besaran pengeluaran rumah tangga petani. Upaya peningkatan pendapatan usaha tani akan dapat meningkatkan skala konsumsi dan pengeluaran rumah tangga petani.

Untuk rumah tangga peternak dengan skala kecil, pendapatan rumah tangga sangat mempengaruhi besaran pengeluaran. Pendapatan dari berbagai ragam sumber sangat diperhatikan peternak dalam upaya penggalan dana sebagai sumber pengeluaran. Sejalan dengan pendapat Sitorus (1994) bahwa rumah tangga miskin menerapkan strategi nafkah ganda yang tidak mengharapkan hanya dari satu pekerjaan melainkan dari beberapa macam pekerjaan tergantung musim dan kesempatan. Oleh karena itu pengembangan kegiatan di dalam dan di luar usaha peternakan sapi potong perlu diberikan perhatian yang lebih besar guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

3. Pola Pengeluaran Rumah Tangga Peternak

Rumah tangga peternak merupakan proses interaksi dan integrasi dari beberapa individu dalam ikatan keluarga dalam menjalankan kehidupan. Dalam menjalan kehidupan dibutuhkan korbanan yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan masing masing individu. Pengeluaran rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga peternak digolongkan menjadi 2 yaitu konsumsi pangan dan non pangan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk pengeluaran untuk usaha. Pola pengeluaran rumah tangga peternak sapi potong merupakan gambaran biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga peternak untuk konsumsi pangan, pendidikan, kesehatan, listrik, gas, pulsa, rokok, sosial, alat mandi dan bensin. Pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga peternak sapi potong di Kabupaten Banjarnegara dengan pola pembibitan lebih tinggi (57,3 persen) dibanding pada pola penggemukan (47.0 persen). Sedangkan untuk pengeluaran non pangan terlihat bahwa pada usaha sapi potong dengan pola penggemukan sebesar (53 persen) dan pola pembibitan hanya 42,7 persen). Kondisi ini sesuai hukum Engel bahwa jika pendapatan meningkat, maka persentasi pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin kecil. Sudaryanto, *et al* (1999) menyimpulkan

bahwa tingkat pendapatan memiliki hubungan yang negatif dengan pengeluaran untuk makanan, yang artinya semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin rendah porsi pengeluaran untuk makanan.

Tabel 1. Pengeluaran rumah tangga peternak pola penggemukan dan pembibitan

Jenis Pengeluaran	Usaha Penggemukan				Usaha Pembibitan		
	D. Rendah	D. Menengah	D. Tinggi	Rataan	D. Rendah	D. Menengah	Rataan
Pangan	892,276.94	822,065.48	464,192.71	726,178.37	719,221.54	888,166.67	803,694.11
Pendidikan	328,118.24	215,083.33	34,702.78	192,634.78	105,795.45	150,897.44	128,346.45
Kesehatan	97,253.52	28,690.48	18,506.25	48,150.08	14,651.52	17,750.00	16,200.76
Listrik	58,902.08	57,371.43	39,495.83	51,923.12	32,215.45	62,755.56	47,485.50
Gas	36,980.00	30,742.86	22,761.46	30,161.44	24,658.54	25,200.00	24,929.27
Pulsa	224,406.59	117,857.14	55,906.25	132,723.33	89,732.46	117,272.73	103,502.59
Rokok	166,880.95	134,682.80	103,483.33	135,015.69	66,204.43	125,916.67	96,060.55
Sosial	49,702.08	42,415.85	40,159.09	44,092.34	36,195.12	45,550.00	40,872.56
Alat Mandi	46,170.42	36,352.38	30,339.58	37,620.79	41,058.94	38,811.11	39,935.03
Bensin	102,112.34	116,625.00	269,401.04	162,712.79	95,803.92	103,129.63	99,466.78
Total	2,002,803.17	1,601,886.74	1,078,948.33	1,561,212.7	1,225,537.37	1,575,449.79	1,400,493.

Tampak pada table 1 bahwa pengeluaran rokok dan pulsa pada peternak sapi potong pola penggemukan lebih tinggi dari pada peternak dengan pola pembibitan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa interaksi sosial peternak sapi potong pola penggemukan lebih luas dari pada peternak dengan pola pembibitan. Hampir semua peternak merokok dan tidak semua pengeluaran rokok untuk diri sendiri namun juga untuk interaksi sosial dengan peternak lainnya. Demikian juga halnya dengan pengeluaran pulsa lebih banyak digunakan untuk komunikasi pemasaran produk (sapi) dan interaksi antar peternak.

Selanjutnya secara lebih detail digambarkan bahwa pengeluaran peternak pada pola penggemukan untuk kegiatan sosial, rokok, alat mandi, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan dan bensin secara signifikan lebih tinggi dibandingkan peternak sapi potong pola pembibitan ($P < 0.05$).

KESIMPULAN

Berdasarkan studi Pola Pengeluaran Rumah Tangga Peternak Sapi Potong Di Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rumah tangga pada peternak sapi potong pola penggemukan lebih tinggi dibanding pada peternak pola pembibitan. Perbedaan pendapatan antara kedua pola usaha tersebut dapat mendorong perbedaan besaran pengeluaran. Peternak sapi potong pada pola pembibitan dengan pendapatan yang lebih rendah memiliki struktur pengeluaran lebih banyak untuk makanan/pangan keluarga/rumah tangga. Pendapatan rumah yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan pengeluaran non pangan rumah tangga peternak.

Berdasarkan hasil tersebut disarankan agar peternak sapi potong dengan pola usaha pembibitan perlu di diversifikasi dengan pola usaha penggemukan untuk memperkuat pendapatan rumah tangga yang akhirnya dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga peternak khususnya pengeluaran non pangan. Selain itu eksplorasi pendapatan dari luar usaha sapi potong perlu ditingkatkan untuk mengembangkan sumber sumber pendapatan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, A., 2000. Manajemen Usahatani. Departemen Pendidikan Nasional. Politeknik Pertanian Negeri Jember. Jember.
- Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian . LPP UNS dan UNS Press. Surakarta

- Nurmanaf, A.R., 1988. Struktur Pendapatan Rumah tangga Petani padi Sawah di Pedesaan Sumatera Barat (*Editor: F. Kasryno dkk*). Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan menuju Ekonomi Berimbang..
- Putra, A.Y, Djaimi Bakce dan Ahmad Rifai. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Keputusan Ekonomi Rumahtangga Petani Karet Di Kabupaten Kuantan Singingi. Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE). Volume 3, Nomor 1, Juli 2012
- Rachman, H.,Tri B. Purwantini, dan Yuni Marisa. 2006. Prospek Diversifikasi Usaha Rumah Tangga Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Penanggulangan Kemiskinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 1, Juli 2006
- Sitorus, M. T. F. 1994. Peranan Ekonomi Dalam Rumah tangga Nelayan Miskin di Pedesaan Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor,21 (8)
- Sudaryanto, I.W Rusastra dan P. Simatupang. 1999. The Impact of Economic Crisis and Policy Adjustment on Food Crop Development Toward Economic Globalization. Paper Presented on "Roundtable Discussion on Food and Nutrition Task Force I; Food and Agriculture" Pra WNPG VII, 8 November 1999. Center For Agro-Socio Economic Research, Bogor.
- Sugiarto. 2008. Analisis Pendapatan, Pola Konsumsi dan Kesejahteraan Petani pada Basis Agroekosistem Lahan Sawah Irigasi di Perdesaan. Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Perdesaan dan Pertanian : Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Bogor 19 Nopember 2008.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DI KELURAHAN KAMBIOLANGI

Muhammad Aminawar¹, Sitti Nurani Sirajuddin¹, dan Rahmayani Sila²

¹ Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin; email : maminawar@yahoo.co.id

² Alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 sampai bulan Februari 2013 di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi masyarakat yang bermukim pada jarak 1 sampai 2 KM dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tersebut sebanyak 220 orang. Berhubung karena jumlah populasi yang cukup besar yaitu 220 orang, maka pada penelitian ini dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan responden sebanyak 37 orang. Analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran yaitu sangat mengganggu (1), cukup mengganggu (2), tidak mengganggu (3). Untuk mengukur variabel persepsi masyarakat terhadap keberadaan RPH digunakan sub variabel bau, limbah, dan pencemaran air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang adalah cukup mengganggu, artinya masyarakat keberatan dengan adanya Rumah Potong Hewan (RPH) yang berada di dekat pemukiman karena limbah dari RPH langsung dialirkan ke sungai dan sebagian ditumpuk di sekitar RPH sehingga menimbulkan bau serta mencemari air dan lingkungan sekitar.

Kata kunci : Persepsi Masyarakat, Rumah Potong Hewan (RPH)

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of Public Perception Against Slaughterhouse (RPH) in the Village District Kambiolangi Alla Enrekang District. Conducted in October 2012 to February 2013 in the Village District Kambiolangi Alla Enrekang District. This research is descriptive quantitative research. The population of people who live at a distance of 1 to 2 KM from abattoirs (slaughterhouses) that as many as 220 people. Because because the population is large enough that 220 people, then the sampling study was conducted using Slovin formula and produce as many as 37 respondents. Analysis of the data used is descriptive statistics using a Likert scale of measurement that is very disturbing (1), is quite disturbing (2), does not interfere with (3). to gauge public perception of the existence of variables used RPH sub-variables odor, waste, and water pollution. The results showed that the public perception of the existence of Slaughter House (RPH) in the Village District Kambiolangi Alla Enrekang District is quite disturbing meaning people objected to the Slaughter House (RPH) for the nearby settlement of slaughterhouse waste directly into river and some stacked around RPH so cause odor and pollutes the water and the surrounding environment.

Key words : Public Perception, Slaughter House (RPH)

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap produk industri peternakan semakin meningkat (termasuk produk industri hasil pertanian dalam hal ini khususnya peternakan). Daging adalah salah satu produk industri peternakan yang dihasilkan dari usaha pemotongan hewan. Seiring semakin banyaknya permintaan masyarakat terhadap daging yang sehat khususnya daging sapi sebagai sumber utama protein hewani terus meningkat. Hal ini menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sangat diperlukan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas baik dari tingkat kebersihannya, kesehatannya, ataupun kehalalan daging untuk

dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat perdesaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya ke arah itu adalah memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut.

Berkembangnya kemajuan teknologi dalam pembangunan peternakan diantaranya dalam industri pemotongan ternak akan membawa dampak positif dan negatif baik lingkungan maupun manusia, tumbuh pesatnya industri juga berarti makin banyak limbah yang dikeluarkan dan mengakibatkan permasalahan yang kompleks bagi lingkungan sekitar. Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai tempat usaha pemotongan hewan dalam penyediaan daging sehat seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan sanitasi baik dalam lingkungan RPH maupun lingkungan disekitarnya.

Menurut Lestari (1994), bahwa perancangan bangunan RPH yang berkualitas sebaiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sebaiknya sesuai dengan Instalasi Standar Internasional dan menjamin produk sehat dan halal. RPH dengan standar internasional biasanya dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih, rapi, bersih dan sistematis, menunjang perkembangan ruangan dan modular sistem. Produk sehat dan halal dapat dijamin dengan RPH yang memiliki sarana untuk pemeriksaan kesehatan hewan potong, memiliki sarana menjaga kebersihan, dan mematuhi kode etik dan tata cara pemotongan hewan secara tepat. Selain itu juga harus bersahabat dengan alam, yaitu lokasi sebaiknya di luar kota dan jauh dari pemukiman dan memiliki saluran pembuangan dan pengolahan limbah yang sesuai dengan AMDAL.

RPH di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang merupakan satu-satunya RPH yang ada di daerah Kecamatan Alla sehingga RPH ini memiliki aktivitas pemotongan yang cukup besar setiap bulannya. Hal ini dikarenakan RPH ini harus memenuhi permintaan daging di daerah Kecamatan Alla dan sekitarnya, khususnya para pedagang makanan misalnya penjual coto, penjual nasu cempa, dan penjual bakso. Adapun data tingkat pemotongan di RPH tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Pemotongan Ternak Sapi per Bulan Rumah Potong Hewan di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

No.	Bulan	Jumlah Pemotongan per Bulan (Ekor)
1	Januari	16
2	Februari	17
3	Maret	12
4	April	18
5	Mei	20
6	Juni	24
7	Juli	22
8	Agustus	21
9	September	16
10	Oktober	16
11	Nopember	14
12	Desember	19
	Jumlah	104

Sumber : Data Sekunder yang Telah Diolah, 2011.

Berdasarkan data pada tabel 1, jumlah pemotongan paling banyak terjadi pada bulan Juni yaitu sebanyak 24 jumlah pemotongan. Hal ini disebabkan karena banyaknya acara pernikahan yang terjadi pada bulan tersebut menurut karyawan yang ada di RPH tersebut, sedangkan jumlah pemotongan yang paling sedikit yaitu pada bulan Maret sebanyak 12 jumlah pemotongan.

RPH di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang merupakan rumah pemotongan hewan yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dari jumlah pemotongan yang terjadi setiap bulannya pada rumah pemotongan hewan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah pada RPH tersebut adalah limbah yang dihasilkan seperti limbah padat seperti feces, dan limbah cair (urine + darah) yang dihasilkan dari pemotongan tersebut dibuang di sekitar RPH bahkan saluran pembuangan dari RPH tersebut dibuang ke sungai, sehingga menimbulkan keresahan dari masyarakat yang tinggal di sekitar RPH. Dengan adanya pembuangan limbah di Rumah Pemotongan Hewan tersebut, maka menimbulkan beberapa persepsi di masyarakat yang berada di sekitar Rumah Pemotongan Hewan tersebut.

Persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Dimana persepsi merupakan hasil interaksi antara dunia luar individu (lingkungan) dengan pengalaman individu yang sudah diinternalisasi dengan sistem sensorik alat indera sebagai penghubung, dan diinterpretasikan oleh sistem saraf di otak (Aditya, 2007). Berdasarkan pernyataan di atas, maka perlu diketahui bagaimana persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar RPH mengenai keberadaan RPH tersebut.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Maka dilakukan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember 2012 hingga Februari 2012 di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, dengan pertimbangan bahwa adanya beberapa keluhan dari sebagian anggota masyarakat terhadap keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini persepsi masyarakat terhadap keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang berada di sekitar RPH dari jarak 1 sampai 2 KM yaitu sebanyak 220 orang, sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 37 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk sumber data meliputi data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat sekitar RPH, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak atau instansi terkait.

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif dalam hal ini tabel distribusi frekuensi. Pada penelitian ini digunakan skala likert yang membantu peneliti untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dalam hal ini persepsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bau

Indikator bau dapat dilihat dari :

- Aroma
- Bau pada waktu kemarau
- Bau pada waktu musim hujan

- Bau sangat menyengat
- Bau yang tidak mudah hilang

Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dari sub variabel bau, dapat dilihat pada tabel 2.

Pada tabel 2, total skor untuk sub variabel bau diperoleh 385 skor dengan kategori cukup mengganggu artinya masyarakat keberatan dengan adanya rumah pemotongan hewan tersebut, tapi tetap dapat memahami keberadaan RPH yang berada pada interval (308 – 431) yang berarti bahwa masyarakat cukup terganggu dengan adanya bau yang ditimbulkan oleh rumah pemotongan hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarma dalam Rachman (2012) yang menyatakan bahwa tanggapan seseorang terhadap bau yang tercium tergantung individu seseorang, dimana bau yang ditimbulkan RPH tersebut berasal dari limbah padat (feses), limbah cair (urine + darah), dan sisa pakan.

Tabel 2. Penilaian Persepsi Masyarakat Tentang Bau Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

No.	Kategori	Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)	Bobot
1	Aroma				
	Mengganggu	3	14	37,83	42
	Cukup Mengganggu	2	11	29,72	22
	Tidak Mengganggu	1	12	32,43	12
Jumlah			37	100	76
2	Bau Pada Waktu Kemarau				
	Mengganggu				
	Cukup Mengganggu	3	15	40,54	45
	Tidak Mengganggu	2	11	29,72	22
		1	11	29,72	11
Jumlah			37	100	78
3	Bau Pada Waktu Musim Hujan				
	Mengganggu	3	15	40,54	45
	Cukup Mengganggu	2	10	27,08	20
	Tidak Mengganggu	1	12	32,43	12
Jumlah			37	100	77
4	Bau Sangat Menyengat				
	Mengganggu				
	Cukup Mengganggu	3	16	43,23	48
	Tidak Mengganggu	2	9	24,32	18
		1	12	32,43	12
Jumlah			37	100	78
5	Bau Tidak Mudah Hilang				
	Mengganggu				
	Cukup Mengganggu	3	15	40,54	45
	Tidak Mengganggu	2	9	24,32	18
		1	13	35,13	13
Jumlah			37	100	76
Total					385

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Limbah

Indikator limbah dapat dilihat dari :

- Langsung dibuang / dialirkan ke sungai

- Ditumpuk

Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dari sub variabel limbah, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Persepsi Masyarakat Tentang Limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

No.	Kategori	Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)	Bobot
1	Langsung dialirkan ke sungai				
	Mengganggu	3	11	29,72	33
	Cukup Mengganggu	2	14	35,13	28
	Tidak Mengganggu	1	12	32,43	12
	Jumlah		37	100	73
2	Ditumpuk				
	Mengganggu	3	10	27,02	30
	Cukup Mengganggu	2	11	29,72	22
	Tidak Mengganggu	1	16	43,24	16
	Jumlah		37	100	68
	Total				141

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Pada tabel 3, total skor untuk sub variabel limbah diperoleh 141 skor dengan kategori cukup mengganggu artinya masyarakat keberatan dengan adanya rumah pemotongan hewan tersebut, tapi tetap dapat memahami keberadaan RPH yang berada pada interval (123 – 172) yang berarti bahwa masyarakat cukup terganggu dengan adanya pengolahan limbah dari RPH karena fekesnya hanya dibiarkan di saluran pembuangan saja atau langsung dibuang di sungai. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusnopranto (1995) yang menyatakan bahwa limbah ternak adalah suatu sumber daya yang bila tak dimanfaatkan dengan baik, dapat menimbulkan masalah bagi peternak itu sendiri maupun terhadap lingkungan. Semua limbah peternakan adalah bahan yang dapat diperbaharui (renewable), tak akan habis selama ternak ada. Bila limbah peternakan tidak dikelola dengan baik, maka akan mencemari atau memperburuk kondisi lingkungan setempat.

Pencemaran Air

Indikator limbah dapat dilihat dari :

- Air berbau
- Air yang tercemar / keruh

Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dari sub variabel pencemaran air, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Persepsi Masyarakat Tentang Pencemaran Air Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

No.	Kategori	Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)	Bobot
1	Air Berbau				
	Mengganggu	3	10	27,02	30
	Cukup Mengganggu	2	11	29,72	22
	Tidak Mengganggu	1	16	43,24	16
Jumlah			37	100	68
2	Air Tercemar / Keruh				
	Mengganggu	3	10	27,02	30
	Cukup Mengganggu	2	12	32,43	24
	Tidak Mengganggu	1	15	40,54	15
Jumlah			37	100	69
Total					137

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2012.

Pada tabel 4, total skor untuk sub variabel pencemaran air diperoleh 137 skor dengan kategori cukup mengganggu artinya masyarakat keberatan dengan adanya rumah potong hewan tersebut, tapi tetap dapat memahami keberadaan RPH yang berada pada interval (123 – 172) yang berarti bahwa masyarakat cukup terganggu dengan adanya pencemaran air karena limbah yang dihasilkan oleh rumah potong hewan tersebut langsung dialirkan ke sungai. Hal ini sesuai dengan pendapat Lahamma (2006) yang menyatakan bahwa harusnya ada pengolahan limbah yang benar agar tidak mengganggu warga dan limbah tersebut sebaiknya diolah agar tidak mencemari lingkungan.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang adalah cukup mengganggu, artinya bahwa masyarakat keberatan dengan adanya Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut. Tetapi tetap dapat memahami keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut karena hanya satu-satunya RPH yang ada di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan dapat memenuhi kebutuhan / permintaan akan daging di seluruh Kecamatan Alla dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnoputranto, H., 1995. Limbah Industri dan B-3 Dampaknya Terhadap Kualitas Lingkungan dan Upaya Pengelolaannya. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Lahamma, A., 2006. Persepsi Peternak Tentang Limbah Pertanian dalam Pemanfaatannya Sebagai Pakan Ternak Sapi di Kecamatan Sukamaju Luwu Utara. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Lestari, P.T.B.A., 1994. Rumah Potong Hewan Ruminansia Indonesia. PT. Bina Aneka Lestari, Jakarta.
- Rachman, M., 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Babi di Kampung Katimbang Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Universitas Hasanuddin, Makassar.

KAJIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM SATU PETANI SATU SAPI (SPSS) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI SUMATERA BARAT¹

Muhamad Reza

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Email: muhamadreza@rocketmail.com

ABSTRAK

Program Satu Petani Satu Sapi (SPSS) telah menjadi ketetapan dan satu kebijakan dalam ranah gerakan kesejahteraan petani (GPP) di propinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2010 hingga saat ini. Program ini berorientasi kepada percepatan pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga di nagari, kelurahan dan desa, melalui sektor peternakan. Sebab beternak bisa memanfaatkan lahan marginal dalam skala kecil, dan limbahnya dapat kembali menyuburkan lahan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong efektifitas keberhasilan usaha tani melalui kegiatan 'satu petani satu sapi'. Penelitian ini dilaksanakan di empat Kabupaten (Padang Pariaman, 50 Kota, Pasaman Barat, Solok) dan 1 Kota (Payakumbuh). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data memadukan beberapa pendekatan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah sampel penelitian sebanyak 160 orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program SPSS, Peningkatan Pendapatan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat tani agar meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan pula kemandiriannya. Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*).

Salah satu subsektor pertanian yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pembangunan oleh pemerintah adalah bidang peternakan sapi. Dimana subsektor ini diyakini mampu membantu meningkatkan perekonomian petani. Maka dari itu pemerintah Sumatera Barat menjadikan sektor peternakan sapi sebagai salah satu alat untuk dapat meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, baik potensi sumberdaya manusia (SDM) maupun sumberdaya alam (SDA), berada dalam kondisi yang memadai untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Untuk sektor peternakan, pemerintah Sumbar meluncurkan program yang diberi nama Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Program tersebut resmi diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Prof. Irwan Prayitno pada tanggal 19 Desember 2010 di Kota Payakumbuh dan keseluruhan Kabupaten/Kota juga akan dilaksanakan program tersebut. Ide dasarnya bahwa 60,7 persen penduduk Sumatera Barat adalah petani. Namun sayangnya rata-rata pendapatan mereka per tahun masih rendah dan belum sejahtera. Penyebabnya adalah rata-rata petani kita hanya memiliki lahan 0,3 hektar lahan per KK. Fakta ini menyebabkan jam kerja petani tidak optimal dan sudah tentu pendapatan yang diperoleh tidak juga maksimal.

Program 'satu petani satu sapi' (SPSS) telah menjadi ketetapan dan satu kebijakan dalam ranah gerakan kesejahteraan petani (GPP) di propinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2010. Gerakan ini berorientasi kepada percepatan pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga di nagari, kelurahan dan desa. Sebab jumlah keluarga yang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan mereka mencapai 1.136.874 unit.

Pengertian 'satu petani satu sapi' tidaklah melulu untuk 'ternak sapi' saja. Ia bisa menyesuaikan pada beraneka jenis ternak dan ketersediaan sumber daya penunjang pada tiap daerah. GPP juga merupakan upaya penambahan variasi sumber penghasilan keluarga; dari satu menjadi tiga. Sehingga, mata pencarian

petani banyak ragamnya, dalam sistem pertanian terpadu. Program berupaya meningkatkan alokasi jam kerja anggota keluarga, dari rata-rata 3.5 jam/hari menjadi lebih tinggi. Kemudian, ia bermuara kepada perbaikan penghasilan keluarga sampai seputar Rp 2 juta/bulan yang setara dengan dua emas.

Adanya variasi sumber penghasilan petani dalam satu sistem pertanian terpadu menempatkan *pemeliharaan ternak sebagai pilihan*. Sebab beternak bisa memanfaatkan lahan kurus yang sekaligus dapat kembali menyuburkannya melalui kotoran mereka. Disamping itu, tahi ternak bisa pula menjadi sumber dan pemicu utama proses pembuatan pupuk organik. Tentu, dalam perspektif yang amat kental dengan nuansa pembangunan pertanian berkelanjutan. Lagi pula, realitanya bahwa rata-rata kepemilikan lahan oleh petani kurang dari 0.3 ha tiap kepala keluarga.

Program ini memiliki tujuan yang baik dalam rangka peningkatan pendapatan petani, akan tetapi jika tidak ada pedoman yang baik untuk melaksanakannya, maka tujuan tersebut sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan kajian secara empiris untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan program tersebut. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah "Bagaimanakah rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong efektifitas keberhasilan usaha tani melalui kegiatan 'satu petani satu sapi' ?

CARA PANDANG PERTANIAN TERPADU SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM SPSS.

Gerakan pensejahteraan petani (GPP) yang mengandung program satu petani satu sapi (SPSS) bertolak dari pemikiran sistem pertanian terpadu (SPT). Seperti sajian Mollison (1990), SPT berlandaskan kepada beberapa prinsip atau cara pandang, seperti;

1. Adalah *kerjasama, tidak kompetisi* dan persaingan, yang mendasari kehidupan dan keberlanjutan sistem terpadu ini.
2. Perlu *kepedulian pada semua* makhluk hidup didalam unsur dari sistem agar keterpaduan bisa berjalan dan semakin membaik. Kepedulian kepada semua pihak (petani, peternak, kelompok, lembaga keuangan, pasar dan pengambil kebijakan) dalam hal akses sumberdaya mesti terjaga.
3. Gunakan *daur ulang* dengan cara memanfaatkan apa yang terbuang. Ganti apa yang dipakai melalui proses perbaikan, rehabilitasi dan reboisasi dll.
4. Hidup dalam sistem terpadu harus ada pihak yang *memberi dan menerima*, tolak angsur dan mengukur kinerja tidak dengan indikator ekonomi saja. Hal ini termasuk terbukanya peluang kerja, mengurangi angka kemiskinan, bertambahnya daya tahan hidup dan upaya untuk membantu sesama.
5. Bekerjalah bersama dan bersahabat dengan alam, tidak menentang, mendorong, menekannya. Kita bekerja 'dalam konteks membantu' dan memelihara ketimbang sekedar membangun saja.

Langkah kerja untuk memulai keterpaduan adalah mengikuti prosedur berikut;

1. Proses keterpaduan mulai bekerja dari upaya mengatasi masalah sosial ketimbang kemegahan dan uang semata mata.
2. Maka, nilai nilai pelaku adalah konservasi, pemeliharaan, kepercayaan diri, kemandirian dan harmoni antara berbagai unsur. Ia tidak melulu memakai pertimbangan ekonomi dan keuntungan.
3. Pertimbangan pekerjaan integrasi adalah faktor sosial ekonomi dan biologi jangka panjang, tidak nilai ongkos dan materi jangka pendek.
4. Cara meraihnya melalui konsultasi, penelitian aksi atau fasilitasi orang dan kelompok melalui rancangan pendidikan. Ia tidak menggantungkan pada bantuan dana pihak luar, yang justru menelantarkan potensi petani peternak sendiri.
5. Suasana yang terbina adalah membuka kesempatan, bantuan keuangan, umpan balik untuk memperbaiki kegiatan dan memungkinkan munculnya kebutuhan baru. Ia menghindari menjual dan tidak bertanggungjawab pada hasil.

Tujuannya adalah suasana masyarakat peternak yang dinamis, sehat, mengerti dan berkuasa untuk sadar melakukan perbaikan. Ia mencegah orang yang terpisah dan tidak berdaya. Sebaliknya ia menghindarkan ketergantungan dan kekhawatiran menatap masa depan.

METODE PENELITIAN

Lokasi kegiatan kajian pelaksanaan program SPSS ini berada pada wilayah administrasi provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dalam wilayah menggunakan teknik *purposive sampling atau penetapan wilayah secara sengaja*. Ada beberapa pertimbangan untuk memakai teknik itu, seperti; alokasi ketersediaan waktu, jumlah tenaga pelaksana dan anggaran dana. Kemudian lokasi juga telah menjadi wilayah kerja GPP. Meskipun begitu pakem 'mewakili karakter' wilayah tetap menjadi prioritas satu. Sebab pemilihan lokasi merujuk pada indikasi berikut ini;

1. Mencakup keragaman letak geografis wilayah dan karakter petani dan peternaknya (pantai, perbatasan dan tengah, dataran rendah dan tinggi, kemajuan dalam teknis beternak).
2. Kehadiran dan perkembangan serta peran kelompok tani.
3. Kehadiran dan peran lembaga keuangan mikro.

Sesuai dengan indikator tersebut, maka lokasi kajian SPSS dapat dicermati seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Kajian Pelaksanaan Satu Petani Satu Sapi

NO	KABUPATEN/KOTA	NAGARI/KELURAHAN
1.	Kabupaten Padang Pariaman	1. Cimpago 2. Lareh Nan Panjang
2.	Kabupaten Pasaman Barat	3. Lingkung Aur (Bandar Rejo) 4. Kinali
3.	Kota Payakumbuh Kabupaten 50 Kota	5. Padang Alai 6. Guguak VIII Koto
4.	Kabupaten Solok	7. Koto Gaek 8. Paninjauan

Catatan : Pemilihan lokasi sesuai dengan juklak GPP Sumbar 2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 160 orang, teknik pengumpulan data (baik primer atau sekunder) berlangsung dengan menggunakan 4 (empat) cara, yaitu : (1) pengamatan langsung atau observasi, (2) wawancara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan instrumen kuesioner, (3) diskusi kelompok terfokus (FGD) dan (4) studi dokumentasi. Semua tahap berjalan secara berurutan dan saling menunjang satu sama lain. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan pendekatan 5 W + 1 H.

Dasar Pemikiran Program Satu Petani Satu Sapi (SPSS)

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, semenjak Gubernur Irwan Prayitno tahun 2010, membuat kebijakan "Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)". Pelaksana kegiatan ini berada pada gabungan 5 SKPD, yaitu; Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Koperindag, dengan Ir. Djoni sebagai ketua.

Bersamaan dengan GPP ada program Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Gubernur Sumbar telah meresmikan pelaksanaan program SPSS melalui upacara yang mendapat liputan media massa di Payakumbuh tanggal 19 Desember 2010. Ketika itu secara simbolis petani peternak menerima sebanyak 80 ekor sapi.

Selanjutnya GPP dan SPSS berkembang dan akan berjalan pada semua kabupaten/ kota Sumatera Barat. Tentu, ini tergantung kesiapan dan komitmen masing-masing daerah. Tiap kabupaten dan kota

mendapatkan kedua paket program semenjak tahap awal kegiatan. Tahun 2011, akan ada pada 62 Nagari, yang terus meningkat sampai tahun 2015. Proses penambahan ini berlangsung sesuai pola 'proses belajar sosial atau social learning process'.

Gagasan program satu petani satu sapi muncul dari kenyataan bahwa 60,7 persen penduduk Sumatera Barat adalah petani. Namun, rata-rata pendapatan mereka setiap tahun masih rendah dan belum masuk kategori/tingkat sejahtera. Penyebabnya ialah rata-rata petani hanya memiliki lahan 0,3 hektar lahan per kepala keluarga (KK). Akibatnya, jam kerja petani tidak optimal penggunaannya dan berujung pada raihannya pendapatan yang juga tidak maksimal. Maka, melalui pendekatan *integrated farming* (pertanian terpadu) meluncurlah kedua program.

Memang, semenjak program SPSS resmi, terjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan, seperti dari akademisi, tokoh politik, dll. Harian Padang Ekspres, misalnya dua kali menerbitkan opini yang membahas program SPSS. *Pertama*, tanggal 3 Maret 2011, Fery Adrianus (Dosen Fakultas Ekonomi Unand) menuangkan beberapa ide mengatasi pendanaan program SPSS. Caranya adalah; (a) menggali dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih, (b) memanfaatkan pengadaan sapi korban, dan (c) memanfaatkan dana CSR BUMN/BUMD atau perusahaan swasta di Sumatera Barat. Donard Games (Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi) Unand pada harian Padek (9/4/2011) mempertanyakan keefektifan program SPSS. Ia lantas mengurai tiga penjabaran efektifitas SPSS, yaitu; (a) aspek pembiayaan, (b) aspek keadilan dan (c) aspek penggerak ekonomi lokal.

Kedua, anggota DPRD Sumbar H. Novrizon (Singgalang, Minggu (9/1) menyatakan bahwa sesuai pengalaman, kegiatan per-sedua-an ternak sapi tidak memberikan keuntungan nyata bagi petani. Namun, jika jumlah ternak sapi yang diperseduakan ada 3 ekor atau lebih, maka petani baru nampak menikmati manfaatnya. Karena itu, ia menyarankan agar kebijakan SPSS bisa mencocokkan jenis ternak yang sesuai dengan kondisi nagari.

Kajian Program Terdahulu

Landasan SPSS dan GPP tentu dari hikmah dan kajian program sebelumnya. Bachtiar dkk (1996) telah menuliskan sejumlah pola dalam koordinasi strategi pengembangan usaha sapi potong di Sumatera Barat. Ia berangkat dari kebijakan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi yang diberlakukan secara terpadu untuk keberlanjutan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Pada perkembangan berikutnya, seperti; poin D dalam misi RPJP Sumbar 2005-2025 berbunyi 'Mewujudkan Usaha Ekonomi Produktif dan Efisien Serta Mampu Bersaing Di Dunia Global'. Maka, pendekatan 'keterpaduan' menjadi icon untuk meraih efisiensi dan produktifitas dalam perspektif ekonomi global tersebut. Hal serupa (terpadu) menjadi basis pada GPP dan SPSS. Dengan demikian dasar kebijakan pengembangan sapi telah bertumpu pada satu benang merah semenjak beberapa dekade yang lalu; yaitu 'pendekatan terpadu'.

Kendati, semenjak dua dekade itu, beberapa nama pengembangan usaha ternak telah berjalan di Sumatera Barat, seperti; village breeding centre (VBC), sapi IFAD (international fund for agricultural development), gerakan pengembangan bibit sapi pedesaan (gerbang serba bisa) dan komponen sapi dalam program kemiskinan dan transmigrasi, sedikitnya ada tiga pola pemeliharaan ternak sapi ini. Lagi pula semua nama pengembangan ternak sapi ini mendapat biaya dari Jakarta (pusat). Karena, walau ada sapi dengan pendekatan kawasan sentra produksi (KSP), sumber dananya tetap dari APBN.

Pertama, keterpaduan berupa mitra antara perkebunan (sawit dan coklat) skala besar dengan ternak sapi. Pola ini semakin berkembang dengan kesepakatan fasilitasi GPP dengan sejumlah perusahaan perkebunan (BUMN) dan Semen Padang melalui CSRnya. Lokasi seperti Kabupaten Pesisir Selatan bagian Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat dekat dengan pola mitra ini. Pola mitra relatif baru di Sumbar, meskipun di Riau telah berjalan sejak belasan tahun terakhir. Malah, kredit untuk pola ini telah tersedia dengan syarat relatif mudah.

Kedua, keterpaduan berupa sistem tanaman pangan (jagung, padi, ubi) dengan ternak sapi. Hampir semua daerah mempunyai potensi model pola ini. Misalnya yang terakhir antara perusahaan benih jagung kota

Solok dengan pemeliharaan sapi dengan fasilitas bank BNI. Kemudian, kebiasaan masyarakat peternak sekitar kota Bukittinggi, yang memberikan kulit ubi kayu (sanjai) sebagai komplemen pakan ternak. Lalu, usaha peternakan penggemukan sapi Roni dan Akmal di 50 Kota yang memberikan jerami padi sebagai pakan utama. Sejumlah SMD yang marak sejak tahun 2007 juga masuk kategori ini dengan tambahan penanaman rumput unggul sekitar lokasi usaha mereka. Beberapa Bank, seperti BPD/ bank Nagari telah mulai memasuki pasar model ini. Misalnya KUPS (kredit usaha pengembangan sapi) dan KUR (kredit usaha rakyat).

Ketiga, keterpaduan berupa variasi sumber pendapatan seperti beragam jenis ternak (unggas, ikan, sapi, kambing, kerbau) dengan tanaman pangan dan kebun skala kecil. Pola ini bersifat tradisional dan belum terlalu mengarah ke komersil. Umumnya usaha ternak sapi bertujuan untuk tenaga kerja dan tabungan yang menjadi sumber pendapatan ketika sewaktu waktu ada perlu. Misalnya untuk kebutuhan menyekolahkan anak, membangun dan rehabilitasi rumah, pesta perkawinan dan mencari pekerjaan. Kelompok peternak kawasan Agam Timur, Padang Pariaman dan sejumlah daerah lain dekat dengan kategori ini.

Rekomendasi Kebijakan

Ringkasan pelaku dan ranah kebutuhan kebijakan dari kerangka interaksi diatas tercantum pada Tabel 2.

Sasaran Program SPSS

Sasaran utama kebijakan (*tingkat produksi*) adalah

1. Petani peternak yang menekuni aktivitas usaha dengan corak subsisten, dalam sebuah sistem pertanian terpadu. Pilihan utama buat petani peternak ini ialah mereka yang memiliki: kejujuran, tekun, disiplin dan, bertanggungjawab.

Kepada mereka tersedia paket SPSS – dan memang jenis ternak sapi, meskipun bagi kabupaten kota dapat menyesuaikan dengan jenis ternak yang cocok dengan kebutuhan lokal. Jadi kebijakan pemda Sumbar tentang SPSS hanya untuk kategori ternak sapi.

Ciri ciri petani / peternak sasaran adalah;

- Petani/peternak menempatkan usaha ternak sebagai bagian dari sistem usaha tani terpadu.
 - Petani/peternak yang memiliki tujuan beternak sebagai simpanan ketika ada keperluan mendadak. Misalnya untuk; a) sumber dana mengatasi penyakit dan bencana; b) sebagai simpanan untuk menyekolahkan anak anak; c) upaya mendukung penyelenggaraan pesta, dan merehabilitasi rumah; d) Akhirnya dapat dimanfaatkan untuk menunaikan tugas agama, seperti memfasilitasi untuk pergi ke Mekkah menunaikan rukun Islam kelima.
2. Sasaran SPSS juga melibatkan pelaku pada (*tingkat distribusi*) dan pemasaran. Misalnya pedagang/toke ternak, tukang potong dan petugas RPH. Karena SPSS merupakan bagian dari GPP, maka cakupan sasaran meliputi tahap produksi dan distribusi. Kemudian, ia sinkron dengan para pelaku pada tanaman pangan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan para penjual produk akhir.

Tabel 2. Ringkasan Rumusan Kebijakan SPSS propinsi Sumbar

Kriteria Kebijakan	Ranah kewenangan, pelaku dan kebutuhannya			
	Propinsi	Kabupaten/kota	Wilayah Fungsional	Kelompok dan peternak
1	2	3	4	5
On Farm				
Teknis beternak				Akses dan terlayani
Bibit	BIB, disnak	SKPD terkait	Inseminator , ULIB, konsultan teknis	Tersedia dengan 'tepat'
Pakan			Teknologi nilai tambah gizi dan pakan alternatif	Tersedia dan ada sumber informasi
Pemeliharaan		UPTD	UPT	Belajar dari sesama
Pencegahan penyakit			UPT, petugas keswan	Ada sumber informasi
Pemasaran			Berfikir jangka panjang, Jujur dan terbuka	Tunai dan Kontan
Off Farm				
Kredit	BPD/Nagari → Hindari system target	Cabang BPD	BPR, LPN, BMT, LKMA	Akses
Pinjaman lunak			Utk produksi & distribusi (toke & pemotong)	Dapat via bank
Pasaduoan Bagi hasil			Kelompok tani ternak	Tidak melalui bank
Informasi	SKPD terkait	SKPD terkait	Swasta	Akses
Harga dan kebijakan nas dan internas				Media massa Penyuluh pemda Penyuluh swasta
Pasar	SKPD terkait	SKPD terkait	Swasta	Akses dan informasi
Toke			Kredit lunak/bagi hasil	Tunai
RPH modern Pyk	Jejaring pada semua pasar, daerah, SMD dan kelompok			Tunai
Tukang bantai			Kredit lunak/bagi hasil	Tunai
Teknologi	SKPD terkait	SKPD terkait	Swasta	Akses dan informasi
Biogas				
Pakan				
Pupuk organik				
Kualitas lahan dan air	Sinergi tiga pihak dengan para pelaku terkait			
Keamanan berusaha dan kendala sosial budaya	SKPD terkait → Pungutan dan intevensi	SKPD terkait → Pungutan dan intevensi → Penakaran & penimbangan	→ Tingkat pencurian → Akses tanah ulayat	Peran moral, etika dan agama
Kelembagaan		Tekad dukungan yang konsisten & sinkron	Fasilitasi dan kerjasama pada ranah administrasi dan kinerja	Pengembangan kinerja kelompok dan asosiasi

Mendukung penerapan skim SPSS dalam GPP, pelaku berikut jadi penyangga meraih keberhasilan, seperti;

1. *Lembaga keuangan* yang menawarkan jasa pinjaman modal usaha dan syarat serta jaminannya. Paket/skim pinjaman modal usaha ini mesti cocok dan jitu untuk mendorong usaha produksi dan distribusi sampai kepasar. Ada dua kategori dukungan modal usaha; (a) pinjaman bersyarat lunak dan (b) pinjaman dengan sistem perseduaan ternak sapi (bagi hasil). Mekanisme kerja kedua bentuk dukungan modal usaha ini tercantum pada lampiran 2. Bank Nagari memainkan peran utama (eksekutor) mengendalikan dan memantau pelaksanaan skim dukungan modal usaha ini. BPR, LPN, dan BMT menyalurkan (channeling) paket pinjaman modal berkategori (a) dengan bantuan kelompok tani. Sasarannya bisa petani, peternak, toke, pedagang dan petugas RPH. Sedangkan LKMA dan kelompok tani menyalurkan dan mengendalikan paket dukungan dana berkategori perseduaan (b). Sasarannya adalah petani dan peternak.
2. *SKPD teknis*, tingkat propinsi dan kabupaten kota, yang terkait dengan program GPP dan SPSS, khusus yang tupoksinya melayani kebutuhan teknis beternak dan pencegahan penyakit hewan. SKPD ini berkoordinasi menyelenggarakan dukungan teknis perbibitan, pakan, teknologi buat nilai tambah, pencegahan dan pengobatan penyakit. Untuk *kategori sapi* bibit perannya memperluas tugas inseminator dan petugas lapangan guna mencapai tujuan program. *Simak misalnya peran H. Effendi Rasyid di Koto Hilalang, Panampuang dan Agustian di Kinali, Simpangan Empat dan sekitarnya*. Untuk kategori sapi kreman perannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
3. *SKPD pendukung teknis* adalah mengukuhkan peran revitalisasi distribusi dan pasar ternak. Tugasnya memastikan bahwa pedagang, petugas RPH, dan toke ternak bisa mengkasas paket pinjaman SPSS. Kemudian, pelaku pasar ini membayar kontan / tunai kepada peternak pada transaksi jula beli ternak. Selanjutnya memastikan produk yang diperjualbelikan di pasar masuk kategori ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Berikutnya, mencegah; (a) monopoli dalam distribusi dan perdagangan ternak dan produknya, (b) menimbun barang, (c) berlaku tidak jujur dalam menakar dan menimbang. SKPD yang masuk kategori pendukung ini juga berperan untuk upaya mengembangkan kelompok dan asosiasi kelompok tani. Targetnya ialah; (a) meningkatkan kapasitas kelembagaan, daya tawar dan administrasi kelompok tani dan asosiasi, (b) memfasilitasi kerjasama kelompok tani secara horizontal dan vertikal, (c) mendorong perbaikan kinerja kelompok dan asosiasi petani peternak. Pada sisi off farm SKPD bertugas memastikan fungsi pengelolaan pasar, teknologi dan keamanan berusaha serta upaya mengatasi kendala sosial budaya.

Tujuan Dan Ukuran Keberhasilan Program SPSS

Secara umum, tujuan kebijakan SPSS adalah;

1. Meningkatkan daya tahan dan kemampuan anggota keluarga tani untuk menghadapi dan keluar dari tekanan bencana alam, kekurangan pangan dan gizi serta lingkaran kemiskinan.
2. Menjaga dan memperbaiki kualitas sumber daya insani dan ketahanan masyarakat melalui diversifikasi sumber penghasilan dalam kerangka sistem pertanian terpadu.
3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan aspek sosial ekonomi rumah tangga melalui instrumen sumber dan lembaga keuangan alternatif dan inovatif.
4. Memfasilitasi anggota keluarga atau rumah tangga petani skala kecil di pedesaan Sumatera Barat agar lebih dinamis dalam berusaha. Mereka bisa menggunakan sisa waktu luang, rumput lapangan dan sisa hasil pertanian.

Ukuran sukses atau indikator kinerja program SPSS mengacu kepada ukuran GPP. Karena SPSS merupakan himpunan bagian dari GPP, yaitu;

1. Petani peternak mampu lebih mengoptimalkan daya guna rumput dan sisa hasil pertanian tanaman pangan agar tidak terbuang percuma.

2. Menambah variasi sumber penghasilan keluarga; dari satu menjadi tiga mata pencarian pada tahun 2015. Sehingga, jenis kegiatan petani dan jumlah sumber penghasilan mereka bertambah dalam sistem pertanian terpadu.
3. Meningkatkan alokasi jam kerja anggota keluarga, dari rata rata 3.5 jam/ hari menjadi lebih tinggi atau sekitar 8 jam/hari pada tahun 2015. Sehingga petani bisa mengisi dan menggunakan waktu luang mereka secara lebih bermanfaat.
4. Perbaiki penghasilan keluarga sampai seputar Rp 2 juta/bulan atau setara dua mas murni sebulan pada tahun 2015. Sehingga petani bisa menerima pendapatan tambahan. Pada gilirannya daya tahan petani dan keluarganya terhadap aneka bencana membaik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil kajian pelaksanaan SPSS, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Satu Petani Satu Sapi tidak bisa hanya dilihat dari sisi kaca mata ekonomi atau aspek komersial semata. Karena program ini menggunakan pendekatan terpadu antara berbagai unsur dalam pertanian, seperti; tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan itu sendiri. Kemudian, ia memadukan aspek dari hulu dan hilir dalam sistem agribisnis (on dan off farm). Sehingga komponen sosial, daya tahan pada bencana dan kelanjutan kehidupan dan usaha masuk jadi pertimbangan. Ukuran suksesnya mengacu kepada kinerja GPP, yaitu; (a) menambah jenis usaha petani melalui usaha ternak, (b) meningkatkan alokasi jam kerja petani mencapai 8 jam/hari dan (c) menambah pendapatan petani sampai Rp 2 juta/bulan atau setara dengan dua emas.
2. Petani peternak responden masih menghadapi sejumlah masalah dalam menjalankan usahanya. Misalnya, (a) keterbatasan akses permodalan, (b) tingkat pengetahuan dan teknis beternak masih rendah, (c) sumber dan bibit sapi bakalan terbatas, (d) adanya perangkap informasi dan struktur pasar, dimana peternak tidak kontan menerima bayaran transaksi jual beli dan (e) masalah pencurian ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. S. 1995. Sembilan Puluh Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Makalah disampaikan pada Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua. Bogor.
- Anwar, Surya; Fuad Madarisa dan Amrizal Anas. 2009. Bahan Kuliah dan Buku Ajar. Ilmu Penyuluhan Pertanian. Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Padang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Solok. 2001. Laporan Pengkajian Pengembangan Potensi Nagari Kab. Solok.
- Badan Pusat Statistik Sumbar. 2010. Sumatera Barat Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. 2009. Padang Pariaman Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. 2010. Pasaman Barat Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2010. Solok Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2010. Lima Puluh Kota Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. 2010. Payakumbuh Dalam Angka.
- Bachtiar, Nurzaman; M Kasim dan F Madarisa. 1996. Koordinasi Strategi Pengembangan Sapi Potong dalam rangka kerjasama Petumbuhan Regional. Dinas Peternakan Sumatera Barat dan Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.

- Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman. 2008. Road Map Komoditas Sapi Potong Kab. Padang Pariaman.
- Deptan. 2007. Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kenagarian Lareh Nan Panjang.
- Kecamatan V Koto Kampuang Dalam. 2010. Profil Nagari Campago.
- Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat. 2009. Profil Nagari Kinali.
- Liem Siok Lan. 2008. Menuju Rakyat Berdaulat: Wawancara Adi Sasono, Ketua Dekopin. Penerbit Republika. Jakarta.
- Madarisa, Fuad. 2010. Perspektif Sosiologi Pembangunan Agribisnis. Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Padang.
- Mardikanto, Totok. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.
- Miftah, Thoha. 2003. *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, cet. keVIII.
- Mollison, Bill. 1990. Permaculture. A Practical Guide for a Sustainable Future. Island Press. Washington.
- Mukerji. B. 1961. Objective and Methods of Community Development dalam Extension Education in Comumunity Development. Directorate of Extension Ministry of Food and Agriculture. Government of India, New Delhi.
- North, Douglass. 2005. Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press. Princeton.
- Pambudy, Rahmat. 2000. *Mengembangkan Wirausaha Peternakan Tangguh*. Trobos.
- Plopino, Ramiro F. 1987. The Adult Learner and Adult Learning dalam An Introduction to Extension Delivery System. Island Publishing House, Inc. Manila.
- Rahardi dan Hartono Rudi. 2003. *Agribisnis Peternakan. Penebar Swadaya*. Jakarta
- Rivera, William dan Gary Alex. 2004. Demand-Driven Approaches to Agriculture Extension: Case Studies of International Initiatives. Agriculture and Rural Development Discussion Paper. Extension Reform for Rural Development of World Bank. Volume 3. Washington.
- Röling, Niels dan Janice Jiggins. 2007. Making Trans-disciplinary Science Work for Resource-poor Farmers. Paper at Workshop Farmers First Revisited. Brighton 12-14 December 2007.
- Saragih, Bungaran. 2000. *Kumpulan Pemikiran: Agribisnis Berbasis Peternakan*. USESE Foundation dan PSP IPB. Bogor.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Slamet. M. 1987. Menetapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Prosiding. Kongres Penyuluhan Pertanian. PERHIPTANI . Subang.
- Sonne, Lina. 2010. Financing pro-poor entrepreneur-based innovation: A review of existing literature. United Nations University - Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology Keizer Karelplein 19, 6211 TC Maastricht, The URL: <http://www.merit.unu.edu>.

- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. Analisa Kebijakan Publik “ Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sumardjo. 2009. Tantangan komunikasi pertanian di era globalisasi. Dalam Husodo, dkk. Pertanian Mandiri; Pandangan strategis para pakar untuk kemajuan pertanian Indonesia. Penebar swadaya. Jakarta.
- Topatimasang, Roem; M Fakih; dan T Rahardjo. 2000. Merubah Kebijakan Publik. REaD Books. Yogyakarta.
- Wirartha, Made I. 2006. Metodologi Sosial Ekonomi. CV. Andi Offset. Yogyakarta

TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA USAHA TERNAK SAPI POTONG JABRES DI KABUPATEN BREBES

Nunung Noor Hidayat dan Imbang Haryoko
Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi Jabres di Kabupaten Brebes. (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perempuan usaha ternak sapi jabres. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Survey. Sample peternak dipilih menggunakan metode *stratified random sampling* sebanyak 60 peternak. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan dianalisis dengan menggunakan perhitungan sederhana berupa nilai rata-rata, frekuensi distribusi, dan tabulasi silang dan dilaporkan secara deskriptif. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan pada usaha ternak sapi Jabres, data dianalisis menggunakan persamaan regresi berganda (*multiple regression*). Hasil Penelitian menunjukkan Rata-rata pemeliharaan ternak sapi Jabres adalah $5,08 \pm 0,21$ ekor. Curahan jam kerja tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong rata-rata $3,62 \pm 2,25$ JKSP dan berkontribusi sebesar $37,10 \pm 16,45$ %, sedangkan tingkat produktivitasnya sebesar Rp 18,678,- $\pm 12.669,-$ per hari. Secara bersama-sama faktor jumlah ternak yang dipelihara, Jumlah anggota keluarga, umur tenaga kerja perempuan, pakan hijauan dan konsentrat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan pada tingkat kepercayaan 99 % ($P < 0,01$) dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 62,71 % sedangkan secara parsial faktor yang berpengaruh adalah : jumlah ternak ($P < 0,01$), jumlah anggota keluarga ($P < 0,10$), dan umur peternak ($P < 0,05$).

Kata Kunci : Survey, tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan, sapi jabres,

ABSTRACT

The purpose of this study is: (1) Determine the level of woman labor productivity in the Jabres cattle farming in Brebes district. (2) Knowing the factors that affect woman labor productivity jabres cattle farming. The study was conducted using a survey method. Sample farmers selected using stratified random sampling of 60 farmers. Women Labor Productivity levels were analyzed using a simple calculation of average values, frequency distributions and cross-tabulations and reported descriptively. To determine the factors that affect the rate of Labor Productivity of Women in the Jabres cattle farming, the data were analyzed using multiple regression equation. Research results show average Jabres cattle raising is 5.08 ± 0.21 tail. Outpouring of working hours of women labor in the cattle farming an average of $3.62 + 2.25$ JKSP and contribute for $37.10 \pm 16.45\%$, while the level of productivity of Rp 18.678, - + 12 669, - per day. Taken together the number of animals kept factors, number of family members, age of women labor, forage concentrate dams affect the level of women labor productivity at 99% confidence level ($P < 0.01$) with a coefficient of determination R^2 of 62.71 % while partially influencing factors are: the number of animals ($P < 0.01$), number of family members ($P < 0.10$), and age of farmers ($P < 0.05$).

Keywords: Survey, level of women labor productivity, cow jabres,

PENDAHULUAN

Ternak sapi potong memegang peranan yang cukup strategis dalam rangka mencapai ketahanan pangan produk hewani. Sampai saat ini produksi domestik ternak sapi potong belum mampu memenuhi

kebutuhan dalam negeri, dan kekurangannya harus impor. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2009) Kebutuhan konsumsi daging segar maupun olahan belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri. Pada periode 2007-2008 terjadi peningkatan produksi daging (3,8%) dengan jumlah produksi pada tahun 2007 sebesar 339.480 ton (berasal dari sapi lokal 263.458 ton dan sapi impor 76.022 ton), pada tahun 2008 sebesar 352.413 ton (berasal dari sapi lokal 251.941 ton dan sapi impor 100.472 ton).

Sapi Jabres merupakan sapi potong lokal yang pengembangannya terfokus di wilayah Kabupaten Brebes. Seperti halnya sapi lokal yang lain (sapi Bali, Madura, Aceh dll), sapi Jabres merupakan tipe sapi potong kecil dengan bobot badan sapi dewasa sekitar 300 kg. Namun demikian mempunyai kelebihan diantaranya sangat cocok ditanamkan di wilayah Brebes, karkas lebih tinggi dibandingkan sapi PO. Menurut Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, (2012), bahwa Sapi Jabres adalah nama populer yang berasal dari singkatan Sapi Jawa Brebes dan merupakan aset ternak lokal khas Kabupaten Brebes yang telah dibudidayakan oleh masyarakat secara turun temurun di Kabupaten Brebes. Sapi ini telah terbukti dapat memberikan tambahan pendapatan pada rumah tangga petani dan limbahnya merupakan sumber pupuk organik guna mendukung budidaya pertanian.

Usaha ternak sapi potong sebagian dilakukan oleh peternakan rakyat yang berada di pedesaan. Usaha peternakan ini bersifat tradisional dan hanya sebagai usaha sampingan di samping usahatani yang lain. Dalam pelaksanaannya usaha sapi potong banyak melibatkan tenaga kerja perempuan. Namun seberapa besar produktivitas tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi potong Jabres belum banyak diinformasikan oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi Jabres di Kabupaten Brebes.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perempuan usaha ternak sapi jabres.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode survey. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peternak dan ternak sapi Jabres yang ada di Kabupaten Brebes. Data dianalisis dengan perhitungan sederhana berupa nilai rata-rata, frekuensi distribusi, dan tabulasi silang dan dilaporkan secara deskriptif. Untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi jabres digunakan rumus:

P = Pendapatan usaha/Curahan jam kerja

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi jabres, data dianalisis menggunakan persamaan regresi berganda, dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, \dots, X_9, D)$$

Y = Produktivitas tenaga kerja perempuan (Rp/jam); X_1 = jumlah ternak sapi yang dipelihara (AU); X_2 = pakan hijauan rumput (kg); X_3 = pakan hijauan jerami (kg); X_4 = Pakan konsentrat (Kg); X_5 = Curahan jam kerja (Jam); X_6 = Kepadatan kandang (m/ekor); X_7 = Pengalaman beternak (tahun); X_8 = Umur peternak (tahun); X_9 = Pendidikan formal peternak (tahun); D = Dummy untuk pola pemeliharaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peternak dan Usaha Ternaknya

Responden sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 41 orang (68,33 persen), SLTP 15 orang (25 %) dan yang tidak pernah sekolah ada 4 orang (6,67 %). Jumlah anggota keluarga peternak mempunyai range yang cukup besar yaitu berkisar antara 2 sampai dengan 15 orang dengan rata-rata sebesar $5,12 \pm 2,57$ jiwa. Pengalaman peternak dalam pemeliharaan sapi potong berkisar antara 3 sampai 50 tahun dengan lama rata-rata $16,17 \pm 10,56$ tahun, dengan jumlah pemilihan ternak berkisar

antara 0,25 sampai dengan 8,75 ST dengan rata-rata jumlah pemilikan ternak $3,725 \pm 1,895$ ST. Keadaan tersebut lebih baik jika dibandingkan pendapat Soedjana (2005) bahwa sistem produksi daging sapi di Indonesia secara tradisional dicirikan oleh skala usaha kecil yang memelihara hanya 1–3 ekor sapi/rumah tangga.

Produktivitas Usaha Ternak Sapi Jabres

Pendapatan Peternak

Pada usaha ternak sapi potong produktivitas dapat diukur dari penambahan bobot badan harian (PBBH). Sedangkan produktivitas tenaga kerja dapat dihitung berdasarkan nilai produktivitas usaha dibandingkan dengan curahan jam kerjanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas usaha ternak sapi jabres masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengukuran PBBH berkisar 0,2 sampai dengan 0,6 kg perhari, dengan rata-rata sebesar $0,338 \pm 0,099$ kg per hari. Jika dinilai dengan uang maka produktivitas usaha ternak sapi potong Jabres berkisar antara Rp 3.000,- sampai dengan Rp 145.000,- per hari dengan rata-rata sebesar Rp 50.283,- \pm Rp 29.273,- per hari. Hasil pengkajian Ahmad *et al.* (2004) usaha penggemukan sapi potong dengan sistem kereman selama 5 bulan dengan menggunakan teknologi introduksi, berupa perbaikan komposisi pakan dan penanggulangan penyakit, mampu meningkatkan penambahan bobot badan harian (PBBH) sapi bali dari 296,90 g menjadi 528 g/ekor/hari. Untuk sapi PO, rata-rata PBBH meningkat dari 381 g menjadi 697 g/ekor/hari. Pendapatan dari penggemukan sapi bali juga meningkat dari Rp 291.525 menjadi Rp 532.450/ekor/5 bulan, sementara pada usaha penggemukan sapi PO, pendapatan meningkat dari Rp 346.500 menjadi Rp 667.375/ekor/5 bulan.

Tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong dicurahkan untuk pekerjaan mengembalakan ternak rata-rata sebesar 1,77 jam, untuk mencari rumput 1,67 jam, member pakan dan minum 0,56 jam dan membersihkan kandang selama 0,53 jam sehingga curahan jam kerja perempuan sebesar 4,52 jam per hari atau sebesar 3,62 jam kerja setara pria (JKSP). Berdasarkan hal tersebut kontribusi tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres rata-rata sebesar 37,10 %. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja perempuan pada usaha sapi potong jabres cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan pada usaha sapi perah, hasil penelitian Mastuti dan Hidayat (2009) menyatakan bahwa kontribusi curahan jam kerja perempuan sebesar 25,24 %.

Produktivitas tenaga kerja perempuan dapat dihitung berdasarkan besarnya produktivitas usaha secara keseluruhan dibandingkan dengan kontribusi tenaga kerja perempuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi jabres berkisar antara Rp 110,09 sampai dengan 57.435,90 per hari dengan rata-rata sebesar Rp 18.678,65 \pm 12.669,43 per hari atau sebesar Rp 6.817.707,60 per tahun. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha sapi perah, menurut Mastuti dan Hidayat (2009) produktivitas tenaga kerja perempuan dari hasil penjualan susu pada usaha ternak sapi perah sebesar Rp 8.505.230,00 per tahun.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres dilakukan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai yang terlihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen pada taraf kepercayaan 99 persen ($P < 0,01$). Koefisien Determinasi sebesar 0,6271 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen sebesar 62,71 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres

Variabel	Koefisien regresi	Standard error	T - hitung
Intercept	-12370.3	6776.847	-1.82537*
Jumlah Ternak	2767.311	999.9379	2.767483***
Jumlah Keluarga	794.1945	442.2424	1.795835*
Umur TK Perem	225.4363	103.434	2.179519**
Pakan Hijauan	310.5372	202.8382	1.53096
Pakan Konsentrat	-3087.45	2410.682	-1.28074
R = 0,6271			
F tabel 18,164***			

Keterangan : ***) Nyata pada taraf kepercayaan 99 % ; **) Nyata pada taraf kepercayaan 95 % *) Nyata pada taraf kepercayaan 90 %

Secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres adalah jumlah ternak, jumlah anggota keluarga dan umur tenaga kerja perempuan. Variabel yang lain berpengaruh tetapi tidak nyata.

Variabel jumlah ternak berpengaruh sangat nyata terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres pada tingkat kepercayaan 99 ($P < 0,01$). Besarnya koefisien regresi sebesar 2767,311 berarti bahwa setiap penambahan satu unit sapi jabres akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres sebesar Rp 2767,311 per hari, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar skala usaha semakin besar produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres.

Variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh nyata terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres pada tingkat kepercayaan 90 ($P < 0,10$). Besarnya koefisien regresi sebesar 794,1945 berarti bahwa setiap penambahan satu anggota keluarga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres sebesar Rp 794,1945 per hari, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota semakin besar produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres. Hal tersebut diduga semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin banyak tenaga yang akan membantu baik dalam pekerjaan sebagai peternak maupun pekerjaan rumah tangga sehingga perhatian terhadap ternaknya lebih meningkat dan dapat meningkatkan produktivitas.

Variabel umur tenaga kerja perempuan berpengaruh nyata terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres pada tingkat kepercayaan 95 ($P < 0,05$). Besarnya koefisien regresi sebesar 225,4363 berarti bahwa setiap penambahan umur peternak akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres sebesar Rp 225,4363 per hari, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah umur semakin besar produktivitas tenaga kerja perempuan pada usaha ternak sapi potong Jabres. Diduga semakin tua semakin banyak waktu yang dicurahkan untuk memelihara ternak sehingga produktivitasnya semakin meningkat

KESIMPULAN

1. Produktivitas tenaga kerja perempuan cukup tinggi dalam usaha ternak sapi potong jabres, kontribusinya sebesar 37,10 % dan dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp 18.678,65 ± 12.669,43 per hari atau sebesar Rp 6.817.707,60 per tahun.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi potong jabres adalah jumlah ternak, jumlah anggota keluarga dan umur peternak.

3. Untuk dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan dalam usaha ternak sapi potong jabres dapat dengan cara meningkatkan jumlah pemilikan ternak, meningkatkan perhatian dan mengoptimalkan umur produktif peternak.
4. Peningkatan produktivitas akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya kandang kelompok, sehingga bisa dilakukan sharing penggunaan fasilitas dan dapat menekan biaya tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S.N., D.D. Siswansyah, dan O.K.S.Swastika. 2004. Kajian sistem usaha ternak sapi potong di Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* 7(2): 155–170.
- Direktorat Jenderal Peternakan, 2009. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2010-2014. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Elly, FH., B.M. Sinaga, SU. Kuntjoro dan N. Kusnadi. 2008. Pengembangan Usaha Ternak Sapi Rakyat Melalui Integrasi Sapi-Tanaman di Sulawesi Utara. *Jurnal Litbang Pertanian*, 27 (2), 2008.
- Mastuti dan NN Hidayat, 2009. Peranan Tenaga Kerja Perempuan dalam Usaha Ternak Sapi Perah di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Animal Production* 11 (1): 40 – 47.
- Mersyah, R. 2005. Desain sistem budi daya sapi potong berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Disertasi, Sekolah Pasca-sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 26(4): 126–130.
- Sariubang, M.A., A. Syam, dan A. Nurhayu. 2003. Sistem Usaha Tani Tanaman-Ternak pada Lahan Kering Dataran Rendah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan. (<http://www.sulsel.litbang.deptan.go.id>) 2007.

PERKEMBANGAN HARGA DAGING SAPI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI SAPI POTONG DI PROPINSI JAWA TIMUR

Rini Widiati dan Tri Anggraeni Kusumastuti

Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada; email: rini_w@ugm.ac.id; triaksp@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan (1) resiko dari perkembangan harga daging sapi di propinsi Jawa Timur, dan (2) pengaruh harga daging sapi terhadap produksi sapi potong. Penelitian ini menggunakan data *time series* harga daging sapi bulanan per kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2007-2012, populasi dan produksi sapi potong. Analisis resiko dari perkembangan harga menggunakan koefisien variasi (KV), jika $KV > 0,5$ terjadi peluang resiko bagi peternak dan sebaliknya $KV \leq 0,5$. Analisis pengaruh harga daging sapi terhadap produksi sapi menggunakan regresi *Cobb-Douglas* dengan model OLS yang sebelumnya dilakukan uji stasioner terhadap data *time series* menggunakan model akar unit. Hasil analisis menunjukkan bahwa KV harga daging sapi per kg berat hidup di semua kabupaten/kota terkecil adalah 1,70 dan terbesar 1,96, demikian juga KV harga per kg daging sapi terkecil 0,95 dan terbesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan harga daging sapi berpeluang terjadi resiko. Resiko harga per kg berat hidup yang umumnya pada peternak lebih tinggi dibanding pemasar daging sapi. Hasil analisis regresi pengaruh harga terhadap produksi menunjukkan $R^2 = 0,29$, secara parsial harga daging per kg berat hidup berpengaruh positif lebih signifikan terhadap produksi sapi potong ($P < 0,01$) dibanding harga per kg daging sapi di pasar ($P < 0,1$). Kebijakan dukungan harga untuk meningkatkan produksi sapi potong perlu dipertimbangkan terutama harga berdasarkan berat hidup.

Kata kunci: Perkembangan harga, daging sapi potong, resiko, produksi, Jawa Timur

ABSTRACT

The objective of this study was to determine (1) the risk of price movements of beef in East Java province; and (2) beef price effect on the beef cattle production. This research was done using monthly time series data by regency/city in East Java in 2007-2012 of beef prices, population and the beef cattle production. Risk analysis of beef price was using the coefficient of variation (CV), if $CV > 0.5$ occurred risks prone to the farmer and vice versa $CV < 0.5$. Quantitative analysis was performed to determine effect of beef price to the cattle production using Cobb-Douglas in the form of linear regression with OLS models that previously conducted stationarity test for time series data using the model of unit root. The result of this research showed that CV of live weight prices in all regency/city were 1.70 as the smallest and 1.96 the largest, as well as CV of the beef price were 0.95 as the smallest and 0.99 the largest. The risk of the live weight price generally higher than beef. The result of regression analysis showed that $R^2 = 0,29$. The price of live cattle and beef had significant effect jointly to the beef cattle production. Partially, price of live cattle showed more significant positive effect to the beef cattle production ($P < 0.01$) than the price of beef ($P < 0.1$). Price support policies to increase beef cattle production should be considered especially for live cattle price.

Key words : Price movements, beef, risks, production, East Java

PENDAHULUAN

Data hasil sensus PSPK tahun 2011 menunjukkan bahwa kenaikan konsumsi daging sapi nasional secara rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan sensus tahun 2011 adalah sebesar 10,94%/tahun, sedangkan kenaikan produksi dalam negeri rata-rata per tahun hanya sebesar 5,84% (Suswono, 2012). Ketidakseimbangan produksi dan permintaan konsumsi berdampak pada kenaikan harga. Khusus harga daging sapi tipikalnya tidak seperti komoditi pertanian lainnya, kenaikan harga daging sapi tidak pernah turun kembali ke posisi awal, apabila harga turun kembali tetapi tidak pernah kembali seperti pada harga awal (Ilham, 2009). Perilaku ini disebabkan karena perubahan harga yang cepat tidak segera diikuti oleh perubahan pada sisi produksi disebabkan karena siklus produksi sapi potong sampai menghasilkan daging membutuhkan waktu yang lama tidak seperti daging ayam broiler, teknologi budidaya yang rendah dan

proses produksi bersifat hanya sebagai sambilan karena hampir 95% suplai daging sapi dalam negeri diproduksi oleh peternakan rakyat. Kebutuhan konsumsi daging sapi nasional lebih tinggi dari produksi, akibatnya impor merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kondisi tersebut menjadikan pemenuhan konsumsi daging sapi nasional dan keinginan untuk berswasembada pangan daging sapi dimana komponen impor 10% dari konsumsi nasional, sampai saat ini masih belum teratasi secara tuntas dan masih menghadapi banyak masalah (Suswono,2012). Perkembangan harga daging sapi nasional ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi nasional 2005-2011

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	Rata-rata kenaikan /tahun(%)
Total konsumsi (000 ton)	359.1	413.8	369.0	415.2	421.3	417.0	449.3	10,94
Produksi Lokal (000 ton)	247.8	294.6	244.2	264.8	278.5	195.8	292.45	5,84
Impor (000 ton)	111.3	119.2	124.8	150.4	142.8	221.2	156.85	5,56

Sumber : Diolah dari (Suswono, 2012), *) Hasil sensus PSPK (2011 dalam Suswono, 2012)

Impor daging sapi secara rata-rata dalam kurun waktu 2005-2011 masih sekitar 36%/tahun dari konsumsi nasional dan paling tinggi pada tahun 2010. Pada kurun waktu tersebut secara rata-rata kenaikan impor daging sapi sebesar 5,56% per tahun. Meskipun demikian pada tahun 2012 -2013 Impor daging sapi berupa sapi bakalan dan daging sapi beku turun sebesar 11,4% dan harga daging lokal merangkak naik pada Nopember 2012 pada kisaran Rp.98.000 - Rp.105.000 per kg lebih tinggi dari kondisi normal semula pada akhir bulan Oktober 2012 antara Rp.65.000 - Rp.75.000 per kg (Nuryati dan Astrid, 2013). Secara teori kenaikan harga daging sapi akan meningkatkan penerimaan peternak sebagai produsen, pada gilirannya peternak akan terpacu untuk meningkatkan produksinya. Namun demikian yang menjadi pertanyaan apakah dengan adanya perkembangan kenaikan harga daging sapi tersebut akan meningkatkan produksi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sehingga dapat memacu peternak untuk meningkatkan produksinya.

Jawa Timur adalah salah satu propinsi di Indonesia yang mempunyai populasi sapi potong terbesar. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui (1) resiko dari perkembangan harga daging sapi di propinsi Jawa Timur, dan (2) pengaruh harga terhadap produksi daging sapi potong.

Hipotesis

- Perkembangan atau pergerakan harga daging sapi menimbulkan resiko produksi bagi peternak sapi potong dan pemasar daging sapi.
- Diduga harga daging sapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi sapi potong.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Jawa Timur, dengan pertimbangan daerah ini mempunyai populasi sapi potong terbesar diantara propinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* bulanan tahun 2007-2012 dari semua kabupaten dan kota di Jawa Timur yang diambil dari berbagai sumber dengan metode survei, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPS Jawa Timur, Buku Statistik Peternakan, Dinas Pertanian, dan Peternakan Jawa Timur tentang populasi sapi potong, harga daging per kg berat badan sapi hidup dan harga daging. Pendekatan perhitungan produksi daging sapi dihitung berdasarkan jumlah populasi sapi pada setiap kabupaten/kota dikalikan dengan *natural increase* atau output sapi potong di Jawa Timur kemudian dikalikan rata-rata estimasi berat karkas sesuai dengan hasil penelitian Sumadi, dkk. (2008).

Selanjutnya metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui resiko dari perkembangan harga dalam pemasaran daging sapi menggunakan analisis resiko dengan menghitung koefisien variasi (KV) sesuai dengan Pappas dan Hirschey (1995); Nasaruddin (2000); Karmini (2005) ditentukan dengan cara sebagai berikut :

Harga (P)

Harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga daging sapi lokal per kg berat hidup dan per kg daging di pasar per kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2007 – 2012.

2. Harga rata-rata (Pi)

Harga rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{\sum_{t=1}^n P_t}{n} \dots\dots\dots (1)$$

di mana,

Pi = harga rata-rata

Pt = harga total selama n periode waktu;

n = jumlah waktu pengamatan.

3. Resiko

Ukuran ragam/varians dan simpangan baku dapat menjelaskan resiko dalam arti kemungkinan menyebarnya hasil pengamatan sebenarnya di sekitar hasil rata-rata yang diharapkan.

Rumus untuk menghitung varians (V²) adalah:

$$V^2 = \frac{\sum (P_t - P_i)^2}{n - 1} \dots\dots\dots (2)$$

Rumus simpangan baku adalah

$$V = \sqrt{V^2} = \sqrt{\frac{\sum (P_t - P_i)^2}{n - 1}} \dots\dots\dots (3)$$

Semakin tinggi nilai ragam dan simpangan baku maka semakin tinggi pula tingkat

resiko dari perubahan harga.

4. Koefisien Variasi (KV)

Tingkat resiko usaha ternak sapi potong dari perubahan harga ditentukan berdasarkan nilai

koefisien variasi seperti rumus berikut :

$$KV = \frac{V}{E} \dots\dots\dots (4)$$

dimana,

KV = koefisien variasi

V = simpangan baku

E = harga rata-rata

Hasil dari rumus (4) menunjukkan jika $KV > 0,5$ terjadi peluang resiko kerugian bagi peternak sapi potong atau pelaku pemasaran dan sebaliknya jika $KV \leq 0,5$ tidak menunjukkan adanya resiko.

Analisis selanjutnya tentang pengaruh harga daging sapi terhadap produksi sapi menggunakan regresi *Cobb-Douglas* yang dilinearkan dengan pendugaan parameter koefisien regresi menggunakan model *Ordinary Least Square (OLS)* yang sebelumnya dilakukan uji stasioner terhadap data *time series* menggunakan model akar unit (*unit root*), sesuai dengan Gujarati (2003). Model dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\ln \text{Prod DS} = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln P_{\text{DS}} + \beta_2 \ln P_{\text{BH}} + \mu_i \dots \dots \dots (5)$$

dimana,

Dari persamaan tersebut variabel sebelah kiri adalah variabel tergantung dan sebelah kanan adalah variabel bebas.

Prod DS = produksi daging sapi (ton/tahun)

P_{DS} = harga daging sapi (Rp/kg)

P_{BH} = harga daging sapi dalam berat hidup (Rp/kg)

μ_i = variabel gangguan

β_0 , = intersep

β_1 dan β_2 = koefisien regresi

Untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam pendugaan garis regresi dapat diandalkan mendekati garis regresi yang sebenarnya ditunjukkan dengan angka koefisien determinasi R^2 yang besarnya $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 semakin mendekati 1 maka estimasi garis regresi semakin baik.

Uji hipotesis

Uji hipotesis untuk menguji koefisien regresi secara menyeluruh menggunakan uji F

Dengan hipotesis :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, yang berarti bahwa ke dua variabel bebas secara bersama –sama tidak mempengaruhi variabel tergantung (produksi daging sapi)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, yang berarti bahwa ke dua variabel bebas secara bersama –sama mempengaruhi variabel tergantung

Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a dan sebaliknya.

Uji hipotesis koefisien regresi secara parsial menggunakan uji t

Dengan hipotesis :

$H_0 : \beta_1 = 0$, Harga daging sapi dalam berat hidup tidak mempengaruhi produksi daging sapi.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, Harga daging sapi dalam berat hidup berpengaruh terhadap produksi daging sapi.

$H_0 : \beta_2 = 0$, Harga daging sapi tidak mempengaruhi produksi daging sapi.

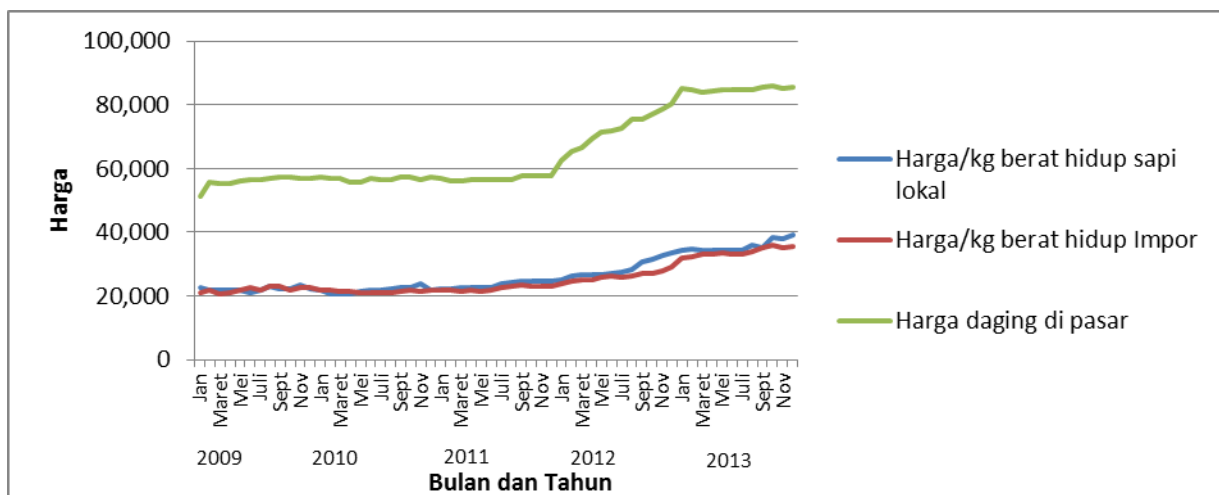
$H_a : \beta_2 \neq 0$, Harga daging sapi berpengaruh terhadap produksi daging sapi.

Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sapi Potong di Jawa Timur

Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi dengan populasi sapi potong terbesar diantara propinsi yang ada di Indonesia, yaitu pada tahun 2012 mencapai 4 727 000 ekor atau merupakan 31,88% dari populasi sapi potong Indonesia sejumlah 14 824 000 ekor. Jawa Timur merupakan sentra produksi sapi potong dan sampai dengan tahun tersebut masih sebagai pemasok sapi potong ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ditinjau dari peningkatan konsumsi daging sapi nasional secara rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan sensus tahun 2011 adalah sebesar 10,94%/tahun, sedangkan kenaikan produksi dalam negeri rata-rata per tahun hanya sebesar 5,84 % (Suswono,2012). Meskipun demikian peningkatan produksi daging sapi di Jawa Timur masih lebih besar dibanding nasional yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2012 rata-rata 8,13%/tahun dan pada tahun 2011 menghasilkan 23,49% dari produksi daging sapi nasional (Ditjen Peternakan, 2012; Badan Pusat Statistik , 2012; Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur 2011). Kondisi dimana permintaan daging sapi lebih besar dari produksi, secara teori ekonomi tanpa adanya pasok daging sapi impor maka harga keseimbangan daging sapi dalam negeri akan meningkat dan diharapkan memacu peningkatan produksi. Namun yang terjadi impor daging sapi nasional terus meningkat karena harga daging sapi impor lebih murah dibanding daging sapi dalam negeri. Kondisi tersebut berakibat produksi daging sapi lokal lambat ditingkatkan karena peternak tidak dapat bersaing dengan harga daging impor sehingga banyak mengalami resiko kerugian. Hal ini juga terlihat dari harga daging sapi di Jawa Timur seperti tercermin pada Gambar 1.



Gambar 1. Harga daging per kg berat hidup sapi potong lokal dan impor serta harga daging sapi dipasar Jawa Timur tahun 2009 sampai 2013

Dari Gambar 1, terlihat bahwa harga daging sapi di Jawa Timur nampak stabil sampai tahun 2012 karena impor terus meningkat disebabkan harga daging sapi impor lebih rendah dibanding daging sapi lokal. Hal ini sejalan dengan (Nuryati dan Astrid, 2013) yang menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2012 dan berlanjut 2013 secara nasional impor sapi bakalan dan daging sapi beku turun sampai 11,8% sehingga harga daging sapi dalam negeri terus meningkat. Namun dikatakan pula bahwa penurunan impor dan peningkatan harga daging sapi dalam negeri belum dapat diikuti peningkatan produksi secara cepat karena pemeliharaan sapi sebagian besar ada di peternakan rakyat dengan skala kecil-kecil dan proses produksi daging sapi membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi yang demikian dimungkinkan juga banyak resiko yang dihadapi peternak

Resiko Dari Pergerakan Harga Daging Sapi di Jawa Timur

Propinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Dalam penelitian ini ada 3 kota yang tidak terdapat data secara lengkap sehingga dalam analisis hanya menggunakan data dari 35 kabupaten dan kota. Hasil analisis resiko dari perkembangan harga bulanan daging sapi per kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2007-2012 berdasarkan koefisien variasi (KV) adalah seperti pada Tabel 2.

Dari Tabel 2, menunjukkan bahwa nilai KV harga daging sapi per kg berat hidup di semua kabupaten/kota terkecil 1,70 dan terbesar 1,96, demikian juga KV harga per kg daging sapi di pasar terkecil 0,95 dan terbesar 0,99. Semua nilai $KV > 0,50$ menunjukkan bahwa perkembangan harga daging sapi berpeluang terjadi resiko, namun KV harga daging sapi per kg berat badan lebih besar dari harga daging sapi. Resiko harga daging sapi dalam berat badan atau dalam bentuk ternak hidup yang umumnya ditanggung peternak adalah lebih tinggi dibanding resiko bagi pemasar daging sapi di pasar.

Tabel 2. Nilai Koefisien Variasi (KV) harga daging sapi bulanan per kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2007-2012

Keterangan	Angka Koefisien Variasi (KV)	
	Berdasarkan harga daging sapi per kg berat hidup	Berdasarkan Harga daging sapi di pasar
Tertinggi	1,96	0,99
Terendah	1,70	0,95
Rata-rata	1,90	0,98

Pengaruh Harga Daging Sapi Terhadap Produksi Sapi Potong

Dalam penelitian ini menggunakan data *time series*, oleh karena itu sebelum dianalisis perlu diketahui apakah data bersifat stasioner atau tidak dengan menggunakan metode *unit root* (akar unit). Pada tingkat pertama ternyata ada 1 variabel bebas yang tidak stasioner yaitu variabel daging sapi lokal (Prob Augmented Dickey Fuller atau ADF > 0.05). Berhubung tidak semua data stasioner maka untuk menjadikan data tidak stasioner menjadi stasioner, data dideferensi pada tingkat deferensi pertama. Pada analisis akar unit, tingkat deferensi pertama ternyata semua variabel bebas sudah stasioner (Prob ADF < 0.01). Data yang tidak stasioner sebelum dideferensi namun stasioner pada tingkat diferensi pertama kemungkinan terjadi kointegrasi yaitu terdapat hubungan jangka panjang diantara variabel bebas dan terikat. Pada pengujian kointegrasi dengan menggunakan Johansen Cointegration Test didapat variabel bebas yang saling berkointegrasi yaitu antara harga daging sapi lokal dan produksi sehingga dalam jangka pendek ada kemungkinan terjadi ketidakseimbangan (disekuilibrium) sehingga diperlukan adanya koreksi dengan model koreksi kesalahan *Error Correction Model* (ECM), sesuai dalam Gudjarati (2003). Berdasarkan hasil analisis dengan ECM maka ternyata didapat nilai residual dengan $P < 0.01$ sehingga data bisa diteruskan untuk analisis lebih lanjut, yaitu analisis regresi. Hasil analisis regresi yang menunjukkan hubungan antara harga daging sapi dan produksi sapi potong dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis regresi pengaruh harga terhadap produksi daging sapi di Jawa Timur

Variable	Coefficien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Ln C	-12567,91	98190,91	-0,1280	0,8983
Ln P _{DS}	25,5373	15,0873	1,6926	0,0920
Ln P _{BH}	131,3103	31,2143	4,2067	0,0000
RESIDUAL	-0,1401	0,0368	-3,7995	0,0002
R-squared	0,2935	F-statistic		28,3889
Adjusted R-squared	0,2831	Prob (F-statistic)		0,0000

Dari Tabel 3 didapat nilai R^2 sebesar 0,2935. artinya variabel harga dapat menjelaskan variabel produksi daging sapi sebesar 29.35%, sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Menurut Ardiyati (2012) pada kasus data deret ukur R^2 yang sangat tinggi sering terjadi. Sebaliknya pada data *cross section*, umumnya akan diperoleh R^2 yang lebih rendah (0.30 s/d 0.80). Pada kasus penelitian sosial, R^2 antara 0.30 – 0.60 juga sudah dapat dikatakan tinggi. Selanjutnya harga daging sapi berdasarkan berat hidup sangat signifikan ($P < 0.01$) dibanding harga daging di pasar dengan tingkat signifikansi $P < 0.1$. Elastisitas harga daging sapi berdasarkan berat hidup terhadap produksi lebih besar atau 5 kali lipat dibanding elastisitas harga daging sapi di pasar. Hal ini disebabkan karena harga sapi hidup berhubungan langsung dengan produsen daging sapi yaitu peternak dibanding pemasar daging sapi di pasar tidak secara langsung berhubungan dengan peternak. Disamping itu pada tataniaga sapi potong, umumnya peternak menjual dalam bentuk ternak hidup kepada pedagang, blantik dan pejagal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa resiko harga daging sapi berdasarkan berat badan atau ternak hidup yang umumnya pada peternak lebih tinggi dibanding pemasar daging sapi. Ditinjau dari pengaruh harga daging per kg berat hidup sangat signifikan positif terhadap produksi sapi potong dibanding harga daging sapi di pasar. Disamping itu elastisitas harga berat hidup terhadap produksi daging sapi juga lebih besar sekitar 5 kali lipat dibanding harga daging sapi di pasar. Oleh karena itu kebijakan dukungan harga daging sapi untuk meningkatkan produksi sapi potong perlu diperhatikan terutama harga daging dalam berat hidup yang berhubungan langsung dengan peternak yang menghadapi resiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, P. and H. C. Knipscheer, 1989. *Conducting On-Farm Animal Research. Procedure & Economic Analysis*. Singapore National Printer Ltd. Singapore.
- Antoni, A.A. 2003. *Kamus lengkap ekonomi*. Gitamedia Press, Jakarta.
- Ardiyati, A. 2012. *Penawaran daging sapi di Indonesia (Analisis proyeksi swasembada daging sapi 2014)*. Tesis. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Kekhususan Manajemen Sektor Publik. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2007-2011*. Badan Pusat Statistik Indonesia-Jakarta.
- Ditjen Peternakan, 2012. *Buku Statistik Peternakan*. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. Departemen Pertanian RI.
- Gujarati, D.N., 2003. *Basic Econometric*. Fourth Edition. New York. Mc Graw-Hill.
- Ilham, N. 2009. *Kelangkaan Produksi daging : Indikasi dan Implikasi Kebijakan*. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 7 No.1, Maret 2009: 43-63
- Karmini, 2005. *The Risk of Price Fluctuation in Marketing of Local and Import Rice in Indonesia*. EPP. Vol.2.No.2.2005:33-39
- Nasarudin. 2000. *Ekonomi produksi*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Nuryati, Y. dan M. Astrid. 2013. *Tinjauan Pasar Daging Sapi Desember 2013*. Tim Komoditi Spesialis Daging Sapi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Pappas, JM., M. Hierschey, 1995. *Ekonomi Managerial Edisi Keenam Jilid II*. Bina rupaAksara. Jakarta.
- Pakpahan, A.R.S. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor daging sapi di Indonesia*. EDAJ 1 (2) (2012). 1-9

- Pemda Provinsi Jawa Timur, 2011. Buku 4. Data Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur 2007- 2011 : Pengukuran Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jatim Dengan BPS Provinsi Jatim.
- Penson, Jr.J.B., Capps, Jr.O., and Rosson III,C.P., 2002. Introduction to Agricultural Economic. Third Edition. Prentice Hall. New Jersey.
- Soekartawi, Rusmadi dan E. Damarjati,. 1993. Resiko dan ketidakpastian dalam agribisnis. Raja Grafindo, Jakarta
- Sumadi, T. Hartatik, N. Ngadiyono, G.S. Budisatria, H. Mulyadi, B. Aryadi., 2008. Sebaran Sapi Potong di Pulau Jawa dan Madura. Kerjasama Pengusaha Feedlod Indonesia (APFINDO) dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suswono, 2012. Blue Print Program Swa sembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014, Edisi Revisi. Departemen Pertanian R I.

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TRADISIONAL (TESANG) PADA USAHA SAPI POTONG DI KABUPATEN BARRU,PROVINSI SULAWESI SELATAN

S.N. Sirajuddin, S. Nurlaelah, A. Amrawaty, dan M. Aminawar

Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin; email: sitti_nurani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sistem bagi hasil tradisional (Tesang) merupakan suatu bentuk kerjasama masyarakat Bugis-Makassar sebagai bentuk hubungan patron-klien dalam bisnis sapi potong. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang merupakan daerah pemurnian sapi Bali (lokal). Penelitian dilakukan sejak April 2014 hingga Mei 2014. Populasi adalah peternak yang melakukan sistem Tesang dalam waktu lebih dari 5 tahun dan sampel berjumlah 30 orang. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan system Tesang sebagian besar dilakukan pada perbibitan sapi potong dengan bentuk tesang sapi dan tesang biaya. Perlu penguatan system Tesang sebagai pola kemitraan yang saling menguntungkan dan merupakan penguatan kelembagaan kearifan lokal .

Kata kunci : tradisional , sistem bagi hasil, Tesang , ternak, sapi

ABSTRACT

Traditional sharing system (Tesang) is a form of cooperation Bugis-Makassar society as a form of patron-client relationships in the cow business. This study was conducted at Soppeng Riaja Village, Barru Regency because Barru purification Bali cattle (local). The study was conducted from April 2014 until May 2014. Population are farmers who do Teseng system propagators within 5 years and over were 30 samples. Analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed the system Tesang mostly in the form of beef cattle breeding cattle and tesang costs. Tesang need reinforcement system as a mutually beneficial partnership and an institutional strengthening local wisdom.

Keywords: traditional, profit-sharing, system ,Tesang, livestock,cow

PENDAHULUAN

Secara umum, peningkatan permintaan daging dan hasil olahannya tidak dibarengi oleh peningkatan jumlah populasi sapi potong itu sendiri, sehingga produksi daging di dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan tersebut yang mengakibatkan pemerintah melakukan impor. Seiring dengan hal tersebut maka perlu pengembangan usaha sapi potong. Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil daging di Indonesia. Namun, produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan tingkat produktivitas ternak rendah (Isbandi 2004; Direktorat Jenderal Peternakan 2007; Syadzali 2007). Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas (Kariyasa 2005; Mersyah 2005; Suwandi 2005). Modal merupakan faktor pembatas. Pada saat ini tingkat kepemilikan ternak dalam usaha tani relatif kecil yaitu sapi 1–3 ekor, kambing/domba 3-5 ekor, dan unggas 5–20 ekor. Pendapatan kotor petani peternak masih belum cukup memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Usaha ternak merupakan sumber tambahan pendapatan yang penting untuk menopang kebutuhan keluarga tani khususnya di pedesaan (Kusnadi, 2008) dalam Ardiansyah (2013). Pola usahanya sebagian besar adalah perbibitan atau pembesaran anak, dan hanya sebagian kecil peternak yang mengkhususkan usahanya pada penggemukan ternak. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan usaha dengan pola kemitraan yang bersifat modern atau tradisional dengan sistem bagi hasil sehingga dapat memberikan keuntungan yang layak secara berkelanjutan.

Pola kemitraan atau kerjasama dalam suatu usaha sudah ada dimasyarakat petani/peternak sejak dahulu. Kerjasama di bidang peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik,diternakkan dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam

bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak (Hadikusumah,2001). Pola kemitraan usaha tersebut khususnya pada usaha ternak di kalangan petani/peternak sering dikenal dengan sebutan “Tesang” yang berasal dari bahasa Bugis yaitu Teseng yang secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan modal yang dimilikinya untuk dikembangkan orang lain. Teseng biasanya diterapkan pada peternakan dengan mekanisme bagi hasil antara peternak dengan pemilik modal akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung variatif. Keberagaman pelaksanaan dan bentuk perjanjian (lisan-tertulis) tidak lepas dari adat istiadat yang berlaku disuatu daerah. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemberi modal dan petani/peternak. Biasanya tidak ada ikatan/kontrak secara tertulis tentang kerjasama usaha tersebut. Kerjasama antara pemilik modal dan Pa’teseng hanya secara lisan dan didasarkan atas saling percaya dan biasanya adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemodal ataupun yang dikenalkan oleh kerabat pemodal. Sistem Tesang ini menunjukkan bahwa nilai trust (kepercayaan) dan norma-norma berperan sangat penting yang berlaku pada kedua belah pihak (Sirajuddin,dkk;2013). Oleh karena itu menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun karakter bangsa (Wagiran, 2012). Oleh karena itu perlu mengetahui penerapan sistem bagi hasil tradisional (Tesang) pada usaha sapi potong di Kabupaten Barru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga bulan Mei 2014 di Kecamatan Soppeng Riaja, kabupaten Barru karena merupakan pemurnian sapi Bali (sapi lokal). Jenis data adalah data kualitatif. Sumber data yaitu data primer yaitu berupa data identitas responden, sistem bagi hasil dan data sekunder yaitu data dari instansi terkait. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Populasi adalah semua peternak sapi potong yang melakukan sistem bagi hasil pola tradisional (Tesang) dan sistem bagi hasil pola pemerintah di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Sampel adalah peternak sapi potong yang melakukan sistem bagi hasil Tesang selama 5 tahun-10 tahun yang berjumlah 30 orang peternak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Penerapan Sistem Bagi Hasil Tradisional (Tesang) Pada Usaha Sapi Potong

Dalam penerapan sistem bagi hasil(Tesang) di Kabupaten Barru secara umum sama dengan bagi hasil tradisional yang berlaku di kehidupan peternak sapi potong di seluruh Indonesia. Di kalangan masyarakat perdesaan dikenal istilah paroan/gadhuh yaitu penyedia bibit ternak dan pemelihara masing-masing mendapatkan bagian separuh dari anak yang dihasilkan. Karena sistem bagi hasil ini sudah sangat umum berlaku dan sudah sejak lama diterapkan dalam setiap usaha bagi hasil peternakan sapi, masyarakat beranggapan bahwa setiap usaha bagi hasil peternakan sapi harus menggunakan pola 50%:50%. Hal yang paling utama pada penerapan sistem bagi hasil yaitu tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari pemilik sapi(pemilik modal) kepada peternak(pa’teseng).

Sistem bagi hasil Tesang yang dilakukan oleh peternak sapi potong di Kabupaten Barru sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan telah mengakar secara turun temurun walaupun dalam perkembangannya telah mengalami beberapa penyesuaian pada metode pembagiannya yaitu atas dasar saling percaya ditambah hukum adat yang mendukung dalam penerapan sistem teseng membuat sistem bagi hasil ini dapat bertahan lama dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurut Saidari (2009) menyatakan bahwa dalam perjanjian itu yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat tertulis yaitu seseorang yang berhak atas suatu tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin mendapat hasilnya memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbalan yang sudah ditentukan sebelumnya

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan system bagi hasil yang ada di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Antara pemilik dan peternak harus ada kepercayaan yang terbangun, karena dalam penerapan system ini biasaya tidak ada kesepakatan yang tertulis. Semua kesepakatan yang terbangun hanyalah kesepakatan lisan antara pemilik dan peternak. Biasanya peternak yang memelihara mempunyai tingkat pendapatan rendah (miskin) sehingga pemilik modal membantu dengan memberikan sapi atau biaya untuk membeli sapi, hal ini sesuai pendapat Mosher dalam Tarigan (1996) bahwa bagi hasil adalah kerjasama yang diikat dengan perjanjian 50 %:50%. Sistem ini banyak dilakukan karena kemiskinan dan kesukaran mendapatkan modal memaksa seseorang untuk menerima nasibnya mengerjakan tanah atau memelihara ternak yang bukan miliknya sendiri.

Bagi pemilik ternak yang biasanya sebelum mempercayakan sapihnya untuk ditenakkan pada orang yang dipilih mempertimbangkan beberapa aspek seperti:

Peternak mempunyai hubungan kekerabatan kekeluargaan yang berdomisili di daerah sekitar tempat pemilik modal sehingga mudah mengawasi ternak yang akan dipelihara

Peternak memiliki pengalaman beternak yang dinilai cukup oleh pemilik modal (pemilik sapi)

Memiliki lahan yang dapat dijadikan tempat menanam hijauan atau didaerah tempat tinggal peternak ketersediaan hijauan cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan sapi.

Jangka waktu penerapan sistem Tesang tidak tentu atau disesuaikan dengan keadaan saat itu. Misalnya, ketika peternak tiba-tiba membutuhkan biaya dan sistem Tesang telah berjalan 2 tahun maka pada saat itu dapat dikatakan kesepakatan dikatakan berakhir dan hasil anak dari sapi yang ditenakkan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Bagian dari masing-masing pihak akan dibagi rata artinya pada tahun pertama jika ternak betina melahirkan maka anak sapi dimiliki oleh pemiliknya dan tahun kedua diberikan kepada peternak atau sebaliknya, hal ini sesuai pendapat Hadikusuma (2001) bahwa perjanjian bagi hasil peternakan menurut hukum perjanjian adat sistem bagi hasil yang umum diterapkan selama ini adalah 50 % untuk penyedia bibit ternak dan 50 % untuk pemelihara.

Mekanisme sistem bagi hasil tradisonal (Tesang) yang diterapkan oleh peternak sapi potong di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru

Pada masyarakat Bugis yang mendiami sebagian besar wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan, maka istilah perjanjian bagi hasil biasa disebut dengan istilah "teseng/tesang". Meskipun istilahnya sama bagi etnis Bugis dan etnis Makassar akan tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung bervariasi disebabkan pemahaman dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat juga berbeda.

Adapun gambaran pola bagi hasil yang diterapkan oleh peternak sapi potong di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yaitu :

1. Pola I (sapi betina induk)

Pada pola ini, sapi yang diberikan oleh pemilik sapi ke peternak untuk dipelihara adalah sapi betina dewasa atau sapi betina yang telah beranak. Untuk sistem pembagian hasilnya yaitu pada tahun pertama jika sapi betina tersebut melahirkan maka anak sapi pada tahun pertama diberikan kepada pemilik sementara pada tahun kedua kepada peternak atau sebaliknya sesuai perjanjian lisan dan begitu seterusnya hingga tahun kelima. Pola ini sebahagian besar diterapkan karena menurut pendapat peternak jika sapi betina dewasa yang ditenakkan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat dikembangbiakan.

Dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pemilik modal(ternak) sebelum menerapkan sistem bagi hasil biasanya mencari peternak yang ingin memelihara sapihnya atau seseorang yang menawarkan diri sebagai peternak kepada orang yang dianggap memiliki modal. Pemilik hanya memberikan uang tunai kepada peternak dan berharap agar uang yang telah diberikan akan dipakai untuk membeli sapi sesuai dengan jenis sapi yang diinginkan oleh pemilik modal seperti membeli induk sapi atau sapi dara. Pada

posisi tersebut maka peternak biasanya membeli induk sapi dengan asumsi bahwa dengan memelihara induk sapi akan lebih cepat mendapatkan keturunan dan berarti lebih cepat mendapatkan keuntungan.

1. Pola II (sistem biaya)

Pada pola ini pemilik ternak atau pemilik modal memberikan kepada peternak sapi untuk memelihara sapi jantan untuk digemukkan dalam waktu 3 – 6 bulan dan selanjutnya dijual dimana kewajiban pemelihara yaitu menanggung seluruh pakan(hijauan makanan ternak dan konsentrat),pengobatan dan kandang. Adapun contoh sistem bagi hasil tersebut jika dalam waktu tertentu sapi jantan tersebut akan dijual maka hasil pembelian sapi dikurangi dengan biaya-biaya selama pemeliharaan selanjutnya hasil tersebut dibagi dua antara peternak dan pemilik modal. Misalnya pembelian ternak jantan seharga 3 juta pada saat diberikan kepada peternak setelah 3 bulan- 6 bulan kemudian sapi tersebut dijual seharga 5 juta maka hasil yang diperoleh peternak yaitu 1 juta sebab 5 juta dikurangi 3 juta berjumlah 2 juta kemudian pembagian 50% : 50%.

Sebenarnya pola apapun yang diterapkan pada sistem bagi hasil Tesang bagi peternak sapi bukan merupakan masalah sebab mereka biasanya hanya menerima sapi yang diberikan oleh pemilik untuk dipelihara dan mereka mendapatkan pendapatan dari sistem bagi hasil yang dilakukan, hal ini sesuai pendapat Saidari (2009) bahwa selain perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian terdapat pula perjanjian bagi hasil dalam bentuk lain dimana bukan hasil tanaman yang menjadi objek perjanjian akan tetapi ternak seperti sapi dan kerbau

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diberikan yaitu penerapan sistem Tesang pada usaha sapi potong di Kabupaten Barru yaitu terbagi atas sistem pemberian betina bunting dimana anak sapi yang lahir diberikan sesuai perjanjian yang berlaku antara peternak dan pemilik sapi dan sistem biaya dimana penjualan sapi potong dibagi berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan oleh peternak

Sedangkan saran yang diberikan sebaiknya sistem Tesang yang berlaku di Kabupaten Barru lebih dikembangkan dengan penguatan pada tingkat kepercayaan antara peternak sapi dan pemilik modal

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Hasanuddin yang memberikan kesempatan memperoleh Hibah penelitian kompetensi BOPTN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah,A,A. 2013. Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Sapi Potong di desa Batu Lappa,Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Skripsi. Fakultas Peternakan UNHAS.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2007. Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2001. Hukum Perekonomian Adat Indonesia. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Isbandi. 2004. Pembinaan kelompok petani- ternak dalam usaha ternak sapi potong. J. Indon. Trop. Anim. Agric. 29(2): 106-114.
- Kariyasa, K. 2005. Sistem integrasi tanaman-ternak dalam perspective reorientasi kebijakan subsidi pupuk dan peningkatan pendapatan petani. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian 3(1): 68-80.
- Mersyah, R. 2005. Desain system budi daya sapi potong berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Saidari,R. 2009. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1960. Diakses pada tanggal 24 Januari 2013.

- Sirajuddin, S.N., Saleh, I.M, Rasyid, I.2013. Peran Teseng (Sistem Bagi Hasil Tradisional) dalam Peningkatan Populasi Sapi Potong di Kabupaten Bone. Prosiding. Seminar Nasional Kimia. Peran Sains dan teknologi Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional.
- Suwandi. 2005. Keberlanjutan Usaha Tani pada Padi Sawah-Sapi Potong Terpadu di Kabupaten Sragen. Pendekatan RAP-CLS. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Syadzali, M.J. 2007. Efektivitas Penyuluhan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan (Studi kasus Kecamatan Kelara). Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
- Wagiran, 2012. Pengembangan Karakter berbasis kearifan local Hamemayu Hayuning Bawana. J. Pendidikan Karakter. 2(3):329-339

PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PETERNAK KERBAU (Studi Kasus di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)

Sri Mastuti, Syarifudin Nur, dan Hudri Aunurohman
Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis besarnya produktivitas kerja usaha peternakan kerbau di Kecamatan Taman, 2). Menganalisis faktor sosial ekonomi (umur peternak, pendidikan peternak, lama beternak, dan sakala usaha) terhadap produktivitas kerja usaha peternakan kerbau di Kecamatan Taman. Penentuan sampel desa, menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan daerah sentra pemeliharaan peternakan kerbau, sehingga terpilih Desa Kejambon, Desa Jebed Utara, dan Desa Jebed Selatan. Tahap kedua, menentukan sampel responden menggunakan metode random sampling sebanyak 60 persen dari masing-masing desa terpilih, sehingga diperoleh 45 responden. Produktivitas kerja peternak kerbau dianalisis dengan membandingkan penerimaan (*revenue*) dengan curahan kerja dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja peternak usaha kerbau digunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman sebesar Rp. 7.816,79/ JKSP.; 2). Faktor skala usaha mempengaruhi besarnya tingkat produktivitas kerja peternak kerbau. Kesimpulan: 1). Produktivitas kerja peternak kerbau cukup efisien karena nilainya di atas UMR daerah setempat. 2). Produktivitas kerja peternak kerbau dapat ditingkatkan dengan jalan menambah skala usaha. Usaha ternak kerbau berarti dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif usaha sampingan yang bisa dipilih oleh petani untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

Kata kunci: produktivitas kerja, usaha ternak kebau

PENDAHULUAN

Kerbau mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi petani, yakni sebagai tabungan hidup, menunjang status sosial, sumber tenaga kerja, penghasil daging, susu dan pupuk (DIWYANTO dan SUBANDRIYO, 1995). Menurut YUSDJA *et al.* (2003), populasi kerbau sebagai penghasil daging relatif lambat, sehingga produktivitasnya rendah. Perbaikan produktivitas kerbau yang dapat dilakukan adalah perbaikan mutu genetik melalui intensifikasi inseminasi buatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi usaha peternakan kerbau belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dan juga untuk ekspor.

Dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas usaha ternak diperlukan adanya ketersediaan piranti-piranti pendukung seperti teknologi siap pakai dan mempunyai tingkat kelayakan yang memadai untuk mendukung proses produksi, dengan berpijak pada sumber daya ternak yang ada, dan peternak sebagai objek yang harus ditingkatkan keterampilannya (ISBANDI dan PRIYANTO, 2004).

Kecamatan Taman merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan usaha peternakan kerbau. Potensi sumber daya alam seperti lahan yang cukup luas dan hijauan yang cukup melimpah dapat menjadi faktor pendorong untuk pengembangan usaha. Namun, usaha peternakan kerbau tersebut masih memiliki berbagai kendala yaitu jumlah kepelikan relatif kecil antara 2-4 ekor, sistem pemeliharaan masih tradisional, dan hanya sebagai usaha sambilan.

Sejalan dengan perkembangan usaha ternak kerbau dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan keluarga, tenaga kerja memegang peranan penting. Karena, baik kaulitas dan kuantitas tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan usaha peternakan kerbau akan memberikan dampak terhadap keberhasilan usaha. Soekartawi (2003), menyatakan bahwa faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja.

Peternak sebagai sumber tenaga kerja dan pengelola akan mempengaruhi tingkat produksi yang dihasilkan. Oleh karena itu tinggi rendahnya produksi yang dihasilkan tergantung kepada kemampuan peternak sebagai sumber daya manusia, agar produksi bisa optimal dan menghasilkan pendapatan yang maksimal.

Produktivitas kerja tergantung dari kemampuan fisik, wawasan dan ekonomi peternak seperti umur peternak, tingkat pendidikan, lamanya beternak, dan skala usaha peternak. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat besarnya peranan tenaga kerja dalam menentukan keberhasilan usaha, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar tingkat produktivitas kerja peternak kerbau dan seberapa besar faktor umur peternak, pendidikan peternak, lamanya beternak, dan skala usaha mempengaruhi terhadap produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis besarnya produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman, 2). Menganalisis faktor sosial ekonomi (umur peternak, pendidikan peternak, lama beternak, dan skala usaha) terhadap produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman.

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel desa, menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan daerah sentra pemeliharaan peternakan kerbau, sehingga terpilih Desa Kejambon, Desa Jebed Utara, dan Desa Jebed Selatan. Tahap kedua, menentukan sampel responden menggunakan metode random sampling sebanyak 60 persen dari masing-masing desa terilih, sehingga diperoleh 45 responden.

Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai berikut:

Produktivitas Kerja Dianalisis dengan Rumus:

$$P = Y/L$$

P = Produktivitas Kerja

Y = Penerimaan

L = Jumlah Curahan Kerja (Henanto, 2003)

Menganalisis pengaruh variabel bebas (umur peternak, pendidikan peternak, lama beternak, dan skala usaha) terhadap produktivitas kerja digunakan analisis Regresi Linier Berganda, dengan model matematik :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + \xi \quad (\text{Sukartawi, 2003})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Usaha Ternak Kerbau

Mubyarto(1995), menyatakan penerimaan tunai pada usahatani merupakan perkalian antara produk yang dihasilkan dengan harga jual dari produk tersebut, baik produk utama maupun produk sampingan. Hasil analisis dapat ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1. Rataan Penerimaan Usaha Ternak Kerbau di Kecamatan Taman

No.	Asal Penerimaan	(Rp)/Th	Pesentase (%)
1.	Pejualan ternak	15.511.111,11	73,34
2.	Kenaikan nilai ternak	5.455.555,56	25,80
3.	Penjualan feses	182.222,22	0,86
	Jumlah	21.148.888,89	100,00

Sumber Data: Data Primer yang Diolah Tahun 2014

Penerimaan utama terbesar adalah dari penjualan ternak, sedangkan penerimaan sampingan berasal dari kenaikan nilai ternak (yaitu ternak yang tidak dijual dalam kurun waktu satu tahun mengalami kenaikan nilai ekonomi), serta penjualan feses yang biasanya dijual setelah terkumpul beberapa bulan.

Berdasarkan Tabel 1 bahwa penerimaan usaha ternak kerbau cukup baik yaitu sebesar Rp.21.148.88,89/tahun, atau RP.1.762.407,41/bulan atau setara Rp.58.746,91/hari. Bila dibanding dengan UMR di Kabupaten Pemalang masih relatif lebih tinggi walaupun masih belum dikurangi biaya produksi. Biaya produksi pada usaha ternak kerbau relatif kecil karena peternak tidak mengeluarkan biaya pakan hijauan dan biaya tenaga kerja. Sebagian besar peternak jarang memberikan pakan konsentrat untuk makan tambahan sehingga biaya produksi relatif rendah.

2. Curahan Kerja dalam Pengelolaan Usaha Ternak Kerbau.

Peternak kerbau di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang mencurahkan waktunya dalam berternak adalah untuk aktivitas merumput, membersihkan kandang, member pakan, serta memandikan ternak. Rincian jenis pekerjaan dan banyaknya curahan kerja yang dibutuhkan dalam usaha ternak kerbau dalam kurun waktu satu tahun, disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rataan Curahan Kerja pada Usaha Ternak Kerbau Per Tahun di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki Jam (TKSP)	Perempuan Jam (TKSP)	Total C.Kerja (JKSP)	Persentase (%)
1.	Merumput	265,33	114,29	379,62	70,29
2.	Memberi pakan	25,33	21,33	46,66	8,64
3.	Membersihkan kandang	33,33	24	57,33	10,62
4.	Memandikan ternak	31,11	25,33	56,44	10,45
	Jumlah	2.160,60	528,03	2.688,29	100,00

Sumber: Data Primer Diolah 2014.

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa pekerjaan merumput merupakan pekerjaan yang menyita waktu sebesar 70,29 persen, hal ini disebabkan pekerjaan merumput adalah pekerjaan yang paling berat dibandingkan pekerjaan yang lain, disamping itu tempat merumput letaknya jauh dari lokasi kandang sehingga memerlukan waktu yang paling besar.

Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja dalam penelitian ini adalah merupakan perbandingan antara penerimaan dengan curahan kerja yang digunakan untuk pengelolaan usaha ternak kerbau selama kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dengan satuan kerja setara pria (JKSP). Adapun data selengkapnya mengenai produktivitas kerja peternak kerbau Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan Produktivitas Kerja Peternak Kerbau di Kecamatan Taman Kabupaten Banyumas

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Total (JKSP/th)	C.Kerja	Produktivitas Kerja (Rp/JKSP)
1.	Maksimal	57.100.000,00	3.783,83		19.928,45
3.	Minimal	5.000.000,00	1.776,33		2.221,40
3.	Rata-rata	21.148.888,89	2.688,29		7.816,79

Sumber: Data Primer Diolah 2014.

Berdasarkan Tabel 3. di atas diketahui bahwa produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan rata-rata produktivitas kerja sebesar Rp.7.816,79./JKSP sebab jika dikalkulasikan ada 7 jam kerja efektif per hari maka nilai produktivitas kerja peternak kerbau sebesar Rp. 54.747,53/hari, sehingga dalam satu bulan nilainya Rp. 1.641.526,02./bulan.

Tingginya nilai produktivitas kerja ini disebabkan, karena sumber penerimaan tidak hanya berasal dari penjualan ternak, tapi dari kenaikan nilai ternak dari ternak yang tidak dijual, dan penerimaan sampingan yaitu penjualan kotoran. Dari Tabel 1. menunjukkan bahwa penerimaan terbesar berasal dari produk utama yaitu penjualan ternak lebih dari 73,34 persen dan sisanya berasal dari produk sampingan sebesar 26,66 persen.

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, upah minimum rata – rata (UMR) Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 sebesar Rp 940.000,00/bulan. Apabila dibandingkan dengan nilai produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, nilai tersebut lebih tinggi dari pada UMR di daerah tersebut. Sehingga usaha ternak kerbau merupakan salah satu alternatif pilihan sebagai usaha sampingan untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Produktivitas Kerja Peternak Kerbau.

Pengaruh variabel bebas (umur peternak, pendidikan peternak, pengalaman beternak, dan skala usaha) terhadap produktivitas kerja digunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis produktivitas kerja peternak kerbau diduga dipengaruhi oleh umur peternak (X_1), pendidikan peternak (X_2), pengalaman beternak (X_3), skala usaha (X_4). Hasil analisis regresi seelengkapny ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Peternak Kerbau

Variabel	Koefisien Regresi	t- Hitung	P- Value
Umur peternak (X_1)	-34,5001	-0,32095	0,749918
Pendidikan peternak (X_2)	-48,8315	-0,16863	0,866938
Pengalaman beternak peternak (X_3)	-184,612	-0,4282	0,670805
Skala usaha (X_4)	1439,584	2,980143	0,004882***
$R^2 = 0,240739$			
F signifikan = 0,02357**			
Intersep = 4981,173			

Sumber: Data Primer Diolah 2014; Keterangan:***) signifikan pada taraf 99 persen; **)signifikan pada taraf 95 persen

Hasil analisis regresi: $Y = 4981,173 - 34,5001 X_1 - 48,8315 X_2 - 184,612 X_3 + 1439,584 X_4$.

Analisis regresi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persamaan garis dapat digunakan untuk mengestimasi produktivitas kerja peternak kerbau dari variabel-variabel yang diambil dalam model tersebut. Karena secara bersama-sama, variabel bebas berpengaruh nyata terhadap efisiensi kerja dengan tingkat signifikan 95 persen ($P < 0,05$), Koefisien determinasi $R^2 = 0,240739$ menunjukkan bahwa 24,07 persen variasi variabel terikat dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel bebas dan sisanya sebesar 75,93 merupakan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Secara parsial variabel umur peternak (X_1) berpengaruh tidak nyata terhadap produktivitas kerja. Hal ini disebabkan tidak terdapat perbedaan curahan kerja antara responden yang masih berumur muda dengan responden yang sudah berumur tua. Perbedaan curahan kerja lebih banyak dipengaruhi oleh banyaknya ternak/skala usaha yang dimiliki. Tidak adanya perbedaan curahan kerja tentunya juga tidak akan berdampak terhadap besarnya produktivitas kerja peternak. Pada hal Lasminah(2005), menyatakan bahwa semakin tinggi curahan kerja yang diberikan maka ternak akan lebih terawat sehingga siklus produksi tidak terganggu. Maka produksi yang diperoleh peternak akan optimal sehingga produktivitas kerja dapat maksimal.

Pendidikan peternak (X_2) berpengaruh tidak nyata terhadap produktivitas kerja. Kondisi ini mungkin disebabkan karena sebagian besar peternak berpendidikan relatif rendah, sehingga kurang termotivasi

dalam mengelola usahanya. Sesuai dengan pendapat Kusumawati (2004), menyatakan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan penerimaan informasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih baik mempertahankan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan daya pikirnya, sehingga sulit menerima informasi baru. Pada hal menurut Mulyadi (2003), menyatakan bahwa peningkatan kualitas pekerja yang akan dicerminkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata semakin baik, yang akan memberikan dampak positif terhadap produktifitas tenaga kerja.

Pengalaman beternak (X_3) berpengaruh tidak nyata terhadap produktivitas kerja peternak. Hal ini disebabkan baik peternak lama atau peternak baru dalam memelihara ternaknya menggunakan metode yang sama. Perbedaan lama beternak ternyata tidak berpengaruh terhadap peternak dalam mengelola ternaknya yang masih saja menggunakan metode tradisional, sehingga antara responden yang sudah berpengalaman ataupun yang belum berpengalaman tidak memiliki perbedaan dalam mengelola ternaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukono (2007), menyatakan bahwa rata-rata peternak masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana serta turun tumurun sehingga pengalaman atau lama beternak tidak memberikan sumbangan yang nyata bagi pendapatan peternak

Faktor skala usaha (X_4) berpengaruh sangat nyata terhadap produktivitas kerja peternak pada tingkat kepercayaan 99 persen ($P < 0,01$). Koefisien regresi 1439,584, berarti bahwa penambahan jumlah ternak sebanyak satu ekor ternak kerbau akan menaikkan produktivitas kerja sebesar Rp. 1.439,584/JKSP. Sesuai pendapat Paturochman (2005), menyatakan bahwa besar kecilnya skala usaha sangat mempengaruhi tingkat produksi. Makin tinggi skala usaha pemilikan, maka makin besar tingkat pendapatan peternak. Maka untuk meningkatkan pendapatan peternak sapi perah dapat ditempuh dengan meningkatkan skala usaha pemilikan. Semakin banyak ternak yang dipelihara semakin efisien dalam penggunaan

KESIMPULAN

Besarnya nilai produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang cukup tinggi bila dibanding dengan UMR yang berlaku di daerah setempat.

Faktor skala usaha berpengaruh terhadap produktivitas kerja peternak kerbau di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dalam pengembangan usaha ternak kerbau melalui berbagai program, baik berupa bantuan modal atau kredit usaha, sehingga peternak dapat meningkatkan skala usaha untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

Petugas penyuluh lapangan (PPL) lebih aktif dan peduli terhadap peternak dengan cara memberikan program penyuluhan dan pelatihan yang sesuai, sehingga kemampuan peternak dalam mengelola usaha ternak kerbaunya meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diwyanto, K. Dan Subandriyo. 1995. Peningkatan mutu genetik kerbau lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian XIV(4): 92-101.*
- Hernanto, F. 2003. *Ilmu Usahatani. Panebar Swadaya. Cetakan ke-3. Jakarta. Hal. 157-212.*
- Isbandi dan D. Priyanto. 2004. Sumbangan subsektor usahaternak domba dalam mendukung ekosistem rumah tangga di Desa Pasiripis dan Tegalsari, Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 4-5 Agustus 2004. (Buku I). Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor. Hlm.314-322.*
- Kusumawati, Y. 2004. Hubungan Pendidikan dan Pengetahuan Gizi Ibu dengan Berat Bayi Lahir di RSUD. Dr. Moewardi Surakarta. *Jurnal Kesehatan Infokes Vol 8 No.1. Maret –September 2004. Hal 1-9.*
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Yogyakarta. Hal. 25 – 34*

- Mulyadi. S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal: 59-60.
- Paturochman, M. 2005. Hubungan Antara Tingkat Pendapatan keluarga Peternak dengan Tingkat konsumsi (Kasus di Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KBPS) Pangalengan) *Sosiohumaniora*, Vol. 7, 3, Nopember 2005. www.resources.unpad.ac.id. Diakses 5 Februari 2009.
- Soekartawi, 2003. *Teori Ekonomi Produksi (Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas)*. Rajawali. Jakarta. Halaman 7-8, 142-143.
- Sukono. 2007. *Kontribusi Usaha Ternak Sapi Perah Terhadap Pendapatan Keluarga Petani di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*. Laporan Skripsi S1. Fakultas Peternakan Unsoed. Hal 45.
- Yusja, Y., N. Ilham dan W. K. Sejati. 2003. Profil dan permasalahan peternakan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 21 (1): 44-56.

KEUNTUNGAN EKONOMI PEMELIHARAAN SAPI SECARA INTENSIF DI PEDESAAN DENGAN PAKAN KONSENTRAT: SUATU STUDI KASUS

Sri Nastiti Jarmani

Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor, P.O.Box 221 Bogor 16002; e-mail: srinastitijarmani@yahoo.com

ABSTRAK

Usaha pemeliharaan sapi secara intensif dengan pakan konsentrat menjadi pola usaha rakyat skala menengah berorientasi mendapatkan keuntungan ekonomi. Pakan merupakan komponen biaya terbesar setelah ternaknya sendiri didalam satu usaha ternak sapi. Respon ternak dalam bentuk pertambahan bobot hidup harian terhadap pakan yang diberikan menjadi kriteria utama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi usaha. Imbangan antara harga bobot hidup dengan nilai pakan yang dikonsumsi setiap hari menjadi indikator besarnya keuntungan yang diperoleh. Pendapatan diatas biaya pakan (*income over feed cost*) yang semakin besar akan menarik perhatian peternak untuk menilai keberhasilan usahanya. Tujuh belas (17) ekor sapi jantan yang dipelihara peternak didesa Meteseh, Karanganyar, Jawa Tengah digunakan sebagai kasus untuk mempelajari keberhasilan usaha ternak sapi secara intensif dengan pakan konsentrat. Kisaran bobot hidup sapi pada awal pemeliharaan bervariasi dari 236 sampai dengan 338 kg dengan harga berkisar antara Rp. 6,5 sampai dengan Rp.11,2 juta /ekor. Setelah masa pemeliharaan, yang bervariasi dari 233 sampai dengan 640 hari dan penggunaan pakan konsentrat yang sama, menunjukkan hasil usaha sebesar Rp. 10.632 sampai dengan Rp. 38.244 /ekor/hari diatas biaya pakan. Pengeluaran biaya tenaga kerja, penyusutan kandang dan sarana, dan biaya-biaya lain masih harus diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bersih (*nett income*). Disimpulkan bahwa pemeliharaan sapi secara intensif dengan pakan konsentrat masih memberikan keuntungan ekonomi yang cukup baik sehingga pola pemeliharaan ini dapat disarankan kepada para peternak rakyat untuk mengembangkan skala usaha mereka.

Kata kunci: sapi, intensif, pakan, keuntungan ekonomi

ABSTRACT

An intensive feeding system of cattle production has been developing recently in villages with ultimate objective to increase the economic benefit. Feed cost is the highest proportion of production cost, only second to the cattle component. The cattle weight gain as the response to feeding management is the criteria to describe the economic benefit. The ratio between economic value of daily weight gain and the cost of feed intake is used as the parameter of interest. A greater Income over feed cost is used by farmers to evaluate the successfulness of the animal production. Seventeen (17) heads of cattle, male, kept by farmer in Meteseh, Karanganyar, Central Java were used as source of data to study the economic benefit of cattle production under an intensive system with special reference to the concentrate feeding system. The live weight of cattle varied from 236 to 338 kg at the initiation of the study with prices ranged from IDR 6.5 to 11.2 million per head. The cattle feeding time ranged from 233 to 640 days using the same concentrate feed, resulting in income over feed cost ranged from IDR 10,632 to 38,244 per head per day. However, other cost components such as labor, depreciation of houses and facilities, and others still need to be determined to find the nett income. It was concluded that an intensive cattle production with special reference to concentrate feeding system was economically profitable suggesting that the system can be introduced to those farmers interested in developing their scale of cattle production.

Key words: cattle, intensive, feed, economic benefit

PENDAHULUAN

Sapi potong merupakan jenis ternak yang banyak dipelihara dipedesaan yang tujuannya adalah sebagai bibit untuk menghasilkan anak. Bagi masyarakat di pedesaan memiliki sapi berarti mempunyai tabungan dan menentukan tingkat status sosial di masyarakat karena sapi adalah “raja kaya” dimana semakin banyak pemilikan sapi semakin tinggi tingkat status sosialnya di masyarakat. Pada umumnya sapi masih dipelihara secara tradisional dimana ketersediaan pemberian pakannya disesuaikan dengan kondisi

setempat seperti yang dilakukan para pendahulunya. Sebagian pemilik sapi adalah juga petani tradisional yang memiliki keterbatasan modal maupun pengetahuan dan sulit untuk diajak merubah kebiasaan, sehingga untuk merubah kebiasaan tersebut memerlukan waktu (Mosher, 1978). Pemberian pakan yang seadanya pada pemeliharaan tradisional cenderung memengaruhi perkembangan organ reproduksi sehingga produktivitasnya rendah (Wiyono dan Umiasih, 1998). Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitasnya adalah dengan merubah manajemen pakan karena menurut Mathius (2010) pemberian pakan yang berkualitas akan diperoleh produktivitas yang tinggi. Jarmani et al. (2007) melaporkan bahwa perbaikan manajemen pemberian pakan dengan memberikan 4 kg jerami padi difermentasi dan 2 kg dedak pada sapi PO dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 4,5 kali lebih tinggi dari sapi yang diberi pakan seperti kebiasaan peternak dan hal yang sama juga dilaporkan oleh Haryanto et al. (2005) bahwa perbaikan pemberian pakan pada sapi PO dengan memberikan jerami difermentasi sebanyak 6 kg dan 2 kg konsentrat dapat meningkatkan bobot badan 0,7 – 1,0 kg per hari dibandingkan dengan pemeliharaan tradisional.

Penghargaan perlu diberikan kepada peternak yang mau mencoba merubah cara membudidaya dari tradisional ke intensif, menggunakan konsentrat sebagai pakan berorientasi bisnis dan mempunyai target waktu untuk memasarkan hasilnya. Pakan merupakan biaya terbesar pada usaha penggemukan sehingga respon ternak dalam bentuk pertambahan bobot hidup harian terhadap pakan yang diberikan menjadi kriteria utama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi usaha. Imbangan antara harga bobot hidup dengan nilai pakan yang dikonsumsi setiap hari menjadi indikator besarnya keuntungan yang diperoleh. Semakin besar pendapatan diatas biaya pakan akan semakin jelas keberhasilan usaha penggemukannya dan menambah semangat peternak untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu makalah ini disajikan untuk melihat seberapa besar pendapatan diatas biaya pakan dan keberhasilan usaha penggemukan yang dilakukan oleh peternak di desa Meteseh, Karanganyar, Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Studi kasus dilakukan di peternak di desa Meteseh, Karanganyar, Jawa Tengah dengan menggunakan 17 ekor sapi persilangan, jantan dengan bobot badan awal berkisar dari 236 hingga 338 kg. Harga beli sapi per ekor bervariasi dari Rp 6,50 hingga Rp 11,20 juta. Lama pemeliharaan bervariasi dari 233 – 640 hari. Pakan yang diberikan adalah konsentrat yang formulanya disusun sendiri dengan kandungan protein 11,06% dengan harga per kg Rp 1969,50. Jumlah pemberian konsentrat sama untuk semua sapi yaitu 10 kg per hari per ekor yang diberikan 2 kali, pagi dan siang menjelang sore. Rumput dan jerami diberikan sebagai sumber serat, diberikan secara berlebihan dan disajikan pada sore hari. Air minum tersedia setiap saat. Sapi ditimbang setiap bulan dengan menggunakan timbangan digital elektrik. Keuntungan pendapatan diatas biaya pakan (*income over feed cost*) dihitung berdasar harga pada saat pemeliharaan. Data disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan budidaya

Sapi yang dipelihara adalah sapi persilangan, jantan yang dibeli dari pasar hewan setempat. Dipilih sapi persilangan karena menurut peternak pertumbuhan badannya lebih cepat dibandingkan dengan sapi lokal. Sapi-sapi tersebut dipelihara didalam kandang permanen, dan dilengkapi dengan tempat pakan dan air minum untuk masing-masing individu sapi.

Pakan yang diberikan adalah konsentrat yang tersusun dari beberapa bahan seperti yang tertulis di Tabel 1. Pemilihan bahan dan susunan formula konsentrat menurut peternak adalah berdasar dari informasi yang disarankan oleh praktisi peternakan. Pencampuran bahan penyusun konsentrat dilakukan dengan mixer oleh peternak setiap minggu sekali. Bahan-bahan penyusun konsentrat diperoleh dari luar Jawa sedangkan rumput dan jerami sebagai sumber serat berasal dari wilayah setempat. Meskipun demikian, pengetahuan peternak untuk mengetahui kualitas bahan masih perlu ditingkatkan. Cara termudah adalah dengan pengenalan secara organoleptik. Hal ini terlihat pada gudang penyimpanan bahan dimana yang

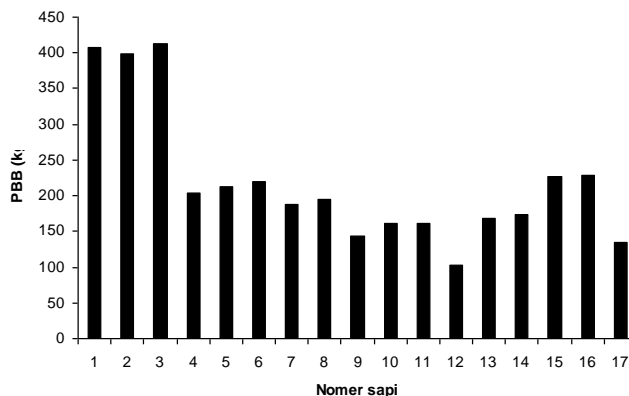
disebut “katul” yang digunakan didalam formula konsentrat ternyata mengandung sekam yang cukup banyak sehingga kandungan protein konsentrat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu bungkil inti sawit masih tercampur dengan “cangkang/bathok” buah sawit sehingga perlu alokasi waktu khusus untuk membersihkannya. Salah satu kriteria kualitas pakan yang baik, dapat dilihat dari kandungan protein dan formula pakan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kondisibahan pakan yang digunakan mempunyai sifat fisika kimia yang berbeda-beda sehingga akan mempengaruhi efisiensi penggunaannya pada proses pencernaan didalam saluran cerna ternak. Mathius (2010) mengatakan bahwa pemberian pakan yang berkualitas akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik.

Tabel 1. Formula konsentrat di peternak

Bahan	Jumlah (kg)	Protein (%)		Harga (Rp)	
		Bahan	Total (gram)	Bahan/kg	Total
Bungkil Inti Sawit	240	18	4320	2000	480000
Onggok	200	3	600	1700	340000
Kulit Kopi	200	12	2400	900	180000
Sekam	150	4	600	1700	255000
Jagung	80	9	720	3700	296000
Klentheng/biji kapok	50	18	900	3200	160000
Tetes	60	2	120	3000	180000
Mineral	5	0	0	2500	12500
Urea	5	280	1400	2000	10000
Minyak goreng	5	0	0	10000	50000
Garam	5	0	0	1200	6000
Total	1000		11060 (11,06%)		1969500 (1969,50/kg)

Penampilan produksi

Usaha penggemukan sapi berarti juga sebagai usaha memproduksi daging yang dapat diperoleh dari pertambahan bobot badan harian atau dengan menambah jumlah kepemilikan ternak. Pertambahan bobot badan sangat dipengaruhi oleh kontinuitas ketersediaan pakan, jumlah dan kualitas pakan yang dikonsumsi, umur dan keturunan (Blakely dan Bade. 1994). Keputusan peternak dalam memilih sapi persilangan untuk digemukkan merupakan hal yang positif karena beberapa penelitian menunjukkan pertumbuhannya lebih baik dari sapi lokal. Pramono et al. (2012) melaporkan bahwa sapi hasil persilangan bobot lahirnya lebih besar (26,4 + 1,63 kg) dibandingkan dengan sapi PO (25,4 kg) dan pertumbuhannya juga lebih cepat walau harus diimbangi dengan penyediaan pakan yang memadai. Besarnya biaya pakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan pertambahan bobot badan yang dihasilkan agar masih diperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Data menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan sapi bervariasi dari 0,422 – 0,983 kg per ekor per hari dengan rata-rata $0,720 \pm 0,143$ kg, sebagaimana diilustrasikan dalam Grafik 1. Hasil ini lebih rendah dari yang dilaporkan oleh Jarmani et al. (2007) dan Haryanto et al. (2005) pada sapi peranakan ongole (PO). Kemungkinannya karena beberapa bahan pakan yang digunakan tidak dapat dimanfaatkan secara optimum saat proses pencernaan di dalam rumen sehingga tidak dapat membentuk daging secara efisien, selain itu pada umumnya sapi-sapi disini ada kemungkinan mengalami kekurangan mineral mikro yang dapat mengganggu proses pencernaan dan efisiensi metabolisme didalam jaringan tubuh. Upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan pakan melalui pemberian probiotik dapat meningkatkan keuntungan usaha pemeliharaan sapi terutama pada awal pemeliharaan sebagai akibat dari penekanan pengaruh negatif selama transportasi (Jarmani dan Haryanto, 2010).



Grafik 1. Pertambahan bobot hidup sapi selama pemeliharaan

Grafik 1 menunjukkan angka pertambahan bobot hidup selama pemeliharaan. Pada umumnya pertambahan bobot hidup hampir sama untuk ternak sapi nomer 4 sampai 17 karena lama pemeliharaan relatif sama yaitu antara 233 sampai 258 hari. Ternak sapi nomer 12 menunjukkan pertambahan bobot hidup harian terendah (0,422 kg) sedangkan ternak sapi nomer 16 menunjukkan pertambahan bobot hidup yang tertinggi (0,983 kg). Sementara itu, ternak sapi nomer 1, 2 dan 3 dipelihara selama 640 hari sehingga menunjukkan pertambahan bobot hidup yang lebih tinggi. Hasil perhitungan pertambahan bobot hidup harian relatif sama dengan rata-rata sebesar 0,720 kg.

Penampilan ekonomi

Lama pemeliharaan sapi bervariasi dari 233 hingga 640 hari dan diikuti dengan peningkatan bobot badan berkisar dari 0,422 – 0,983 kg per ekor per hari atau rata-rata $0,720 \pm 0,143$ kg. Angka tersebut menunjukkan adanya koefisien variasi sekitar 20% yang berarti bahwa peluang untuk meningkatkan produktivitas sapi masih terbuka cukup besar. Perhitungan keuntungan dari penggemukan sapi seperti yang tertulis di Tabel 2.

Tabel 2. Penampilan ekonomi penggemukan sapi intensif di peternak (n=17 ekor)

Parameter	Rataan	Mini mum	Maksi mum	Standar Deviasi
Bobot awal sapi (kg)	283	236	338	32
Harga Beli /ekor (juta rupiah)	9,482	6,50	11,20	1,525
Lama pemeliharaan (hari)	312	233	640	152
Bobot Akhir (kg)	503	410	680	87
Harga Jual /ekor (juta rupiah)	22,382	17,500	30,000	3,919
Biaya pakan selama pelihara (juta rupiah)	6,160	4,558	12,604	2,997
Pendapatan / ekor (juta rupiah)	12,900	7,400	23,000	4,961
Keuntungan diatas biaya pakan (juta rupiah)	6,740	2,594	10,526	2,433
Keuntungan/ekor/hari (rupiah)	23.070	10.632	38.244	8.121

Keuntungan usaha penggemukan sapi dipengaruhi oleh harga beli, biaya pakan yang dikeluarkan selama pemeliharaan, harga jual serta faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti tingkat permintaan konsumen serta ketersediaan supply daging di pasar. Rataan harga beli sapi pada awal pemeliharaan adalah sekitar Rp. 9,482 juta dengan perhitungan harga per kg bobot hidup sapi antara Rp. 25.641,- sampai dengan Rp. 39.689,- tergantung pada kondisi ternak serta perkembangan harga pasar. Sementara itu, harga jual sapi pada akhir pemeliharaan rata-rata adalah Rp. 22,382 juta per ekor dengan harga per kg bobot hidup antara Rp. 43.750,- sampai dengan Rp. 45.000,-. Harga jual per kg bobot hidup relatif sama karena

berkaitan dengan waktu penjualan yang mendekati atau bertepatan dengan hari besar keagamaan nasional Idul Adha. Biaya pakan yang dikeluarkan selama pemeliharaan bervariasi menurut lama waktu pemeliharaan sementara harga per kg pakan konsentrat relatif sama untuk semua ternak. Keuntungan di atas biaya pakan (*income over feed cost*) dari pemeliharaan sapi yang dilakukan peternak dalam studi kasus ini rata-rata adalah Rp. 23.070,- per ekor per hari dengan variasi antara Rp. 10.632,- sampai dengan Rp. 38.244,-. Besarnya kisaran keuntungan di atas biaya pakan ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kondisi tubuh ternak yang akan menentukan posisi tawar pada saat dilakukan transaksi jual-beli.

Melihat pada tingkat keuntungan di atas biaya pakan yang cukup besar tersebut, semestinya usaha penggemukan sapi peternak rakyat dapat ditingkatkan skala pemilikannya sehingga mampu meningkatkan pendapatan peternak. Namun demikian, perlu pula dipertimbangkan bahwa nilai keuntungan di atas biaya pakan tersebut masih harus memasukkan biaya-biaya lain, seperti biaya tenaga kerja, depresiasi kandang dan sarana serta biaya lain yang terkait sehingga akan diperoleh nilai keuntungan bersih yang semestinya.

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa pemeliharaan sapi persilangan menggunakan pakan konsentrat dapat memberikan keuntungan yang bervariasi sesuai dengan jumlah pemberian pakan dan waktu pemeliharaan. Perbedaan besarnya keuntungan per hari masih memungkinkan ditingkatkan dengan pola pemberian pakan yang lebih tepat.

Pengetahuan peternak masih perlu ditingkatkan terutama dalam manajemen pakan dan pemberiannya, memilih dan menggunakan bahan penyusun konsentrat agar tidak terjadi pemborosan, lebih sering berkonsultasi dengan ahli pakan atau yang lebih berpengalaman.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada Ibu Etty, Pak Bayu, Pak Raji dan Pak Giyanto terimakasih atas kerjasamanya dan membantu memfasilitasi serta menyediakan data untuk terselenggaranya studi kasus hingga kesediaannya untuk mencoba menerapkan perbaikan manajemen pakan sapi periode pemeliharaan tahun 2013 / 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, J dan D.H. Bade. 1994. Ilmu Peternakan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haryanto, B., B. Hasan, D. Sisriyenni, A. Batubara dan Bestina. 2005. Penerapan teknologi pemanfaatan jerami padi dan pembuatan pupuk organik dari usaha pengembangan sapi potong di Kabupaten Kampar. Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil ppengkajian teknologi pertanian. BPTP Riau. Halaman. 45 -53
- Jarmani, S. N. and B. Haryanto. 2010. Economic Advantage of Increasing Production of Cattle through Enhancement of Rumen Fermentation. Seminar Nasional Ruminansia. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jarmani, S.N., B. Haryanto., W. Puastuti., Hastono, Santiananda A.S, D. Pramono dan K. Sumanto. 2007. Laporan Penelitian. Perbaikan manajemen budidaya ternak berwawasan lingkungan melalui penerapan teknologi bioproses limbah petanian dan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat di Blora. Balai Penelitian Ternak Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI) Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian.
- Mathius, I.W. 2010. Optimalisasi bungkil inti sawit untuk sapi yang diberi pakan dasar rumput lapang. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2010. Teknologi Peternakan dan Veteriner Ramah Lingkungan dalam mendukung swa sembada daging dan peningkatan Ketahanan Pangan. Bogor, 3 – 4 Agustus 2010. Puslitbang Peternakan Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Hal 161 -169
- Mosher, A.T. 1978. Pembangunan Pertanian Indonesia. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.

Pramono, D., T.R. Parastuti dan S.Budi.S. 2012. Tampilan reproduksi sapi Peranakan Ongole (PO) dan Brahman Cross (BX) pada peternakan rakyat di desa Kedaung, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis Peternakan Menuju Swa Sembada Protein Hewani. Fakultas Peternakan Universitas Djenderal Sudirman. Purwokerto.

Wiyono, D.B dan U.Umiyah. 1998. Tampilan status ternak reproduksi sapi perah pada tingkat kondisi badan yang berbeda dan system pengelolaan di peternakan rakyat. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.

ANALISIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN BERDASARKAN BAGIAN-BAGIAN DAGING SAPI (STUDI KASUS : PASAR TERONG MAKASSAR)

St. Rohani, Veronica Sri Lestari, dan Iranita Haryono

Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kampus Unhas Tamanlana, Telp/Fax. (0411) 587 Makassar 90245

ABSTRAK

Penelitian dengan judul analisis permintaan dan penawaran berdasarkan bagian-bagian daging sapi (studi kasus : pasar terong makassar) untuk melihat bagaimana permintaan dan penawaran daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Juni 2013. Tempat penelitian di Pasar Terong Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah Deskriptifi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang daging sapi yang ada di Pasar Terong Kota Makassar Sebanyak 54 orang, jumlah sampel 36 orang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penawaran dan permintaan daging sapi di Pasar Terong Kota Makassar dimana jumlah daging sapi yang di tawarkan sebanyak 49.532,4 kg/bulan, dan jumlah permintaannya atau yang terjual yaitu sebanyak 36.642 kg/bulan dengan demikian dapat di katakan bahwa penawaran daging sapi lebih tinggi dari pada permintaan daging sapi. Dapat dilihat pula bahwa pada masing-masing bagian daging, penjualan tertinggi terdapat pada bagian paha belakang yaitu sebesar 18.036 kg/bulan untuk penawaran dan 11.04 kg/bulan untuk permintaan

Kata Kunci : Permintaan, penawaran, Bagian-bagian Daging Sapi

ABSTRACT

Research has been carried out with the title analysis based on demand and a supply on parts of the beef (case study: terong market makassar) the purpose of this research was to find out sales the equilibrium of supply and demand of parts of beef in terong market, makassar. This research was conducted from april until june 2013. Population of this research was 54 people who were beef sellers. The number of samples of 36 people. The results of this research it is known that there is a difference between the supply and demand of beef in the market Town of Makassar where Eggplant beef amount on offer as much as 49.532 4 kg/month And the number of his main demand or sold out, with 36.642 kg. / month thus can be said that an offer beef higher than in demand for beef. It can be seen that on each piece of meat, the highest sales found in the hamstrings, i.e. amounting 18.036 kg/month for deals and at 11 kg/month to demand.

Keyword: supply, demand, parts of beef

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Peternakan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian, terutama disaat adanya krisis ekonomi dan moneter, sehingga peranan petani peternak sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut. Tantangan utama yang dihadapi dewasa ini adalah bagaimana menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing tinggi baik dalam aspek kuantitas, kualitas, ragam produk, kontinuitas, pelayanan maupun harga, sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar domestik maupun pasar global. Program Pembangunan Peternakan pada hakekatnya adalah merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Annehira, 2010)

Tercatat sepanjang tahun 2008 sebanyak 651.196 ekor sapi harus di impor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan daging. Sedangkan dinamika populasi sapi lokal selama kurun waktu 2005-2009 mengalami kenaikan, dari 10,6 juta ekor menjadi 12,6 juta ekor. Produksi daging sapi di Indonesia meningkat pada tahun 2006-2007 yang mencapai 395.840 ton menjadi 418.210 ton. Akan tetapi, produksi daging sapi nasional tidak dapat memenuhi tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia yang pada tahun 2007

mengalami peningkatan sebesar 383,6% atau mencapai 453.800 ton. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Ditjennakeswan), per tanggal 1 Juli 2011, ada sebanyak 16 juta ekor ternak ruminansia lebih (yang terdiri dari 14 juta ekor sapi potong; 500.000 lebih sapi perah dan 1,2 juta lebih kerbau). Dengan jumlah tersebut, sebetulnya Indonesia telah memenuhi kebutuhan sapi potong dalam negeri (SAC, 2011).

Kebutuhan daging sapi di Indonesia dipenuhi dari tiga sumber, yaitu peternakan rakyat ternak lokal, industri peternakan rakyat (hasil penggemukan sapi *ex-import*), dan impor daging dari luar negeri. (Soepranto, 2006). Menurut Anonim (2010), daging sapi (beef) merupakan sebuah jaringan otot yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan.

Pasar Terong merupakan salah satu pasar tradisional yang besar ada di kota Makassar. Letak pasar Terong cukup strategis karena berlokasi di pusat perkotaan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Disamping itu jumlah pedagang daging sapi di Pasar Terong cukup banyak yaitu 54 orang. Berdasarkan survey awal di Pasar Terong, sering terjadi fluktuasi penjualan daging sapi. Dimana pada hari-hari tertentu seperti mendekati hari raya dan tahun baru sering terjadi pelonjakan permintaan daging sapi. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Permintaan Dan Penawaran Berdasarkan Bagian-Bagian Daging Sapi (Studi Kasus : Pasar Terong Makassar)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu :

Bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya (Studi Kasus : Pasar Terong, Kota Makassar) ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi peneliti
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2013, Tempat penelitian di Pasar Terong Kota Makassar, dengan alasan di Pasar Terong terdapat pedagang daging sapi yang cukup banyak yaitu sebanyak 54 orang.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskriptifkan kondisi variabel penelitian yaitu volume penjualan berdasarkan bagian-bagian daging sapi di Pasar Terong, Kota Makassar.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang daging sapi yang terdapat di pasar Terong sebanyak 54 orang. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel digunakan statistik deskriptif dengan menggunakan rumus Slovin menurut Soewadji (2012) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = Tingkat Kelonggaran (10%)

Tingkat kelonggaran 10% digunakan dengan dasar jumlah populasi tidak lebih dari 2000 (Sugiyono, 2003). Sehingga jumlah sampel yang didapatkan yaitu

$$n = \frac{54}{1 + 54 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{54}{1 + 54 (0,01)}$$

$$n = \frac{54}{1,54}$$

n=35

Jadi sampel minimum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 35 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk di tetapkan sebagai anggota sampel.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian dalam hal ini pedagang daging sapi di Pasar Terong, Kota Makassar.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada para pedagang daging sapi di Pasar Terong Kota Makassar yang menjadi responden peneliti.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang meliputi volume penjualan daging sapi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pedagang / pengecer daging yang meliputi volume penjualan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak atau instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik yang meliputi keadaan umum lokasi penelitian.

Analisa Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa statistik deskriptif untuk mengetahui volume penjualan daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sederhana.

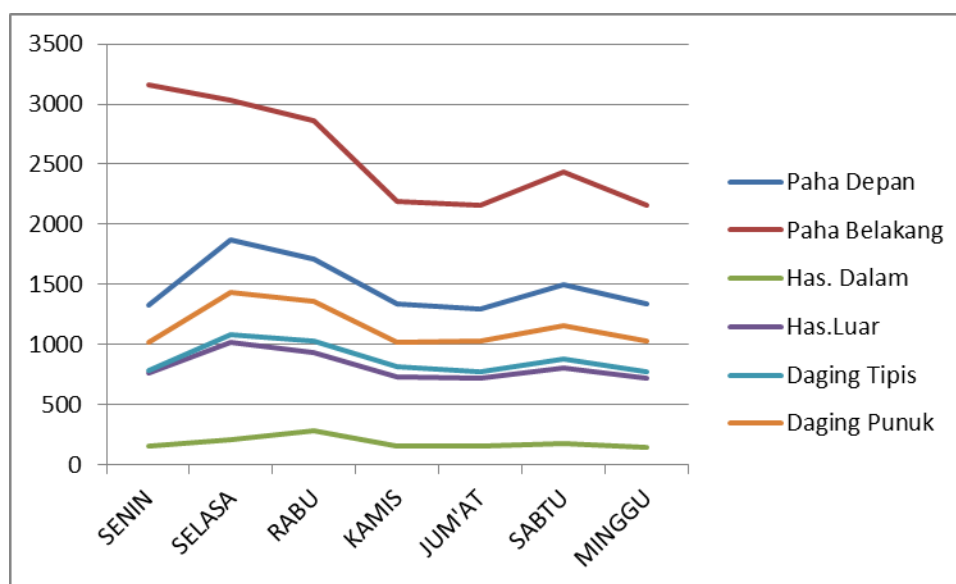
HASIL DAN PEMBAHASAN

Permintaan dan Penawaran Daging Sapi Di Pasar Terong Kota Makassar

Penawaran daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya dapat dilihat pada tabel1.

Tabel 1. Penawaran Daging Sapi Berdasarkan Kg/Hari

Hari	Paha Depan	Paha Belakang	Has Dalam	Has Luar	Daging Tipis	Daging Punuk	Jumlah	(%)
Senin	1.323	3.165	149	761,5	781	1.021,5	7.201	14,55
Selasa	1.870	3.027,7	210	1018	1.078,5	1.429,5	8.634	17,44
Rabu	1.713,5	2.862	285,5	933,5	1.033	1.362,5	8.190	16,54
Kamis	1.341,5	2.187	150	727,5	816	1.012,5	6.235	12,59
Jum'at	1.297,5	2.160,5	148,5	720	774	1.025	6.126	12,37
Sabtu	1.493	2.436,5	177	807	876	1.157	6.947	14,03
Minggu	1.341,4	2.161	148	720,5	776	1.024	6.171	12,47
Jumlah	10.406,9	18.036	1.171	5.713	6.136,5	8.069	49.532,4	100



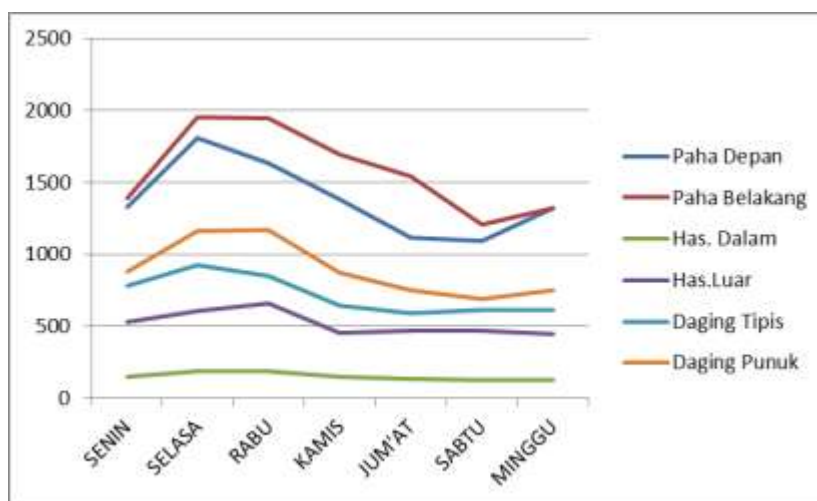
Gambar 1. Grafik Penawaran Daging Sapi di Pasar Terong Kota Makassar

Berdasarkan Tabel 1 dan gambar 1, dapat dilihat bahwa penawaran daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya yang di jual di Pasar Terong Kota Makassar yaitu jumlah daging sapi yang di tawarkan sebanyak 49.532,4 kg/bulan, dari data yang telah diolah maka didapatkan hasil persentase penjualan dari 30 hari penjualan bagian bagian daging yaitu di dapat volume penjualan terbesar yaitu pada hari Selasa sebanyak 8.634 kg (17,44%) dan volume penjualan terkecil pada hari Jum'at sebanyak 6.126 kg (12,37 %) hal ini di karenakan pada hari Selasa selama penelitian bertepatan dengan banyaknya jumlah daging sapi yang masuk ke pedagang di Pasar Terong Kota Makassar sesuai dengan permintaan pedagang yang ada di Pasar Terong Makassar sedangkan pada hari jumat jumlah daging sapi yang masuk ke Pasar Terong makassar lebih sedikit.

Tabel 2. Data Permintaan Daging Sapi Berdasarkan Hari

Hari	Paha Depan	Paha Belakang	Has Dalam	Has Luar	Daging Tipis	Daging Punuk	Jumlah	(%)
Senin	1.326,5	1.387	144	526	780	877	5.040,5	13,73
Selasa	1.808,5	1.949	188	603	928	1.161	6.637,5	18,08
Rabu	1.636	1.948	186	660	848	1.168	6.446	17,56
Kamis	1.385	1.696	145	454	643,5	872	5.195,5	14,16
Jum'at	1.114	1.545	134	471	588	749	4.601	12,54
Sabtu	1.090	1.210	128	471	615	690	4.204	11,45
Minggu	1.321	1.323	125	446	615	748	4.578	12,47
Jumlah	9.705,5	11.041	1.051	3.582	5.040,5	6.222	36.642	100,00

Sumber : Data primer yang telah diolah 2013



Gambar. 2. Grafik Permintaan

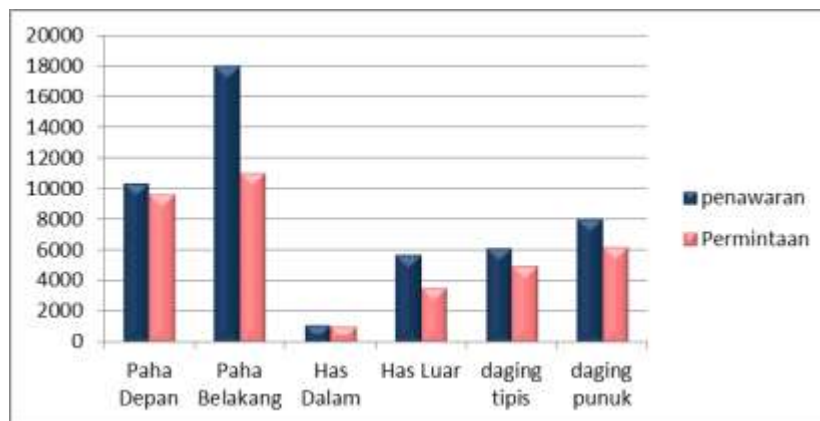
Berdasarkan Tabel 2 dan gambar 2, dapat dilihat bahwa permintaan daging sapi berdasarkan bagiannya yang di jual di pasar Terong Kota Makassar yaitu pada hari Selasa sebanyak 6.637,5 kg (18,08 %) dan volume penjualan terkecil pada hari sabtu sebanyak 4.204 kg (11,45 %).

Permintaan dan Penawaran daging sapi di pasar terong Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penawaran dan Permintaan Daging Sapi di Pasar Terong Kota Makassar

No	Bagian daging	Penawaran (kg/bulan)	Permintaan (kg/bulan)	Selisih (kg/bulan)	Persentase (%)
1	Paha Depan	10.406,9	9.705,5	701,4	5,44
2	Paha Belakang	18.036	11.041	6.995	54,27
3	Has Dalam	1.171	1.051	120	0,93
4	Has Luar	5.713	3.582	2.131	16,53
5	Daging Tipis	6.136,5	5.040,5	1.096	8,50
6	Daging Punuk	8.069	6.222	1.847	14,33
	Jumlah	49.532,4	36.642	12890,4	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah 2013



Gambar 3. Grafik penawaran dan permintaan daging sapi di Pasar Terong

Berdasarkan Tabel 3 dan gambar 3, dapat dilihat bahwa penawaran dan permintaan daging sapi berdasarkan bagian-bagiannya yang dijual di pasar Terong Kota Makassar yaitu jumlah daging sapi yang di tawarkan sebanyak 49.532,4 kg/bulan, dan jumlah permintaannya atau yang terjual yaitu sebanyak 36.642 kg/bulan dengan demikian dapat di katakan bahwa penawaran daging sapi lebih tinggi dari pada permintaan daging sapi, sedangkan untuk daging sapi yang tersisa disimpan di freezer (dibekukan) atau di oper kepedagang lainnya. Dapat dilihat pula bahwa pada masing-masing bagian daging, penjualan tertinggi terdapat pada bagian paha belakang yaitu sebesar 18.036 kg/bulan untuk penawaran dan 11.04 kg/bulan untuk permintaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penawaran dan permintaan daging sapi di Pasar Terong Kota Makassar dimana jumlah daging sapi yang di tawarkan sebanyak 49.532,4 kg/bulan, dan jumlah permintaannya atau yang terjual yaitu sebanyak 36.642 kg/bulan dengan demikian dapat di katakan bahwa penawaran daging sapi lebih tinggi dari pada permintaan daging sapi. Dapat dilihat pula bahwa pada masing-masing bagian daging, penjualan tertinggi terdapat pada bagian paha belakang yaitu sebesar 18.036 kg/bulan untuk penawaran dan 11.04 kg/bulan untuk permintaan. Sebaiknya pedagang daging sapi lebih cermat dalam melihat kondisi pasar agar penawaran dan permintaan terhadap daging sapi dapat seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2004. Penetapan Jumlah Produksi Ayam Broiler. www.halalguide.com Diakses pada tanggal 3 Maret 2013.
- Annehira, 2010. *Pembangunan Peternakan*. <http://www.annehira.com/pembangunan-peternakan.htm>.
- Anonim.2010.<file:///C:/Users/user/Documents/Jenis%20Daging%20Sapi%20di%20Pasaran%2.htm>. Diakses pada tanggal 11 mei 2013
- Boone, Louise E. dan David L. Kurtz. 2002. Pengantar Bisnis, Edisi 1, Terjemahan Fadrinsyah Anwar, Emil Salim, Kusnedi, Erlangga, Jilid 2, Jakarta.
- Cahyo, A.D. 2013. Teori Permintaan Dan Penawaran. <http://ri2-aff.blogspot.com/2010/02/pengertian-permintaan-dan-penawaran.html>
- Fathrozzi. 2003. Teori Ekonomi Mikro, dilengkapi beberapa bentuk fungsi produksi. Salemba Empat. Jakarta
- Hansen D, R, dan M, M. Mowen. 2000. Akuntansi Manajemen, Edisi Kedua, terjemahan : A. Hermawan, Penerbit Erlangga, Jakarta

- Kanisius. 1990. *Beternak Sapi Potong*. Kanisius. Yogyakarta.
- Kotler, P dan Susanto. 1999. *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kotler, P. 1994. *Manajemen Pemasaran; Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Edisi Keenam. Jilid 2. Erlangga, Jakarta
- Kotler, P. 2005. *Manajemen Pemasaran .Jilid 2*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, M.E. 2012. *Pengaruh Harga Jual dan Volume Penjualan Terhadap Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam Potong di Kota Makassar*. Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar
- Lipsey, R, G. 1995. *Pengantar Ilmu Makroekonomi*. Alih Bahasa : Jaka Wasan dkk. Erlangga. Jakarta.
- Mahdaliah, A. 2012. *Kontribusi Curahan Waktu Kerja Perempuan Terhadap Total Curahan Waktu Kerja Pada Usaha Peternakan Sapi Potong Di Perdesaan (Study Kasus, Kelompok Tani Ternak Lonrae Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai)*. Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar
- Mulyadi. 2001. *Balance Scorecard : Alat Manajemen Komputer Untuk Pelipatganda Kinerja Perusahaan*, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Murtidjo, B. 2000. *Beternak Sapi Potong*. Kanisius. Yogyakarta.
- Purnomo, A. 2009. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Skripsi Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan
- Rianto dan Purbowanti. 2009. *Panduan Lengkap Sapi Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta
- SAC.2011. *PeternakanSapi Indonesia*.<http://www.sac-ina.org/id/pendidikan/fakta-permasalahan-kesejahteraan-hewan/sapi/peternakan-sapi-indonesia>
- Santosa, U. 2006. *Manajemen Usaha Ternak Potong*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Siregar. 2009. *Penggemukan Sapi*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Soeprapto, H. 2006. *Cara Tepat Penggemukan Sapi Potong*. PT Agromedia Pustaka. Bintaro
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Sugiyono. 2003. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabet, Bandung.
- Sukirno, S. 1997. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. CV. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana. 2009. *Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis Dengan Pola Kemitraan*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan. Banjarmasin. *Jurnal Litbang Pertanian*,28 (1), 2009.
- Swastha, B. 2000. *Manajemen Penjualan*. PT. BPFPE, Yogyakarta.
- Umar, H. 2001. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yulianto dan Saparianto. 2011. *Penggemukan Sapi Potong Hari Perhari*. Penebar Swadaya. Depok

KELANGGEGAN USAHA SAPI POTONG RAKYAT POLA GADUHAN DI KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK PETERNAK)

Sumanto, IGM Budiarsana, E. Juarini, dan Broto Wibowo

Balai Penelitian Ternak Ciawi-Bogor PO Box 221 Bogor ; email : sumanto_d@ymail.com

ABSTRAK

Program perkembangbiakan/ penggemukan sapi potong dari tahun ke tahun masih terus dilakukan di Kalsel, dengan tujuan untuk peningkatan populasi dan pendapatan masyarakat yaitu melalui pola perguliran dan gaduhan yang umumnya diarahkan pada suatu kelompok peternak di pedesaan. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat seberapa jauh kelanggengan usaha sapi potong pola tersebut di kelompok ternak terpilih di Kalsel melalui survai yang dilakukan pada bulan September-Oktober 2012. Sumber dana kegiatan usaha sapi pada kelompok ternak di pedesaan berasal dari pemerintah (APBN,APBD), Kelembagaan Swasta (Bank,CSR) dan Pribadi. Dana pemerintah umumnya untuk tujuan usaha pengembangbiakan sapi induk, kelembagaan swasta berminat pada usaha penggemukan atau pembesaran sapi bakalan, dan pribadi bisa bertujuan dikedua usaha tersebut. Pengembangan sapi pola pemerintah digunakan cara perguliran induk dalam waktu tertentu (umumnya 5 tahun), untuk kelembagaan swasta untuk penggemukan/pembesaran dengan pola bagi hasil (50:50; 60:40) masing-masing untuk pengelola dan pemodal, dan untuk pola pribadi disesuaikan dengan pola pemeliharaan sapi yang ada, bisa perguliran induk, kembali anak atau bagi hasil. Kelanggengan usaha sapi model pengembangbiak atau pembesaran melalui gaduhan di dana pribadi menunjukkan lebih langgeng dibandingkan dengan pola pemerintah atau kelembagaan swasta.

Kata kunci : sapi, pola gaduhan, kelanggengan usaha

ABSTRACT

Breeding and fattening program of beef cattle is still underway from year to year in South Kalimantan, with aiming to increase its population and the farmers' income through the pattern of revolving and sharing system. This program is generally directed to a group of farmers in the countryside. A study was conducted using a method of survey in September-October 2012, to see the endurance of this beef cattle business patterns still used by the selected farmers groups in South Kalimantan. Sources of funds of the activities of this farm business come from government (state budget, budget), private institution (Bank, CSR) and personal. Government funds are generally for the purpose of holding cattle breeding business, private institutions interested in raising and fattening of beef cattle business, and personal usually involved in both business either breeding and fattening. To develop the population the government usually conduct the revolving pattern, where the cow was revolved within a certain time (usually 5 years), whereas private institutions conduct the pattern of sharing for fattening (50:50 or 60:40) 50% or 60% for the farmer and 50% or 40% for the investor respectively), and personal investors usually tailor to the existing pattern, wether revolving the cow, calf, or sharing the profit. The endurance of the cattle business models through revolving or sharing pattern in personal funds showed more lasting than the pattern of government or private institutions.

Keywords : cattle , sharing patterns , endurance of business

PENDAHULUAN

Saat ini beberapa provinsi di Indonesia, masih terjadi kekurangan jumlah persediaan dari kebutuhan daging sapi dalam negeri per tahunnya. Untuk itu secara keseluruhan pemerintah melakukan strategi untuk menanggulangi masalah tersebut melalui berbagai kegiatan utama, diantaranya impor sapi bakalan dan daging beku, serta peningkatan populasi dan produksi sapi lokal pada spesifik wilayah untuk pengembangan sapi potong di Indonesia, seperti di Jawa dan luar Jawa (PSPK, 2011), tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan.

Statistik Peternakan Kalsel 2011 melaporkan bahwa masih terdapat kekurangan ketersediaan daging sapi potong sekitar 686 ton/tahun dan kekurangan tersebut didatangkan dari wilayah surplus sapi potong, seperti dari NTB dan NTT. Untuk itu program perkembangbiakan/penggemukan sapi potong dari tahun ke tahun masih terus dilakukan di Kalsel, dengan tujuan secara terus menerus untuk peningkatan populasi dan pendapatan masyarakat melalui pola perguliran dan gaduhan yang umumnya diarahkan pada suatu kelompok peternak di pedesaan. Pola perguliran dan gaduhan bagi hasil program sapi potong tersebut tentunya sulit diprediksi berapa jumlah dana yang telah dikeluarkan dan juga jumlah ternak yang sudah disebarkan kepeternak. Tetapi yang jelas bahwa pola perguliran atau gaduhan bagi hasil ternak masih terus bertahan dan berguna untuk membantu para peternak yang kurang punya modal untuk beternak sapi, sementara potensi lahan tanaman pangan (padi, palawija) dan perkebunan (kelapa sawit, coklat, kelapa dalam, karet) sebagai sumber hijauan pakan ruminansia di Kalsel masih cukup banyak yang ditandai dengan nilai kemampuan tampung tambahan sekitar 645.238 Satuan Ternak setara 920.000 ekor sapi. Integrasi tanaman-ternak telah memberikan tambahan kegiatan bagi ratusan ribu peternak dan pelaku lainnya di beberapa tempat di Indonesia. Kegiatan ini tidak terlepas dari adanya peran kerjasama yang baik dari pihak pemerintah, perusahaan swasta, dan kelompok peternak (Sumanto dkk., 2012).

Produksi sawit dan limbah olahannya juga cukup besar dan berpotensi sebagai bahan pakan ternak, terutama untuk ternak ruminant (Umar S., 2009). Dengan melimpahnya potensi daya dukung pakan setempat berbasis limbah sawit, maka arah pengembangan sapi di perkebunan kelapa sawit adalah dapat untuk usaha pembibitan, penggemukan dan industri pakan ternak berbasis limbah dan produk samping kelapa sawit guna mendorong sebagai pusat wilayah pertumbuhan pengembangan sapi potong dalam rangka revitalisasi dan akselerasi pembangunan peternakan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat seberapa jauh *kelangngan* usaha sapi potong pola tersebut di kelompok ternak terpilih di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh tujuan kajian ini telah dilakukan survei secara “*puspositive sampling*” terhadap beberapa kelompok peternak sapi potong penerima bantuan dari pemerintah (APBD, APBN), perusahaan (Bank, CSR) dan pribadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selama September-Oktober 2012. Kajian ini bersifat deskriptif, karena mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi peternak/kelompok peternak yang melakukan usaha pengembangbiakan atau penggemukan sapi potong dalam suatu hubungan kemitraan dengan pola gaduhan. Pengumpulan data sekunder diperoleh di Badan Statistik setempat, Dinas-dinas terkait dan penelusuran di internet, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara terhadap para anggota peternak dalam kelompok dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan (profil kelompok, produktivitas sapi, pasar, pola gaduhan). Data terkumpul disajikan dalam bentuk tabel dan dilakukan analisis secara deskriptif (Amir Pervaiz dan H.C. Knipscheer, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengembangan Sapi Potong

Program pengembangan/penyebaran sapi dengan tujuan usaha pembibitan atau pengembangbiakan untuk peningkatan populasi dan penggemukan/pembesaran sapi potong di Kalsel, umumnya dilakukan dengan pola perguliran atau gaduhan bagi hasil baik yang didanai dari pemerintah melalui APBN/APBD, perusahaan tambang melalui dana *Community Social Responsibility* (CSR), maupun swasta modal sendiri/ perbankan. Pola tersebut diatas dapat ditemui di kelompok peternak di Kalimantan Selatan, seperti pada kelompok peternak *Harapan Makmur*. Pola pengembangan sapi potong melalui model kemitraan Inti-plasma belum berkembang. Salah satu alasan adalah masih tingginya harga bakalan sapi yang diperoleh dari luar Kalsel, karena sapi bakalan sampai di Kalsel perlu biaya transport yang tinggi, sehingga dalam proses penggemukan dan nilai jual sapi belum memperoleh nilai tambah yang berarti bagi pengelola.

Program Pemerintah

Program pembibitan-pengembangan/ penggemukan sapi potong dari tahun ke tahun cenderung tidak berubah di Kalsel, yaitu dengan pola perguliran yang umumnya diarahkan pada suatu kelompok peternak, seperti kegiatan penjarangan betina produktif, LM3, dan SMD. Tujuan pengembangan sapi dilakukan dengan memberikan satu atau dua indukan sapi per Kepala Keluarga (KK) (alasan pemerataan) yang tergabung dalam suatu kelompok peternak dan beberapa pejantan sebagai pemacek yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Model pemeliharaan sapi diarahkan untuk kandang berkelompok, namun tidak tertutup pemeliharaan sapi dilakukan pada kandang individu peternak. Secara umum pola perguliran sapi adalah dalam jangka waktu 5 tahun setiap peternak penerima sapi harus sudah mengembalikan sejumlah sapi yang diterima terdahulu dan hasil guliran tersebut oleh kelompok digulirkan lagi kepada peternak yang belum memperoleh bagian guliran sapi.

Model pengembangbiakan sapi di peternak telah dianalisis banyak pakar bahwa hasil nilai tambah yang dirasakan terlalu lama dan hanya memperoleh keuntungan sedikit oleh peternak. Peternak baru memperoleh hasil anakan sapi minimal pada tahun kedua, sedangkan satu tahun sebelumnya peternak perlu mengelola sapi yang tentunya minimal perlu biaya dan tenaga untuk membuat kandang dan sehari-hari mencari pakan hijauan. Tujuan untuk memperoleh penghasilan dari sapi dalam kurun waktu tertentu tidak selalu menjadi sasaran utama, namun yang penting bahwa sapi dipakai sebagai alat tabungan peternak yang sewaktu-waktu akan dijual bila diperlukan. Dengan kondisi umumnya seperti itu, maka apabila dilakukan analisis secara bisnis tampaknya bisa berpotensi rugi. Untuk itu model pembibitan sapi kurang diminati oleh pihak swasta, karena umumnya pertimbangan nilai untung-rugi selalu dipikirkan dalam kelangsungan usahanya dan kecenderungan nilai sosial masih dinomor duakan.

Pengamatan Matatula MJ (2010) terhadap analisis usaha sapi potong pola gaduhan di Seram Bagian Barat menyatakan bahwa pola gaduhan sapi potong merupakan salah satu model kemitraan yang dapat digunakan untuk pengembangan sapi potong dengan *Benefit /Cost (B/C) ratio* selama 6 tahun mencapai 1,4 dan *Internal Rate of Return (IRR)* 30,87% atau di atas tingkat bunga pasar (12%) yang berarti usaha ini layak dilakukan. Namun meskipun usaha ini layak, tetapi karena waktu yang panjang maka kurang diminati oleh para pengusaha swasta. Kegiatan seperti ini bisa terjadi sebaliknya, seperti di Kabupaten Sekadau Kalbar, dimana program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan belum optimal, seperti yang dilaporkan oleh Wibowo MHS dkk. (2011). Ketidak optimalan pelaksanaan program tersebut karena peternak belum sepenuhnya mengerti tujuan dan pelaksanaan program, seleksi calon penerima tidak sesuai kriteria, pembentukan kelompok tidak sesuai aturan dan spesifikasi ternak bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan usaha penggemukan sapi yang tampaknya tak bermasalah dalam proses pengelolaannya dan banyak masyarakat yang berminat dalam usaha ini.

Perusahaan (CSR)

Keikutsertaan perusahaan dalam pengembangan ternak sapi melalui kelompok peternak di Kalsel, salah satunya adalah Perusahaan Tambang Batubara PT. Adaro melalui dana CSR telah menyebarkan ternak sapi potong dikelompok peternak, seperti kelompok peternakan *Singkubut*. Ternak diberikan secara hibah oleh perusahaan kepada kelompok, tetapi dalam pengelolaannya yang meliputi penyebaran, pengembangan dan pengawasan diatur oleh pemda masing-masing termasuk dukungan operasionalnya.

Usaha ternak sapi terutama penggemukan cukup mendatangkan keuntungan dari hasil pertambahan bobot badan dan kotoran sapi yang akan dipakai sebagai pupuk kandang atau kalau tersedia prasarannya dapat digunakan sebagai bahan bakar biogas. Hasil analisis oleh Anonymous (2011a) melaporkan bahwa usaha penggemukan sapi (lama 3 bulan) mencapai B/Ratio sekitar 1,4 artinya layak diusahakan atau usaha yang menguntungkan. Disamping itu peran perubahan pakan sangat berpengaruh dalam meningkatkan nilai tambah untuk penggemukan sapi. Hasil aplikasi teknologi pakan pada penggemukan sapi telah dianalisis juga oleh Anonymous (2011b) di kelompok Tunas Muda desa Lawas, kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Laju pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi PO dan Sapi Bali

yang diberi pakan tambahan dapat meningkat dari pola petani sekitar 0,48 kg/ekor menjadi 0,78 kg/ekor untuk Sapi PO dan pola petani sekitar 0,28 kg/ekor menjadi 0,53 kg/ekor untuk sapi Bali. Dari hasil PBBH tersebut, nilai ekonomi keuntungan untuk sapi PO adalah Rp 620.775,-/ekor/bulan dan untuk sapi Bali Rp 244.775,-/ekor/bulan.

Integrasi Tanaman-Ternak

Model integrasi usaha tanaman-ternak telah menjadi salah satu pilihan dalam pengembangan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, dimana diyakini dapat meningkatkan pendapatan petani/ pelaku usaha melalui diversifikasi usaha. Melalui diversifikasi usaha minimal resiko adanya kegagalan usaha dari salah satu komoditi yang sedang dijalani dapat ditutupi dari usaha lain yang masih memberikan nilai keuntungan. Di berbagai lokasi transmigrasi dari Jawa yang mendapat jatah sejumlah lahan dan umumnya awal lahan digunakan untuk tanaman pangan (padi, jagung, ketela pohon) dan juga kelapa sawit. Dengan melimpahnya pakan rumput dan limbah hasil tanaman pangan yang terjadi di wilayah transmigrasi, maka ternak sapi dan kambing menjadi pilihan untuk diusahakan oleh para petani sebagai tujuan tabungan. Alasan untung rugi tidak menjadi pertimbangan utama karena modal awal ternak (sapi, kambing) diberikan secara bantuan dari pemerintah yang dikelola model ternak bergulir atau memperoleh modal dari petani yang kaya dengan cara bagi hasil. Dengan tumbuhnya perkebunan sawit, ternak sapi terasa manfaatnya karena hasil kotoran sapi bisa digunakan untuk tambahan pupuk untuk kelapa sawit dengan cara dicampur dengan pupuk anorganik yang harus membeli. Untuk itu input yang diperlukan dalam memproduksi satu komoditi dapat dipenuhi sendiri dari output komoditi yang lain, misalnya kotoran sapi untuk pupuk tanaman sawit, padi, jagung, dll. Apabila kondisi integrasi tanaman-ternak dijalankan secara efektif dan efisien, niscaya nilai keuntungan keseluruhan usaha dapat meningkat bila dibandingkan kalau petani hanya melakukan usaha dalam bentuk yang terpisah-pisah (Sumanto, *dkk.*, 2012).

Dengan demikian pola integrasi tanaman-ternak telah menjadi salah satu simbol program pengembangan baik untuk komoditi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan dalam peternakan sendiri saat ini di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Selatan. Khusus pada lahan perkebunan sawit milik negara yang diprediksi berpotensi sebagai sumber pakan, sedang dilakukan dalam rangka memanfaatkan limbah sawit untuk tujuan produksi dan pengembangan sapi potong secara massal pada tahun 2012 di beberapa kabupaten terpilih. Kajian tersebut diharapkan tidak hanya dapat memberikan nilai tambah bagi dunia persapian, tetapi juga nilai tambah kepada pihak perkebunan sawit secara keseluruhan yang awalnya hanya sebagai penguasa lahan sawit. Apabila kajian pemanfaatan ternak sapi tersebut dapat memberikan nilai yang positif bagi usaha perkebunan sawit, maka ini memberi peluang yang besar dalam meningkatkan populasi sapi di Kalimantan Selatan. Apabila harapan ini dapat terwujud dimasa datang, maka Kalsel sebagai wilayah kekurangan sapi potong saat ini yang selalu mendatangkan bibit/bakalan sapi dari luar Kalsel akan beralih sebagai wilayah pemasok sapi (Sumanto, *dkk.*, 2011).

Profil Kelompok Peternak Terpilih

Kerberhasilan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong sebagai upaya untuk meningkatkan keseimbangan penyediaan dan kebutuhan ternak sapi sangat tergantung pada ketersediaan bibit baik jumlah dan kualitasnya. Salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan bibit tersebut adalah dengan membentuk, membina dan mengembangkan pembibitan sapi potong di berbagai wilayah yang mempunyai potensi pakan yang memadai dan berbasis kelompok. Meluncurnya dana pemerintah baik APBD dan APBN serta dana swasta (pribadi dan CSR) dalam bidang ternak sapi baik untuk pembibitan dan penggemukan, tampak telah memberikan peningkatan terhadap jumlah populasi sapi dan membantu kecukupan ketersediaan daging sapi serta dapat menambah penerimaan peternak di Kalsel yang umumnya kepada kelompok peternak transmigrasi dari P.Jawa. Secara umum penyebaran sapi pemerintah untuk tujuan pembibitan dan hanya sebagian kecil untuk penggemukan atau dikatakan sebagai usaha pembesaran sapi. Umumnya pola penyebaran sapi pemerintah dilakukan dengan cara perguliran

dan diarahkan pada wilayah transmigrasi baik yang sudah lama maupun wilayah transmigrasi baru. Model ini juga terjadi pada pola gaduhan yang dananya berasal dari pribadi.

Hasil survai kajian ini terhadap kelompok peternak sasaran telah dilakukan pada 3 lokasi terpilih yang mewakili substansi sumber pandanaannya, yaitu pola gaduhan sapi potong yang berasal dari pemerintah, perusahaan swasta dan pribadi. Profil kajian kelompok peternak di ketiga lokasi dipaparkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Profil Kelompok Peternak Sapi Potong

No	Karakteristik	Pemerintah	Perusahaan Swasta	Pribadi
1	Nama Kelompok	Harapan Makmur	Singkubut	-
2	Lokasi	Desa Telaga, Kabupaten Tanah Laut	Batang Enau, Kabupaten Balangan	Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala
3	Jumlah Anggota	31 orang	15 orang	-
4	Agroekosistem	Lahan Sawit	Lahan sawit	Lahan sawit
5	Ternak Sapi	Pengembangan, Jenis sapi ditentukan pemerintah. Umumnya sapi Bali	Penggemukan/Pembesaran. Jenis sapi sesuai keinginan peternak. Penggemukan : Sapi Bramman, Simental. Pembesaran bakalan : sapi Bali	Pengembangan, jenis sapi sesuai keinginan peternak (umumnya sapi Bali)
6	Bentuk Bantuan	Uang/ternak/alat (sesuai dgn pedum bantuan)	Uang/ternak (kesepakatan kelompok & pemodal)	Ternak
7	Pola Pemeliharaan	Semi-intensif : rumput	Intensif : dedak, ampas tahu, rumput, pelepah daun sawit	Semi-intensif : rumput
8	Tenaga kerja	Keluarga	Keluarga	Keluarga
9	Penanganan kotoran sapi	Belum diolah	Belum diolah	Belum diolah
10	Tujuan usaha	Tabungan	Penggemukan : bisnis; pengembangbiakan: tabungan	Tabungan

Dari ketiga lokasi tersebut tampak bahwa profil usaha sapi potong pada kelompok peternak terletak sama-sama pada kondisi agroekosistem lahan sawit. Sumber dana berasal dari pemerintah yang di gambarkan pada kelompok “Harapan Makmur”, umumnya diperuntukkan pada tujuan pengembangan atau pengembangbiakan sapi potong kepada anggota peternak berupa bantuan sapi betina Bali (induk). Sumberdana bantuan yang berasal dari perusahaan swasta, yang terkenal dana CSR, umumnya ditujukan kepada kelompok peternak untuk usaha penggemukan/pembesaran sapi, karena disamping resiko kegiatan kecil, lebih dapat dikendalikan dan peternak penerima lebih cepat memperoleh hasil karena waktu sekitar 3-6 bulan/periode kegiatan. Untuk itu jenis sapi yang dipelihara adalah sapi Brahman, Simental dengan pertimbangan dapat memberikan pendapatan yang lebih nyata dibandingkan dengan jenis sapi Bali atau PO. Sumber dana pola gaduhan pribadi diamati pada peternak-peternak yang ada di Desa Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala, dimana umumnya usaha sapi potong yang dipilih untuk tujuan pengembangbiakan sapi jenis Bali dengan pola gaduhan - bagi hasil keuntungan 60% untuk peternak dan 40% untuk pemodal. Pola pemeliharaan pengembangan/pengembangbiakan sapi kesehariannya dari ketiga lokasi adalah sama, yaitu dengan pola semi intensif, dimana sapi digembalakan di lokasi terpilih (lahan sekitar sawit) mulai jam 8.00-17.00 dan sisa waktu lainnya sapi kembali ke kandang tanpa atau/dengan tambahan rumput yang diperoleh dari mengarit. Namun untuk kegiatan penggemukan sapi bakalan, dilakukan pemeliharaannya secara intensif dikandang selain diberi pakan rumput ditambah dengan dedak, ampas tahu/singkong, bungkil kelapa sawit, lumpur sawit sesuai yang ada dan mudah

didapat di sekitar lokasi. Penambahan pakan padat pada kegiatan penggemukan sapi dimaksudkan agar pertumbuhan bobot badan harian sapi sesuai yang diharapkan (nilai ekonomis), seperti tidak kurang dari 0.5 kg/hari/ekor. Usaha sapi potong rakyat dikelola oleh keluarga peternak dan termasuk untuk kegiatan pengembalaan sapi. Pendapatan peternak dari usaha ini hanya berasal dari penjualan sapi, belum dihitung dari pemanfaatan kotoran sapi.

Usaha sapi potong yang didanai swasta (misalnya bentuk CSR, seperti oleh PT Adaro yang bergerak dalam usaha batubara) lebih banyak dalam bentuk usaha penggemukan atau pembesaran bakalan sapi dengan alasan bahwa lebih menguntungkan dan waktunya lebih pendek sehingga waktu perputaran modal lebih cepat dibandingkan untuk usaha pembibitan. Waktu penggemukan sapi bakalan sekitar paling lama 6 bulan, tetapi untuk kegiatan pembesaran sapi dilakukan dalam kurun waktu 8-9 bulan dan umumnya hasil pembesaran tersebut ditargetkan akan dijual pada bulan lebaran/ haji dengan harapan harga jual sapi akan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, sehingga sisa hasil pendapatannya akan lebih besar. Pola pengembalian usaha penggemukan atau pembibitan sapi dilakukan dengan cara bagi hasil keuntungan melalui proses kesepakatan bersama antara pemodal dan penerima modal/kegiatan. Sedangkan usaha sapi potong pola Inti-plasma yang terjadi seperti pada agribisnis ternak ayam ras belum dapat berkembang, karena nilai bisnisnya belum nyata yang disebabkan nilai input tidak seimbang (harga sapi bakalan tinggi karena ongkos tranport mahal) dengan nilai harga jualnya.

Sumber Dana dan Kelanggenan Gaduhan

Sumber dana kegiatan usaha sapi pada kelompok ternak di pedesaan berasal dari pemerintah (APBN,APBD), Kelembagaan Swasta (Bank, CSR) dan Pribadi. Dana pemerintah umumnya untuk tujuan usaha pengembangbiakan sapi induk, kelembagaan swasta berminat pada usaha penggemukan atau pembesaran sapi bakalan, dan pribadi bisa bertujuan dikedua usaha tersebut. Pola gaduhan di ketiga lokasi disajikan pada Tabel 2. Bantuan sapi dari pemerintah atau perusahaan swasta selalu melalui proses perjanjian tertulis, sedangkan yang bersumber dana pribadi bersifat lisan dan hanya saling menjaga kepercayaan saja. Pengembangan sapi pola pemerintah digunakan cara perguliran induk dalam waktu tertentu (umumnya 5 tahun). Untuk kelembagaan perusahaan swasta (CSR) dengan tujuan kegiatan penggemukan/pembesaran dengan keuntungan pola bagi hasil (50:50 ; 70:30; 60:40) masing-masing untuk pengelola dan pemodal, namun yang umum adalah porsi 60:40. Lama pola gaduhan ini dapat bermitra dengan perusahaan swasta Antara 2-5 tahun. Dilihat dari keberlanjutan usaha kegiatan tersebut di kelompok peternak kurang dapat dipantau setelah masa tenggang waktu gaduhan selesai, karena peternak merasa bahwa ikatan perjanjiannya sudah selesai dan kegiatan kelompok peternak selanjutnya sudah tidak dipantau lagi.

Hal ini terjadi juga pada bantuan dari dana perusahaan swasta (CSR), karena perusahaan tidak selalu dapat terus memantau kegiatan di kelompok peternak, karena keterbatasan petugas atau ketersediaan dana bantuan untuk keperluan lainnya. Adapun untuk pola pribadi disesuaikan dengan pola pemeliharaan sapi yang ada, bisa perguliran induk, kembali anak atau bagi hasil, dan yang umum adalah bagi hasil 50:50 dengan lama waktu gaduhan yang tidak dapat ditebak. Gaduhan sapi potong dana pribadi lebih bersifat social kepada peternak penggaduh. Pemodal dan penggaduh biasanya mempunyai hubungan persaudaraan yang baik, apalagi pemodal adalah tokoh masyarakat di wilayah tersebut dan tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban kebutuhan penggaduh, sehingga penggaduh merasa berhutang budi. Dengan kondisi tersebut, pola gaduhan dari dana pribadi tidak dapat ditentukan berapa lama akan berakhir. Berakhirnya pola gaduhan dan pribadi, akan terjadi bila penggaduh sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pemeliharaan sapi karena sudah berumur tua dan untuk memperoleh pakan hijauannya sudah kesulitan atau dananya ditarik oleh pemodal karena sesuatu hal. Kelanggenan usaha sapi model pengembangbiak atau pembesaran melalui gaduhan di dana pribadi umumnya menunjukkan lebih langgeng atau lama dibandingkan dengan pola pemerintah atau kelembagaan swasta.

Tabel 2. Pola Gaduhan Sapi di Kelompok Peternak terpilih

No	Karakteristik	Pemerintah	Perusahaan	Pribadi
1	Nama Kelompok	Harapan Makmur	Singkubut	Damar Wulan
2	Tujuan Bantuan	Pengembangan	Pembesaran/Penggemukan.	Pengembangan,
3	Bentuk Bantuan	Uang/ternak/alat (sesuai dgn pedum bantuan)	Uang/ternak (kesepakatan kelompok & pemodal)	Ternak
4	Aturan Bantuan	Bergulir, jangka waktu 5 tahun. Ada perjanjian tertulis dikelompok	Pengembangan : 1 ekor induk, kembali 1 ekor induk (waktu 5 tahun) + bunga 6%/tahun. Bagi hasil pembesaran : (50:50; 70:30; 60:40), terbatas waktu. Ada perjanjian tertulis dikelompok	Bagi-hasil (50:50; 60:40), tidak terbatas waktu, perjanjian tidak tertulis
5	Sangsi	Kurang ketat	Ketat	Tidak ketat, sosial
6	Monev	Kurang	Baik	Baik
7	Hubungan bantuan	Sosial	Sosial, Bisnis	Sosial, Bisnis
8	Lama keberadaan ternak	Maks 5 tahun	Tidak menentu	Lama, tergantung kemampuan peternak
9	Pengaruh pemodal	kurang	kurang	Kuat, ada hubungan sosial

KESIMPULAN

Bantuan dana pemerintah dan perusahaan swasta dalam kegiatan pengembangan dan penggemukan sapi potong pola gaduhan adalah bersifat sementara (< 5 tahun) dan bermanfaat bagi kelompok peternak. Pola gaduhan sapi potong dana pribadi akan lebih lama keberlanjutannya dibandingkan dengan kedua pola yang diutarakan diatas, karena pola gaduhan pribadi ada keterikatan social yang kuat antara pemodal dengan pengaduh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Pervaiz dan H.C. Knipscheer. 1989. *Conducting On-Farm Animal Research : Procedur and Economic Analisis*. Winrock International Institute, USA and IDRC-Canada.
- Anonimous, 2011a. *Analisa Usaha Peternakan*. Dinas Peternakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Anonimous, 2011b. *Laporan Aplikasi Teknologi Pakan Ternak Ruminansia*. Dinas Peternakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Matatula Michel Johan. 2010. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Sapi Potong Pola Gaduhan di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat*. *Jurnal Agroforestri* : volume V, Nomor :3
- Umar Sayed. 2009. *Potensi perkebunan kelapa sawit sebagai pusat pengembangan sapi potong dalam merevitalisasi dan mengakselerasi pembangunan peternakan berkelanjutan*. Universitas Sumatera Utara.
- Sumanto, E. Juarini, Budiarsana, I.W. Mathius. 2011. *Analisis Sosial-Ekonomi Pola Integrasi Sapi Sawit (SISKA) di Lahan Perkebunan*. Laporan Sementara Hasil Kegiatan 2011. Balai Penelitian Ternak-Ciawi.

Sumanto, I. Wayan M., E. Juarini Dan Lisa P. 2012. Laporan Kajian Sapi Potong Pola Inti Plasma di Kalimantan. Puslitbangnak Peternakan

Wibowo MHS, Budi Guntoro dan Endang Sulastri. 2011. Penilaian Pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Di Kabupaten Sekadau. Kalbar. Buletin Peternakan Vol.35(2),143-153

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGROINDUSTRI SUSU DI JAWA TENGAH

Syarifuddin Nur, Moch Sugiarto, Oentoeng Edy Djatmiko dan Sri Mastuti
Fakultas Peternakan Unsoed; email: syarif_lppslh@yahoo.com

ABSTRAKS

Tujuan penelitian adalah menghasilkan strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu yang tepat berdasarkan berbagai kriteria dan penilaian dari pakar. Sedangkan secara khusus bertujuan: 1) Mengetahui kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah, 2) Menghasilkan strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai. Sampel diambil dengan cara stratified proporsional random sampling. Variabel yang diamati adalah kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah 75% berkategori baik. Hasil analisis strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu di Jawa Tengah menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan agar tujuan pengembangan agroindustri persusuan dapat tercapai adalah pembinaan kelompok usaha bersama (40,9 persen). Kemudian pembinaan sentra industri (33,6 persen) dan pembinaan melalui pola kemitraan usaha (25,4 persen).

Kata kunci : Strategi pengembangan , kinerja kelembagaan, agroindustri susu

ABSTRACT

The research objective is obtaining the appropriate development strategy for dairy agroindustry based on various criterias and evaluation of experts. Specific objectives are described as follow : 1) Knowing of dairy agroindustry institutions performace for *koperasi persusuan* (cooperative union of dairy farmers) in Central Java, 2) Formulation of development strategy for dairy agroindustry institutions at *koperasi persusuan* level. Research method applied is based on survey method . Samples are taken by stratified proportional random sampling method. Observed variables are institutional performance of *koperasi persusuan* in Central Java. The research results indicate that 75% of institutional performance of *koperasi persusuan* in Central Java have good performance. The analysis of institutional development strategy of dairy agroindustrial in Central Java proves that the strategy to achieve agroindustrial development is the construction of a joint venture group (40.9%). Followed by the construction of centralization site coaching of dairy agroindustry industry (33.6%) and through a partnership patterns effort (25.4%)

Keywords: strategy development, institutional performance , dairy agroindustry

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Strategi pembangunan peternakan dalam pengembangan agroindustri yang berkelanjutan menjadi penggerak pertumbuhan sektor lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan dinamika perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara agraris yang berlimpah dengan kekayaan alamnya sudah sewajarnya apabila menempatkan subsektor peternakan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Kontribusi subsektor peternakan ditunjukkan dari 1) produksi pangan dan bahan mentah bagi proses produksi di sektor hilir, 2) pasar utama bagi sektor di luar peternakan baik barang maupun jasa, 3) penyerapan tenaga kerja, kapital dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dan 4) neraca perdagangan, serta 5) keseimbangan lingkungan (Departemen Pertanian, 2009)

Agroindustri susu mempunyai posisi yang strategis sebagai jembatan yang menghubungkan sektor peternakan, sektor industri dan sektor perdagangan. Prospek agroindustri susu sebagai salah satu andalan peternak layak diperhitungkan sebagai sumber pendapatan karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain : (1) mudah dilakukan dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi, (2) dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar, (3) dapat dilakukan pada lahan sempit, (4) memberikan pendapatan rutin harian

dan tidak mengenal musim, dan (5) dapat dilakukan pada dataran tinggi maupun dataran rendah, (6) spektrum dan prospek pemasaran sangat luas.

Sebagian besar aktor pembangunan peternakan sapi perah di Indonesia yang bergerak pada domain on-farm adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Usaha peternakan ini sebagian besar merupakan peternakan rakyat skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan sebagai usaha sampingan yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan, sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan untuk memenuhi keadaan yang sifatnya mendadak, dan sebagai sumber pupuk organik. Melihat perannya yang penting ini maka peternakan rakyat khususnya sapi perah seharusnya memperoleh perhatian dan dukungan serius dari penentu kebijakan

Upaya memberikan masukan kepada penentu kebijakan pembangunan agroindustri susu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan. Pemahaman akan makna kelembagaan menjadi penting karena aktivitas disektor peternakan sapi perah baik dalam sektor produksi, pengolahan (agroindustri), distribusi dan konsumsi melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Hambatan yang sering adalah upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang memandang agroindustri persusuan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan kesisteman ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan strategi pengembangan kelembagaan yang komprehensif dan holistik.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah menghasilkan strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu yang tepat berdasarkan berbagai kriteria dan penilaian dari pakar serta mampu memberikan manfaat secara proporsional terhadap pelaku usaha agroindustri susu skala kecil, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Mengetahui kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah
2. Menghasilkan strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem untuk merekayasa model kelembagaan pengembangan agroindustri susu di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan:

Tahap awal penelitian terdiri dari studi pustaka dan survai lapangan, analisis kebutuhan, perumusan masalah dan identifikasi sistem kelembagaan agroindustri susu.

Tahap kedua adalah identifikasi dan klasifikasi kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah

Tahap penentuan strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu di Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survai lapang dengan melakukan wawancara mendalam dan pengisian kuesioner dengan *pelaku* terkait dan pakar. Data sekunder diperoleh melalui instansi terkait dan publikasi dari lembaga-lembaga yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

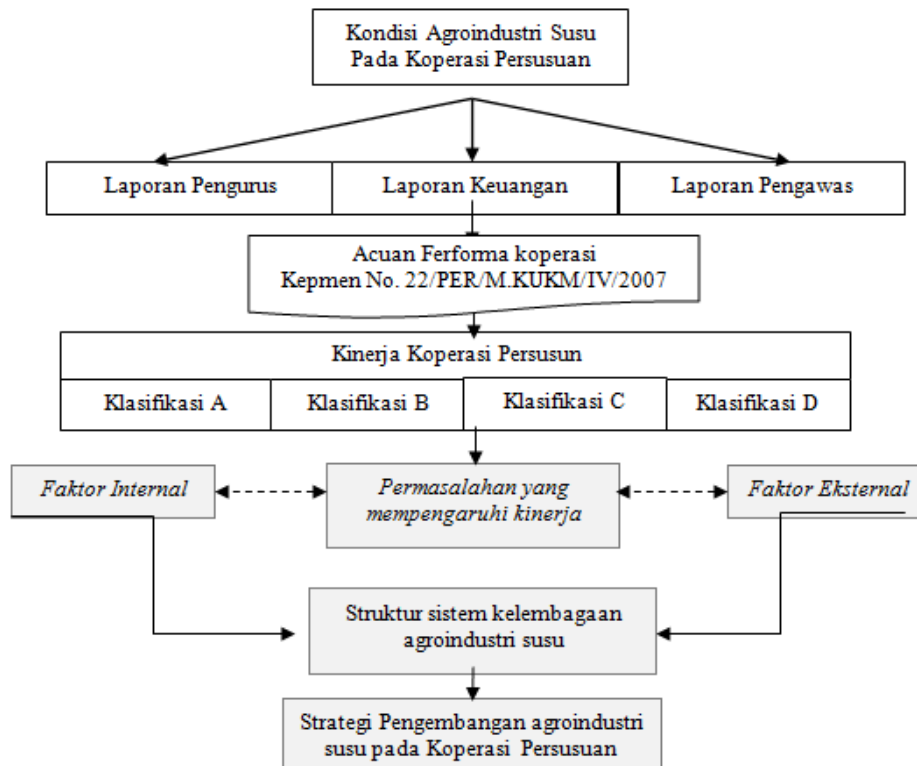
Data dan informasi hasil survey lapang diolah sesuai dengan rancangan metode analisis yang digunakan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode analisis untuk identifikasi dan klasifikasi kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah digunakan klasifikasi koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemerinkatan Koperasi

Metode analisis strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu dilakukan dengan menggunakan teknik *Analitical Hierarchy Process* (AHP)

Kerangka Konseptual Penelitian

Alur pemikiran peneliti dalam penelitian ini terangkai dalam kerangka pemikiran pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Agroindustri Susu pada Koperasi Persusuan di Jawa Tengah

Agroindustri susu merupakan industri yang mengolah susu sebagai bahan baku untuk menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai tambah. Koperasi persusuan yang mengolah susu merupakan koperasi aktif di unit usaha persusuan yang beranggotakan peternak sapi perah. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak koperasi persusuan yang tersebar di bagian timur dan selatan wilayah teritorial yang tergabung dalam organisasi Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Sebaran koperasi susu di wilayah tersebut dikenal sebagai jalur utama pemasaran susu (GKSI Jawa Tengah, 2011). GKSI Jawa Tengah kemudian membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) susu untuk membantu peternak dalam menyediakan sarana dan prasarana usaha sapi perah dan jaminan pemasaran susu. Provinsi Jawa Tengah memiliki 21 unit koperasi persusuan dengan tingkat produksi bervariasi antara 500 sampai 5000 liter per hari (GKSI Jawa Tengah, 2011).

Pengembangan agroindustri susu pada koperasi persusuan masih relatif sangat sedikit terfokus pada aktifitas produksi. Tahap pengolahan (agroindustri) ditangani oleh industri yang skala besar (Sugiarto dan Purboyo, 2002). Tingkat ketergantungan koperasi persusuan pada Industri Pengolahan Susu (IPS) sangat

tinggi, 80 % dari produksi susu dalam negeri digunakan oleh Industri Pengolahan Susu (IPS), 5 % untuk pedet, 5 % digunakan peternak dan keluarganya, hanya 10 % digunakan koperasi persusuan yang memiliki usaha agroindustri susu (Luthan, 2011). Hal ini sesuai dengan Nur, S (2012) yang menyatakan bahwa pemasaran produk susu oleh koperasi susu sebagian besar (86,6%) ke IPS dan hanya 13,4% produksi yang diolah menjadi produk lainnya seperti yoghurt, krupuk susu, permen karamel susu dll.

2. Kinerja Agroindustri Susu pada Koperasi Persusuan di Jawa Tengah

Kinerja agroindustri susu adalah hasil dari semua keputusan yang dilakukan secara terus-menerus yang didasari dengan perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Koperasi sebagai badan usaha yang mengelola persusuan di Jawa Tengah memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektifitas kegiatan usahanya terutama efektifitas operasional bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2001). Adapun tujuannya adalah mengidentifikasi kinerja koperasi pada masing-masing fungsi sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan (Prihatini, 2011). Penilaian kinerja perusahaan berbeda dengan penilaian kinerja yang dilakukan pada instansi pemerintah, dimana kegiatan dari perusahaan berorientasi mencari keuntungan, sedangkan instansi pemerintah berorientasi sosial, sehingga harus mengutamakan kepuasan masyarakat secara adil dan merata. Himpuni (2008) menyatakan bahwa pengkajian kinerja pada koperasi didefinisikan sebagai pengkajian hasil karya koperasi dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama oleh para pembina koperasi dan gerakan koperasi. Salah satu pendekatan untuk melihat kemampuan kinerja koperasi adalah klasifikasi koperasi. Klasifikasi koperasi adalah suatu penilaian kinerja melalui suatu sistem penilaian yang obyektif dalam suatu periode sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia NOMOR 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang pedoman pemeringkatan koperasi. Penjabaran atas kinerja koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh Pengendalian anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerjasama diantara koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Hasil penilaian masing-masing faktor utama tersebut disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Hasil penilaian masing-masing faktor pada koperasi persusuan yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Susu Indonesia Jawa Tengah

No	KOPERASI SUSU	FAKTOR/INDIKATOR PENILAIAN							Peringkat	
		KS	PD	PP	KAK	OK	PEA	KTK		SKOR
1	Koprasi Pesat	750	1700	1350	750	975	1050	1100	7675	B
2	KUD Jatinom	750	1700	1350	300	750	1050	800	7600	B
3	KUD Cepogo	1.100	1600	1200	575	1575	1050	1100	8200	A
4	KUD Musuk	750	1650	1125	725	1200	1050	1100	7600	B
5	KUD Kota	750	1650	1500	650	1050	1125	1100	7825	B
6	KUD Mojosongo	750	1550	1125	725	1500	1050	1100	7800	B
7	KUD Sumber Karya	900	1350	1500	750	1200	975	700	7375	B
8	KUD Mekar	750	1750	1425	725	1350	1125	1100	8175	A
9	KUD Banyumanik	800	1550	1200	725	1050	1050	1000	7375	B
10	Koperasi Andini	950	1450	1350	800	1200	1050	1100	7900	B
11	KSU Wahyu Agung	800	1650	1500	300	1200	1050	1100	7600	B
12	KUD Gotong Royong	750	1050	1200	300	600	975	1100	5975	C
	Rata-rata	816,7	1554,7	1318,7	610,4	1137,5	1050	1033,3		
	Indikator Capaian	1200	1800	1500	800	2100	1500	1100		
	Capaian (%)	68.06	86.34	87.90	76.30	54.16	70.00	93.94		

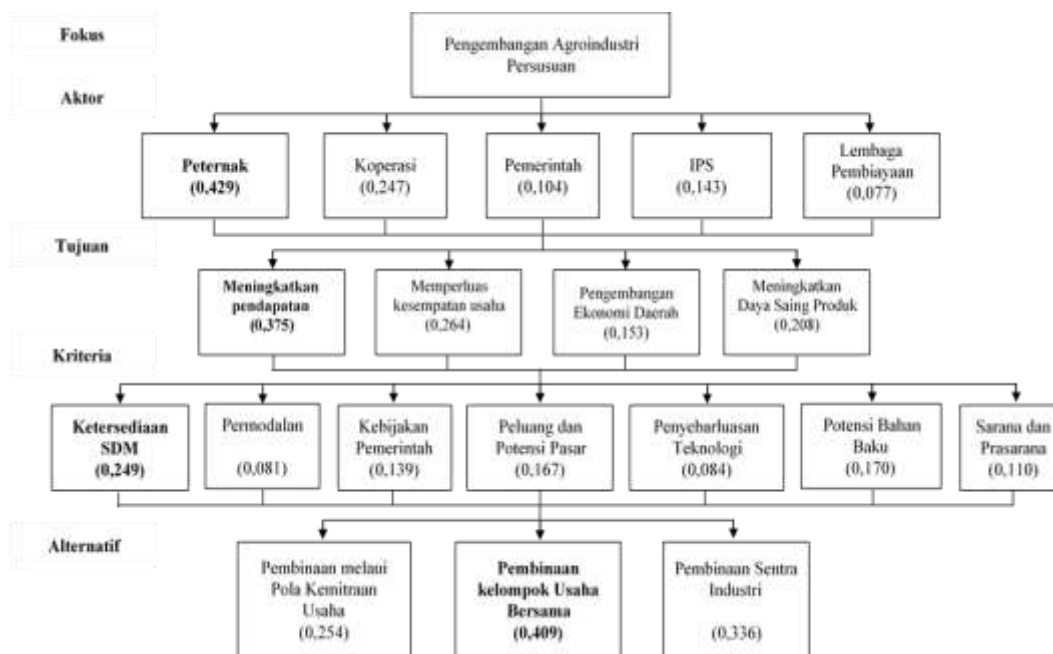
KS : keanggotaan sukarela dan terbuka; PD : pengendalian oleh Pengendalian anggota secara demokratis; PP : pendidikan dan pelatihan; KAK: kerjasama diantara koperasi; OK : otonomi dan kemandirian; PEA : partisipasi ekonomi anggota; KTK : Kepedulian terhadap komunitas;

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kinerja koperasi persusuan di Jawa Tengah berkinerja Baik. Dua koperasi persusuan (16.67 %) yaitu koperasi Cepogo dan Koperasi Mekar yang mempunyai kinerja Sangat Baik, 75 % berkinerja Baik, sedangkan satu koperasi persusuan (8.33 %) yaitu koperasi Gotong Royong yang berkinerja Cukup. Hasil penelitian dari beberapa peneliti memperlihatkan hal yang sama bahwa kinerja koperasi berada dalam status baik, namun dari tahun ke tahun cenderung menurun. Penurunan terutama dipengaruhi oleh indikator peningkatan jumlah anggota, realisasi anggaran belanja, keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, serta indikator pendidikan dan pelatihan bagi anggota (Octaviani 2004)

Nilai rata-rata dari masing-masing faktor utama (kriteria penilaian) menunjukkan nilai capaian yang menggembirakan diatas 68 %, hanya satu faktor utama penilaian yaitu otonomi dan kemandirian (OK) yang rendah baru mencapai nilai capaian sebesar 54.16 %. Faktor utama ini berkaitan dengan penilaian yang menyangkut dengan kinerja keuangan dan permodalan yang bermuara ke aspek *likuiditas* yang meliputi ratio lancar (*current ratio*); aspek *solvabilitas* yang meliputi ratio hutang terhadap equitas (*debt to equity ratio*) serta aspek *profitabilitas* yang meliputi ratio margin laba bersih (*net profit margin ratio*) *return of asset (ROA)* dan *return of equity (ROE)* .

3. Strategi Sistem Kelembagaan Agroindustri Susu pada Koperasi Persusuan

Pengembangan agroindustri susu pada koperasi persusuan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan nilai tambah dan sekaligus membuka lapangan kerja. Berdasarkan hasil analisis dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) diperoleh bahwa strategi pengembangan sistem kelembagaan agroindustri susu yang tepat adalah dikembangkannya pembinaan kelompok usaha bersama dan pembinaan sentra industri susu di Jawa Tengah (Gambar 2).



Gambar 2. Struktur Hirarki Pengembangan agroindustri susu pada koperasi persusuan

Gambar di atas memperlihatkan bahwa hasil kajian terhadap aktor dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), diperoleh bahwa aktor yang mempunyai bobot tertinggi adalah aktor peternak. Oleh karena itu perlu dikaji peran dan tanggungjawab dari aktor peternak dalam implementasi strategi sistem kelembagaan agroindustri susu. Peternak merupakan pelaku yang akan menanggung risiko tertinggi berkaitan dengan sistem jaminan mutu pasokan bahan baku agroindustri susu, karena jika bahan baku

yang diperolehnya tidak memenuhi standar kualitas akan menghasilkan produk yang mempunyai kualitas rendah dan mengakibatkan penolakan produk oleh konsumen maupun koperasi persusuan. Selain itu dengan bahan baku agroindustri susu yang bermutu rendah akan menurunkan nilai jual produk, mengakibatkan kerugian pihak agroindustri susu.

Untuk dapat melakukan jaminan mutu pengadaan bahan baku agroindustri susu perlu adanya kerjasama antara koperasi persusuan dengan peternak sapi perah dalam penyediaan bahan baku yang berkualitas. Dengan konsep kerjasama ini akan dapat menghindari adanya risiko kualitas yang ditanggung oleh pihak agroindustri susu, karena risiko kualitas bahan baku telah dipindahkan ke pihak koperasi. Untuk mendapatkan jaminan mutu dan keberlanjutan usaha yang adil antar kedua belah pihak maka perlu adanya sistem kerjasama dalam bentuk kelembagaan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang lain. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut seperti kontrak jual beli dengan kualitas tertentu, atau kontrak pengadaan dan pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi secara sharing investasi (Starbird & Amanor-Boadu, 2007).

Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam pengembangan agroindustri susu yang berpedoman pada Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bersama tentang Kerjasama Persusuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2008 dan No 11 Tahun 2008, yang kemudian dijabarkan dalam Grand Design Pengembangan Persusuan yang meliputi : 1). Kebijakan Meningkatkan Kerjasama Kelembagaan dalam Upaya Menanggulangi Lost Generation; 2). Kebijakan Meningkatkan Peluang Pasar Susu untuk Konsumsi Masyarakat; 3). Kebijakan Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ternak Perah; 4). Kebijakan Meningkatkan Produktivitas Ternak Perah; 5). Kebijakan Meningkatkan Kualitas Produk (Susu dari Peternak Ternak Perah) dan 6). Kebijakan Meningkatkan Peluang Penciptaan Industri Susu/Peternakan Ternak Perah yang bisa menyerap tenaga kerja

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan di Jawa Tengah 75% berkategori baik. Berdasarkan indikator-indikator standar penilaian kinerja koperasi persusuan terdapat satu indikator yang mempunyai nilai capaian rendah yaitu otonomi dan kemandirian. Hasil analisis strategi pengembangan kelembagaan agroindustri susu di Jawa Tengah menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan agar tujuan pengembangan agroindustri persusuan dapat tercapai adalah pembinaan kelompok usaha bersama (40,9 persen). Kemudian pembinaan sentra industri (33,6 persen) dan pembinaan melalui pola kemitraan usaha (25,4 persen). Untuk mewujudkan kelembagaan agroindustri susu pada koperasi persusuan yang kuat diperlukan pembinaan kelompok usaha bersama dan pembinaan sentra industri susu yang berkelanjutan dan terarah

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan. 2009. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan 2010-2014. Jakarta
- Eriyatno dan F. Sofyar. 2007. Riset Kebijakan Metode Penelitian Untuk Pascasarjana. : IPB Press. Bogor
- GKSI Jawa Tengah. 2011. Profil GKSI Daerah Jawa Tengah. Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Boyolali.
- Himpuni, Okwan. 2008. Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. [Skripsi]. Program Sarjana Agribisnis Penyelenggaraan Khusus Departemen 2004
- Luthan, F. 2011. Pengembangan Agribisnis Persusuan. Direktorat Jenderal Peternakan. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Nur S. 2012. Pelatihan Penerapan Model Pengembangan Klaster Agroindustri Susu Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian - Kementerian Pertanian. 15-19 Oktober 2012

- Nur S, E. Gumbira-Said, J.M. Munandar, and Mahfud. 2011. Traceability System Model for Quality of Gelatine Raw Material of Cattle Hides. *Journal Animal Production* Vol 12 No 3 September
- Octaviani S. 2004. Analisis Kinerja Koperasi pada Koperasi Badan Pusat Statistik Jakarta. Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Bogor.
- Prihatini, D. 2011. Pemingkatan Koperasi dalam Konteks Pemberdayaan Koperasi. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 5 No. 1 April 2011
- Saaty TL. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Yang Kompleks. Setiono L, penerjemah; Jakarta: Pustaka Binaman Presindo. Terjemahan dari: *Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in Complex World*.
- Saxena JP, Sushil and Vrat P. 1992. Hierarchy and classification of program plan elements using interpretative structural modelling: a case study of energy conservation in the Indian cement industry. *System Practice* 7(4):651-670.
- Starbird SA., Amanor-Boadu V. 2007. Contact Selectivity, Food Safety, and Traceability. *Journal of Agricultural & Food Industrial Organization*.

PENGARUH HARGA JUAL DAN VOLUME PENJUALAN TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PENGUMPUL AYAM POTONG

Tanrigiling Rasyid¹, Sofyan Nurdin Kasim¹, dan Muh. Erik Kurniawan²

¹ Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin; email : villa_mandiri7@yahoo.com

² Alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin; email : muh.erikkurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga jual dan volume penjualan terhadap pendapatan pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar, untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh harga jual dan volume penjualan terhadap pendapatan pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember 2011 – Januari 2012 di beberapa wilayah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis (eksplanatori). Analisa data yang digunakan adalah rumus pendapatan dan analisis statistik regresi linier berganda dengan menggunakan dua variabel independen yang meliputi harga jual dan volume penjualan terhadap variabel dependen pendapatan pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual dan volume penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar. Sedangkan kontribusi pengaruh harga jual terhadap pendapatan sebesar 0,327 atau 32,7% dan kontribusi volume penjualan terhadap pendapatan sebesar 0,896 atau 89,6%.

Kata kunci : Pedagang Pengumpul Ayam Potong, Harga Jual, Volume Penjualan

ABSTRACT

The research was aimed to determine the effect of the sale price and the volume of sales to revenues of broilers traders in Makassar City, to determine the contribution influence the selling price and sales volume to earnings of broilers traders in Makassar City. The research was conducted in November 2011 - January 2012 in several areas of Makassar City. The research is a quantitative study to test the hypothesis (explanatory). Analysis of the data used is the formula of revenue and statistical analysis using multiple linear regression with two independent variables which include the selling price and sales volume to the dependent variable income of chicken traders in Makassar City. The results showed that the selling price and sales volume have a significant effect on the income of chicken traders in Makassar City. While the contribution of the effect of the sale price to earnings of 0.327 or 32.7% of sales volume and contribution to the revenues of 0.896 or 89.6% .

Key words : Broiler Traders, Sales Price, Sales Volume

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur yang bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan, dan dapat menambah devisa serta memperluas kesempatan kerja. Hal inilah yang mendorong pembangunan sektor peternakan sehingga di masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perekonomian bangsa.

Jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun terus diimbangi dengan kesadaran akan arti penting peningkatan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berimplikasi pada pola konsumsi makanan terutama protein hewani juga mengalami peningkatan. Jadi, pengembangan subsektor peternakan harus dikembangkan melalui peningkatan populasi ternak dan peningkatan produksi.

Melihat kondisi seperti itu, secara ekonomi, pengembangan usaha ternak ayam broiler di Indonesia khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki prospek bisnis yang menguntungkan karena permintaan yang selalu bertambah. Hal tersebut dapat berlangsung bila kondisi perekonomian berjalan dengan normal. Lain halnya secara makro, terjadi perubahan-perubahan secara ekonomi yang membuat

berubahnya pasar sehingga mempengaruhi permodalan, produksi, dan pemasaran hasil ternak (Hamka, 2009).

Adapun jumlah ternak unggas yang dipotong pada daerah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Banyaknya Ternak Besar dan Kecil Serta Unggas yang di Potong Menurut Jenis Ternak di Kota Makassar (dalam ekor).

JENIS TERNAK	TAHUN				
	2006	2007	2008	2009	2010
Sapi	17.701	10.302	8.728	8.732	6.206
Kerbau	2.500	5.741	6.301	3.467	3.471
Babi	5.648	-	-	5.197	5.457
Kambing	772	1.017	1.003	724	1.395
Ayam Broiler	706.922	900.040	931.365	843.681	1.069.922
Itik	1.838	1.799	1.871	3.879	4.057

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011.

Adapun jumlah konsumsi dan kebutuhan daging ayam masyarakat Kota Makassar tiap bulannya, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Produksi Daging Ternak Unggas Menurut Bulan di Kota Makassar (dalam kilogram).

BULAN	EKOR	PRODUKSI	
		KOTOR (KG)	KONSUMSI (KG)
Januari	62.948	47.211	44.064
Februari	12.223	9.167	8.556
Maret	88.441	66.331	61.909
April	77.198	57.899	54.039
Mei	62.019	46.514	43.413
Juni	87.851	65.888	61.496
Juli	95.970	71.978	67.179
Agustus	116.685	87.514	81.680
September	116.773	87.580	81.741
Oktober	116.648	87.486	81.654
Nopember	116.569	87.427	81.598
Desember	116.597	87.448	81.618
JUMLAH	1.069.922 (2010)	802.443 (2010)	748.947 (2010)
	843.681 (2009)	632.763 (2009)	590.570 (2009)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011.

Dari tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa jumlah pemotongan dan produksi daging ayam broiler di Kota Makassar mengalami peningkatan yang cukup drastis. Maka dari itu terdapat beberapa wilayah di Kota Makassar yang menjadi daerah penampungan dan pedagang pengumpul ayam potong (Broiler) seperti di wilayah Kecamatan Mariso, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Biringkanaya. Daerah penampungan yang dimaksud adalah daerah atau tempat dimana pedagang pengumpul membuat kandang guna untuk menampung ayam potong untuk selanjutnya di jual ke pedagang selanjutnya.

Salah satu wilayah di Kota Makassar yang memiliki jumlah terbesar daerah penampungan dan pedagang pengumpul ayam potong (Broiler) yaitu di Kecamatan Makassar disusul oleh Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Mariso. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata pedagang ayam di pasar, rumah/warung makan, dan pedagang keliling mengambil serta membeli ayam potong pada pedagang pengumpul yang terdapat di ketiga kecamatan tersebut. Selain itu, pedagang pengumpul yang terdapat di ketiga kecamatan tersebut merupakan usaha dagang mitra. Hal ini dapat dilihat bahwa pedagang di daerah tersebut

memperoleh ayam potong dari beberapa perusahaan peternakan yang bermitra dengan para peternak di daerah pedesaan.

Fakta lain yang terdapat di lapangan yaitu perbedaan kapasitas daya tampung yang dimiliki oleh setiap pedagang pengumpul. Para pedagang pengumpul yang terdapat di ketiga kecamatan tersebut memiliki perbedaan kapasitas daya tampung mulai yang terkecil sebanyak 200 ekor dengan volume penjualan berkisar antara 6000 ekor/bulan, sedangkan yang terbesar sebanyak 1000 ekor dengan volume penjualan 30.000 ekor/bulan.

Harga jual dasar ayam potong di daerah ini ditetapkan oleh suatu organisasi pedagang pengumpul berdasarkan harga pembelian. Penetapan harga jual tersebut dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga. Kedua hal inilah menyebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh masing-masing pedagang pengumpul ayam potong di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dilakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Harga Jual dan Volume Penjualan Terhadap Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam Potong di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam Potong di Kota Makassar

Pendapatan diperoleh setelah penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Jadi, tentunya pendapatan sangat dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Apabila nilai yang diperoleh positif maka usaha tersebut memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila nilai yang diperoleh negatif berarti usaha tersebut mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (2003) yang menyatakan bahwa pendapatan (keuntungan) merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya.

Adapun besarnya pendapatan yang diperoleh pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam Potong di Kota Makassar.

No	Volume Penjualan (Ekor/Bulan)	Total Penerimaan (Rp./Bulan)	Total Biaya (Rp./Bulan)	Pendapatan (Rp./Bulan)
1.	6000	111.780.000	106.576.361	5.203.639
2.	9000	192.261.600	186.239.527	6.022.073
3.	10500	236.670.000	229.811.678	6.858.322
4.	12000	269.928.000	263.378.818	6.549.182
5.	13500	240.327.000	233.656.917	6.670.083
6.	15000	313.346.250	306.464.099	6.882.151
7.	21000	381.892.000	374.057.678	7.834.322
8.	22500	462.645.000	454.052.194	8.592.806
9.	24000	496.800.000	488.806.361	7.993.639
10.	30000	652.740.000	642.247.888	10.492.112

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012.

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan yang diperoleh pedagang pengumpul berdasarkan volume penjualan yang dilakukan. Semakin besar penampungan yang dimilikinya, maka semakin bertambah pula pendapatan yang dimilikinya.

Tetapi lain halnya dengan pedagang pengumpul yang memiliki volume penjualan 12000 ekor dengan rata-rata pendapatan Rp. 6.549.182,- ; 13500 ekor dengan rata-rata pendapatan Rp. 6.670.083,- ; 21.000 ekor dengan rata-rata pendapatan Rp. 7.834.322,- dan volume penjualan 24000 ekor dengan rata-rata pendapatan Rp. 7.993.639,-. Pedagang pengumpul tersebut masing-masing memiliki rata-rata pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pedagang pengumpul yang memiliki volume penjualan lebih kecil dari volume penjualan mereka. Hal ini dapat terjadi akibat pengalaman berdagang masih sedikit, langganan atau konsumen yang masih sedikit sehingga harga jual yang diberikan tidak terlalu tinggi.

Melihat kenyataan tersebut menunjukkan bahwa usaha dagang ayam potong merupakan usaha yang potensial dalam memberikan pendapatan kepada pedagang pengumpul di Kota Makassar.

Pengaruh Harga Jual (X_1) Terhadap Pendapatan (Y)

Nilai koefisien regresi untuk variabel harga jual (X_1) sebesar 12499,644. Artinya bahwa harga jual memberikan pengaruh yang searah, dimana jika harga jual naik Rp. 1/kg maka pendapatan pedagang pengumpul meningkat Rp. 12.499,644 per bulan dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien korelasi (r) variabel harga jual (X_1) sebesar 0,572 menunjukkan bahwa harga jual memiliki keeratan hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel pendapatan pedagang pengumpul (Y). Nilai koefisien determinannya (r^2) yaitu sebesar 0.327 yang berarti bahwa parsial kontribusi variabel harga jual (X_1) sebesar 32,7% terhadap naik turunnya pendapatan pedagang pengumpul.

Nilai t_{hitung} variabel harga jual (X_1) yaitu sebesar 4,462 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,680. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,462 > 1,680$), maka variabel harga jual ayam potong memberi pengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang pengumpul di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan harga jual suatu produk akan mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diterima oleh pedagang pengumpul. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti (2005) yang menyatakan bahwa harga jual mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan hidupnya. Ini berarti bahwa harga dalam hal ini adalah harga jual suatu produk akan mempengaruhi kelangsungan hidup usaha dari pedagang pengumpul.

Pengaruh Volume Penjualan (X_2) Terhadap Pendapatan (Y)

Nilai koefisien regresi untuk variabel volume penjualan (X_2) sebesar 14563,925. Artinya bahwa volume penjualan memberikan pengaruh yang searah, dimana jika volume penjualan bertambah 1 ekor maka pendapatan pedagang pengumpul meningkat Rp. 14.563,925 per bulan dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien korelasi (r) variabel volume penjualan (X_2) sebesar 0,947 menunjukkan bahwa volume penjualan memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap variabel pendapatan pedagang pengumpul (Y). Nilai koefisien determinannya (r^2) yaitu sebesar 0,896 yang berarti bahwa parsial kontribusi variabel volume penjualan (X_2) sebesar 89,6% terhadap naik turunnya pendapatan pedagang pengumpul.

Nilai t_{hitung} variabel volume penjualan (X_2) yaitu sebesar 18,833 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,680. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,833 > 1,680$), maka variabel volume penjualan ayam potong memberi pengaruh nyata terhadap pendapatan pedagang pengumpul di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan volume penjualan mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang pengumpul. Hal ini sesuai dengan pendapat Astuti (2005) yang menyatakan bahwa semakin besar volume penjualan suatu produk, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pedagang pengumpul. Dengan meningkatnya volume penjualan, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh pedagang pengumpul.

Pengaruh Harga Jual (X_1) dan Volume Penjualan (X_2) Terhadap Pendapatan Pedagang Pengumpul Ayam Potong di Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar adalah harga jual dan volume penjualan. Adapun lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Rekapitulasi Data Hasil Regresi Linier Berganda.

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Koefisien Korelasi (r)	r ²	T Hitung	Sig.	Keterangan
Pendapatan (Y)						
Harga Jual (X ₁)	12499.644	0.572	0.327	4.462	0.000	Signifikan
Volume Penjualan (X ₂)	14563.925	0.947	0.896	18.833	0.000	Signifikan
F Hitung = 197.950		R square = 0.906				
F Tabel = 3.23		Constanta = -2,558.10 ⁵				
T Tabel = 1.466		Signifikan pada α = 0,05				

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012.

Berdasarkan hasil tabel 14, maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
 $Y = -2,558.10^5 + 12499,644X_1 + 14563,925X_2$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka diperoleh nilai konstanta sebesar -255.800.000. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada harga jual dan volume penjualan yang dilakukan oleh pedagang pengumpul, maka pendapatan pedagang pengumpul akan menurun sebesar Rp. 255.800.000,-. Koefisien regresi harga jual (X₁) sebesar 12499,644 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp. 1,- harga jual akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 12.499,644. Sedangkan koefisien regresi volume penjualan (X₂) sebesar 14563,925 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 ekor volume penjualan akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 14.563,925.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pedagang pengumpul berkisar antara Rp. 5.203.639,- sampai dengan Rp. 10.492.112,- tiap bulan.
2. Harga jual dan volume penjualan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang pengumpul ayam potong di Kota Makassar.
3. Kontribusi pengaruh harga jual terhadap pendapatan sebesar 0,327 atau 32,7% sedangkan kontribusi pengaruh volume penjualan terhadap pendapatan yaitu 0,896 atau 89,6%.
4. Volume penjualan paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan. Ini dibuktikan dengan koefisien korelasi volume penjualan yaitu 0,947.
5. Persamaan regresi linier berganda $Y = -255.800.000 + 12499,644X_1 + 14563,925X_2$, dimana jika tidak ada harga jual dan volume penjualan yang dilakukan oleh pedagang pengumpul, maka pendapatan pedagang pengumpul akan menurun sebesar Rp. 255.800.000,-.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhinayasrin, 2011. Definisi Perdagangan dan Jenis Pedagang. <http://id.shvoong.com> Diakses pada tanggal 24 September 2011.
- Astuti, 2005. Skripsi : Pengaruh Nilai Margin Pemasaran Terhadap Pendapatan Pengrajin Gula Kelapa di Desa Karang Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Hanafiah, A. M., 2006. Tata Niaga Hasil Perikanan. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Samualson, A. Paul dan William D. Nordhaus, 1996. Mikroekonomi Edisi Keempat Belas. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Soekartawi, 2002. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian Edisi Revisi. PT. Gajah Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2003. Agribisnis, Teori, dan Aplikasinya. PT. Gajah Grafindo Persada, Jakarta.

Swastha, B., 2000. Manajemen Penjualan. PT. BPFE, Yogyakarta.

Sukirno, S., 1997. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. CV. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERSEPSI PETERNAK SAPI POTONG TERHADAP PEMANFAATAN LIMBAH PERTANIAN DI KABUPATEN SINJAI

Veronica Sri Lestari, Djoni Prawira Rahardja, dan Martha Buttang Rombe
Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan UNHAS, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Sulawesi Selatan; email: veronicasrilestari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi peternak sapi potong terhadap pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak di kabupaten Sinjai Timur, propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu dari bulan Mei sampai Juni 2014. Total sampel adalah 24 peternak sapi potong yang ditentukan secara *random sampling*. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peternak memelihara ternak sapi potong secara tradisional. Menurut peternak, limbah pertanian a). bisa menjadi sumber pakan alternatif, khususnya jika hijauan rumput tidak tersedia terutama saat musim kemarau, b) dijadikan sebagai stok pakan dengan sentuhan teknologi pakan yaitu pakan komplit, silase dan urea molasses block (UMB). Persepsi peternak yang menggunakan limbah pertanian sebagai pakan ternak yang diolah secara alami adalah termasuk kategori “tinggi”. Namun belum ada peternak yang memanfaatkan limbah pertanian dengan teknologi fermentasi.

Kata kunci: Limbah pertanian, pakan komplit, persepsi, silase, UMB

ABSTRACT

This study aimed to determine perceptions of beef cattle farmers to use agricultural waste as animal feed in Sinjai regency, South Sulawesi province. This study was conducted for two month which started from May until June 2014. Total sample was 24 beef cattle farmers which was chosen through *random sampling*. The data consisted of primary data and secondary data. The data were obtained through observation and interviews by using questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics. The results showed that in general beef cattle farmers were raising livestock traditionally. Beef cattle farmers said that: a). crop by-product could be an alternative feed source, particularly if forage grass was not available, especially during dry season, b) crop by-product can be used as stock feed through technology such as complete feed, silage and urea molasses block (UMB). Perception of farmers who used crop by-product as animal feed can be categorized as “high” in natural way. However, they were no farmers adopted crop by-product which used fermentation technology.

Keywords : agricultural waste, complete feed, crop by-product, perception, silage, UMB

PENDAHULUAN

Pengembangan sapi potong di suatu daerah perlu usaha untuk memanfaatkan limbah pertanian, mengingat penyediaan rumput dan hijauan pakan lainnya sangat terbatas. Limbah pertanian yang berasal dari limbah tanaman pangan seperti jerami jagung, jerami padi dan lain-lain ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh pola pertanian tanaman pangan di suatu wilayah (Febriani dan Liana, 2008).

Upaya pengawetan hijauan makanan ternak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk hay dan silase. Pengawetan makanan dengan cara dikeringkan atau biasa disebut dengan hay. Hay adalah hijauan makanan ternak yang sengaja dipotong potong dan dikeringkan dengan bantuan sinar matahari atau dengan panas buatan hingga kadar airnya berkisar antara 10 -15%. Pemberian hay untuk ternak sapi dapat dilakukan secara langsung tanpa pemberian apa apa. Pemberiannya dapat dilakukan sepanjang hari. Perbandingan antara hay dan rumput segar adalah 1 : 7 artinya 1 kg hay setara dengan 7 kg rumput segar (UPTD, 2011).

Dari bermacam-macam limbah pertanian yang mempunyai potensi besar sebagai sumber hijauan adalah jerami jagung. Kualitas jerami jagung sebagai pakan ternak dapat ditingkatkan dengan teknologi silase

yaitu proses fermentasi yang dibantu jasad renik dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen). Teknologi silase dapat mengubah jerami jagung dari sumber pakan berkualitas rendah menjadi tinggi serta sumber energi bagi ternak (Budimulya, 2012).

Menurut Sariubang dkk (2000), pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak masih sangat rendah yaitu berkisar antara 34-39%, sedangkan sisanya dibakar atau dikembalikan ke tanah sebagai kompos. Ditambahkan oleh Hidayat dan Purnama (2005), permasalahan pada pemanfaatan jerami padi adalah rendahnya nilai gizi dan koefisien cerna padi yang merupakan pembatas selain palatabilitas yang rendah. Untuk meningkatkan nilai gizi, pencernaan sekaligus palatabilitasnya dapat dilakukan melalui proses fermentasi. Ali dan Noerjanto dalam Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (2008) menambahkan bahwa pemberian jerami hingga 50% dalam ransum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sapi Madura sebesar 0,597 kg/ekor/hari.

Kebutuhan ternak ruminansia akan pakan dapat dipenuhi dari pakan hijauan (rumput atau kacang-kacangan) sebagai pakan basal (utama) dan konsentrat sebagai pakan penguat. Dalam rangka terus membina pengembangan ternak, maka perlu dikenalkan berbagai teknologi tepat guna kepada masyarakat. Salah satu teknologi dibidang pakan ternak adalah penggunaan urea molases blok (UMB) sebagai pakan suplemen pada ternak ruminansia. Menurut Abutani dkk (2010), UMB dapat meningkatkan berat badan (0,2-0,45 kg) dan efisiensi penggunaan ransum (1.2 – 2.9), tetapi tidak meningkatkan konsumsi ransum.

Menurut Simamora (2004), persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Rakhmat (2004) menambahkan bahwa persepsi adalah pengalaman seseorang tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dua faktor yang mempengaruhi proses pembentukan persepsi yaitu faktor struktural dan faktor fungsional. Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat rangsangan (stimuli) fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. Itu berarti secara struktural persepsi ditentukan oleh jenis dan bentuk rangsangan yang diterima. Sedangkan faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk ke dalam faktor pribadi, jadi yang menentukan persepsi secara fungsional ialah karakteristik orang yang memberi respons terhadap rangsangan tersebut.

Effendy (1993) menyatakan bahwa persepsi adalah penginderaan yang dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan. Kemampuan mempersepsi antara orang yang satu dengan yang lain tidak akan sama meskipun mereka sama sama dalam satu organisasi atau kelompok. Hal ini disebabkan persepsi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas komunikasi orang baik ia seorang komunikator atau komunikan.

Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Keputusan inovasi merupakan proses mental, sejak seorang mengetahui adanya inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolaknya kemudian mengukuhkannya. Keputusan inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas (Suprpto dan Fahrianoor, 2004).

Kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai dimana sektor pertaniannya memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Penduduknya kebanyakan adalah petani peternak, terutamanya ternak sapi potong. Kelompok tani-ternak Sipakainge yang berlokasi di kelurahan Patalassang, kecamatan Sinjai Timur berdiri sejak 21 April 2009, memiliki jumlah anggota kelompok sebanyak 140 orang. Tidak berbeda dengan para petani peternak di beberapa daerah, masalah yang dihadapi adalah ketersediaan pakan dimusim kemarau. Kebanyakan jerami padi yang berlebihan dimusim panen, hanya dikeringkan dan ditimbun di tempat penyimpanan untuk pakan ternak sapi potong, dan sebagian jerami padi dibakar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi peternak terhadap pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak di kelurahan Patalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Mei sampai Juni 2014 di kabupaten Sinjai Timur, propinsi Sulawesi Selatan. Sampel sebanyak 24 peternak sapi potong diambil secara random sampling. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan peternak sapi potong. Sumber data berupa data primer dan data sekunder.

Analisis Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif menggunakan pengelompokan, penyederhanaan dan penyajian data seperti penggunaan tabel distribusi frekuensi dan pengukuran dengan menggunakan skala likert (Sugiono,2002).

Menurut Riduwan (2005) skala likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban yang diungkapkan dengan kata-kata dikategorikan sebagai berikut: Tinggi (3); Sedang (2); Rendah (1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi umum lokasi penelitian

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang secara administratif terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan desa dan 67 desa. Kabupaten ini terletak 222 km dari Kota Makassar.

Secara geografis, yang berupa dataran rendah adalah kecamatan Sinjai Utara, Tellu Limpoe dan Sinjai Timur, sedangkan yang berupa dataran tinggi adalah kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Salah satu kecamatan terunik adalah Pulau Sembilan yang berupa hamparan 9 pulau. Posisi wilayah kabupaten Sinjai berbatasan dengan kabupaten Bone dibagian Utara, Teluk Bone dibagian Timur, Goa dibagian Barat dan Bulukumba dibagian Selatan.

Secara Administrasi luas wilayah kabupaten Sinjai adalah 819.96 km² dengan rincian lahan sebagai berikut: persawahan: 13.592 Ha, bukan sawah 46.288 Ha dan lain-lain 22.143 Ha. dengan jumlah penduduk sebanyak 228.879 jiwa yang terdiri dari: pria sebanyak 110.771 jiwa dan wanita sebanyak 118.108 jiwa dengan kepadatan rata-rata 27.913 jiwa/km².

Kabupaten Sinjai menduduki urutan keempat setelah kabupaten Bone, Bulukumba dan Gowa sebagai sentra produksi dan perbibitan sapi Bali, hal ini ditunjukkan dengan jumlah populasi sapi sebesar 52.477 ekor yang dimiliki oleh 7.836 peternak (Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, 2010) yang sistem pemeliharaannya sebahagian besar secara tradisional. Pemerintah daerah setempat sangat mendukung pengembangan ternak sapi yaitu dengan cara melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan, pembinaan, penyuluhan dan dropping ternak sapi.

Kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai yang memiliki potensi pengembangan usaha peternakan dan pertanian. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor peternakan dan pertanian di daerah ini adalah melalui pemberdayaan koperasi tani dan kelompok tani ternak. Koperasi Sipakainge dan Kelompok Tani-Ternak (KTT) Bakka resmi dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai cq Dinas Peternakan setempat 2 tahun yang lalu dan berlokasi di kelurahan Pattallasang Kecamatan Sinjai Timur. Koperasi Sipakainge diketuai oleh bapak H. Firdaus dan Kelompok Tani-Ternak Bakka oleh bapak Ismail.

Melihat potensi, struktur topografi dan pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Sinjai Timur, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan usaha peternakan di wilayah ini memiliki potensi yang sangat cerah, namun demikian masih rendahnya introduksi teknologi yang menyebabkan masih rendahnya

pengetahuan para petani/peternak tentang teknologi peternakan menyebabkan pengembangan usaha peternakan berjalan lambat.

Karakteristik responden

Rata-rata usia responden adalah 44 tahun, dengan usia paling muda adalah umur 30 tahun dan tertua adalah 59 tahun. Rata-rata pengalaman responden adalah 15 tahun, terendah adalah 9 tahun dan paling lama adalah 20 tahun. Rata-rata kepemilikan ternak adalah 4 ekor, yang terendah adalah 2 ekor dan tertinggi adalah 8 ekor. Rata-rata pendidikan responden adalah lulusan SMP.

Persepsi peternak

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa persepsi peternak sapi potong terhadap pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak adalah 100% termasuk kategori tinggi terutama dalam bentuk hay. Dalam penerapannya, 100% peternak memanfaatkan limbah pertanian khususnya jerami padi tanpa sentuhan teknologi pengolahan limbah. Para peternak hanya melakukan proses penjemuran limbah pertanian kemudian disimpan ditempat teduh, sehingga tidak ada peningkatan nilai gizi dari limbah tersebut. Sebagian limbah pertanian dibakar. Faktor utama

rendahnya pemanfaatan limbah pertanian dengan sentuhan teknologi adalah faktor kurang motivasi dari peternak untuk melakukannya. Untuk mengatasi rendahnya motivasi peternak, diperlukan pembinaan dan penyuluhan dari Dinas Peternakan setempat. Alasan kedua adalah tingkat kerumitannya. Peternak merasa terlalu rumit untuk melakukan pengolahan limbah pertanian dengan teknologi fermentasi, disamping itu para peternak sudah terlalu tersita waktunya sebagai petani dan peternak. Alasan ketiga adalah faktor biaya terutama untuk pengadaan peralatan dan bahan baku. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dkk (2014), yang mengatakan 55.21% peternak sapi potong di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tidak memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Peternak yang mengetahui pemanfaatan limbah pertanian melalui sentuhan teknologi fermentasi adalah 56,25%. Persepsi peternak terhadap pemanfaatan limbah pertanian termasuk kategori rendah karena pengetahuannya kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi peternak sapi potong di desa Patalasang kecamatan Sinjai Timur, kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan terhadap pemanfaatan limbah pertanian secara alami termasuk kategori “tinggi”. Limbah pertanian bisa menjadi sumber pakan alternatif serta stok pakan dengan sentuhan teknologi fermentasi. Namun dalam penerapannya, diperlukan pembinaan dan penyuluhan dari Dinas Peternakan setempat secara kontinyu untuk meningkatkan motivasi peternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., H.M. Ali dan J. Syamsu. 2014. The farmer's perception on crop-by product utilization as feed for beef cattle in Bulukumba regency, South Sulawesi, Indonesia. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*. 3(2): 129-137.
- Abutani, S.A., S. Rahim dan Noverma. 2010. Respon pemberian “blok suplemen” berbasis bahan lokal terhadap penambahan bobot badan sapi. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*. 5(1): 65-69.
- BPTP Gorontalo. 2008. Pemanfaatan Jerami Padi dan Jagung untuk Pakan Ternak. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Gorontalo.
- Budimulya. 2012. Teknologi Pembuatan Silase Jagung untuk Pakan Sapi Potong. <http://www.total-fm.co.id/index.php/the-news/639-teknologi-pembuatan-silase-jagung-untuk-pakan-sapi-potong>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai. 2010. Sinjai dalam Angka. Sinjai.
- Effendy, O.U. 1993. *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Febrina, D. dan M. Liana. 2008. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ruminansia pada peternak rakyat di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Peternakan* 5 (1): 28 – 37.
- Hidayat dan R. Denny Purnama. 2005. Pemanfaatan Jerami Padi Fermentasi (Jpf) sebagai Pakan Penggemukan Sapi Potong di Kecamatan Banyu Resmi Kabupaten Garut. *Prosiding Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian*. Balai Penelitian Ternak, Bogor.
- Rakhmat, J. 2005. *Psikologi Komunikasi*. PT. Rosdakarya Group, Bandung.
- Riduwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Cetakan Ketujuh. CV. Alfabeta. Bandung.
- Simamora, .2004. *Perilaku Konsumen*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suprpto, T. dan Fahrianoor. 2004. *Komunikasi Penyuluhan dalam Teori dan Praktek*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- UPTD. 2011. *Hay (Rumput Kering)*. UPTD Berbibitan Ternak, Bantaeng.